



LAPORAN

KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

WALI KOTA

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024

LKPJ WALI KOTA ATA 2024





KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.*

Rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala Rahmat-Nya, sehingga sepanjang tahun 2024, kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk berkolaborasi dalam menjalankan amanah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Surabaya termasuk dalam hal penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya Tahun 2024 ini.

Laporan ini disusun dengan mempedomani ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan ini memuat rangkuman dari pelaksanaan, hasil, dan pencapaian berbagai tugas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan berpedoman pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 beserta perubahannya dan APBD Kota Surabaya Tahun 2024 beserta perubahannya.

Selama 3,5 tahun kita telah bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Surabaya. Di tengah pandemi covid-19 yang tidak kita duga datangnya, kita berusaha membawa Kota Surabaya menjadi kota yang maju, humanis dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kota Surabaya, Forkopimda, Jajaran Pemerintah Kota Surabaya, media, tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, RW, LPMK, seluruh Warga Surabaya dan pemangku kepentingan lainnya, dan tentu dukungan pemerintah provinsi dan pusat, yang telah berkolaborasi dan bergotong royong dalam satu visi untuk mewujudkan Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan.



Kolaborasi yang kuat, dengan semangat yang besar, semangatnya Arek Suroboyo, yang berani, lantang, dan pemberani, telah membawa kita pada pencapaian yang cukup memuaskan di tahun 2024 :

- Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,76%, di atas rata-rata nasional dan Jawa Timur.
- Pengangguran telah kita berhasil turunkan menjadi 4,91%.
- Kemiskinan menurun menjadi 3,96% pada 2024, bahkan telah mencapai level yang lebih rendah sebelum terjadinya pandemi Covid-19.
- Pembangunan manusia terus meningkat menjadi 84,69% dan tertinggi di Jawa Timur;
- Prevalensi *stunting* turun dari 28,9% menjadi 1,6%.
- Perbaikan pada akuntabilitas kinerja kita telah membawa Kota Surabaya menjadi Kota pertama di Indonesia dengan predikat AA.

Tentunya, capaian tersebut tidak membuat kita lantas berbangga diri, di hadapan kita tantangan terus ada, mulai dari lonjakan penduduk perkotaan yang berpotensi meningkatkan ketimpangan sosial-ekonomi, perubahan iklim yang memicu suhu ekstrem dan banjir, hingga dominasi teknologi seperti *Artificial Intelligence* (AI) dan *Internet of Things* (IoT) dalam kehidupan kota. Surabaya harus beradaptasi dengan inovasi, tata kelola cerdas, dan langkah strategis untuk menghadapi masa depan yang lebih kompleks.

Demikian LKPJ Wali Kota Tahun 2024 disampaikan. Catatan-catatan strategis, saran dan masukan dari DPRD Kota Surabaya merupakan rekomendasi penting bagi penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Surabaya di masa mendatang. Terima kasih disampaikan kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Surabaya dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKPJ ini. Semoga dokumen ini menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan proses pembangunan di Surabaya di masa mendatang, dan mendorong Kota Surabaya sebagai Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan. Menjadikan Surabaya Kota yang *baldatun toyyibatun warobbun ghofur* melalui gotong royong dan sinergi kuat untuk Surabaya hebat.

Semoga niat dan langkah baik kita selalu mendapat ridho dari Allah SWT.

Tuku Kopi nang Sikatan

Paling enak disambi mangan ketan

Demikian LKPJ kami sampaikan

Untuk mendapatkan saran dan masukan



Burung berkicau di atas batu

Di sore yang riang saling bersahutan

Bergotong royong kita Bersatu

Wujudkan Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Shalom,

Om Santi santi santi Om,

Namo Budaya,

Salam Kebajikan.

Surabaya, Maret 2025



Dr. Eri Cahyadi, S.T., M.T.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Dasar Hukum	I - 2
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	I - 6
1.3 Data Umum Daerah.....	I - 8
1.3.1 Kondisi Geografis Daerah.....	I - 8
1.3.2 Gambaran Umum Demografis	I - 9
1.3.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil	I - 14
1.3.4 Kondisi Ekonomi.....	I - 16
1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan.....	I - 26
1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	I - 41
1.3.7 Realisasi Pembiayaan	I - 42
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	
DAERAH.....	II - 1
2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	II - 3
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah.....	II - 4
2.1.2 Pendapatan Transfer	II - 6
2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	II - 7
2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah	II - 9
2.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	II - 11
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI	
KEWENANGAN DAERAH.....	III - 1
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	III - 1
3.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai dengan Target Kinerja.....	III - 1
3.1.2 Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan Pada Setiap Urusan	III - 72
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja.....	III - 430



3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III - 434
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya.....	III - 448
3.4 Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	III - 475
3.5 Penghargaan Diraih Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024.....	III - 490

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN

PENUGASAN	IV - 1
4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugaspembantuankan.....	IV - 1
4.1.1 Identifikasi Tugas Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Tingkat Daerah Atasnya	IV - 1
4.1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Pemerintahan yang diberikan kepada Tingkat Pemerintahan di bawahnya	IV - 1
4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian.....	IV - 1

BAB V PENUTUP

V - 1



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perumusan Penjelasan Visi – Misi	I - 8
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024.....	I - 12
Tabel 1.3 Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin	I - 14
Tabel 1.4 Jumlah PNS berdasarkan Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin	I - 14
Tabel 1.5 Jumlah PNS berdasarkan Golongan	I - 15
Tabel 1.6 Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir.....	I - 15
Tabel 1.7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2023-2024* (dalam miliar Rupiah).....	I - 21
Tabel 1.8 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2023-2024* (dalam miliar Rupiah)	I - 22
Tabel 1.9 10 Komoditas Tertinggi Penyumbang Inflasi dan Deflasi di Kota Surabaya Selama Tahun 2024.....	I - 26
Tabel 1.10 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Daerah Tahun 2024	I - 27
Tabel 1.11 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 ..	I - 27
Tabel 1.12 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.....	I - 29
Tabel 1.13 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Retribusi Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.....	I - 31
Tabel 1.14 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024.....	I - 33
Tabel 1.15 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain-lain PAD yang Sah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024.....	I - 36
Tabel 1.16 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Transfer Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024.....	I - 36
Tabel 1.17 Realisasi Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2024	I - 41
Tabel 1.18 Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2024	I - 43
Tabel 2.1 Perubahan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.....	II - 8
Tabel 2.2 Perubahan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.....	II - 10
Tabel 2.3 Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.....	II - 12
Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024.....	III - 3
Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Pembangunan Utama	III - 5



Tabel 3.3 Indeks Gini Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024	III - 7
Tabel 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024.....	III - 10
Tabel 3.5 Komposisi Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024.....	III - 10
Tabel 3.6 Persentase Penduduk Miskin Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024.....	III - 15
Tabel 3.7 Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024.....	III - 20
Tabel 3.8 Perbandingan Indeks Pendidikan Kota di Indonesia Tahun 2024.....	III - 22
Tabel 3.9 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024	III - 23
Tabel 3.10 Indeks Budaya Lokal Tahun 2020 – 2024	III - 29
Tabel 3.11 Indeks Harmoni Sosial Beserta Indikator Penyusunnya Tahun 2024	III - 31
Tabel 3.12 Indeks Infrastruktur Kota Beserta Indikator Penyusunnya Tahun 2024	III - 35
Tabel 3.13 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2021 – 2024.....	III - 38
Tabel 3.14 Indeks Penyusun IKLH Kota Surabaya Tahun 2021 – 2024.....	III - 39
Tabel 3.15 Indeks Penyusun IKLHS Tahun 2020 – 2024.....	III - 40
Tabel 3.16 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024	III - 40
Tabel 3.17 Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024	III - 43
Tabel 3.18 Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024	III - 45
Tabel 3.19 Penilaian RB General Kota Surabaya Tahun 2024	III - 45
Tabel 3.20 Penilaian RB Tematik Kota Surabaya Tahun 2024.....	III - 46
Tabel 3.21 Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota Beserta Indikator Penyusunnya Tahun 2024	III - 48
Tabel 3.22 Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024	III - 49
Tabel 3.23 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024.....	III - 53
Tabel 3.24 Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024	III - 73
Tabel 3.25 Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024	III - 178
Tabel 3.26 Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun 2024.....	III - 241
Tabel 3.27 Capaian Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2024	III - 258
Tabel 3.28 Capaian Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2024	III - 275
Tabel 3.29 Capaian Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2024	III - 296
Tabel 3.30 Capaian Unsur Kewilayahan Tahun 2024	III - 301



Tabel 3.31 Capaian Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2024.....	III - 425
Tabel 3.32 Kebijakan Strategis Tahun 2024	III - 435
Tabel 3.33 Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2023 dan Tindak Lanjut Tahun 2024.....	III - 449
Tabel 3.34 Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024.....	III - 474
Tabel 3.35 Penghargaan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024	III - 489



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin per Wilayah Tahun 2024.....	I - 10
Gambar 1.2 Rincian Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Usia	I - 11
Gambar 1.3 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024.....	I - 12
Gambar 1.4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024.....	I - 16
Gambar 1.5 Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Surabaya Tahun 2024*.....	I - 20
Gambar 1.6 Pergerakan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024.....	I - 23
Gambar 1.7 Kelompok Jenis Barang dan Jasa Pembentuk Inflasi Kota Surabaya Tahun 2024.....	I - 25
Gambar 3.1 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024	III - 3
Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 – 2024.....	III - 3
Gambar 3.3 Indeks Gini Tahun 2020 – 2024	III - 7
Gambar 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020 – 2024.....	III - 10
Gambar 3.5 TPT Menurut Pendidikan Tahun 2022 – 2024.....	III - 11
Gambar 3.6 Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kegiatan pada Pekerjaan Utama Tahun 2024 (persen)	III - 13
Gambar 3.7 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020 – 2024.....	III - 15
Gambar 3.8 Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024	III - 16
Gambar 3.9 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024.....	III - 17
Gambar 3.10 Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Tahun 2020 – 2024	III - 18
Gambar 3.11 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020 – 2024	III - 20
Gambar 3.12 Perbandingan Indeks Pendidikan Kota di Indonesia Tahun 2020-2024.....	III - 21
Gambar 3.13 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota di Indonesia Tahun 2020-2024.....	III - 25



Gambar 3.14 Pengeluaran Per Kapita Tahun 2020-2024.....	III - 27
Gambar 3.15 Indeks Budaya Lokal Tahun 2020 – 2024	III - 29
Gambar 3.16 Komponen Indeks Harmoni Sosial Kota Surabaya 2020 – 2024	III - 32
Gambar 3.17 Indeks Infrastruktur Kota Tahun 2022 – 2024	III - 35
Gambar 3.18 Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota Tahun 2019 – 2021	III - 48
Gambar 3.19 Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota Tahun 2022 - 2024.....	III - 49
Gambar 3.20 Rata-Rata Capaian Kinerja Berdasarkan Kelompok Urusan dan Penunjangnya	III - 430
Gambar 3.21 Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	III - 431
Gambar 3.22 Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	III - 432
Gambar 3.23 Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Urusan Pemerintahan Pilihan.....	III - 433
Gambar 3.24 Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....	III - 433
Gambar 3.25 Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	III - 434



BAB I

PENDAHULUAN

Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan, dengan mempedomani ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021-2026, tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Tahun 2024 merupakan tahun dimana pemulihan ekonomi pasca pandemi terus berlanjut utamanya untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat dengan menurunkan kemiskinan, menurunkan pengangguran, menurunkan kesenjangan pendapatan dengan tetap memprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta infrastruktur berkelanjutan sesuai dengan tema pembangunan sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya tahun 2024 *“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dengan Dukungan Kualitas Tata Kota, Sistem Transportasi Terpadu dan Berkelanjutan serta Peningkatan Sumber Daya Manusia”*. Tema pembangunan yang ditetapkan ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan tahun 2024 yang tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 *“Peningkatan kualitas tata kota dan sistem transportasi terpadu pendukung sektor utama yang sinergi dengan kebijakan nasional dan daerah sekitar”*.



Konsistensi dalam pembangunan yang diselenggarakan dengan kolaboratif antara Pemerintah, DPRD, masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk segera pulih dari dampak pandemi Covid-19 telah membuahkan hasil dengan capaian pembangunan di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2024 mencapai 5,76%, menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,91%, menurunnya tingkat kemiskinan pada 3,96% di tahun 2024, lebih rendah dibandingkan sebelum terjadinya Pandemi yakni sebesar 4,51% di tahun 2019, serta menurunnya kesenjangan dengan mencapai ratio gini pada angka 0,381. Pembangunan Manusia terus meningkat mencapai 84,69, dan menjadi nilai IPM tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Dari sisi infrastruktur, indeks infrastruktur yang terdiri dari aspek Kebinamargaan dan Pematusan; Keciptakarya, Penataan Ruang dan Pertanahan serta aspek Penyelenggaraan Transportasi meningkat menjadi 0,810 di tahun 2024, dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 0,75. Pada tahun 2024, pengelolaan tata kota utamanya untuk mengatasi banjir dan genangan telah berhasil menurunkan menjadi 180 titik dibandingkan sebelumnya 250 titik.

Penyusunan perencanaan pada tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sedangkan penyusunan penganggaran berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Dokumen LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2024 disampaikan oleh Wali Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, memuat capaian kinerja hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan berupa program dan kegiatan, dengan mengacu pada Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Surabaya Tahun 2024 didasarkan atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965



- tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara



- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034; (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4);



27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 6);
29. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 69);
30. Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kota Surabaya yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (lima) tahun menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah, yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu:

“Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis Dan Berkelanjutan”

Makna dalam visi tersebut adalah:

1. **Gotong Royong** Gotong royong merupakan pengerahan tenaga tambahan terhadap kekurangan tenaga dalam menjalankan berbagai aktivitas. Gotong royong juga diyakini sebagai potensi sosial yang dapat dijadikan sebagai bagian yang signifikan dalam pemecahan berbagai masalah yang kemasyarakatan termasuk dalam upaya pembangunan daerah. Kota Surabaya merupakan kota terbesar di Jawa Timur yang memiliki dinamika pembangunan yang sangat kompleks. Guna mencapai upaya pembangunan Kota Surabaya menjadi kota dengan tatanan yang dinamis kelas dunia maka dibutuhkan kerjasama dan semangat gotong royong dari berbagai elemen masyarakat. Peran aktif serta gotong royong berbagai elemen tersebut dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pembangunan, mendukung program pembangunan sampai melestarikan hasil pembangunan.
2. **Maju** yaitu Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia tentu menjadi barometer perkembangan ekonomi bukan hanya di tingkat Jawa Timur namun juga di tingkat Nasional.



Perwujudan pada Visi menjadikan Kota Surabaya sebagai wilayah dengan tingkat Maju perekonomiannya adalah sebagai wujud upaya pembangunan daerah yang mengoptimalkan segala bentuk potensi ekonomi daerah sebagai penopang perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi yang dituju bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata namun bagaimana upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya mampu dirasakan oleh masyarakat Kota Surabaya.

3. **Humanis** dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya menciptakan Kota Surabaya sebagai tempat yang mendukung terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Aman yang berarti kesiagaan perlindungan atas resiko kejadian bencana alam dan bencana sosial serta terjaganya kualitas lingkungan hidup, dengan melakukan penataan ruang publik yang hijau sehingga nyaman dan ramah untuk anak, lansia serta difabel. Kemudian rasa nyaman, yang berarti menggambarkan sebagai daerah yang kondusif untuk tempat tinggal, tempat berusaha atau bekerja, mengakses pelayanan publik, rekreasi dan berkreasi melestarikan adat istiadat. Nyaman berarti juga lingkungan hidup yang sehat dan baik untuk pertumbuhan generasi dan tersedianya sumber daya alam dengan daya dukung lingkungan yang optimal.
4. **Kota Dunia Berkelanjutan** Pembangunan Kota Surabaya harus mengedepankan model pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainability Development*) yaitu bagaimana pembangunan yang menedepankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial serta budaya. Pembangunan Kota Surabaya mengintegrasikan upaya pertumbuhan ekonomi dengan upaya perwujudan keadilan sosial, kelestarian lingkungan, partisipasi masyarakat serta keragaman budaya.

Selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional;
2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya;
3. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan;
4. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
5. Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan.



Tabel 1.1
Perumusan Penjelasan Visi – Misi

Visi	Pokok-pokok Visi	Misi
Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis Dan Berkelanjutan	Maju	<i>Misi 1</i> : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional
	Humanis	<i>Misi 2</i> : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya
		<i>Misi 5</i> : Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan
	Berkelanjutan	<i>Misi 3</i> : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan
<i>Misi 4</i> : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik		

1.3 Data Umum Daerah

Gambaran umum daerah Kota Surabaya disajikan berdasarkan kondisi geografis dan demografis serta kondisi ekonomi, yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut.

1.3.1 Kondisi Geografis Daerah

Kota Surabaya secara geografis terletak antara 07°9' s.d 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' s.d 112°54' Bujur Timur, secara umum kondisi topografi Kota Surabaya memiliki ketinggian tanah antara 0-20 meter di atas permukaan laut, sedangkan pada daerah pantai ketinggiannya berkisar antara 1-3 meter di atas permukaan laut. Wilayah barat Kota Surabaya memiliki kemiringan sebesar 12,77% dan sebelah selatan sebesar 6,52%. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15 %.



Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya luas wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 bahwa luas wilayah Kota Surabaya meliputi daratan seluas \pm 33.451,14 Ha dengan wilayah laut sejauh 1/3 dari wilayah kewenangan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau bahwa luas wilayah Kota Surabaya seluas 335,925 km² (\pm 33.592,5 Ha).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggabungan Kelurahan Perak Utara Dan Kelurahan Perak Timur Pada Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, bahwa wilayah Kota Surabaya terbagi menjadi 31 Kecamatan dan 153 Kelurahan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

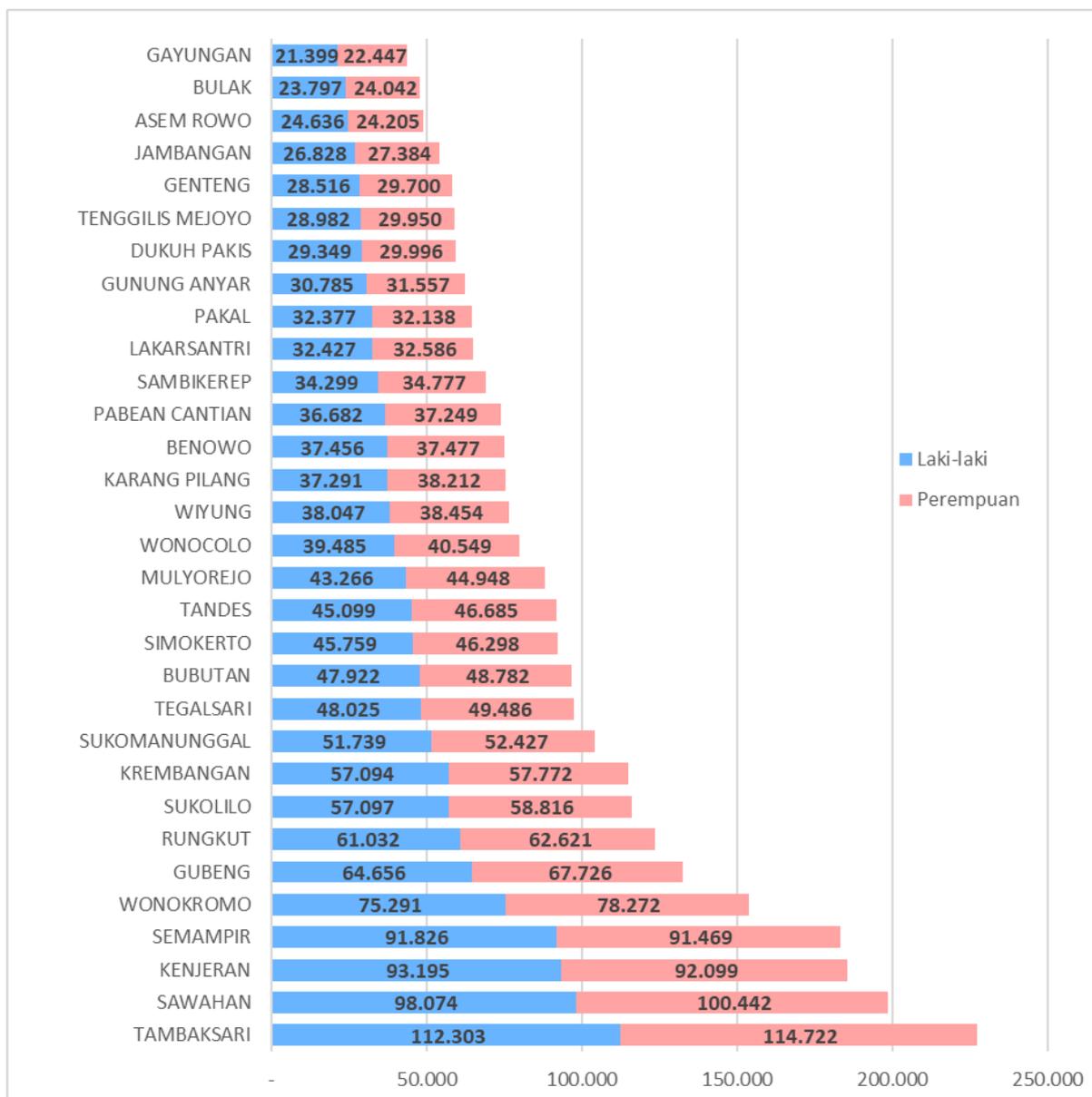
1. Sebelah Utara : Laut Jawa dan Selat Madura;
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo;
3. Sebelah Timur : Selat Madura;
4. Sebelah Barat : Kabupaten Gresik.

1.3.2 Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Kota Surabaya yang memiliki Nomor Identitas Kependudukan (NIK) pada tahun 2024 berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebesar 3.018.022 jiwa di 31 wilayah kecamatan. Komposisi berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, dan kelompok pendidikan diuraikan sebagai berikut.

a. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk Kota Surabaya pada tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin meliputi 1.523.288 jiwa atau 50,47% penduduk perempuan dan 1.494.734 jiwa atau 49,53% penduduk laki-laki. Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan persebaran tiap kecamatan menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tambaksari yaitu 227.025 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Gayungan yaitu 43.846 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin per wilayah disajikan pada gambar berikut.

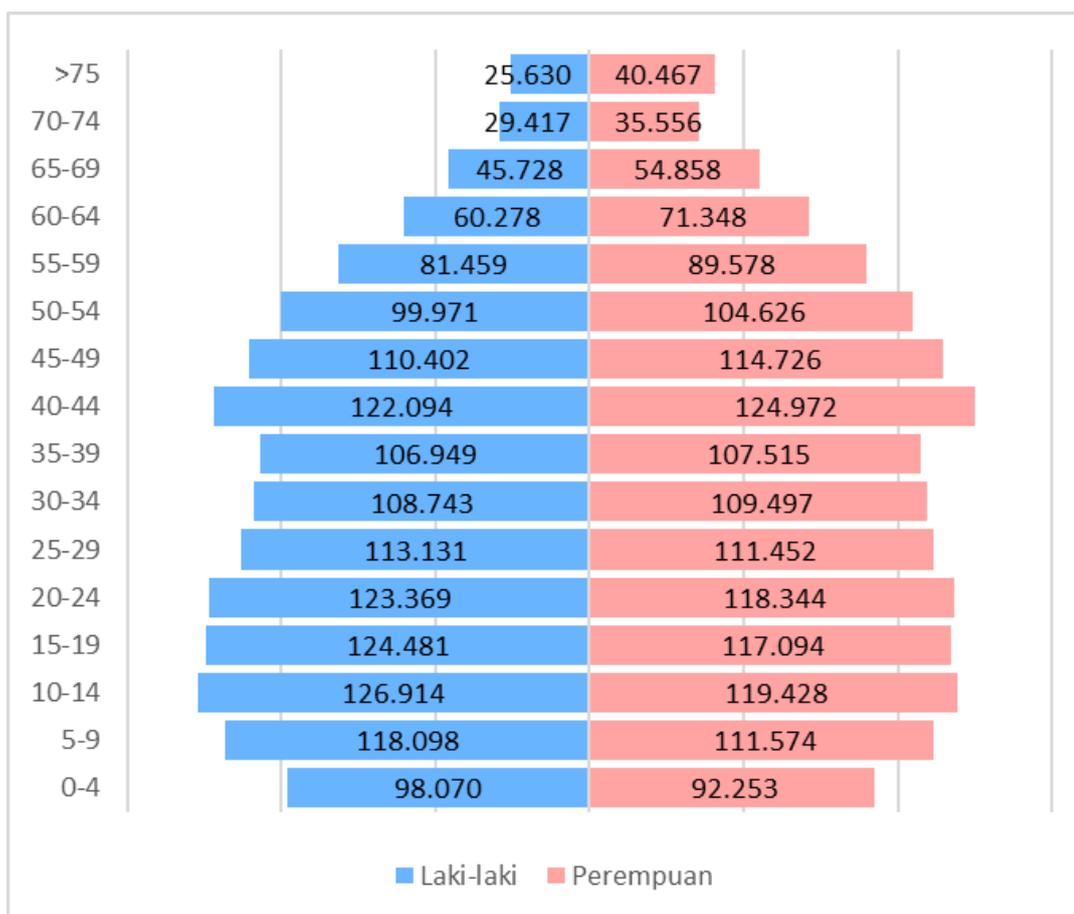


Gambar 1.1
Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin per Wilayah Tahun 2024

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah, 2024)

b. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

Komposisi penduduk Kota Surabaya pada tahun 2024 berdasarkan kelompok usia didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu kelompok penduduk usia 15 sampai dengan 64 tahun memiliki jumlah terbesar yaitu 2.120.029 jiwa atau 70,25%, sedangkan kelompok penduduk usia kurang dari 15 tahun adalah sebanyak 666.337 jiwa atau 22,08% dan kelompok usia diatas 64 tahun sebanyak 231.656 jiwa atau 7,68%. Bagan piramida penduduk berdasarkan kelompok usia sebagaimana gambar di bawah, menggambarkan bentuk Piramida Penduduk Dewasa (*stasioner*). Hal ini menunjukkan bahwa di Kota Surabaya memiliki pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif tetap atau stabil.

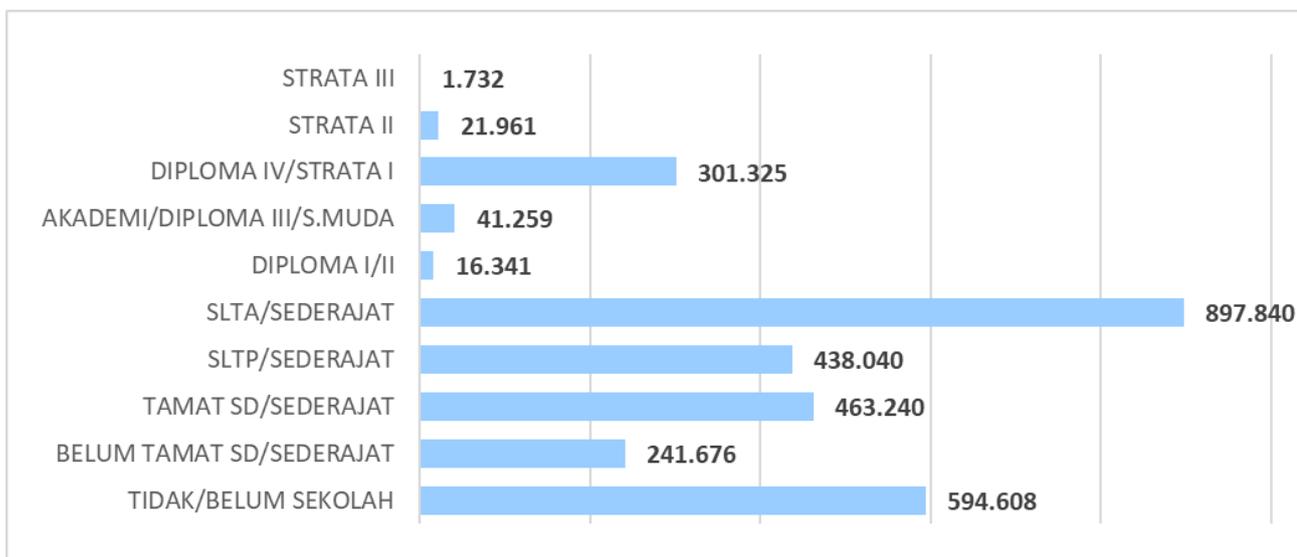


Gambar 1.2
Rincian Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kelompok Usia

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah, 2024

c. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Pendidikan

Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan untuk kategori tingkat pendidikan tinggi (Diploma dan Strata), tertinggi didominasi tingkat pendidikan Diploma IV/Strata I sebanyak 301.325 jiwa. Sedangkan untuk tingkat Pendidikan Menengah dan Dasar, didominasi oleh tingkat pendidikan SLTA/ sederajat sebanyak 897.840 orang dan untuk yang tidak/belum sekolah sebanyak 594.608 orang. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok pendidikan ditunjukkan oleh gambar berikut.



Gambar 1.3
Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024
(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah, 2024)

d. **Pertumbuhan Penduduk**

Pertumbuhan penduduk Kota Surabaya pada tahun 2020-2024 relatif stabil. Pergerakan jumlah penduduk, selain karena faktor pertumbuhan penduduk alami (kelahiran dan kematian), mutasi penduduk (pindah masuk dan pindah keluar) juga karena adanya proses pemutakhiran data kependudukan yang terpusat dalam Satu Data Kementerian Dalam Negeri. Secara detail gambaran persebaran dan perkembangan jumlah penduduk perkecamatan pada tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024

No.	KECAMATAN	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan
1	Karang Pilang	74.281	74.341	74.931	75.572	75.503	-0,09%
2	Wonocolo	79.361	79.260	79.559	79.986	80.034	0,06%
3	Rungkut	117.287	117.983	120.067	121.941	123.653	1,40%
4	Wonokromo	159.138	157.126	155.559	154.995	153.563	-0,92%
5	Tegalsari	98.904	98.288	98.484	98.317	97.511	-0,82%
6	Sawahan	201.743	200.341	199.548	199.336	198.516	-0,41%
7	Genteng	58.450	58.114	58.601	58.742	58.216	-0,90%
8	Gubeng	135.817	134.467	133.900	133.804	132.382	-1,06%
9	Sukolilo	110.705	111.762	113.876	115.099	115.913	0,71%



No.	KECAMATAN	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan
10	Tambaksari	225.507	225.180	226.136	226.995	227.025	0,01%
11	Simokerto	94.619	93.793	92.832	92.683	92.057	-0,68%
12	Pabean Cantian	75.346	74.820	74.810	74.490	73.931	-0,75%
13	Bubutan	98.762	97.573	97.707	97.273	96.704	-0,58%
14	Tandes	91.827	91.462	91.784	91.922	91.784	-0,15%
15	Krembangan	114.807	114.618	114.674	115.320	114.866	-0,39%
16	Semampir	183.158	183.344	181.226	182.371	183.295	0,51%
17	Kenjeran	172.452	174.180	177.561	181.300	185.294	2,20%
18	Lakarsantri	60.770	61.422	63.017	64.062	65.013	1,48%
19	Benowo	67.828	68.643	71.033	73.306	74.933	2,22%
20	Wiyung	72.522	73.223	74.224	75.382	76.501	1,48%
21	Dukuh Pakis	59.740	59.564	59.293	59.532	59.345	-0,31%
22	Gayungan	43.553	43.336	43.617	43.999	43.846	-0,35%
23	Jambangan	52.249	52.851	53.639	54.200	54.212	0,02%
24	Tenggilis Mejoyo	58.239	58.329	58.695	58.990	58.932	-0,10%
25	Gunung Anyar	59.048	59.673	60.535	61.565	62.342	1,26%
26	Mulyorejo	86.407	86.469	86.824	87.556	88.214	0,75%
27	Sukomanunggal	103.814	103.831	104.271	104.786	104.166	-0,59%
28	Asemrowo	46.563	47.036	47.437	48.022	48.841	1,71%
29	Bulak	44.975	45.420	46.350	47.082	47.839	1,61%
30	Pakal	57.805	58.865	60.877	62.715	64.515	2,87%
31	Sambikerep	65.053	65.638	66.796	67.943	69.076	1,67%
JUMLAH		2.970.730	2.970.952	2.987.863	3.009.286	3.018.022	0,29%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2024

Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, pertumbuhan penduduk Kota Surabaya berada di bawah 1%, yakni 0,01% di tahun 2021, 0,57% di tahun 2022 dan 0,72% di tahun 2023. Pada tahun 2024, pertumbuhan penduduk tertinggi di Kecamatan Pakal sebesar 2,87% diikuti Kecamatan Benowo sebesar 2,22% dan Kecamatan Kenjeran sebesar 2,20%.



1.3.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Sumber Daya Manusia (SDM) yang menggerakkan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan SDM non PNS agar dapat mewujudkan pelayanan prima. Di tahun 2024, jumlah PNS berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada laki-laki sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 1.3
Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Tahun 2024
1.	Jumlah PNS Laki-laki	3.906
2.	Jumlah PNS Perempuan	6.015
	Jumlah seluruh PNS	9.921

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025

Komposisi PNS berdasarkan jenis kelamin berbeda jika dikaitkan dengan pemegang jabatan struktural karena komposisi pejabat struktural berjenis kelamin laki-laki yang lebih besar daripada perempuan dengan selisih yang kecil sebagaimana Tabel 1.4. Namun demikian, Pemerintah Kota Surabaya telah mengakomodasi konsep kesetaraan gender dalam karir dan jabatan selain mempertimbangkan aspek yang utama yaitu kompetensi, disiplin, integritas dan pendidikan melalui penerapan manajemen talenta sehingga baik PNS Laki-laki maupun Perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan struktural.

Tabel 1.4
Jumlah PNS berdasarkan Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Tahun 2024
1.	Jumlah PNS Pejabat Struktural	1.175
	Laki-laki	611
	Perempuan	564
2.	Jumlah PNS Staf dan Tenaga Fungsional	8.746
	Laki-laki	3.295
	Perempuan	5.451
Total		9.921

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025

Jika dikelompokkan berdasarkan golongan, maka dapat diketahui bahwa jumlah PNS terbanyak pada golongan III dan paling sedikit pada golongan I sebagaimana yang disampaikan



dalam Tabel 1.5. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga yang memiliki keterampilan dan pengalaman bekerja masih mendominasi jumlah PNS di Kota Surabaya.

Tabel 1.5
Jumlah PNS berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Tahun 2024
1.	Jumlah PNS Golongan I	56
2.	Jumlah PNS Golongan II	1.320
3.	Jumlah PNS Golongan III	6.838
4.	Jumlah PNS Golongan IV	1.707
Jumlah seluruh PNS		9.921

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025

Jumlah PNS dengan tingkat golongan golongan III dan IV, jika dikaitkan dengan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 1.6. menunjukkan bahwa golongan III dan IV tersebut banyak dipenuhi oleh PNS berpendidikan strata I, SMA, dan diploma III.

Tabel 1.6
Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

No.	Uraian	Tahun 2024
1.	SD	129
2.	SMP	224
3.	SMA	1.782
4.	Diploma I	10
5.	Diploma II	79
6.	Diploma III	959
7.	Diploma IV	95
8.	Strata I	5.685
9.	Strata II	949
10.	Strata III	9
Jumlah seluruh PNS		9.921

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025

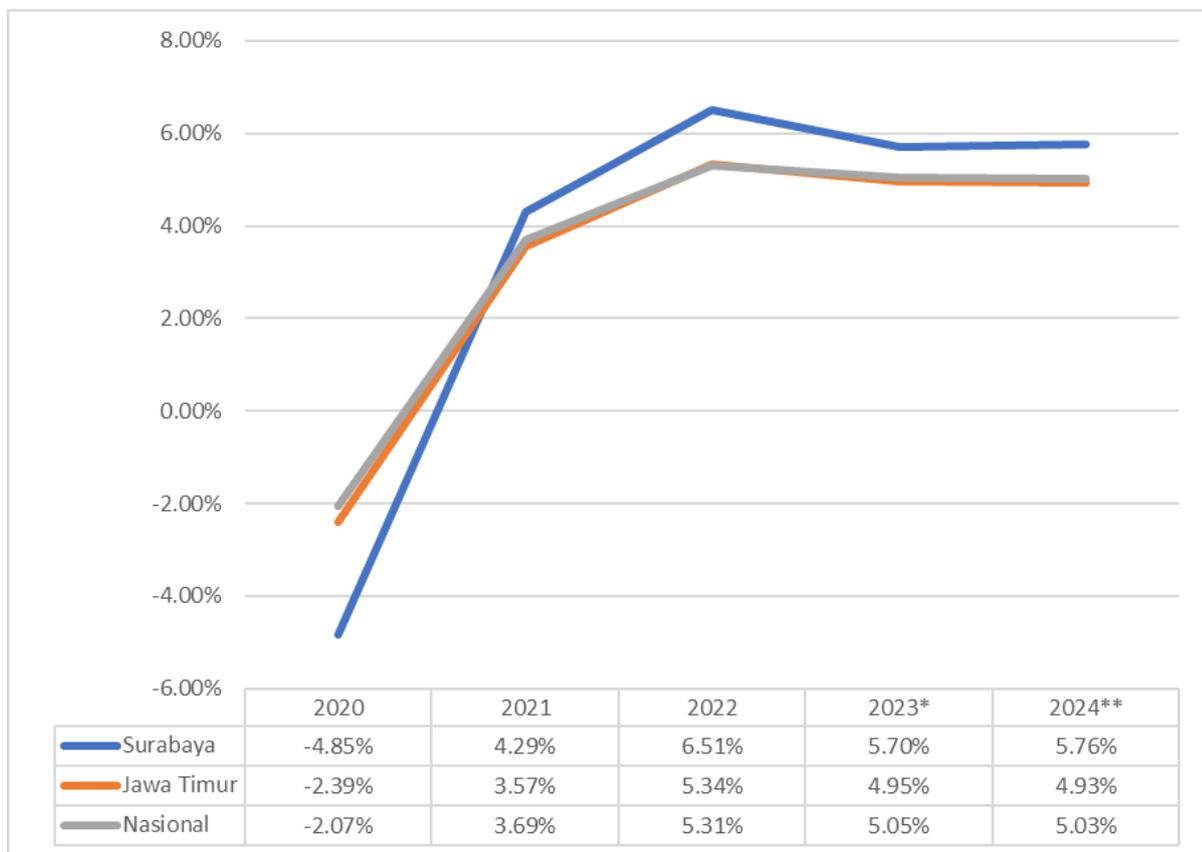
1.3.4 Kondisi Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Tekanan perubahan ekonomi global yang dinamis disertai ketidakpastian yang tinggi terjadi sepanjang tahun 2024. Kinerja ekonomi global pada tahun 2024 tumbuh sebesar 3,2 persen, namun melamban dibandingkan pertumbuhan tahun 2023 sebesar 3,4 persen. Hal ini berdampak terhadap kinerja ekonomi domestik.



Pada tahun 2024 perekonomian Kota Surabaya tumbuh sebesar 5,76 persen. Artinya kinerja ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2024 sedikit meningkat sebesar 0,06 persen dibanding tahun 2023. Meskipun demikian, ekonomi Kota Surabaya menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah kondisi global yang sangat dinamis dan penuh tantangan. Kuatnya performa ekonomi Kota Surabaya disebabkan oleh stabilitas permintaan masyarakat sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, sejalan dengan kinerja investasi yang terus meningkat setiap tahunnya. Sisi sektoral kinerja lapangan usaha dominan Kota Surabaya juga turut berkontribusi terhadap terjaganya ketahanan ekonomi Kota Surabaya. Di samping itu, daya dukung manusia yang diukur dari indikator indeks pembangunan manusia turut menjadi daya ungkit perekonomian Kota Surabaya. Faktor-faktor yang solid tersebut menjadi pilar ketahanan ekonomi Kota Surabaya sepanjang tahun 2024. Kuatnya kinerja ekonomi Kota Surabaya juga ditunjukkan oleh capaian nilainya yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Jawa Timur (4,93 persen) dan Nasional (5,03 persen).



Gambar 1.4
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024
(Sumber data: BPS Pusat, BPS Jawa Timur dan BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Kota Surabaya, 2025, diolah)

Catatan :*)Data sementara
**)Data sangat sementara



Dari sisi permintaan, laju pertumbuhan ekonomi dikontribusi oleh komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi non rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi) dan net ekspor. Berdasarkan kontribusinya, komponen terbesar yang berkontribusi terhadap perekonomian Kota Surabaya selama ini yakni konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (investasi). Besaran komponen konsumsi rumah tangga berkontribusi lebih dari separuh total perekonomian Kota Surabaya atau tepatnya sebesar 60,24 persen, diikuti pembentukan modal tetap bruto (investasi) sebesar 26,83 persen.

Oleh karena itu, pemerintah berusaha menjaga peran dari konsumsi rumah tangga melalui pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat tetap tinggi. Hal itu diwujudkan melalui pengendalian inflasi untuk meningkatkan konsumsi dengan menjaga harga barang dan jasa di Kota Surabaya stabil rendah. Sepanjang tahun 2024 pengendalian inflasi di Kota Surabaya dilakukan melalui monitoring dan pemantauan harga di pasar-pasar secara masif untuk komoditas bapokting maupun komoditas yang sering menjadi pemicu utama inflasi di Kota Surabaya. Monitoring dan pemantauan harga dilakukan secara rutin setiap minggu yang selanjutnya dari data tersebut dijadikan patokan *early warning system* untuk pengambilan kebijakan antisipasi terjadinya inflasi.

Dari sisi ketersediaan, pemerintah memastikan ketersediaan pangan dan terjaganya rantai distribusi agar tidak menimbulkan kelangkaan di pasaran yang akhirnya memicu terjadinya inflasi. Tidak sampai di situ, pemerintah juga melakukan operasi pasar pada titik titik wilayah yang tersebar hampir diseluruh wilayah Kota Surabaya guna membuat harga kembali stabil rendah. Pemerintah juga melakukan intervensi untuk menjaga daya beli melalui peningkatan pendapatan masyarakat Kota Surabaya dengan pemberdayaan usaha padat karya yang melibatkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Pembentukan modal tetap bruto (investasi) menjadi komponen kedua yang berkontribusi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Peningkatan investasi diwujudkan melalui kemudahan-kemudahan perizinan investasi. Kemudahan perizinan dan inovasi-inovasi pelayanan investasi yang telah dilakukan saat ini di bawah naungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu seperti *Surabaya Single Window Alfa* (SSWAlfa), klinik investasi. Inovasi Pesona Buaya (Pendampingan, Sinergi dan Sosialisasi Perizinan Berusaha untuk UMK Surabaya) dan lainnya. Inovasi-inovasi tersebut dilakukan selain bermanfaat untuk membantu pelaku usaha mendapatkan informasi terkait potensi investasi di Kota Surabaya, juga memberikan pendampingan pengurusan perizinan dan menyelesaikan permasalahan dalam investasi. Upaya mendorong perekonomian dari aspek investasi berhasil dilakukan ditunjukkan dari nilai capaian realisasi investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya selama tahun 2024 mencapai lebih dari 40 triliun. Dengan capaian



tersebut, investasi di Kota Surabaya dapat memberikan efek yang meluas (*multiplier effect*) seperti menurunkan tingkat kemiskinan dan menyerap tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Surabaya mengalami penurunan, yakni pada tahun 2023 TPT Kota Surabaya sebesar 6,76 persen menurun menjadi sebesar 4,91 persen di tahun 2024.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi juga dilakukan melalui kebijakan fiskal. Sama seperti di tahun-tahun sebelumnya, Kebijakan fiskal dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya selama tahun 2024 melalui pemberian keringanan atas kewajiban pembayaran pajak melalui retribusi. Tahun 2024 Pemerintah Kota Surabaya memberikan keringanan atas kewajiban pembayaran pajak daerah agar sektor perekonomian segera pulih, dengan menetapkan: (1) Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Masyarakat dalam Rangka Menyambut Hari Jadi Kota Surabaya ke 731; (2). Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administratif berupa Denda dan/atau Bunga atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan/atau Keterlambatan Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya ke 731; (3) Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/317/436.1.2/2024 tentang Pemberian Pengurangan Pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Rangka Menyambut Tahun Baru 2025; (4) Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/164/436.1.2/2024 tentang Penghapusan Sanksi Administratif berupa Denda dan/Atau Bunga atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan/atau Keterlambatan Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah dalam Rangka Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-79.

Selain pajak, Pemerintah Kota juga memberikan keringanan pembayaran retribusi dengan menetapkan: (1) Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Retribusi Pemakaian Tanah kepada Masyarakat Pemegang Izin Pemakaian Tanah dalam Rangka Memperingati Hari Kartini. (2) Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Kebun Raya Mangrove, Adventure Land Romokalisari, dan Hutan Kota pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dari sisi sektoral, hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif dengan kecepatan laju yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pada tahun 2024 dari 17 (tujuh belas) sektor lapangan usaha pembentuk perekonomian Kota Surabaya, terdapat 16 (enam belas) lapangan usaha yang tumbuh positif, dan 1 (satu) lapangan usaha yang masih berkontraksi yakni lapangan usaha pertanian. Seperti yang terangkum dalam grafik batang, lapangan usaha



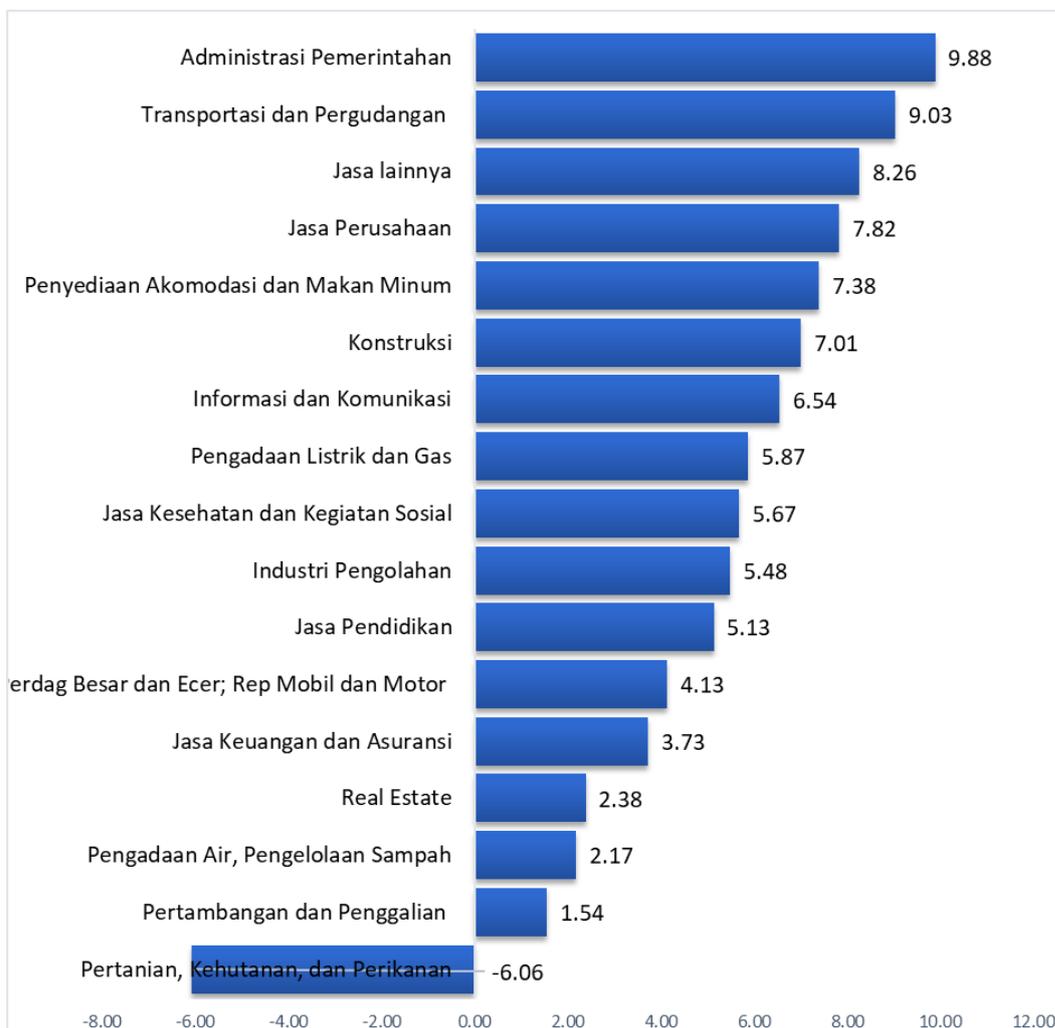
yang mengalami laju pertumbuhan tertinggi selama tahun 2024 yakni administrasi pemerintahan, diikuti oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan serta jasa lainnya. Lapangan usaha administrasi pemerintahan pada tahun 2024 mengalami laju pertumbuhan tertinggi di Kota Surabaya sebesar 9,88 persen.

Pertumbuhan lapangan usaha administrasi pemerintahan meningkat ditopang oleh peningkatan belanja Kota Surabaya. Berdasarkan data APBD Kota Surabaya 2024, belanja pemerintah tahun 2024 mengalami kenaikan yang mulanya sebesar Rp9,5 triliun meningkat lebih dari Rp9,9 triliun atau meningkat kurang lebih sebesar Rp400 miliar. Berdasarkan rincian belanja, komponen belanja yang mengalami peningkatan selama tahun 2024 yakni belanja operasional dan belanja modal. Belanja operasional mengalami peningkatan terjadi pada sub komponen belanja subsidi dan belanja hibah. Sementara belanja modal yang mengalami peningkatan terjadi pada sub komponen belanja tanah serta belanja gedung dan bangunan.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi kedua yakni transportasi dan pergudangan. Pada tahun 2024 laju pertumbuhan lapangan usaha ini mencapai 9,03 persen. Kota Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa memiliki tingkat mobilitas penduduk tinggi secara otomatis membuat lapangan usaha transportasi dan pergudangan tumbuh tinggi. Hal itu dikarenakan transportasi menjadi moda penggerak aktivitas masyarakat dan perekonomian Kota Surabaya.

Selanjutnya, jasa lainnya menjadi lapangan usaha tertinggi ketiga di tahun 2024 tumbuh sebesar 8,26 persen. Sebagai sektor daya dukung untuk sektor lainnya serta didalamnya terdapat sektor jasa dan sektor pariwisata sehingga lapangan usaha ini berkontribusi tinggi terhadap perekonomian Kota Surabaya. Ditambah lagi, adanya momen-momen penting yakni momen hari raya keagamaan seperti Idul Fitri dan Nataru mendorong meningkatnya mobilitas penduduk serta aktivitas lainnya. Berdasarkan data BPS, meningkatnya lapangan usaha ini sepanjang tahun 2024 diindikasikan dari jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang meningkat. Selain itu tingkat penghunian kamar hotel, serta omset penyediaan makan minum juga mengalami peningkatan.

Lapangan usaha tertinggi selanjutnya tumbuh pada kisaran 7 persen yakni jasa perusahaan (7,82 persen), akomodasi dan makan minum (7,38 persen) dan konstruksi (7,01 persen). Sisanya tumbuh kisaran kurang dari 7 persen. Sementara lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif selama tahun 2024 yakni pertanian yang berkontraksi sebesar -6,06 persen.



Gambar 1.5

Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Surabaya Tahun 2024*

(Sumber data: BPS Pusat, BPS Jawa Timur dan BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Kota Surabaya, 2025, diolah)

Catatan :*)Data sementara

Sementara lapangan usaha dominan Kota Surabaya (*leading sector*) mengalami perlambatan selama tahun 2024 seperti perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Sementara industri pengolahan mengalami laju pertumbuhan yang positif. Kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor mengalami perlambatan didorong oleh pertumbuhan yang melambat signifikan pada sub perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasi. Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami perlambatan dipicu oleh kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran perjalanan dinas yang ditetapkan sejak 7 November 2024. Sebaliknya kinerja industri pengolahan yang tumbuh positif di tahun 2024 disebabkan oleh meningkatnya aktivitas industri makanan minuman, industri tembakau, industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman, industri logam dasar, industri furniture, dan industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan.



b. Potensi Unggulan Daerah

Perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2024 juga ditunjukkan oleh peningkatan nilai tambah yang dihasilkan dibandingkan tahun sebelumnya, yang terlihat pada nilai tambah PDRB Kota Surabaya baik PDRB Atas Dasar Harga Berlaku maupun PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Berdasarkan tabel 1.7 dan tabel 1.8 nilai tambah dari seluruh lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Surabaya pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan namun dengan variasi peningkatan yang berbeda-beda.

Tabel 1.7
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2023-2024* (dalam miliar Rupiah)

Kategori	Uraian	2023	2024*
		Miliar (Rp)	Miliar (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.026,19	969,36
B	Pertambangan dan Penggalian	32,51	31,38
C	Industri Pengolahan	135.434,98	147.302,54
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.728,71	3.970,55
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	968,11	994,91
F	Konstruksi	64.940,58	70.335,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	201.432,93	214.341,08
H	Transportasi dan Pergudangan	42.834,31	47.529,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	114.627,56	126.222,54
J	Informasi dan Komunikasi	39.290,06	42.170,99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	35.852,30	37.509,07
L	Real Estate	17.213,53	17.731,56
M,N	Jasa Perusahaan	17.530,93	19.268,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.533,02	9.788,00
P	Jasa Pendidikan	15.784,48	16.838,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.958,22	6.374,98
R,S,T,U	Jasa lainnya	10.106,27	11.114,82
	PDRB	715.294,71	772.493,61

Sumber data : BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2025

Catatan : *) Data Sementara



Tabel 1.8
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2023-2024* (dalam miliar Rupiah)

Kategori	Uraian	2023 Miliar (Rp)	2024* Miliar (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	576,18	541,24
B	Pertambangan dan Penggalian	17,84	18,12
C	Industri Pengolahan	87.392,24	92.182,28
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.174,08	2.301,73
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	696,39	711,52
F	Konstruksi	44.772,95	47.910,22
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	128.814,59	134.133,56
H	Transportasi dan Pergudangan	25.517,17	27.494,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	66.946,11	71.889,16
J	Informasi dan Komunikasi	34.446,03	36.698,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	20.445,33	21.207,82
L	Real Estate	11.916,34	12.200,16
M,N	Jasa Perusahaan	10.278,17	11.082,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.759,41	5.229,78
P	Jasa Pendidikan	10.447,85	10.983,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.932,73	4.155,68
R,S,T,U	Jasa lainnya	6.197,31	6.709,01
	PDRB	459.030,72	485.448,89

Sumber data : BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2025

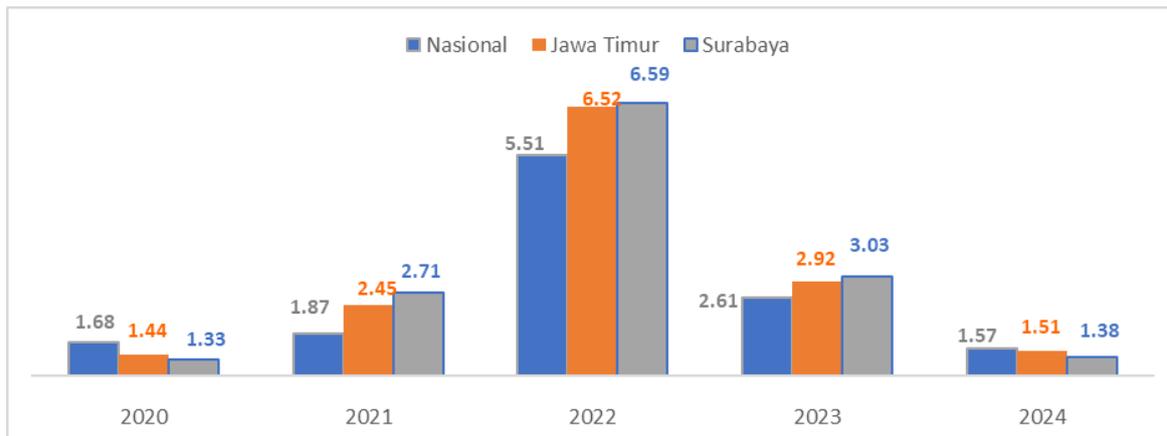
Catatan : *) Data Sementara

c. Inflasi Kota Surabaya

Berdasarkan data rilis Badan Pusat statistik Kota Surabaya, inflasi Kota Surabaya pada tahun 2024 tercatat sebesar 1,38 persen menurun dibandingkan tahun 2023. Bahkan nilai inflasi pada tahun ini cukup sesuai dari sasaran yang ditargetkan $2,5 \pm 1$ persen. Terkendalnya inflasi Kota Surabaya sejalan dengan masifnya aksi pengendalian harga sepanjang tahun 2024 yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi dengan instansi terkait dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menstabilkan harga. Aksi pengendalian harga diwujudkan melalui monitoring harga secara berkala, operasi pasar, pasar murah, gerakan pangan murah, serta kolaborasi kerjasama dengan daerah penghasil. Nilai inflasi Kota



Surabaya pada tahun 2024 capaiannya juga lebih rendah dibanding nilai inflasi pada tingkat provinsi yang tercatat sebesar 1,51 persen dan Nasional sebesar 1,57 persen.



Gambar 1.6
Pergerakan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Pusat, Provinsi Jawa Timur, BPS Kota Surabaya, 2025

Inflasi Kota Surabaya yang terjadi pada tahun 2024 secara *year on year* disebabkan oleh 9 kelompok pengeluaran mengalami inflasi sisanya 2 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi. Kelompok pengeluaran yang berkontribusi tertinggi menyumbang inflasi Kota Surabaya *year on year* tahun 2024 secara berurutan yakni perawatan pribadi dan jasa lainnya (6,69 persen); kelompok makanan, minuman dan tembakau (2,54 persen); penyediaan makanan dan minuman/restoran (2,48 persen); kesehatan (1,83 persen); pendidikan (1,30 persen).

Perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi kelompok penyumbang utama inflasi selama tahun 2024. Emas perhiasan konsisten menjadi komoditas dengan andil terbesar (0,36 persen) dengan tingkat inflasi (*y-on-y*) mencapai 37,42 persen pada November 2024. Komoditas emas perhiasan senantiasa mengalami kenaikan harga dalam 11 bulan terakhir. Peningkatan permintaan akan komoditas ini merupakan respon dari masyarakat khususnya investor untuk mencari perlindungan pada logam *safe haven* di tengah ketidakstabilan ekonomi sehingga emas perhiasan dianggap sebagai *saving asset* yang paling aman.

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi kelompok tertinggi selanjutnya yang menyumbang inflasi Kota Surabaya secara *yoy* di tahun 2024 sebesar 2,54 persen. Komoditas utama yang menyumbang inflasi *yoy* tahun 2024 dari kelompok ini yakni daging ayam ras, nasi dengan lauk, beras, minyak goreng, kopi bubuk, telur ayam ras, dan bawang merah. Kelompok makanan, minuman dan tembakau dikontribusi oleh komoditas-komoditas bahan pangan yang disebabkan selain karena periode musiman yang tidak menentu yang menyebabkan ketersediaan stok di pasaran terbatas, juga dikarenakan banyak sedikitnya permintaan. Meningkatnya harga beras didorong oleh tingginya permintaan beras di Kota



Surabaya yang tidak diiringi ketersediaan yang memadai (terbatas) akibat produksi yang menurun dibanding periode sebelumnya di wilayah sentra penghasil beras. Selain itu kenaikan harga beras di pasaran masih berlanjut sebagai dampak dari penerapan kebijakan Pemerintah untuk menaikkan nilai HET beras yang diberlakukan sejak 31 Mei 2024. Sementara untuk komoditas kopi bubuk mengalami inflasi sejalan dengan kenaikan harga biji kopi dunia yang meningkat dari 228,24 USD/Lbs pada triwulan II menjadi 270,80 USD/Lbs.

Sementara komoditas nasi dengan lauk kembali mengalami kenaikan harga sebagai dampak lanjutan dari kenaikan bahan baku. Untuk komoditas minyak goreng selama tahun 2024 mengalami kenaikan harga secara berturut-turut selama 6 bulan terakhir. Beberapa faktor penyebabnya selain peningkatan permintaan konsumsi minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan secara domestik maupun internasional, juga kondisi cuaca yang berpengaruh terhadap produksi kelapa sawit dan proses pengangkutan. Kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar internasional dibandingkan bulan sebelumnya berdampak langsung pada biaya produksi minyak goreng serta rantai distribusi yang panjang menyebabkan pasokan minyak goreng tidak dapat mengimbangi lonjakan permintaan konsumen pada momen tertentu. Sementara komoditas daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang merah mengalami kenaikan harga yang terjadi umumnya disebabkan kenaikan permintaan menjelang pada momen tertentu seperti perayaan dan hari raya yang tidak diimbangi dengan pasokan yang memadai, ditambah lagi proses distribusi pasokan yang terhambat oleh cuaca buruk.

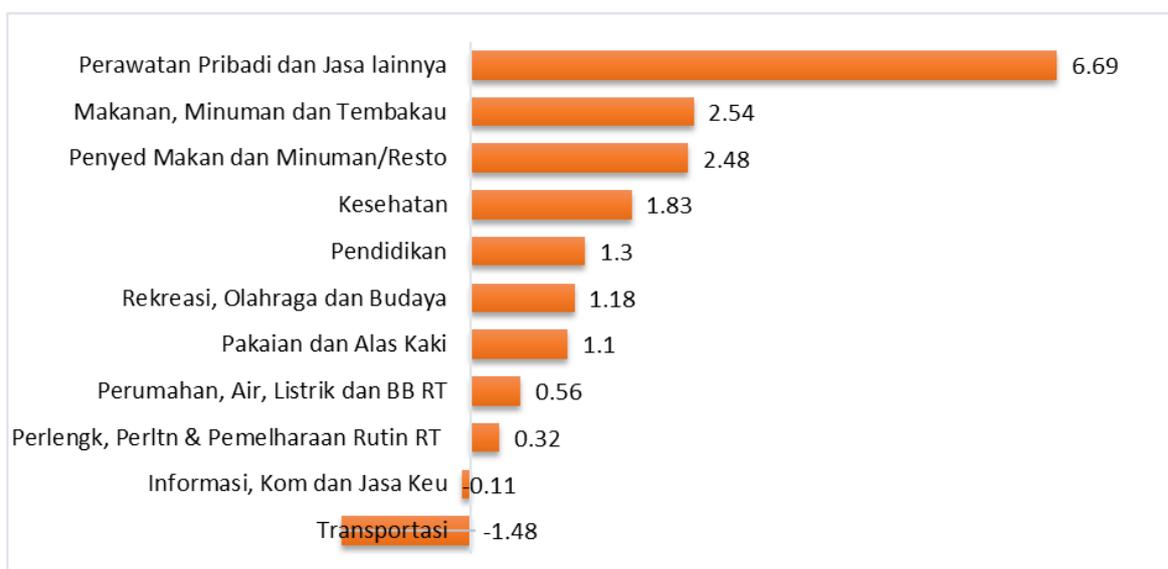
Selanjutnya kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran mengalami inflasi *year on year* 1,83 persen di tahun 2024. Kelompok ini merupakan sejalan dengan meningkatnya inflasi kelompok bahan makanan yang merupakan komponen dari kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran. Berdasarkan data BPS, sektor penyediaan makanan dan minuman/restoran menjadi sektor kedua terbesar yang berkontribusi terhadap perekonomian Kota Surabaya. Secara otomatis, kebutuhan bahan pangan baku sebagai pasokan menjadi faktor penentu yang berpengaruh terhadap dampak lanjutan dari kenaikan bahan baku.

Pada tahun 2024 kelompok kesehatan turut berkontribusi cukup tinggi terhadap inflasi Kota Surabaya. Komoditas yang dominan memberikan andil yakni obat dengan resep, vitamin, obat gosok, masker, biaya jasa dokter spesialis, dan tarif *check up*. Banyaknya rumah sakit besar baik milik pemerintah maupun swasta serta fasilitas kesehatan yang lainnya menjadikan Kota Surabaya sebagai tujuan berobat/rujukan masyarakat di luar Kota Surabaya membuat sektor kesehatan tumbuh. Sementara sektor Pendidikan turut andil berkontribusi inflasi setiap tahunnya yang umumnya terjadi pada momen tahun ajaran baru khususnya kenaikan tarif harga sekolah yang dikelola oleh swasta. Selama tahun 2024 inflasi terjadi pada jenjang pendidikan



wajib yakni kenaikan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.

Selain mengalami inflasi, terdapat dua kelompok jenis barang dan jasa menjadi penahan laju inflasi selama tahun 2024 yakni kelompok transportasi yang deflasi sebesar -1,48 persen diikuti oleh kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan yang mengalami deflasi sebesar -0,11 persen. Kelompok transportasi mengalami deflasi utamanya disumbang oleh penurunan harga komoditas bensin sejalan dengan adanya penyesuaian harga terhadap bahan bakar minyak (BBM) non subsidi yang dilakukan oleh PT Pertamina. Ditambah lagi adanya penurunan tarif angkutan udara seiring penurunan harga bahan bakar avtur serta promo tiket angkutan udara mendorong kelompok transportasi mengalami deflasi di tahun 2024. Sementara kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi disumbang oleh telepon seluler yang mengalami penurunan harga.



Gambar 1.7

Kelompok Jenis Barang dan Jasa Pembentuk Inflasi Kota Surabaya Tahun 2024

(Sumber: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Kota Surabaya, 2025, diolah)

Jika dilihat dari jenis komoditasnya, 10 (sepuluh) komoditi tertinggi yang menyumbang inflasi Kota Surabaya selama tahun 2024 antara lain emas perhiasan, daging ayam ras, nasi dengan lauk, beras, minyak goreng, kopi bubuk, telur ayam ras, sigaret kretek mesin, mobil dsan bawang merah. Sementara 10 (sepuluh) komoditi yang menjadi penahan laju inflasi pada tahun 2024 antara lain cabai rawit angkutan udara, cabai merah, bensin, apel, susu bubuk balita, ikan bandeng.ikan bolu, pengharum cucian, telepon seluler dan wortel.



Tabel 1.9
10 Komoditas Tertinggi Penyumbang Inflasi dan Deflasi di Kota Surabaya Selama Tahun 2024

No	Inflasi		Deflasi	
	Komoditas	Sumbangan	Komoditas	Sumbangan
1	Emas Perhiasan	0,3323	Cabai Rawit	-0,2946
2	Daging Ayam Ras	0,1571	Angkutan Udara	-0,2762
3	Nasi Dengan Lauk	0,133	Cabai Merah	-0,1024
4	Beras	0,1143	Bensin	-0,0797
5	Minyak Goreng	0,0948	Apel	-0,0136
6	Kopi Bubuk	0,092	Susu Bubuk Balita	-0,011
7	Telur Ayam Ras	0,0743	Ikan Bandeng/Ikan Bolu	-0,0099
8	Sigaret Kretek Mesin	0,0702	Pengharum Cucian	-0,0077
9	Mobil	0,0651	Telepon Seluler	-0,0073
10	Bawang Merah	0,0627	Wortel	-0,0068

Sumber: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Kota Surabaya, 2025, diolah

1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi dengan potensi daerah. PAD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.



Pendapatan Daerah Kota Surabaya tahun 2024 terealisasi sebesar Rp10.034.440.869.486,- atau 88,78% dari target yang telah ditetapkan. Rincian target realisasi dan capaian pendapatan tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.10
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi* (Rp)	Capaian (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	6.586.664.664.047	6.114.378.521.533	92,83%
2	Pendapatan Transfer	4.715.753.768.916	3.920.062.347.953	83,13%
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0	0,00%
Jumlah Pendapatan Daerah		11.302.418.432.963	10.034.440.869.486	88,78%

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2025

*data realisasi tahun 2024, per 23 Januari 2025

Pendapatan meliputi 3 komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan rincian:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 meliputi realisasi pajak daerah sebesar Rp4.784.138.830.204,- atau 92,55%; retribusi daerah sebesar Rp307.724.171.226,- atau 74,41%; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp195.348.090.465,- atau 102,79%; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp827.167.429.639,- atau 101,60% dari target yang telah ditetapkan. Rincian target, realisasi, dan capaian PAD Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.11
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pajak Daerah	5.168.983.486.267	4.784.138.830.204	92,55%
2	Retribusi Daerah	413.533.091.681	307.724.171.226	74,41%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	190.042.923.841	195.348.090.465	102,79%
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	814.105.162.258	827.167.429.639	101,60%
Jumlah		6.586.664.664.047	6.114.378.521.533	92,83%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2025



Realisasi PAD didukung oleh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan rincian:

a. Pajak Daerah

Realisasi pajak daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp4.784.138.830.204,- atau 92,55%. Pajak Daerah secara umum belum mencapai target di tahun 2024 namun sudah lebih baik dari tahun 2023. Tahun 2024 Pemerintah Kota Surabaya memberikan kelonggaran atas kewajiban pembayaran pajak daerah agar sektor perekonomian segera pulih, dengan menetapkan:

1. Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Masyarakat dalam Rangka Menyambut Hari Jadi Kota Surabaya ke 731;
2. Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administratif berupa Denda dan/atau Bunga atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan/atau Keterlambatan Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya ke 731;
3. Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/317/436.1.2/2024 tentang Pemberian Pengurangan Pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Rangka Menyambut Tahun Baru 2025;
4. Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/164/436.1.2/2024 tentang Penghapusan Sanksi Administratif berupa Denda dan/Atau Bunga atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan/atau Keterlamabatan Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah dalam Rangka Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-79

Selain kelonggaran memberikan kelonggaran atas kewajiban pembayaran Pajak Daerah, permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah adalah:

1. Lokasi objek pajak PBJT Jasa Parkir belum seluruhnya terpasang alat perekam pajak daring sehingga proses pengawasan dan integrasi pelaporan pajak parkir belum terlaksana secara optimal;
2. Jumlah piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) relatif besar belum terbayarkan karena data Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama tidak jelas atau tidak ditemukan;
3. Pergeseran minat masyarakat dalam melakukan pengiklanan via media sosial karena dirasa lebih efektif dan lebih masif sehingga menurunkan potensi pemasangan reklame;



4. Pemungutan pajak PBJT Tenaga Listrik yang dilakukan oleh penyedia listrik (PLN) belum maksimal karena pemungutan pajak berdasarkan pembayaran langganan listrik oleh konsumen bukan dari jumlah konsumsi tenaga listrik sebenarnya.
5. Pemutakhiran data untuk mengatasi tingginya dinamika perubahan terhadap objek pajak dan wajib pajak yang belum optimal akibat keterbatasan sumber daya dan sarana prasarana.
6. Wajib Pajak cenderung kurang memanfaatkan layanan dan fasilitas pembayaran pajak secara daring melalui beragam kanal mengakibatkan pelaksanaan pemungutan pajak masih belum dapat optimal
7. Ketentuan dasar pengenaan pajak reklame masih menggunakan regulasi lama (2010) dan sampai dengan saat ini belum dilakukan pembaruan regulasi sehingga pendapatan pajak reklame masih belum optimal.

Selengkapnya mengenai rincian target, realisasi dan capaian Pajak Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.12
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2024

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pajak Reklame			
	a. Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/ Megatron	142.718.213.619	123.847.860.850	86,78%
	b. Pajak Reklame Kain	19.222.344.214	17.608.035.300	91,60%
	Jumlah Pajak Reklame	161.940.557.833	141.455.896.150	87,35%
2	Pajak Air Tanah			
	a. Pajak Air Tanah	1.368.359.434	1.413.967.810	103,33%
	Jumlah Pajak Air Tanah	1.368.359.434	1.413.967.810	103,33%
3	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)			
	a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.644.686.993.252	1.414.562.140.623	86,01%
	Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.644.686.993.252	1.414.562.140.623	86,01%
4	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			



No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a.	BPHTB-Pemindahan Hak	1.396.287.716.684	1.229.753.172.480	88,07%
b.	BPHTB-Pemberian Hak Baru	73.488.827.149	110.936.470.502	150,96%
	Jumlah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.469.776.543.833	1.340.689.642.982	91,22%
5	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)			
a.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) - Makanan dan/atau Minuman	655.433.066.321	673.358.993.847	102,73%
b.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) - Tenaga Listrik	688.269.513.544	685.934.853.045	99,66%
c.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) - Jasa Perhotelan	405.404.814.687	384.781.372.811	94,91%
d.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) - Jasa Parkir	57.776.569.585	56.365.369.294	97,56%
e.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) - Jasa Kesenian dan Hiburan	84.327.067.778	85.576.593.642	101,48%
	Jumlah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	1.891.211.031.915	1.886.017.182.639	99,73%
	Jumlah Pajak Daerah	5.168.983.486.267	4.784.138.830.204	92,55%

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2025

b. Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah tahun 2024 sebesar Rp307.724.171.226,- atau 74,41% dari target Rp413.533.091.681,- meliputi capaian dari retribusi jasa umum sebesar Rp139.312.536.849,- atau 89,83%; retribusi jasa usaha sebesar Rp124.215.032.924,- atau 88,72%; dan retribusi perizinan tertentu sebesar Rp44.196.601.453,- atau 37,32%.

Pada tahun 2024, selain kebijakan pengurangan pajak daerah, Pemerintah Kota juga memberikan keringanan pembayaran retribusi dengan menetapkan:

1. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Retribusi Pemakaian Tanah kepada Masyarakat Pemegang Izin Pemakaian Tanah dalam Rangka Memperingati Hari Kartini;



2. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Kebun Raya Mangrove, Adventure Land Romokalisari, dan Hutan Kota pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tabel 1.13
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Retribusi Daerah Kota Surabaya Tahun 2024

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Retribusi Jasa Umum			
a.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.560.322.900	2.586.141.650	165,74%
b.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	92.345.857.508	109.418.772.386	118,49%
c.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	1.030.518.200	1.103.758.200	107,11%
d.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan	58.941.279.426	25.063.915.413	42,52%
e.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	1.206.702.400	1.139.949.200	94,47%
Jumlah Retribusi Jasa Umum		155.084.680.434	139.312.536.849	89,83%
2	Retribusi Jasa Usaha			
a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	110.281.662.047	102.104.888.632	92,59%
	- Retribusi Penyewaan Tanah	100.962.155.267	92.231.084.036	91,35%
	- Retribusi Penyewaan Bangunan	5.850.012.780	6.590.809.221	112,66%
	- Retribusi Pemakaian Ruangan	2.720.600.000	2.584.645.375	95,00%
	- Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	748.894.000	698.350.000	93,25%
b.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	553.584.000	592.250.000	106,98%
c.	Retribusi Terminal	1.915.058.768	1.883.018.111	98,33%
	- Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.138.588.884	957.301.002	84,08%
	- Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	776.469.884	925.717.109	119,22%
d.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	13.958.043.183	6.904.533.785	49,47%
e.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	13.301.400.000	12.730.342.396	95,71%
Jumlah Retribusi Jasa Usaha		140.009.747.998	124.215.032.924	88,72%
3	Retribusi Perizinan Tertentu			
a.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	-	-
b.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	-	-	-



No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
c.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	111.479.733.649	36.172.475.253	32,45%
d.	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	6.958.929.600	8.024.126.200	115,31%
Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu		118.438.663.249	44.196.601.453	37,32%
Jumlah Retribusi Daerah		413.533.091.681	307.724.171.226	74,41%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2025

Meskipun Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan kelonggaran atas kewajiban pembayaran Retribusi Daerah, masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan retribusi daerah, antara lain:

1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan tercapai 42,52% dikarenakan belum optimalnya pengawasan dan berkurangnya titik parkir;
2. Retribusi Tempat Khusus Parkir tercapai 49,47%, meningkat 14,70% dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 31,75% dikarenakan adanya penambahan lokasi titik parkir baru yang dikelola Dinas Perhubungan semula 44 lokasi menjadi 53 titik pada tahun 2024;
3. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tercapai 32,45% dikarenakan adanya regulasi pengurangan, pembebasan, atau pengurangan denda salah satunya adalah Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif berupa Pembebasan atau Pengurangan Denda Pelaksanaan Kemajuan Pembangunan di Lapangan pada Saat Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan/ Persetujuan Bangunan Gedung dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya ke-730. Selain itu, pembangunan bangunan tinggi yang semakin sedikit dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengajukan IMB sebelum membangun rumah tinggal juga turut mengurangi pendapatan IMB.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2024 sebesar Rp195.348.090.465,- atau 102,79%. Bagian laba yang disetorkan kepada Pemerintah Kota Surabaya tersebut merupakan *output* pendapatan BUMD dan BUMN di tahun 2024. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut:



Tabel 1.14
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN			
a.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	13.895.724.423	16.585.759.987	119,36%
	Jumlah Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	13.895.724.423	16.585.759.987	119,36%
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD			
a.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	19.671.336.512	19.671.336.512	100,00%
b.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	3.294.219.466	5.768.350.525	175,11%
c.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	140.808.479.073	140.949.479.074	100,10%
	Jumlah Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	163.774.035.051	166.389.166.111	101,60%
3	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta			
a.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	12.373.164.367	12.373.164.367	100,00%
	Jumlah Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	12.373.164.367	12.373.164.367	100,00%
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		190.042.923.841	195.348.090.465	102,79%

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2025



Secara rinci Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meliputi :

1. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN yaitu dari PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT SIER) tercapai Rp16.585.784.987,- atau 119,36% dari target;
 2. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD tercapai Rp166.389.166.111,- atau 101,60% dari target Rp163.774.035.051,- meliputi:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) tercapai Rp19.671.336.512,- atau 100% dari target terdiri dari :
 - PT BPR Surya Artha Utama Perseroda tercapai Rp2.302.504.886,- atau 100% dari target
 - PT BPD Jawa Timur tercapai Rp17.363.651.626,- atau 100% dari target
 - PT BPR Jawa Timur tercapai Rp5.180.000,- atau 100% dari target
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) tercapai Rp5.768.350.525,- atau 175,11% dari target Rp3.294.219.466,- terdiri dari :
 - Perusahaan Daerah Pasar Surya tercapai Rp379.707.689 atau 148,56% dari target Rp255.564.102,- dengan rincian :
 - Realisasi dividen tahun 2019 sebesar Rp41.000.000,-
 - Realisasi dividen tahun 2022 sebesar Rp114.564.102,- tanggal 4 Januari 2024
 - Realisasi dividen tahun 2022 sebesar Rp100.000.000 tanggal 13 Juni 2024
 - Realisasi dividen tahun 2023 sebesar Rp123.143.587,- tanggal 31 Desember 2024
 - Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan tercapai sebesar Rp246.800.714,- atau 100% dari target dengan rincian :
 - Angsuran pertama sebesar Rp64.553.594,-
 - Angsuran kedua sebesar Rp35.000.000,-
 - Angsuran ketiga sebesar Rp5.000.000,-
 - Angsuran keempat sebesar Rp5.000.000,-
 - Angsuran kelima sebesar Rp137.247.120,-
- Berdasarkan Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/84/436.1.2/2024 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Rumah Potong



Hewan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp564.553.594,-, terdapat selisih Rp317.752.880,- akan dibayarkan secara bertahap kepada Pemerintah Kota Surabaya dan diakui sebagai utang dividen

- PT Surya Karsa Utama tidak ada realisasi dividen karena akan dilakukan pembubaran melalui likuidasi sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 28 Desember 2023
- Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya tercapai sebesar Rp5.141.842.122,- atau 194,63% dari target Rp2.641.854.650,- berdasarkan:
 - 1) Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/118/436.1.2/2024 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Kota Surabaya, telah disetorkan sebesar Rp3.051.078.415;
 - 2) Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/315/436.1.2/2023 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya Tahun 2022, telah disetorkan sebesar Rp2.590.763.707,- di tahun 2023 dan tahun 2024

c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) yaitu dari Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada (PDAM Surya Sembada) tercapai Rp140.949.479.074,- atau 100,10% dari target Rp140.806.479.073,- berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/79/436.1.2/2024 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023.

3. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta yaitu PT YEKAPE Surabaya tercapai Rp12.373.164.367,- atau 100% dari target berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 28 Maret 2024 yang telah disahkan Akta Notaris tanggal 6 Mei Tahun 2024.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2024 sebesar Rp827.167.429.639,- atau 101,60% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah selengkapnya disajikan pada tabel berikut.



Tabel 1.15
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain-lain PAD yang Sah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	3.509.536.696	13.808.234.872	393,45%
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	43.896.757.289	53.752.221.602	122,45%
3	Jasa Giro	6.049.563.899	1.911.260.790	31,59%
4	Pendapatan Bunga	15.784.520.548	12.036.815.068	76,26%
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	702.945.850	138.323.212	19,68%
6	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	45.997.876.776	40.514.108.263	88,08%
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.230.553.572	785.784.150	35,23%
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	11.050.444.995	-
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	3.035.957.004	1.353.869.186	44,59%
10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	83.678.845	-
11	Pendapatan dari Pengembalian	1.134.368.713	455.094.069	40,12%
12	Pendapatan BLUD	662.860.230.550	653.162.295.708	98,54%
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	28.902.851.361	38.115.298.879	131,87%
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah		814.105.162.258	827.167.429.639	101,60%

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2025

2. Pendapatan Transfer

Realisasi pendapatan transfer tahun 2024 sebesar Rp3.920.062.347.953,- atau 83,13% dari target yang telah ditetapkan. Capaian komponen Pendapatan Transfer selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.16
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Transfer Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pendapatan Transfer				
1	Pendapatan Transfer dari Pusat			
1.1	Dana Perimbangan			



No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)				
	a.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.888.614.000	5.667.108.000	115,92%
	b.	DBH PPh Pasal 21	404.540.613.000	446.896.881.000	110,47%
	c.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	-	73.715.211.000	-
	d.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	41.582.063.000	45.748.488.000	110,02%
	e.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	25.756.872.000	43.828.395.000	170,16%
	f.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	-	7.372.960.000	-
	g.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	13.435.000	33.524.000	249,53%
	h.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	692.136.000	925.920.000	133,78%
	i.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	92.533.000	194.820.000	210,54%
	j.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.182.737.000	1.182.737.000	100,00%
	Jumlah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)		478.749.003.000	625.566.044.000	130,67%
1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
	a.	Dana Alokasi Umum	1.428.602.538.000	1.410.856.698.070	98,76%
	Jumlah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1.428.602.538.000	1.410.856.698.070	98,76%
1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik				
	a.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	219.898.000	46.502.000	21,15%
	b.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.134.952.000	3.031.800.000	96,71%
	c.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan Penurunan AKI dan AKB	228.996.000	228.204.000	99,65%



No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
d.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	765.900.000	765.900.000	100,00%
e.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	189.995.000	188.605.688	99,27%
f.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	2.225.768.000	1.862.500.000	83,68%
	Jumlah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	6.765.509.000	6.123.511.688	90,51%
1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik			
a.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	229.806.669.000	232.668.563.000	101,25%
b.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	4.623.038.000	6.349.832.000	137,35%
c.	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.500.000.000	1.442.838.559	96,19%
d.	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	65.827.750.000	56.769.941.775	86,24%
e.	DAK Non Fisik-BOKB-KB	21.954.623.000	19.238.767.862	87,63%
f.	DAK Non Fisik-Ketahanan Pangan dan Pertanian	520.000.000	519.893.600	99,98%
g.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	324.851.820.000	322.563.180.472	99,30%
h.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	7.510.000.000	7.315.000.000	97,40%
i.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	59.485.040.000	58.975.336.849	99,14%
j.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	1.410.000.000	1.290.000.000	91,49%
k.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	4.594.770.000	4.336.044.852	94,37%
l.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000	135.000.000	100,00%
m.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	23.882.268.000	18.023.064.044	75,47%
n.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	44.756.412.000	42.470.060.555	94,89%



No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Jumlah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	790.857.390.000	772.097.523.568	97,63%
	Jumlah Dana Perimbangan	2.704.974.440.000	2.814.643.777.326	104,05%
1.2	Insentif Fiskal			
a.	Insentif Fiskal	22.392.814.000	41.433.041.000	185,03%
	Jumlah Insentif Fiskal	22.392.814.000	41.433.041.000	185,03%
	Jumlah Pendapatan Transfer dari Pusat	2.727.367.254.000	2.856.076.818.326	104,72%
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah			
2.1	Pendapatan Bagi Hasil			
a.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	784.116.685.163	420.727.817.723	53,66%
b.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	631.720.839.362	293.668.624.300	46,49%
c.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	389.178.039.451	233.728.277.085	60,06%
d.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.900.418.869	1.279.473.399	67,33%
e.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	177.627.218.292	111.543.937.121	62,80%
	Jumlah Pendapatan Bagi Hasil	1.984.543.201.137	1.060.948.129.627	53,46%
2.2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi			
a.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	3.843.313.779	3.037.400.000	79,03%
	Jumlah Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	3.843.313.779	3.037.400.000	79,03%
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.988.386.514.916	1.063.985.529.627	53,51%
	Jumlah Pendapatan Transfer	4.715.753.768.916	3.920.062.347.953	83,13%

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2025

Pendapatan transfer Tahun 2024 meliputi:

1. Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tercapai Rp6.123.511.688,- atau 90,51% dari target Rp6.765.509.000,- dikarenakan penyalurannya memperhitungkan nilai kontrak pekerjaan masing-masing bidang.
2. Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tercapai Rp772.097.523.568,- atau 97,63% dari target Rp790.857.390.000,- dikarenakan penyalurannya memperhitungkan SILPA tahun sebelumnya



3. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi tercapai Rp1.060.948.129.627,- atau 53,46% dari target Rp1.984.543.201.137,- berdasarkan:
- a. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/635/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur berdasarkan Target Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
 - b. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/596/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - c. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/218/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Desember Tahun Anggaran 2023;
 - d. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/210/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2024;
 - e. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/353/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2024;
 - f. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/580/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2024;
 - g. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/762/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV Bagian Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2024;
 - h. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/219/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan I Tahun Anggaran 2024;
 - i. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/391/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan II Tahun Anggaran 2024;
 - j. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/600/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan III Tahun Anggaran 2024;



- k. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/780/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Bagian Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2024
4. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi tercapai Rp3.037.400.000,- atau 79,03% dari target Rp3.843.313.779,- berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/140/KPTS/013/2024 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Hibah Bos yang semula masuk pada kode rekening Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diubah menjadi masuk ke dalam Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi belanja daerah Kota Surabaya Tahun 2024 sebesar Rp9.998.051.074.977,- atau terealisasi 86,94%, secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.17
Realisasi Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2024

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi* (Rp)	Capaian (%)
	Belanja Daerah			
1	Belanja Operasi			
	Belanja Pegawai	3.047.541.116.109	2.871.477.429.285	94,22%
	Belanja Barang dan Jasa	5.351.581.024.851	4.768.566.646.946	89,11%
	Belanja subsidi	30.517.436.557	23.212.862.862	76,06%
	Belanja Hibah	444.198.089.655	432.667.414.836	97,40%
	Belanja Bantuan Sosial	5.393.000.000	4.287.200.000	79,50%
	Jumlah Belanja Operasi	8.879.230.667.172	8.100.211.553.929	91,23%
2	Belanja Modal			
	Belanja Tanah	271.946.411.954	243.584.204.453	89,57%
	Belanja Peralatan dan Mesin	257.110.687.857	226.624.123.848	88,14%



No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi* (Rp)	Capaian (%)
	Belanja Gedung dan Bangunan	737.789.684.192	657.767.071.308	89,15%
	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.341.342.749.349	762.164.782.711	56,82%
	Belanja Aset Tetap Lainnya	884.288.879	679.876.173	76,88%
	Belanja aset lainnya	6.564.091.290	6.421.936.175	97,83%
	Jumlah Belanja Modal	2.615.637.913.521	1.897.241.994.668	72,53%
3	Belanja Tidak Terduga			
	Belanja Tidak Terduga	5.500.000.000	597.526.380	10,86%
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	5.500.000.000	597.526.380	10,86%
4	Belanja Transfer			
	Transfer bagi hasil	-	-	-
	Transfer bantuan keuangan	-	-	-
	Jumlah Belanja Transfer	-	-	-
	Jumlah Belanja Daerah	11.500.368.580.693	9.998.051.074.977	86,94%

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2025

*data realisasi tahun 2024, per 23 Januari 2025

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan belanja daerah di tahun 2024 yaitu realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kota Surabaya yang belum mencapai target. Di mana Pendapatan Daerah Kota Surabaya yang ditargetkan sebesar Rp11.302 Miliar terealisasi sebesar Rp10.034 Miliar atau sebesar 88,78%. Namun demikian, realisasi pendapatan Kota Surabaya Tahun 2024 ini mengalami peningkatan sebesar 4,47% atau Rp429,66 milyar dari realisasi pendapatan tahun 2023 yang sebesar Rp9.604 milyar.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan belanja sebagai berikut:

- Penentuan skala prioritas belanja dengan didukung oleh proses penganggaran yang adaptif terhadap penyesuaian realisasi pendapatan;
- Penguatan proses pelaksanaan pengadaan barang jasa agar dapat dilaksanakan dengan tepat waktu.

1.3.7 Realisasi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan, maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengelolaan pembiayaan daerah yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) tahun 2023 sebesar Rp207.845.879.322,-, surplus APBD Rp36.389.794.509,-, dan realisasi Penyertaan Modal Rp9.929.481.387,-



sehingga realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2024 sebesar Rp234.306.192.444,- yang secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.18
Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2024

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Penerimaan Pembiayaan	207.879.629.117	207.845.879.322	99,98%
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	207.879.629.117	207.845.879.322	99,98%
2	Pengeluaran Pembiayaan	9.929.481.387	9.929.481.387	100,00%
	Penyertaan Modal	9.929.481.387	9.929.481.387	100,00%

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2025

Realisasi penyertaan modal tahun 2024 sebesar Rp9.929.481.387,- atau 100,00% dari target.



BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Perekonomian global pada tahun 2024 masih menghadapi berbagai tekanan. Masih berjalannya ketidakstabilan kondisi ekonomi yang terjadi selama tahun 2024 masih menjadi penyebab tertahannya laju perekonomian global tumbuh lebih tinggi hingga saat ini. Beberapa alasan yang menjadi faktor perlambatan, antara lain yakni dampak aksi geopolitik ekonomi yang mengganggu kestabilan ekonomi dunia, melambatnya perekonomian Tiongkok akibat terganggunya sektor *real estate*, masih lemahnya ekonomi Amerika Serikat, pengetatan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi, serta volatilitas harga komoditas global. Faktor-faktor tersebut tentunya berdampak terhadap mayoritas negara di dunia, baik untuk negara maju maupun berkembang, tentunya implikasi tersebut berdampak berbeda tergantung dari masing-masing ketahanan ekonomi (fundamental) yang dimiliki.

Dampak ketidakstabilnya ekonomi global juga berdampak terhadap perekonomian nasional. Hal itu dikonfirmasi oleh kinerja ekonomi Indonesia yang menunjukkan capaian yang moderat. Berdasarkan data BPS Nasional, realisasi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05%, sedangkan di tahun 2024 mencapai 5,03%. Meskipun di tengah ketidakpastian global, capaian kinerja ekonomi nasional menunjukkan kinerja baik. Hal itu ditunjukkan oleh keberhasilan pemerintah mempertahankan capaian pertumbuhan ekonomi dikisaran 5 persen. Peran konsumsi domestik masih menjadi kunci utama kuatnya ekonomi nasional disertai investasi yang terus tumbuh seiring peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 9,80 persen. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 12,48 persen.

Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 4,93%. Secara struktur, Lapangan Usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Timur pada Triwulan IV-2024 dengan kontribusi sebesar 31,29 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 60,96 persen. Arah kebijakan makro Jawa Timur dilaksanakan melalui pemerataan serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan. Pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah yang dilakukan melalui optimalisasi dan pemberdayaan potensi ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi berkualitas dilaksanakan melalui penciptaan stabilitas makro



ekonomi yang didukung investasi, peningkatan nilai tambah sektor primer dan sekunder serta pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

Selaras dengan nasional dan Jawa Timur, meski mengalami perlambatan akibat pengaruh kondisi ekonomi global, namun kinerja ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2024 dengan pencapaian pertumbuhan 5,76% sudah cukup memuaskan. Masih kuatnya ketahanan ekonomi Kota Surabaya menjaga pertumbuhan ekonomi stabil tinggi. Sama seperti periode sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya konsisten tumbuh tinggi diatas capaian pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Timur. Kinerja konsumsi yang dibarengi tingginya daya beli menjadi fundamental ekonomi Kota Surabaya selama ini. Hampir 60 (enam puluh) persen komponen konsumsi rumah tangga menjadi kontribusi terhadap perekonomian Kota Surabaya. Selanjutnya konsistensi daya tarik investasi di Kota Surabaya juga menjadi daya dukung yang turut mengakselerasi. Capaian pertumbuhan ekonomi yang stabil tinggi selama ini juga merefleksikan besarnya produktivitas pelaku usaha serta sektor-sektor potensial di Kota Surabaya yang terus menggeliat menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Kondisi ekonomi Kota Surabaya tumbuh optimis lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut nampak pada ketercapaian sasaran target pembangunan ekonomi yang tercermin dari target indikator makro Kota Surabaya, meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada RKPD Tahun 2024 yang ditargetkan sebesar 6,1% dengan melihat capaian tahun 2023 sebesar 5,70%, namun melihat perkembangan ekonomi, ditargetkan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 tumbuh kisaran 5,6-6,1% yang terealisasi sebesar 5,76%, **mencapai target;**
2. Indeks Gini Kota Surabaya pada RKPD Tahun 2024 ditargetkan 0,319 dan pada perubahan RKPD Tahun 2024 ditargetkan pada kisaran 0,319-0,388 yang teralisasi sebesar 0,381, **mencapai target;**
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 4,50%, yang terealisasi 4,91%, **belum mencapai target;**
4. Persentase penduduk miskin Kota Surabaya pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 4,01% yang terealisasi 3,96%, **mencapai target;**
5. Indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Surabaya pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 83,50 dengan melihat capaian tahun 2023 sebesar 83,99, namun target ditingkatkan lagi pada perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi 84,2 yang terealisasi 84,69, **mencapai target.**



Mengacu pada Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- c. keadaan darurat; dan/atau
- d. keadaan luar biasa
- e. organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja.

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka perubahan APBD Tahun 2024 dilakukan salah satunya bertujuan untuk penggunaan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Nomor : 84/S-HP/XVIII.SBY/05/2024 tanggal 2 Mei 2024, untuk pendanaan kegiatan tahun 2024, selanjutnya Perubahan APBD Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pada tahun 2024 terdapat perubahan pendapatan di Kota Surabaya, hal yang mendasari perubahan kebijakan pendapatan daerah Kota Surabaya Tahun 2024 adalah:

1. Mempertimbangkan realisasi pendapatan sampai dengan triwulan II, Pemerintah Kota Surabaya melakukan penyesuaian komposisi pendapatan untuk pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
2. Penyesuaian target pendapatan berdasarkan regulasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk pendapatan dari dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.



Sebagai tindak lanjut perubahan kebijakan pendapatan tersebut, arah kebijakan pendapatan daerah Kota Surabaya yang disusun pada tahun 2024 meliputi:

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah terdiri atas pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing jenis objek meliputi:

a. Pajak Daerah yaitu :

- 1) Penganggaran pajak daerah disusun berdasarkan Pasal 94 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 2) Penganggaran pajak daerah dengan objek kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat dapat dipungut pajak daerah dengan nama pajak alat berat;
- 3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Kota Surabaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yaitu penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi;
- 4) Mengoptimalisasikan penerimaan pajak melalui perluasan basis data pajak;
- 5) Mengembangkan layanan pajak digital untuk mempermudah pembayaran pajak.

b. Retribusi daerah yaitu:

- 1) Penganggaran retribusi daerah dapat dialokasikan dan dilaksanakan pemungutannya selama Peraturan Daerah telah disesuaikan dan ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



- 2) Peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
 - 3) Pengawasan bangunan yang memerlukan perizinan tertentu yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui Perangkat Daerah penghasil dan Kecamatan/Kelurahan supaya semakin banyak masyarakat yang mengajukan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan membayar retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu :
- 1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah
 - 2) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan, antara lain:
 - a) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga, dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi daerah
 - b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi Pemerintahan Daerah
 - c) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan
 - d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan
 - e) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi daerah
 - 3) Optimalisasi koordinasi dan/atau pengawasan kepada BUMD dan BUMN
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu :
- 1) Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
 - a) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan
 - b) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
 - c) Hasil kerjasama daerah
 - d) Jasa giro



- e) Hasil pengelolaan dana bergulir
 - f) Pendapatan bunga
 - g) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah
 - h) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah
 - i) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 - j) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
 - k) Pendapatan denda pajak daerah
 - l) Pendapatan denda retribusi daerah
 - m) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
 - n) Pendapatan dari pengembalian
 - o) Pendapatan dari BLUD
 - p) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Dalam rangka meningkatkan Lain-lain PAD yang Sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS) / Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Peningkatan koordinasi dengan PD terkait terkait optimalisasi denda pajak daerah dan denda retribusi daerah serta pendapatan obyek lainnya;
- 4) Koordinasi dengan lembaga perbankan secara intensif terkait penempatan jasa giro dan deposito kas daerah Pemerintah Kota.

2.1.2 Pendapatan Transfer

- a. Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Transfer pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pendapatan bagi hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur dana transfer dari Pemerintah Pusat mulai diberlakukan pada tahun 2023. Potensi dana transfer dari



pemerintah pusat pada APBD Kota Surabaya menyesuaikan dengan kebijakan yang tertuang dalam aturan tersebut

- c. Penganggaran Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana transfer atau informasi resmi mengenai alokasi dana transfer yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- d. Penganggaran dana transfer dari Pemerintah Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Provinsi dengan memperhatikan realisasi pendapatan Dana Transfer tahun terakhir. Terhadap dana perimbangan ini, kebijakan yang ditetapkan adalah melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peranan aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk dapat memenuhi persyaratan penyaluran dana transfer.

2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi :

- a. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- c. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.



- f. Pengalokasian Dana BOS Kabupaten/Kota untuk satuan pendidikan dasar negeri dan swasta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 ada pada kode rekening Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik merupakan bagian dari pendapatan transfer DAK Non Fisik

Pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2024 mengalami perubahan semula sebesar Rp10.770.314.467.863,- menjadi Rp11.302.418.432.963,- mengalami peningkatan sebesar Rp532.103.965.100,- atau 4,94% yang meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan dari Rp6.420.892.151.293,- menjadi Rp6.586.664.664.047,- mengalami peningkatan sebesar Rp165.772.512.754,- atau 2,58%;
2. Pendapatan Transfer mengalami perubahan dari Rp4.349.422.316.570,- menjadi Rp4.715.753.768.916,- mengalami peningkatan sebesar Rp366.331.452.346,- atau 8,42%;
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024 tidak teralokasikan.

Rincian perubahan Pendapatan Daerah tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1
Perubahan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2024

No	Uraian	APBD 2024		Bertambah/Berkurang	
		Murni	Perubahan	Rp	%
1	Pendapatan Asli Daerah				
	Pajak Daerah	5.061.651.201.188	5.168.983.486.267	107.332.285.079	2,12%
	Retribusi Daerah	393.470.465.818	413.533.091.681	20.062.625.863	5,10%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	222.512.698.894	190.042.923.841	-32.469.775.053	-14,59%
	Lain-lain PAD yang sah	743.257.785.393	814.105.162.258	70.847.376.865	9,53%
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	6.420.892.151.293	6.586.664.664.047	165.772.512.754	2,58%
2	Pendapatan Transfer				
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.727.367.254.000	2.727.367.254.000	0	0,00%
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.622.055.062.570	1.988.386.514.916	366.331.452.346	22,58%



No	Uraian	APBD 2024		Bertambah/Berkurang	
		Murni	Perubahan	Rp	%
	Jumlah Pendapatan Transfer	4.349.422.316.570	4.715.753.768.916	366.331.452.346	8,42%
	Jumlah Pendapatan Daerah	10.770.314.467.863	11.302.418.432.963	532.103.965.100	4,94%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2025

2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan dalam Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Perubahan RKPD Kota Surabaya tetap difokuskan untuk pencapaian tema pembangunan dalam RKPD Kota Surabaya tahun 2024 yaitu ***“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dengan Dukungan Kualitas Tata Kota, Sistem Transportasi Terpadu dan Berkelanjutan serta Peningkatan Sumber Daya Manusia”*** diprioritaskan untuk:

1. Peningkatan produktifitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata dan padat karya;
2. Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu;
3. Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar;
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
5. Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana;
7. Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 terkait Belanja Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, bahwa belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, kemampuan pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan publik.



Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024, mengalami perubahan dari Rp10.984.338.989.794,- menjadi Rp11.500.368.580.693,- bertambah sebesar Rp516.029.590.899,- atau 4,70%, yang meliputi:

1. Belanja Operasi mengalami perubahan dari Rp8.290.902.153.339,- menjadi Rp8.879.230.667.172,- bertambah sebesar Rp588.328.513.833,- atau 7,10%;
2. Belanja Modal mengalami perubahan dari Rp2.675.936.836.455,- menjadi Rp2.615.637.913.521,- berkurang sebesar Rp60.298.922.934,- atau -2,25%;
3. Belanja Tidak Terduga mengalami perubahan dari Rp17.000.000.000,- menjadi Rp5.500.000.000,- berkurang sebesar Rp11.500.000.000,- atau -67,65%;
4. Belanja Transfer mengalami perubahan dari Rp500.000.000,- menjadi nol, berkurang sebesar Rp500.000.000,- atau -100,00%;

Rincian perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Perubahan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2024

No	Uraian	APBD 2024		Bertambah/Berkurang	
		Murni	Perubahan	Rp	%
	Belanja Daerah				
1	Belanja Operasi				
	Belanja Pegawai	2.969.669.114.959	3.047.541.116.109	77.872.001.150	2,62%
	Belanja Barang dan Jasa	4.850.107.939.311	5.351.581.024.851	501.473.085.540	10,34%
	Belanja subsidi	-	30.517.436.557	30.517.436.557	-
	Belanja Hibah	442.862.699.069	444.198.089.655	1.335.390.586	0,30%
	Belanja Bantuan Sosial	28.262.400.000	5.393.000.000	-22.869.400.000	-80,92%
	Jumlah Belanja Operasi	8.290.902.153.339	8.879.230.667.172	588.328.513.833	7,10%
2	Belanja Modal				
	Belanja Modal Tanah	393.997.670.242	271.946.411.954	-122.051.258.288	-30,98%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	398.892.674.812	257.110.687.857	-141.781.986.955	-35,54%



No	Uraian	APBD 2024		Bertambah/Berkurang	
		Murni	Perubahan	Rp	%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	615.559.280.761	737.789.684.192	122.230.403.431	19,86%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.257.896.843.623	1.341.342.749.349	83.445.905.726	6,63%
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.590.367.017	7.448.380.169	-2.141.986.848	-22,33%
	Jumlah Belanja Modal	2.675.936.836.455	2.615.637.913.521	-60.298.922.934	-2,25%
3	Belanja Tidak Terduga				
	Belanja Tidak Terduga	17.000.000.000	5.500.000.000	-11.500.000.000	-67,65%
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	17.000.000.000	5.500.000.000	-11.500.000.000	-67,65%
4	Belanja Transfer				
	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	500.000.000	0	-500.000.000	-100,00%
	Jumlah Belanja Transfer	500.000.000	0	-500.000.000	-100,00%
	Jumlah Belanja Daerah	10.984.338.989.794	11.500.368.580.693	516.029.590.899	4,70%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2025

2.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan Kota Surabaya Tahun 2024 diperoleh dari SILPA dan diarahkan untuk penempatan modal/penyertaan modal bagi badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.



Sisa penyertaan modal Pemerintah Kota Surabaya kepada BUMD (sesuai dengan pencapaian tujuan pembangunan di tahun 2024) berdasarkan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya;
- 2) Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama dan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama.

Tabel 2.3
Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2024

Uraian	APBD 2024		Bertambah/Berkurang	
	Murni	Perubahan	Rp	%
Penerimaan Pembiayaan	223.954.003.318	207.879.629.117	-16.074.374.201	-7,18%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	223.954.003.318	207.879.629.117	-16.074.374.201	-7,18%
Pengeluaran Pembiayaan	9.929.481.387	9.929.481.387	0	0,00%
Penyertaan Modal	9.929.481.387	9.929.481.387	0	0,00%
Pembiayaan Daerah Neto	214.024.521.931	197.950.147.730	-16.074.374.201	-7,51%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2025



BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 diukur dari pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta dari pencapaian kinerja masing-masing kegiatan pada setiap urusan. Capaian kinerja masing-masing kegiatan pada setiap urusan, terbagi dalam 8 bagian, yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan, dan Unsur Pemerintahan Umum.

3.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai dengan Target Kinerja

3.1.1.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator tolok ukur keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya berkontraksi cukup signifikan menjadi -4,85 persen. Hal ini terjadi akibat pandemi Covid-19 yang terjadi di sepanjang tahun 2020. Pemulihan ekonomi dilakukan beriringan dengan penanggulangan pandemi Covid-19 yang membawa kinerja perekonomian Kota Surabaya kembali meningkat sehingga pada tahun 2021 tumbuh sebesar 4,29 persen. Pertumbuhan yang positif tersebut terus meningkat 6,51 persen di akhir tahun 2022. Selanjutnya, kondisi ekonomi global yang cepat berubah diiringi dengan tekanan yang tinggi berimbas terhadap seluruh perekonomian sehingga laju pertumbuhan ekonomi tumbuh sedikit lebih rendah dibanding sebelumnya yakni sebesar 5,70 persen di tahun 2023. Meski capaian pada tahun ini lebih lambat dibanding tahun 2022, perekonomian Kota Surabaya terjaga tumbuh stabil di atas 5 persen. Terkontraksinya perekonomian disebabkan oleh perubahan ekonomi yang dinamis disertai ketidakpastian berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan selama tahun 2023.

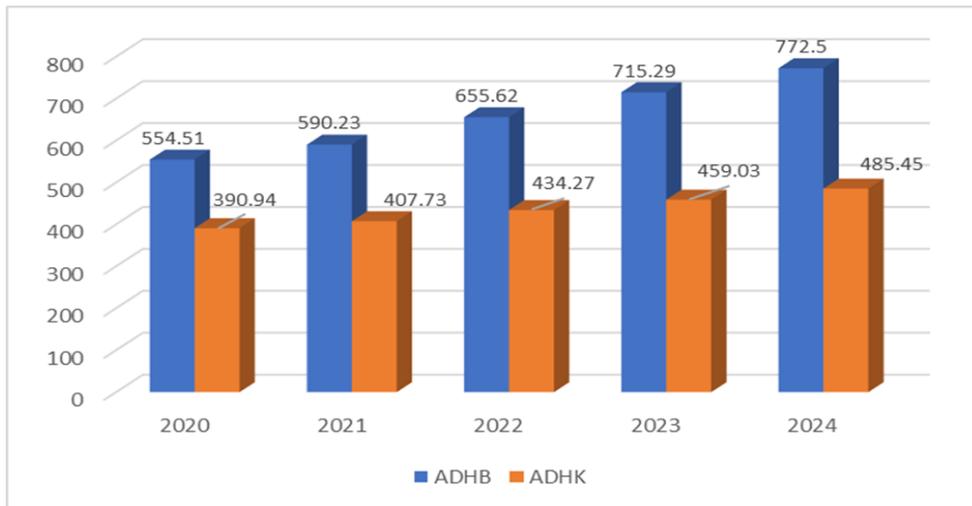
Kondisi yang sama dirasakan di tahun 2024 bahwa ekonomi tumbuh positif namun cenderung stagnan. Meski demikian, ekonomi Kota Surabaya menunjukkan ketahanan yang



kuat di tengah kondisi global yang sangat dinamis dan penuh tantangan. Hal itu ditunjukkan oleh capaian kinerja ekonomi secara kumulatif akhir tahun 2024 tumbuh positif mencapai 5,76 persen. Masih kuatnya performa ekonomi Kota Surabaya disebabkan oleh kebijakan fiskal yang lebih produktif. Selain itu, upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam menjaga daya beli masyarakat Kota Surabaya tetap tinggi dapat dikatakan berhasil. Upaya tersebut diselenggarakan dalam berbagai program, di antaranya adalah program peningkatan investasi melalui pelayanan investasi maupun perizinan, pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya, pemberdayaan UMKM, penyediaan akses pekerjaan, serta peningkatan pendapatan melalui program kampung dan lainnya.

Namun demikian, konstelasi global yang dinamis memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya Kota Surabaya, antara lain:

1. Perekonomian global yang melamban disertai ketidakpastiaan yang tinggi berdampak terhadap perekonomian domestik dari aspek perdagangan dan pasar keuangan. Perekonomian global yang melamban menunjukkan kinerja perekonomian kurang kondusif;
2. Masih tingginya risiko geopolitik berdampak terhadap kenaikan suku bunga bank sentral dan perkembangan pasar keuangan global di sepanjang tahun 2024 yang akhirnya menimbulkan fragmentasi pada pola perdagangan dunia dan memengaruhi aktivitas ekspor dan impor antarnegara;
3. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang didengungkan Presiden Terpilih Donald Trump, America First, berpotensi menyebabkan perubahan besar pada geopolitik dan perekonomian dunia ke depan seperti penerapan tarif yang tinggi, kebijakan imigrasi, serta kebijakan politik luar negeri;
4. Perubahan iklim akibat ketidakseimbangan ekosistem alam berdampak terhadap kenaikan harga pangan dan energi dunia yang mengancam ketahanan pangan dan energi secara global;
5. Perkembangan kecerdasan buatan dalam teknologi informasi yang berpotensi meningkatkan risiko kejahatan maya.



Gambar 3.1 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024

Sumber : BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang, diolah, 2025

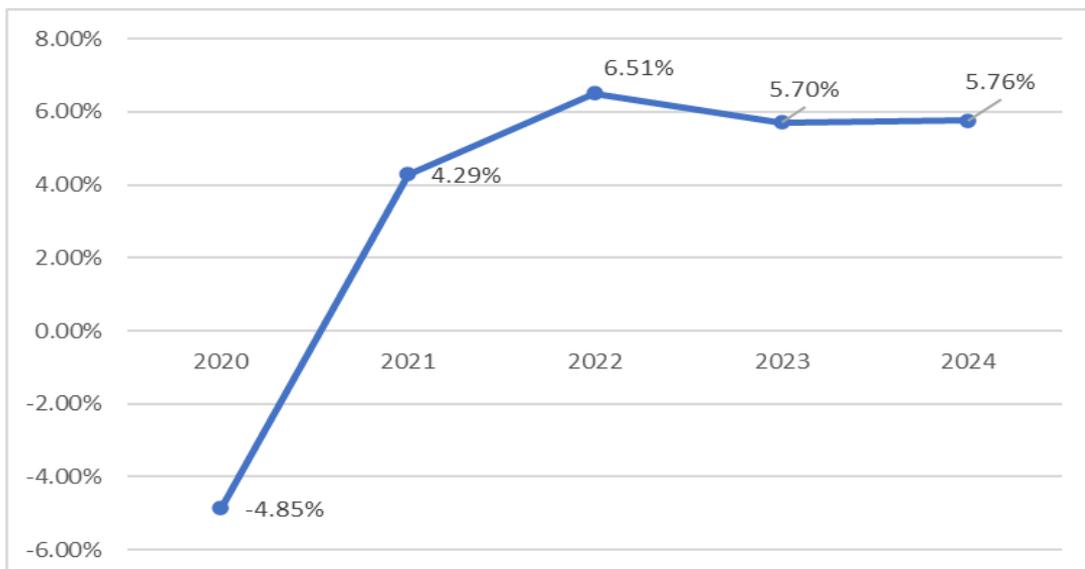
Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	6,3-6,7%	6,3 - 6,8%	2,96%	5,9% *)	5,6 - 6,1% **)
Realisasi	-4,85%	4,29%	6,51%	5,7%	5,76%
Capaian	-76,98%	68,10%	219,93%	96,61%	100,00%

*) Target tahun 2023 berdasarkan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2023

**) Target tahun 2024 berdasarkan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024

Sumber : BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang, diolah, 2025



Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 – 2024

Sumber : BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang, diolah, 2025



Capaian kinerja ekonomi Kota Surabaya di tahun 2024 menjadi salah satu indikator keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya. Dalam mewujudkan keberlanjutan pemulihan ekonomi, Pemerintah Kota Surabaya menyusun berbagai program antara lain:

1. Peningkatan investasi diutamakan melalui promosi, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal asing maupun penanaman modal domestik;
2. Integrasi pelayanan investasi dan perizinan yang dilakukan secara digital termasuk perluasan jaringan;
3. Peraturan Walikota Surabaya nomor 15 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Surabaya menyediakan perluasan layanan secara terpadu melalui sentra pelayanan publik agar dapat memberikan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman;
4. Pemerintah Kota Surabaya memberikan bantuan berupa fasilitasi penggunaan aset, memberikan bantuan pemenuhan sarana peralatan untuk berkegiatan usaha melalui Program Padat Karya di kecamatan-kecamatan dengan jumlah Rumah Padat Karya per 31 Desember 2024 sebanyak 106 lokasi yang tersebar di 26 kecamatan, dengan 23 kategori jenis usaha dan sebanyak 1.848 tenaga kerja yang terserap pada program Padat Karya. Tenaga kerja tersebut berasal dari keluarga miskin dan pra miskin yang menjadi sasaran intervensi dalam rangka pengentasan kemiskinan. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, rumah padat karya yang didirikan sebanyak 41 rumah di 21 kecamatan.
5. Penyediaan akses lowongan pekerjaan melalui program melalui job fair serta link and match ASSiK (Arek Suroboyo Siap Kerja) yang telah dilaksanakan sebanyak 5 kali di tahun 2024. Pada tahun 2024 pelaksanaan job fair diikuti 1.476 peserta/pengunjung, dan sebanyak 324 orang diterima dari event job fair;
6. Pemulihan sektor wisata melalui pengawasan kawasan wisata pada kawasan Kalimas, Ampel, Kya-kya, Kenjeran, Tunjungan, Romokalisari dan Kota Lama.
7. Pemberdayaan UMKM melalui fasilitasi pemasaran online pada e-Peken dengan UMKM yang tergabung sebanyak 4.705 (UMKM, Tokel dan SWK), fasilitasi toko daring pada eKatalog sebanyak 862 UMKM, serta pengelolaan Surabaya Kriya Gallery dan acara-acara yang melibatkan UMKM.

Wilayah Metropolitan (WM) Surabaya berperan terhadap perekonomian nasional sebesar 6,48 persen dan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah pembangunan utama di Indonesia, Kota Surabaya menempati posisi yang tertinggi dibandingkan dengan Jakarta, Makassar, dan Medan seperti pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Pembangunan Utama

Wilayah	Nilai ADHK (dalam Juta Rupiah)		Pertumbuhan Ekonomi
	2023	2024	
Wilayah Pembangunan Utama A (Kota Pusat Pertumbuhan: Medan)	173.445.690,00	182.242.590,00	5,07%
Wilayah Pembangunan Utama B (Kota Pusat Pertumbuhan: Jakarta)	2.050.465.970,00	2.151.041.330,00	4,96%
Wilayah Pembangunan Utama C (Kota Pusat Pertumbuhan: Surabaya)	459.030.719,58	485.448.887,46	5,76%
Wilayah Pembangunan Utama D (Kota Pusat Pertumbuhan: Makassar)	140.197.903,47	147.989.200,00	5,56%

Sumber: BPS, 2025

Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk peningkatan nilai pertumbuhan ekonomi di 2025, sebagai berikut :

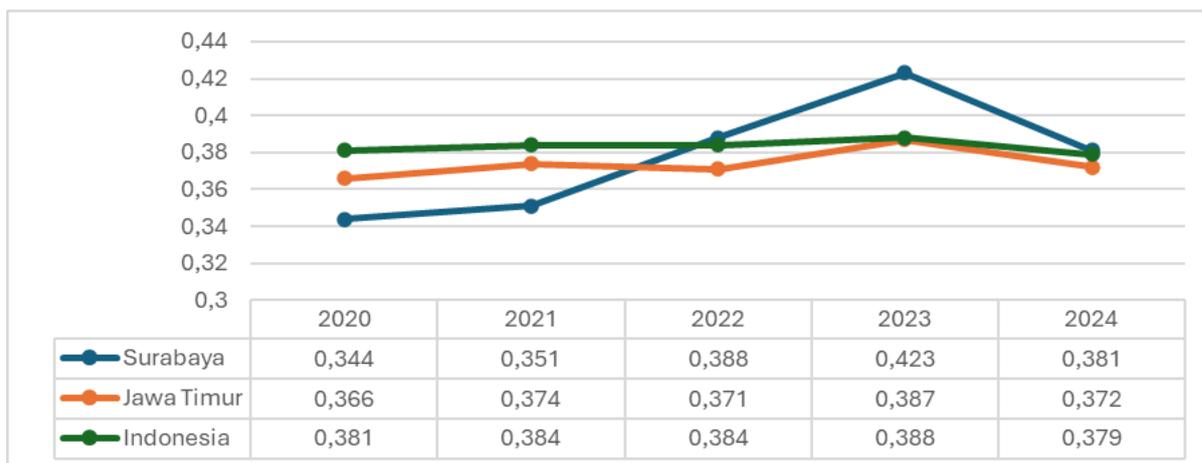
1. Menjaga inflasi agar tetap terkendali sehingga tercipta kepastian dan kondusifitas perekonomian. Di antaranya melalui optimalisasi peran tim pengendalian inflasi daerah (TPID);
2. Meningkatkan investasi melalui promosi, kemudahan investasi dan pelayanan perizinan non perizinan di Kota Surabaya;
3. Meningkatkan produktivitas bisnis dan sektor pelaku usaha melalui pemberian insentif/kelonggaran pajak maupun retribusi;
4. Mengingat pada tahun 2024 Wilayah Metropolitan (WM) Surabaya berperan terhadap perekonomian nasional. maka beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:
 - Perluasan jangkauan jaringan serat optik sebagai tulang punggung layanan digital yang berkualitas;
 - Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan angkutan umum massal yang terintegrasi;
 - Penanganan masalah perkotaan atau urbanisasi, seperti banjir, kemacetan, dan permukiman kumuh;
 - Penerapan ekonomi hijau dan pemenuhan kebutuhan energi sesuai dengan tahapan transisi energi berbasis sumber daya lokal dan implementasi transformasi digital serta
 - Penguatan keterkaitan rantai pasok antar wilayah.



5. Pengembangan UMKM melalui fasilitasi pemasaran contohnya e-Peken dan Surabaya Kriya Gallery, legalitas usaha melalui sertifikasi halal, fasilitasi tempat usaha, fasilitasi pemasaran, dan akses permodalan;
6. Keberlanjutan program padat karya untuk pengentasan kemiskinan dan meningkatkan golongan masyarakat berpendapatan rendah;
7. Meningkatkan sektor pariwisata melalui keberlanjutan program penataan kawasan wisata, melanjutkan revitalisasi sejumlah titik potensi wisata di Kota Surabaya sebagai langkah untuk menggerakkan titik pertumbuhan; kolaborasi dengan stakeholder pariwisata, usaha perjalanan wisata, pemandu wisata, hotel dan restoran, melakukan event-event dan promosi wisata dan sejarah serta melakukan pembentukan, pelatihan dan pembinaan kelompok sadar wisata. Selain itu dilakukan peningkatan skala penyelenggaraan event-event di Kota Surabaya sampai dengan tingkat regional/nasional sebagai upaya untuk meningkatkan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
8. Peningkatan penyediaan data dan informasi pendukung pertumbuhan ekonomi antara lain:
 - Jumlah tamu/Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel per hari, bulan;
 - Data pertanian dan perikanan yang mutakhir dan selaras dengan pelaporan tingkat Provinsi Jawa Timur dan kementerian terkait;
 - Data-data aktivitas e-commerce sebagai informasi aktivitas ekonomi digital seperti Gojek, e-Peken, Shopee, dsb.

B. Indeks Gini

Indeks Gini dipergunakan untuk mengukur ketimpangan/kesenjangan pengeluaran penduduk. Nilai Gini Rasio berada diantara 0 dan 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti terjadi pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti terdapat ketimpangan sempurna. Berdasarkan nilai gini rasio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini rasio 0,5 atau lebih, ketimpangan sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan ketimpangan rendah jika kurang dari 0,30.



Gambar 3.3 Indeks Gini Tahun 2020 – 2024

Sumber: BPS, 2025

Tabel 3.3 Indeks Gini Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	0,38-0,37	0,38-0,37	0,328	0,323	0,319-0,388 ^{*)}
Realisasi	0,344	0,351	0,388	0,423	0,381
Capaian	107,03%	105,14%	81,71%	69,04%	100,00%

^{*)} Target tahun 2024 berdasarkan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024

Sumber: BPS dan Bappedalitbang, diolah, 2025

Indeks gini Kota Surabaya pada tahun 2020 hingga tahun 2024 cenderung bergerak naik, terutama pada periode tahun 2022 hingga tahun 2023, meski masih berada di kategori ketimpangan “sedang”. Hal ini disebabkan diantaranya karena adanya fenomena *crazy rich*, yakni beberapa pengusaha dari kelompok pendapatan tinggi yang semakin sukses dalam bisnisnya, ditambah fakta adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi lebih banyak dipengaruhi oleh kelas penduduk yang berpendapatan tinggi, namun tidak terlalu dirasakan oleh penduduk yang berpendapatan menengah ke bawah.

Pada tahun 2024, gini ratio Kota Surabaya menurun menjadi 0,381, yaitu dalam kategori ketimpangan sedang berdasarkan kriteria Bank Dunia. Penurunan ini didukung oleh keberhasilan Program Kampung Madani dan Pancasila yang telah terlaksana di 57 kampung (RW) sejak Juni 2023 hingga Desember 2024. Program ini merupakan inisiatif Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang berlandaskan prinsip gotong royong dan keswadayaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Dengan demikian, pemerataan pengeluaran dapat terwujud di tingkat komunitas, sehingga manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.

Beberapa intervensi masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya di tahun 2024 dengan mengedepankan peningkatan sektor strategis berbasis potensi lokal, yakni:



1. Peningkatan pendapatan melalui program padat karya yang merupakan kegiatan multi-perangkat daerah yang di dalamnya terdapat pelatihan dan bimbingan teknis untuk keluarga miskin, pra miskin maupun miskin ekstrim yang dalam tahun 2024 terdapat 256 orang yang sudah dilatih dan disalurkan di rumah padat karya serta tempat kerja formal yang lain. Dari sisi permodalan, dilakukan juga pemberian bantuan melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surabaya serta akses permodalan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Surya Artha Utama (SAU) melalui program PUSPITA sejumlah 250 debitur;
2. Fasilitasi e-Peken sebagai upaya pemasaran pelaku usaha lokal yang terdiri dari usaha mikro binaan, toko kelontong yang terdaftar, dan pedagang sentra wisata kuliner dengan tujuan agar sektor usaha mikro tidak hanya didominasi oleh pedagang besar atau swalayan. Sampai dengan tahun 2024, terdapat 4.730 pelaku usaha lokal yang terdaftar di e-Peken;
3. Penyerapan tenaga kerja pada keluarga miskin dilakukan penyaluran ke sektor usaha lokal sejumlah 256 orang, dan untuk pencari kerja umum disalurkan pada program ASSiK (Arek Suroboyo Siap Kerja) yang di antara kegiatannya *job fair* serta *link and match* perusahaan sejumlah 5.595 pencari kerja.

Penurunan gini ratio pada tahun 2024 tidak hanya dipengaruhi oleh berbagai upaya strategis yang dilakukan, tetapi juga oleh berkurangnya pengeluaran konsumtif dan kebutuhan tersier di kalangan masyarakat berpendapatan menengah dan tinggi yang dialihkan menjadi pengeluaran untuk tabungan, baik dalam bentuk simpanan di bank, investasi, atau cadangan dana darurat sebagai langkah antisipatif terhadap risiko keuangan. Penurunan ini merupakan respons terhadap ketidakpastian ekonomi yang terjadi sepanjang tahun. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah meningkatnya suku bunga Bank Indonesia (BI) dari triwulan I hingga triwulan III 2024, serta kondisi geopolitik global yang mengganggu rantai pasokan dan menyebabkan volatilitas harga komoditas. Selain itu, pelemahan sektor manufaktur dan perdagangan global semakin memperkuat tren penurunan konsumsi di kelompok pendapatan atas.

Dalam rangka pengendalian ketimpangan di tahun 2025 pada khususnya, Pemerintah Kota Surabaya antara lain perlu:

1. Menjaga kestabilan harga kebutuhan barang pokok

Pada tahun 2024, sebagian besar pengeluaran penduduk pada kelompok pendapatan 40 persen terbawah masih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan. Kenaikan harga kebutuhan pokok akan berdampak menekan daya beli masyarakat kelompok bawah yang mendorong kelompok ini ke kondisi finansial yang semakin rentan.

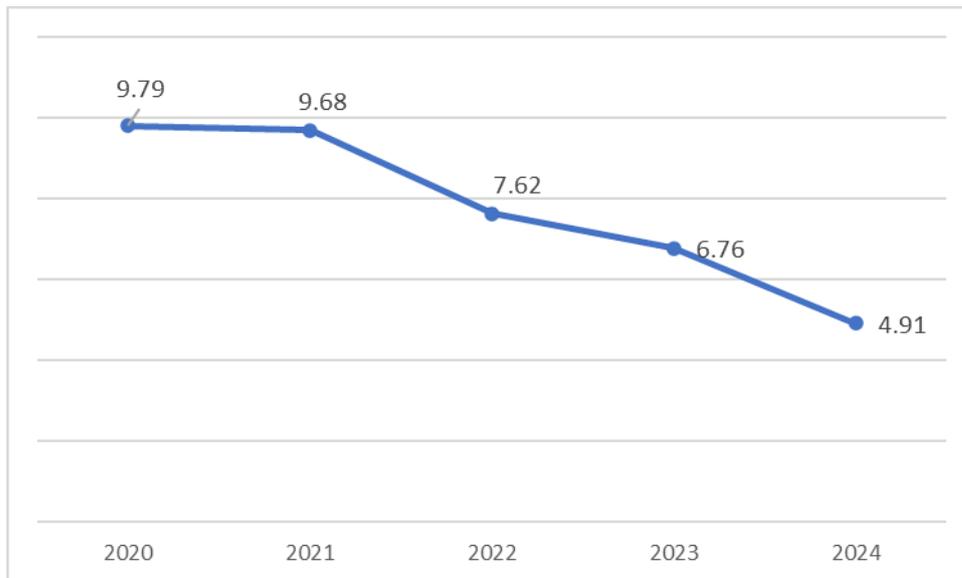


2. Mempertimbangkan subsidi pajak bagi UKM dan UMKM serta memberikan kredit ringan
Bantuan kredit ringan melalui lembaga perkreditan rakyat, merupakan salah satu intervensi penting dalam pengembangan dan pertumbuhan produktivitas dan peningkatan skala usaha pelaku usaha mikro kecil.
3. Pemberian Subsidi Tepat Sasaran
Pemberian subsidi dan bantuan sosial, termasuk jaminan sosial, diprioritaskan bagi seluruh masyarakat dengan pendapatan 40 persen terbawah untuk memastikan kelompok masyarakat ini dapat mengalokasikan pengeluaran pada sektor-sektor penting lainnya, misalnya tabungan.
4. Memperluas peluang pekerjaan untuk kelompok rentan
Program padat karya yang digalakkan oleh Pemerintah Kota merupakan langkah yang tepat, terutama di tengah tren perusahaan yang semakin beralih ke sistem padat modal akibat kenaikan Upah Minimum. Peralihan ini berisiko menggeser pekerja dengan keterampilan rendah, yang lebih rentan terhadap kehilangan pekerjaan. Dengan adanya program padat karya, peluang kerja bagi kelompok tersebut dapat tetap terjaga, sekaligus membantu menjaga stabilitas ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Pengembangan Program Padat Karya diarahkan pada monitoring dan evaluasi secara berkala atas keberlanjutan usaha masyarakat yang telah diintervensi.
5. Mengoptimalkan Kampung Madani dan Kampung Pancasila
Kampung Madani merupakan kampung atau rukun warga (RW) yang menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan dengan prinsip gotong royong, keswadayaan, dan kemandirian warga yang bertujuan untuk mewujudkan mekanisme gotong royong, mendorong warga untuk peduli kepada sesama, mendorong motivasi berusaha dan kemandirian, meningkatkan pendapatan penerima manfaat, mendukung terwujudnya kebahagiaan warga melalui terciptanya ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, dan pengentasan dari kemiskinan. Sedangkan Kampung Pancasila adalah Kampung Madani yang sudah berada pada level tertinggi (level 5), yaitu kampung yang tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan kampungnya sendiri tetapi juga mampu memberi manfaat bagi kampung lintas kelurahan lainnya. Saat ini (Maret 2025) telah terdapat 30 Kampung Madani dan 28 Kampung Pancasila. Upaya yang dilakukan di tahun 2025 dalam rangka perluasan program Kampung Madani dan Kampung Pancasila antara lain: 1) peningkatan kualitas pengelolaan data dan pelaporan intervensi, 2) perluasan jangkauan sosialisasi kepada warga sejahtera, serta 3) pelibatan sektor swasta/pengusaha.



C. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.



Gambar 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020 – 2024

Sumber: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang, diolah, 2025

Tabel 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	6,40 - 5,95%	6,30 - 5,90%	8,99 %	5,00%	4,50%
Realisasi	9,79%	9,68%	7,62%	6,76%	4,91%
Capaian	47,03%	46,35%	115,24%	64,80%	90,89%

Sumber: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang, diolah, 2025

Tabel 3.5 Komposisi Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024

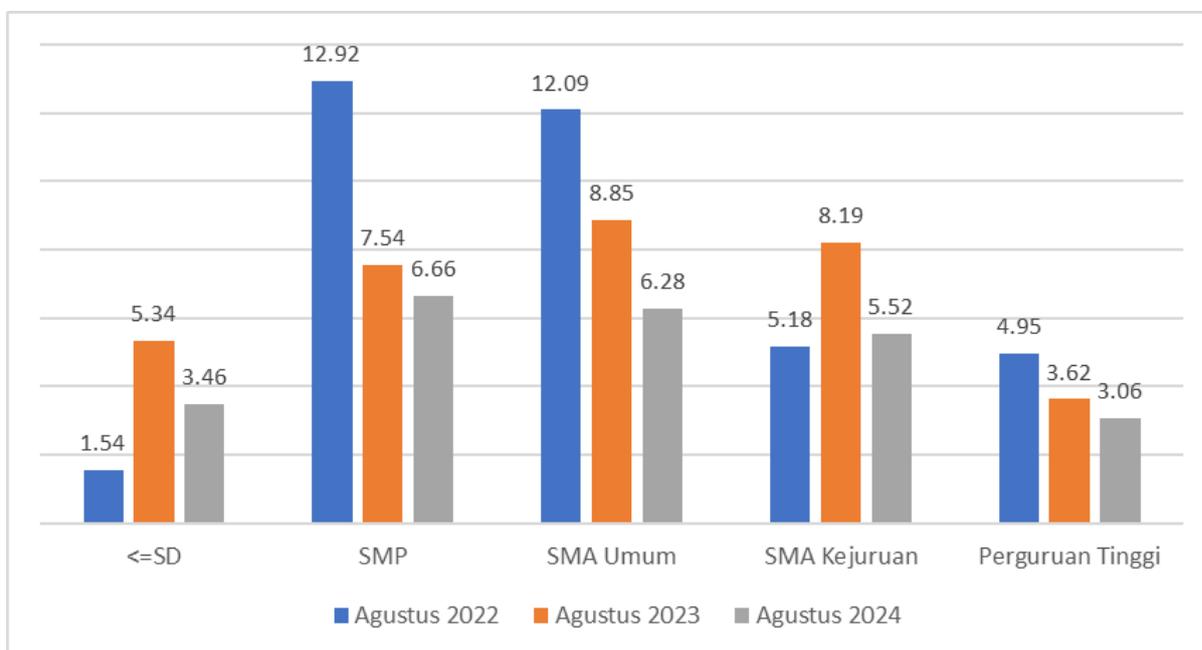
No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja	154.933	152.273	125.276	106.120	79.767
2	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	1.582.564	1.572.888	1.643.314	1.569.714	1.624.822
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	9,79	9,68	7,62	6,76	4,91

Sumber: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang, diolah, 2025

Pada tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Surabaya mencapai 9,79% akibat dampak pandemi Covid-19. Krisis tersebut menyebabkan berkurangnya penyerapan tenaga kerja, pemutusan hubungan kerja, serta pengurangan jam kerja. Namun, seiring meredanya pandemi, tingkat ketenagakerjaan di Surabaya menunjukkan tren positif. Pada tahun 2021, TPT turun menjadi 9,68%, mengalami penurunan sebesar 0,11% dari tahun



sebelumnya. Tren ini terus berlanjut dengan penurunan lebih signifikan pada 2022 sebesar 2,06%, sehingga TPT mencapai 7,62%. Konsistensi pemulihan ekonomi mendorong penurunan lebih lanjut di tahun 2023 menjadi 6,76%. Pada tahun 2024, TPT Surabaya mencapai 4,91% di mana merupakan TPT level terendah dalam periode 2001–2024, mencerminkan keberhasilan dalam penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat.



Gambar 3.5 TPT Menurut Pendidikan Tahun 2022 – 2024

Sumber: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang, diolah, 2025

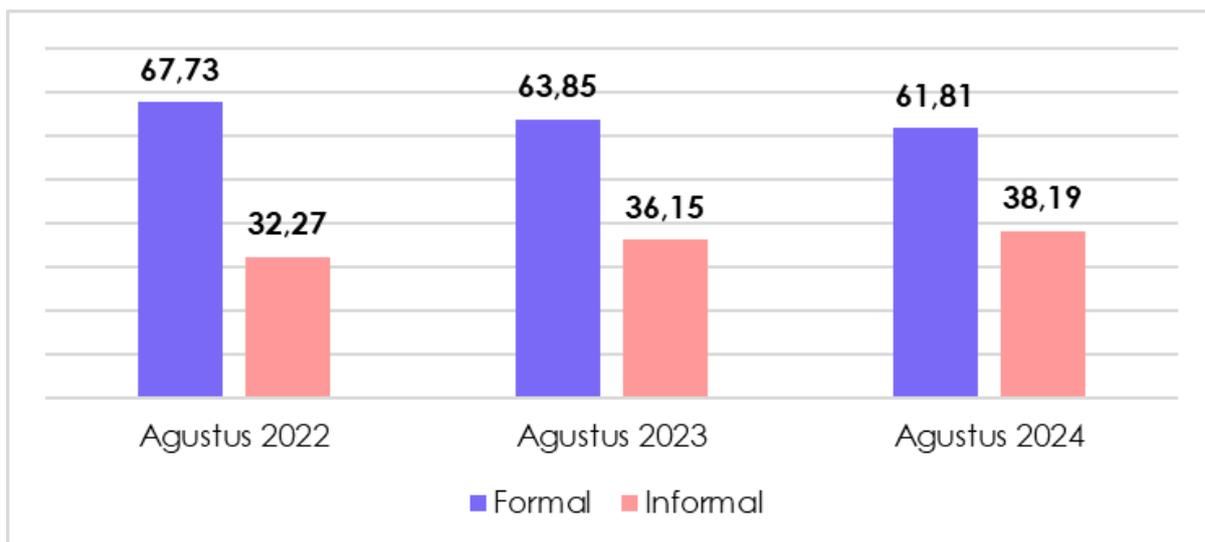
Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya sebagaimana ditampilkan dalam grafik di atas, tingkat pengangguran di semua jenjang pendidikan mengalami penurunan pada tahun 2024. Meskipun terjadi perbaikan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Surabaya pada tahun 2024 masih didominasi oleh penduduk yang memiliki tingkat pendidikan terakhir SMP dan SMA sederajat.

Kinerja penurunan TPT Kota Surabaya Tahun 2024 dapat tercapai salah satunya melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja baik di sektor formal dan informal, antara lain:

1. Peningkatan kompetensi bagi pencari kerja untuk menunjang keahlian dan siap bekerja, sebanyak 752 orang;
2. Sertifikasi keahlian bagi 703 orang di bidang administrasi perkantoran, akuntansi dasar, barista, kepariwisataan, teknologi dan informasi, desain grafis, fotografi, otomotif, *make-up artist*, perhotelan, *public relation* dan sebagainya;



3. Pemagangan 37 orang di 14 perusahaan untuk meningkatkan daya saing pencari kerja dengan tujuan meningkatkan penyerapan tenaga kerja formal;
4. Pemberian fasilitasi link and match melalui program ASSiK (Arek Suroboyo Siap Kerjo) yang dilaksanakan sebanyak 5 kali di tahun 2024. Selain itu melalui pelaksanaan job fair, sebanyak 1.476 peserta/pengunjung mengakses fasilitasi ini dan sebanyak 324 orang diterima di perusahaan/lembaga yang berpartisipasi dalam acara ini;
5. Pemberian bimbingan teknis/pelatihan berwirausaha sebanyak 274 orang melalui program Padat Karya, untuk mendorong para pencari kerja untuk berwirausaha;
6. Pemerintah Kota Surabaya memberikan bantuan berupa fasilitasi penggunaan aset, memberikan bantuan pemenuhan sarana peralatan untuk berkegiatan usaha melalui Program Padat Karya di kecamatan-kecamatan dengan jumlah Rumah Padat Karya per 31 Desember 2024 sebanyak 106 lokasi yang tersebar di 26 kecamatan, dengan 23 kategori jenis usaha dan sebanyak 1.848 tenaga kerja yang terserap pada program Padat Karya. Tenaga kerja tersebut berasal dari keluarga miskin dan pra miskin yang menjadi sasaran intervensi dalam rangka pengentasan kemiskinan. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, rumah padat karya yang didirikan sebanyak 41 rumah di 21 kecamatan.
7. Kemudahan akses pemasaran melalui e-Peken, Surabaya Kriya Galeri pada 2 (dua) lokasi di Siola dan MERR. Pada tahun 2024, sebanyak 72 UKM telah mengikuti 9 event pameran nasional sebagai upaya untuk memasarkan produk UKM Binaan Pemerintah Kota Surabaya;
8. Hibauan dan sosialisasi secara masif ke hotel, toko swalayan, mall dan perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja ber-KTP Surabaya yang dilakukan melalui hibauan surat yang dikirim oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, serta mengumpulkan Asosiasi Mall yang ada di Kota Surabaya.



Gambar 3. 6 Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kegiatan pada Pekerjaan Utama Tahun 2024 (persen)

Sumber: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang, diolah, 2025

Berdasarkan grafik di atas, proporsi penduduk bekerja masih didominasi pada sektor/kegiatan formal. Namun demikian, pada tahun 2024 persentase penduduk bekerja pada sektor/kegiatan informal meningkat sebesar 38,19%, yaitu sebanyak 590.041 orang. Selain itu, jumlah penduduk perempuan bekerja di sektor informal juga terus mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2022 sebesar 48,55% dan meningkat menjadi 51% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa program Padat Karya, termasuk bantuan pemberian bantuan pemenuhan sarana peralatan untuk berkegiatan usaha memberikan manfaat secara efektif bagi penduduk Kota Surabaya khususnya perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, penduduk bekerja di Surabaya didominasi oleh tingkat pendidikan ditamatkan SMA/ sederajat. Persentase penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan SD/ sederajat mengalami peningkatan yaitu 20,13% di tahun 2024, sedangkan penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan perguruan tinggi mengalami penurunan, di mana tahun 2023 sebesar 23,26% menjadi 21,99%.

TPT Kota Surabaya dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif dan terus menurun, namun kualitas dari tenaga kerja juga memerlukan perhatian dan peninjauan kembali terutama keterampilan/skill tenaga kerja, tenaga kerja di bidang industri kreatif serta UKM, karena tenaga kerja di bidang industri kreatif dan UKM sangat mudah terdampak situasi ekonomi.

Sedangkan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk menekan angka TPT di 2025 dan menjawab tantangan ketenagakerjaan di Kota Surabaya, melalui:

1. Pelatihan kewirausahaan, pelatihan kompetensi, sertifikasi dan keahlian bagi pencari kerja, termasuk didalamnya adalah pelatihan terhadap pelaku industri kreatif dan UKM yang



sangat rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Selain itu, Lembaga Pelatihan Kejuruan difokuskan pada pekerjaan/skill khusus dengan potensi pendapatan tinggi

2. Meningkatkan peluang/kesempatan kerja melalui pelaksanaan job fair secara masif, khususnya pada periode kelulusan pendidikan dan informasi terkait lowongan kerja. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga melaksanakan pemagangan bagi lulusan baru atau peserta pelatihan dengan tujuan agar lulusan baru/peserta pelatihan mendapatkan pengalaman terjun langsung di dunia kerja dan menambah keterampilan sehingga lebih mudah diterima di pasar kerja;
3. Melaksanakan bimbingan kepada balai penyaluran tenaga kerja. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk ikut serta melakukan pendampingan kepada pencari kerja dengan keahlian khusus tertentu;
4. Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan soft skill bagi pencari kerja, serta memberikan keterampilan dalam melakukan wawancara, membuat lamaran dan kiat-kiat komunikasi saat wawancara;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi (monev) rutin terhadap pelaksanaan intervensi tenaga kerja serta sistem pengumpulan data ketenagakerjaan Kota Surabaya untuk menjamin kualitas, akurasi dan relevansi data terjaga sehingga bisa dijadikan dasar pengambilan kebijakan terkait ketenagakerjaan di Kota Surabaya. Termasuk didalamnya adalah data profil lulusan perguruan tinggi maupun SMK di Kota Surabaya sehingga Pemerintah Kota Surabaya bisa memetakan dan mengukur kemampuan dan kompetensi lulusan ketika bersaing di pasar kerja;
6. Penyuluhan terhadap calon tenaga migran;
7. Kemudahan investasi yang diharapkan menyerap tenaga kerja lokal masyarakat Kota Surabaya;
8. Mencegah perselisihan perusahaan dan karyawan.

D. Persentase Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin digunakan sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Indikator tersebut diwakili oleh Angka Kemiskinan (P0) yang dirilis oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dalam menilai keberhasilan pengentasan kemiskinan di Kota Surabaya selama lima tahun terakhir. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pada pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai



ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.



Gambar 3.7 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020 – 2024

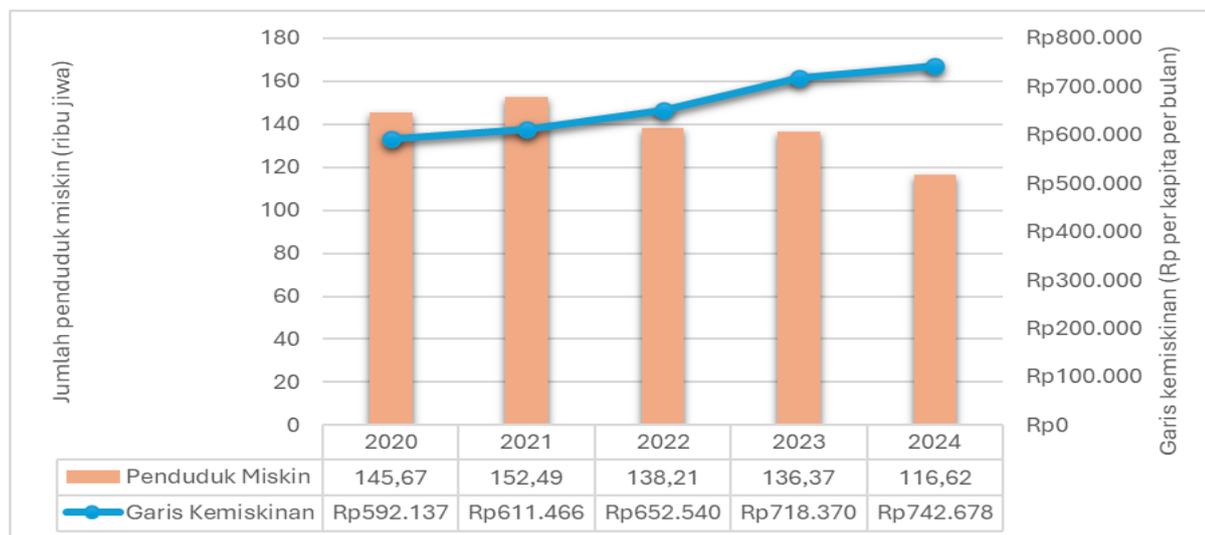
Sumber: BPS (Data Maret), 2024

Tabel 3.6 Persentase Penduduk Miskin Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	4,75 - 4,70%	4,71 - 4,60%	4,62%	4,31%	4,01%
Realisasi	5,02%	5,23%	4,72%	4,65%	3,96%
Capaian	94,32%	88,96%	97,84%	92,11%	101,25%

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2024

Persentase penduduk miskin Kota Surabaya, yang pada periode tahun 2020 sebesar 5,02 persen, berhasil diturunkan menjadi 3,96 persen di tahun 2024. Angka ini merupakan yang terendah ketiga di Jawa Timur setelah Kota Batu dan Kota Malang, bahkan telah melampaui angka sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Angka ini juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kemiskinan Jawa Timur dan Nasional.

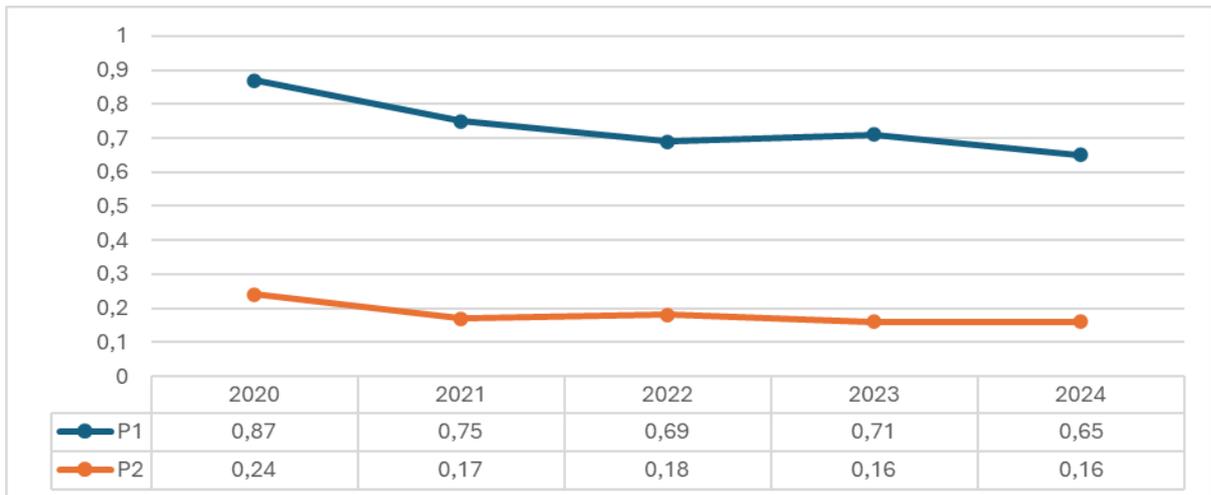


Gambar 3.8 Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024

Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan data BPS Kota Surabaya, jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya pada tahun 2020 hingga tahun 2024 cenderung menurun secara konsisten. Adapun kenaikan yang terjadi pada tahun 2021 disebabkan adanya aktivitas perekonomian yang masih belum pulih akibat dampak pandemi Covid-19. Sedangkan pada tahun 2024, penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 19,75 ribu jiwa dibandingkan tahun 2023. Penurunan jumlah penduduk miskin di tahun 2024 merupakan penurunan terbanyak sejak tahun 2009, di mana penduduk miskin berkurang 38,7 ribu jiwa di tahun 2009.

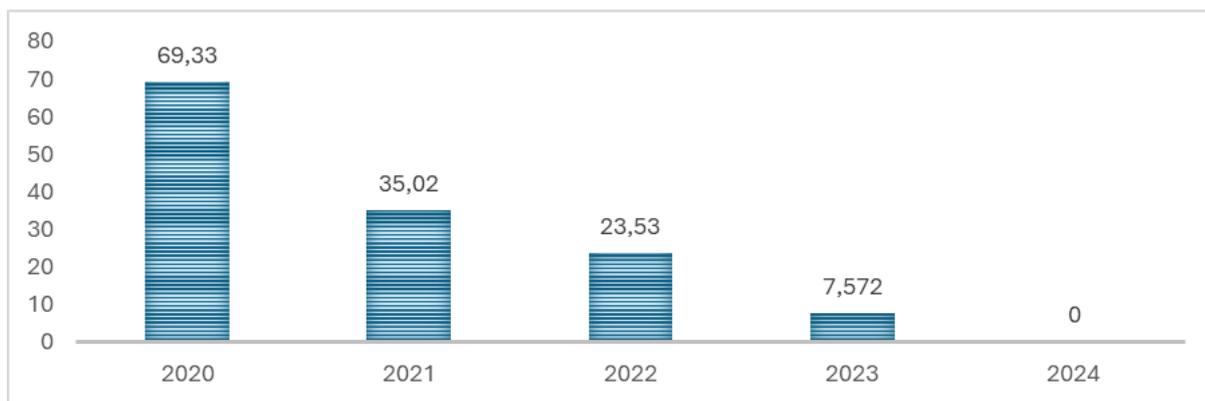
Ukuran lain yang perlu diperhatikan dalam masalah kemiskinan adalah tingkat kedalaman (P1) serta keparahan (P2) dari kemiskinan yang terjadi. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) atau *Poverty Gap Index* adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Hal ini juga berarti ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin menyempit. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) atau *Poverty Severity Index* menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks P2, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Upaya yang bertujuan memperkecil jumlah penduduk miskin, diharapkan juga bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.



Gambar 3.9 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024

Sumber: BPS, 2024

Pada periode tahun 2020-2024, Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan (P2) Kemiskinan di Kota Surabaya cenderung mengalami penurunan. Penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) ini menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Kota Surabaya, tidak terlalu besar. Begitu pula dengan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang menunjukkan bahwa rata-rata jarak tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Kota Surabaya, semakin mendekati Garis Kemiskinan. Terjadinya peningkatan nilai P1 pada tahun 2023 sebesar 0,02 poin disebabkan peningkatan inflasi yang cukup tinggi selama Maret 2022 hingga Maret 2023, sehingga tidak mampu mendorong penduduk yang sangat miskin untuk meningkatkan daya belinya. Berdasarkan hal ini, program bantuan sosial kemiskinan selanjutnya diarahkan untuk mengangkat keluarga miskin yang berada di status sangat miskin atau miskin ekstrem. Ditambah dengan fakta bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara grafik P1 dan P2 menguatkan bukti bahwa tidak adanya penduduk miskin ekstrem di Kota Surabaya pada akhir Tahun 2024.



Gambar 3.10 Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Tahun 2020 – 2024

Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan kebijakan Pemerintah, pengentasan kemiskinan dilakukan secara terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran melalui kolaborasi intervensi, sehingga kemiskinan ekstrem dapat mencapai tingkat 0% (nol persen) pada 2024. Kemiskinan ekstrem yang dimaksud mengacu pada definisi yang digunakan oleh Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu rumah tangga yang mendapatkan penghasilan sebesar 1,9 USD PPP (*Purchasing Power Parity*) per hari. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 69,33 ribu jiwa (2,39%), terus menurun secara signifikan di tahun-tahun berikutnya, hingga menjadi nol di akhir tahun 2024. Hal ini tidak lepas dari komitmen serius Pemerintah Kota Surabaya untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem, di antaranya dengan menetapkan data kemiskinan ekstrem setiap tahunnya melalui SK Walikota tentang Data Sasaran Keluarga Miskin Ekstrem Kota Surabaya. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga menciptakan berbagai inovasi untuk mengurangi angka kemiskinan melalui peningkatan pendapatan dan pemberdayaan ekonomi warga, antara lain pelatihan masyarakat (keluarga miskin) dalam program Padat Karya, inovasi e-peken dan pemberian bantuan modal.

Program intervensi pengurangan beban pengeluaran masyarakat yang dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya antara lain peningkatan cakupan *Universal Health Coverage* (UHC), pemberian beasiswa Pendidikan seperti beasiswa penghafal kitab suci, beasiswa pemuda tangguh, pembebasan ijazah, serta pemberian bantuan langsung kepada warga miskin melalui penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan), dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Di samping itu, Pemerintah Kota juga mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui Program Dandan Omah serta pengadaan jamban sehingga Kota Surabaya mencapai *Open Defecation Free* (ODF) 100% sejak tahun 2023. Sebagai upaya optimalisasi penyelesaian masalah kemiskinan secara terpadu, dilakukan



perbaikan data yang dilakukan melalui kegiatan musyawarah kelurahan (muskel) yang dilakukan setiap bulan dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Walikota.

Masyarakat dan lembaga/instansi eksternal dan swasta juga turut berpartisipasi dalam pemberian bantuan yang sangat berperan dalam mengurangi beban keluarga miskin. Pada tahun 2024, terdapat bantuan dari Yayasan Mawar Sharon Peduli Surabaya, Badan Amil Zakat (Baznas) Kota Surabaya, dan Vasa Hotel Surabaya yang bermitra dengan Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial untuk menyalurkan bantuan berupa bahan pokok (sembako) bagi keluarga miskin.

Beberapa rekomendasi yang perlu menjadi catatan Pemerintah Kota Surabaya dalam peningkatan penanganan kemiskinan di tahun 2025 antara lain:

1. Peningkatan pelatihan keterampilan untuk sektor yang lebih produktif untuk mencapai produktivitas yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih baik.
2. Memberikan bantuan keuangan dan insentif bagi usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan produktivitas, salah satunya melalui adopsi teknologi baru agar lebih efisien;
3. Perluasan dan pengembangan program jaminan sosial yang inklusif untuk menjangkau lebih banyak penduduk miskin dan rentan miskin;
4. Peningkatan verifikasi atas data registrasi penduduk serta integrasi data-data administratif untuk mendapat gambaran yang lebih lengkap untuk memastikan program intervensi tepat sasaran;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program padat karya secara rutin untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan manfaat serta kontribusinya terhadap penurunan kemiskinan dan pengangguran.

E. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan utamanya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator



Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Sedangkan indikator Standar hidup yang layak digambarkan oleh Pengeluaran Per Kapita per tahun.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 atau yang disebut SP2020, terdapat pemutakhiran nilai IPM menyesuaikan data dasar jumlah penduduk sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

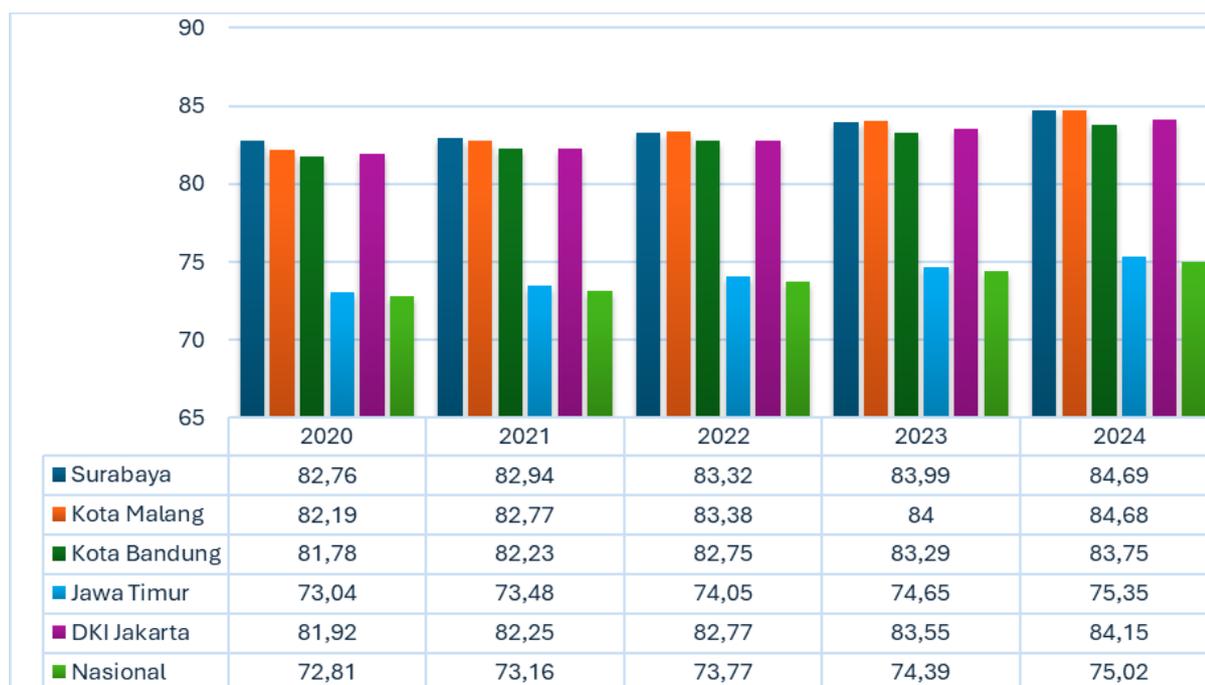
Tabel 3.7 Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	80-81	81-82	82,50	82,50	84,2 ^{**})
Realisasi	82,76	82,94	83,32	83,99	84,69
Capaian	102,17%	101,15%	100,99%	101,81%	100,58%

***Target tahun 2024 berdasarkan Perubahan RKPD 2024.*

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, IPM tercatat sebesar 82,76 dan terus meningkat hingga mencapai 84,69 pada tahun 2024, dengan rata-rata kenaikan 0,58 persen per tahun. Sepanjang periode tersebut, IPM Surabaya tetap berada dalam kategori **“sangat tinggi”** karena nilainya selalu melebihi 80.



Gambar 3.11 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020 – 2024

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2024

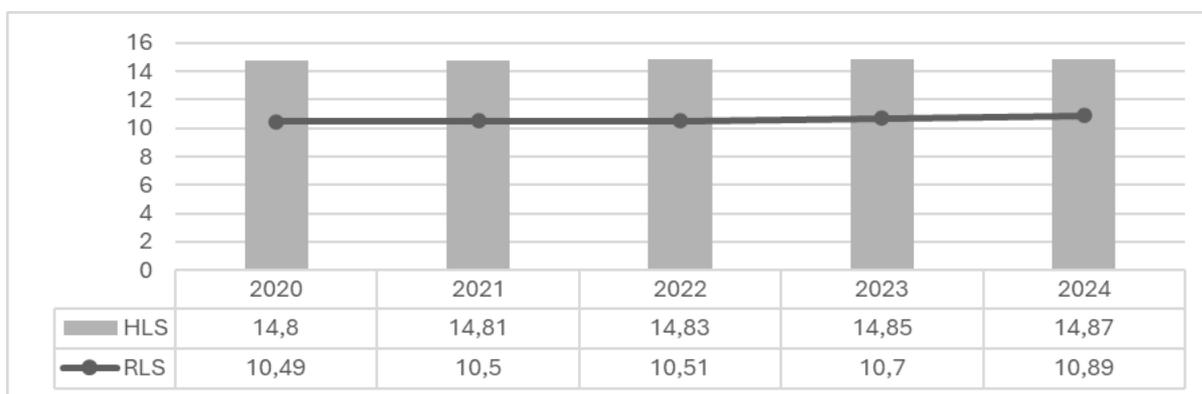
Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya masih berada di atas capaian Nasional dan Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta serta Kota Bandung, bahkan Kota Malang meski hanya selisih 0,01 dengan keunggulan pada dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat



yang diwakili indikator Usia Harapan Hidup (UHH), serta dimensi Standar Hidup Layak yang ditentukan melalui indikator Pengeluaran Per Kapita per tahun.

E.1 Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas dan Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas. Lebih lanjut, RLS menggambarkan rata-rata jumlah tahun belajar yang ditempuh oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menyelesaikan pendidikan formal, tidak termasuk tahun yang diulang. Sedangkan HLS menunjukkan peluang penduduk untuk menempuh pendidikan formal pada usia tertentu, dengan asumsi bahwa peluang anak untuk bersekolah di masa mendatang sama dengan peluang penduduk mengakses pendidikan saat ini.



Gambar 3.12 Perbandingan Indeks Pendidikan Kota di Indonesia Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Jawa Timur, 2024

Pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa RLS Kota Surabaya Tahun 2024 sebesar 10,89 tahun, meningkat sebesar 0,19 tahun (1,78 persen) dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan RLS tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2024 (0,94 persen). Dengan kata lain, penduduk Kota Surabaya berusia 25 tahun ke atas menempuh dan menyelesaikan pendidikan formal sebanyak 10,89 tahun belajar atau setara kelas XI SMA/MA/SMK. Kondisi RLS Kota Surabaya masih dinilai baik dari sisi pertumbuhan, namun apabila dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Timur, angka RLS dan HLS di Kota Surabaya masih tertinggal dari Kota Malang dengan HLS tertinggi di Jawa Timur sebesar 15,79 tahun dan Kota Madiun dengan RLS tertinggi di Jawa Timur sebesar 12,11 tahun.



Tabel 3.8 Perbandingan Indeks Pendidikan Kota di Indonesia Tahun 2024

Nama Kota	Angka RLS	Angka HLS
Kota Surabaya	10,89	14,87
Kota Malang	11,14	15,79
Kota Semarang	11,05	15,57
Kota Bandung	11,07	14,25
Provinsi Jawa Timur	8,28	13,43
Provinsi DKI Jakarta	11,49	13,51
Nasional	8,85	13,21

Sumber: BPS, 2024

Dari segi penduduk usia sekolah (7-24 tahun), sebanyak 24,27% penduduk Kota Surabaya pada kelompok usia ini sudah tidak bersekolah lagi. Sementara itu, jika melihat dari perspektif penduduk usia kerja (di atas 15 tahun), hanya 20,05% penduduk usia 15 tahun ke atas yang menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi. Di sisi lain, hanya 6,51% penduduk pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang berhasil menamatkan pendidikan perguruan tinggi. Kondisi ini dipengaruhi antara lain kondisi Kota Surabaya sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur dengan tuntutan ekonomi yang tinggi membuat masyarakatnya lebih berminat untuk bekerja atau berwirausaha daripada menempuh pendidikan tinggi. Selain itu juga masih terdapat banyak penduduk usia 25 tahun ke atas yang tidak melakukan pemutakhiran data dan informasi kependudukan secara aktif, khususnya informasi tingkat pendidikan, sehingga memengaruhi angka RLS.

Untuk Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk Kota Surabaya mencapai 14,87 tahun (setingkat Diploma III) atau meningkat 0,02 poin dibanding tahun 2023 yaitu 14,85. Capaian HLS tersebut tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota Surabaya antara lain:

1. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada jenjang pendidikan SD dan SMP;
2. Pemerataan dan pengembangan akses pendidikan, melalui penyelenggaraan Sekolah Inklusi pada 1 PAUD, 284 SDN dan 63 SMPN, pengembangan PAUD Holistik Integratif, program Kejar Paket dengan muatan pendidikan vokasi, pelaksanaan Sinau dan Ngaji Bareng Arek Suroboyo yang diselenggarakan di 234 balai RW, serta Program Tebus Ijazah bagi 631 siswa jenjang SMA/SMK/MA dengan dukungan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Surabaya;
3. Mendorong program Orang Tua Asuh, yaitu intervensi penanggungungan biaya pendidikan bagi anak asuh yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin dengan harapan dapat mengangkat derajat keluarganya menjadi keluar dari kemiskinan;



4. Pemberian bantuan seragam sekolah kepada 48.179 siswa setingkat SD dan SMP baik negeri maupun swasta di Kota Surabaya, yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin serta bekerja sama dengan pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pemberian beasiswa bagi 6.633 siswa SMP dari keluarga miskin dan rentan miskin;
5. Pemberian beasiswa bagi penghafal kitab suci sebanyak 1.456 siswa yang meningkat dari tahun sebelumnya, sebanyak 1.339 siswa, serta Program Surabaya Mengajar yang melibatkan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi yang ada di Kota Surabaya;
6. Sebagai upaya meningkatkan akses pada pendidikan tinggi, telah diberikan beasiswa Pemuda Tangguh yang diperuntukkan kepada siswa-siswi SMA/MA/SMK sebanyak 19.071 orang (tahun sebelumnya 20.356 siswa) dan mahasiswa sebanyak 3.502 orang (tahun sebelumnya 3.196 mahasiswa).

**Tabel 3.9 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya
Tahun 2020 – 2024**

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
APK PAUD (%)	90,33	91,81	76,11	77,58	77,39
APK SD/MI (%)	104,30	106,90	106,37	106,40	104,50
APK SMP/MTs (%)	98,93	110,64	108,47	108,51	105,89

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 2024

Selain mendorong akses terhadap pendidikan hingga tingkat pendidikan tinggi, Pemerintah Kota Surabaya juga mendorong peningkatan partisipasi pendidikan dimulai dari usia dini hingga SMP atau sederajat melalui capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, SD atau sederajat, maupun SMP atau sederajat, serta dengan tetap proaktif dalam menyekolahkan kembali sebanyak 195 anak yang sempat putus sekolah di tahun 2024. Peningkatan kualitas bagi 11.715 guru PAUD, SD, SMP, maupun PKBM juga didorong melalui peningkatan kinerja, sertifikasi, serta pemetaan dan pemerataan penugasan guru. Dalam hal peningkatan kualitas lembaga pendidikan, sebanyak 459 SD/MI/sederajat dan 226 SMP/MTs/sederajat Kota Surabaya telah berakreditasi A di tahun 2024. Pemerintah Kota Surabaya terus mendorong lembaga pendidikan baik PAUD, SD/sederajat, dan SMP/sederajat untuk mengikuti dan meningkatkan nilai akreditasi, salah satunya melalui partisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM).

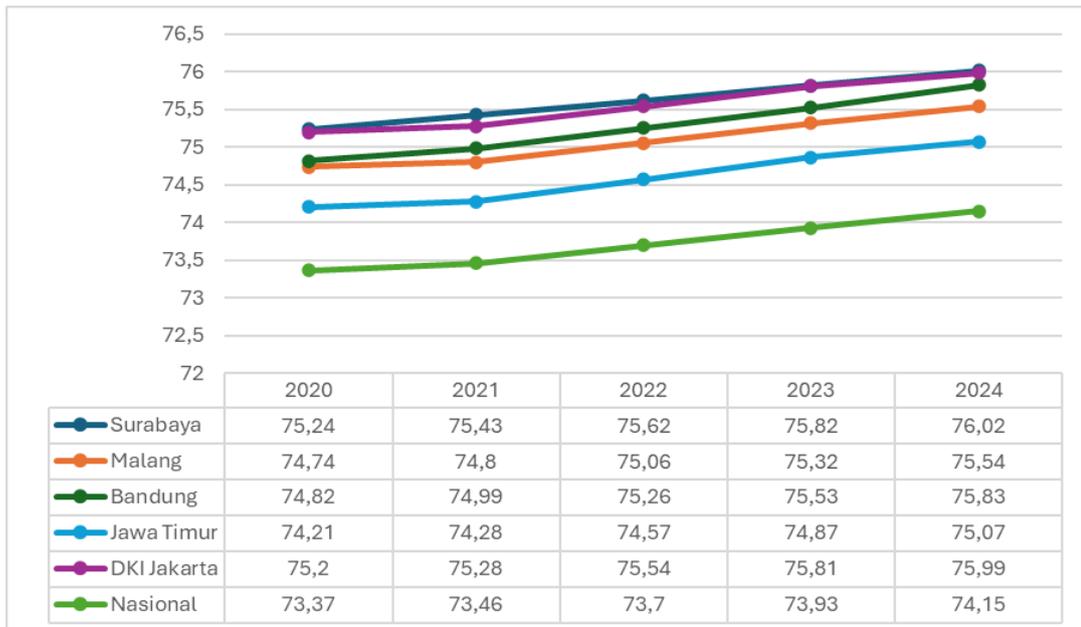


Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya dalam peningkatan akses dan kualitas pendidikan di tahun 2025 antara lain:

1. Mendorong dan meningkatkan akses bagi penduduk usia 25 tahun ke atas untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi untuk peningkatan RLS;
2. Mendorong penuntasan Kejar Paket A, B, C bagi penduduk usia 25 tahun ke atas;
3. Meningkatkan jumlah fasilitas pendidikan olahraga/hobi;
4. Menyiapkan kurikulum untuk siswa siap bekerja dengan memasukkan pelajaran keterampilan modern;
5. Meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh anak dari keluarga tidak mampu;
6. Meningkatkan penyediaan data dan informasi antara lain 1) penduduk usia sekolah yang putus sekolah; 2) penduduk yang bersekolah di luar Kota Surabaya; 3) data intervensi terpadu terutama bagi penduduk usia 7-23 tahun; serta 4) tracing pendidikan yang dijalani oleh lulusan sebagai upaya pemutakhiran data tingkat pendidikan penduduk;
7. Sinkronisasi dengan data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, *Check in* Warga serta sinkronisasi data siswa berasal dari keluarga miskin dan pramiskin pada Dinas Sosial untuk menghasilkan intervensi yang lebih tepat sasaran;
8. Peningkatan intensitas dan cakupan penyebarluasan informasi beasiswa baik yang berasal dari Pemerintah Kota maupun pihak swasta melalui media sosial juga terus dilakukan dengan tujuan peningkatan akses terhadap pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya.

E.2 Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir atau Angka Harapan Hidup (AHH). AHH adalah perkiraan rata-rata jumlah tahun hidup bayi yang baru lahir yang diharapkan, dengan asumsi bahwa pola tingkat kematian menurut umur tidak berubah sepanjang hidupnya.



Gambar 3.13 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota di Indonesia Tahun 2020-2024

Sumber: BPS (Hasil Long Form SP2020), 2024

UHH penduduk Kota Surabaya di tahun 2024 mencapai 76,02 tahun, meningkat 0,2 tahun dibanding tahun sebelumnya yaitu 75,82 tahun. Pada tahun 2024, UHH Kota Surabaya tertinggi di Provinsi Jawa timur diikuti oleh Kota Mojokerto sebesar 75,99 dan Kota Kediri sebesar 75,94. Hal ini dicapai melalui komitmen penjaminan kesehatan bagi penduduk Kota Surabaya melalui *Universal Health Coverage* (UHC), yang keberhasilannya tidak lepas dari upaya koordinasi, komunikasi, serta kerja sama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan bidang Kesehatan di Kota Surabaya. Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan pada Tahun 2024 sebanyak 1.109.014 jiwa (PBI APBD) dan sebanyak 1.888.004 jiwa (Jaminan Kesehatan Kepesertaan Lainnya), sehingga capaian pada Tahun 2024 mencapai 99,3%, di mana angka ini telah memenuhi ambang batas minimal UHC BPJS Kesehatan yakni 98%.

Pada tahun 2024, program intervensi di bidang kesehatan Kota Surabaya masih memfokuskan perhatian pada ibu dan anak. Angka Kematian Ibu (AKI) terus mengalami penurunan, mencapai 30,38 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2024. Angka kematian bayi juga berhasil diturunkan menjadi 4,03 per 1.000 kelahiran hidup. Pada akhir tahun 2024, balita *stunting* aktif tercatat sebanyak 301 balita. Meskipun terdapat sedikit peningkatan pada kasus balita *stunting* aktif di akhir tahun ini, hal ini disebabkan oleh adanya tambahan balita *stunting* dengan penyakit penyerta yang sulit disembuhkan. Balita tersebut berasal dari luar Kota Surabaya dan tidak terdeteksi sejak awal. Namun, secara keseluruhan, jumlah kumulatif balita *stunting* mengalami penurunan. Pada tahun 2023, terdapat 982 balita yang



teridentifikasi sebagai balita *stunting* aktif dan telah lulus *stunting*, sedangkan pada tahun 2024 jumlahnya menurun menjadi 858 balita.

Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan komitmen yang kuat dalam menangani *stunting*, terbukti dengan berbagai intervensi yang telah dilakukan. Sebanyak 858 balita *stunting* mendapat intervensi, 109 balita dengan gizi buruk mendapatkan perhatian khusus, serta pendampingan untuk 15.643 ibu hamil. Selain itu, program penyediaan nutrisi dan vitamin yang memadai terus dilaksanakan, seperti pemberian tablet tambah darah kepada 106.729 orang remaja putri dan 37.390 ibu hamil. Makanan tambahan juga diberikan kepada ibu hamil dengan kondisi Kurang Energi Kalori (KEK), yang mencakup 2.720 orang. Tak hanya itu, pemberian *Community Feeding Center* (CFC) atau PKMK (Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus) untuk balita yang mengalami malnutrisi, seperti *stunting*, *prastunting*, dan gizi buruk, mencapai 1.941 balita.

Pemerintah Kota Surabaya juga terus mengupayakan penyediaan sarana prasarana kesehatan yang memadai pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah, pembangunan sarana kesehatan lingkungan dan air bersih serta peningkatan kegiatan promotif dan preventif perilaku hidup bersih dan sehat melalui penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Surabaya telah meresmikan pembangunan rumah sakit baru yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Eka Candrarini di wilayah Surabaya Timur sebagai komitmen pemerintah dalam pemerataan fasilitas kesehatan (khususnya RSUD) di seluruh wilayah di Kota Surabaya. RSUD Eka Candrarini dibangun di atas lahan seluas 17.700 m² dengan layanan unggulan “Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak”, yang memiliki 155 tempat tidur. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya terus berinovasi dengan program 1 Puskesmas 1 Pediatri (dokter anak) serta 1 Puskesmas 1 Obgyn (dokter kandungan) untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak. Pemerintah Kota Surabaya juga mengimplementasikan integrasi layanan primer (ILP) di 63 puskesmas, 153 puskesmas pembantu serta 939 posyandu keluarga di Kota Surabaya.

Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan di tahun 2025, Pemerintah Kota Surabaya perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

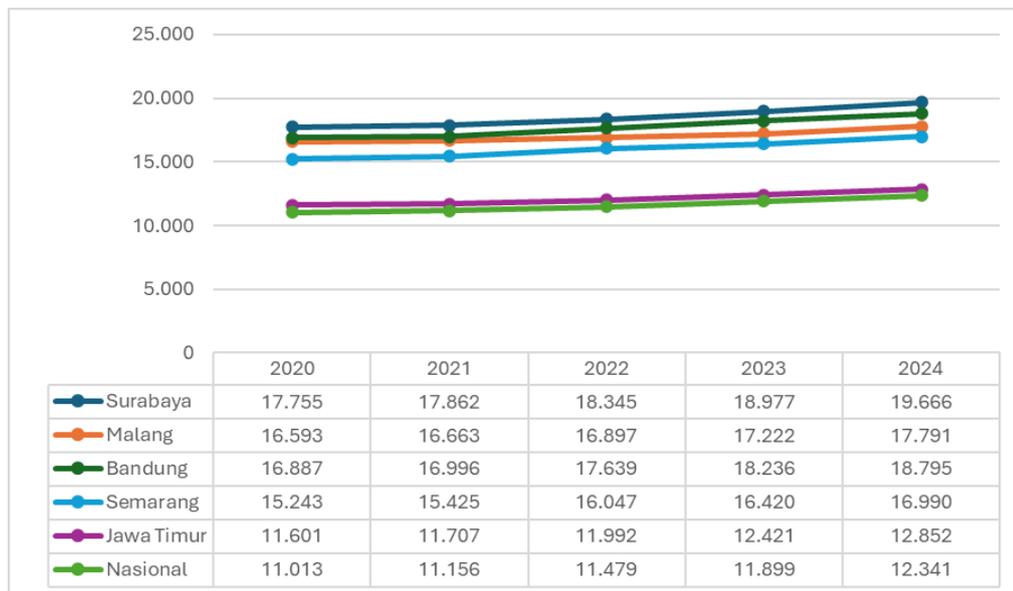
1. Optimalisasi program-program intervensi yang bertujuan pengurangan usia perkawinan pertama;
2. Peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan untuk menurunkan Angka Kesakitan, antara lain melalui penggunaan material rumah tinggal yang standar dan layak, peningkatan akses dan kualitas air dan sanitasi layak, serta memastikan luas lantai minimal tempat tinggal memenuhi standar;



3. Pelaksanaan imunisasi lengkap bagi balita;
4. Pemutakhiran data yang cepat dan terkini, terutama terkait kematian penduduk;
5. Peningkatan ketersediaan dan kualitas pemutakhiran data dan informasi terkait:
 - a. Usia perkawinan pertama dan pelayanan/edukasi/intervensi untuk calon pasangan;
 - b. Ibu hamil, bayi dan balita pada seluruh faskes beserta cakupan pelayanan; cakupan balita mendapatkan ASI, serta data penduduk rawat inap dalam setahun terakhir;
 - c. Penduduk yang telah mendapatkan intervensi perbaikan rumah tidak layak huni serta
 - d. Melakukan Identifikasi wilayah Kota Surabaya yang menjadi prioritas intervensi, khususnya pada isu kesehatan dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).

E.3 Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi standar hidup layak mengukur tingkat pendapatan atau kemampuan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Indikator yang digunakan adalah pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar harga konstan 2010) yang disesuaikan. Pengeluaran ini mencerminkan kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan untuk hidup layak.



Gambar 3.14 Pengeluaran Per Kapita Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2024

Pada tahun 2024, Pengeluaran per Kapita per Tahun mencapai Rp19.666.000 atau meningkat Rp689.000 dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp18.977.000 per tahun. Pengeluaran per kapita Kota Surabaya merupakan yang tertinggi di Provinsi Jawa Timur, diikuti Kota Malang, Kota Madiun dan Kabupaten Sidoarjo masing-masing sebesar Rp. 17,79 juta, Rp. 17,52 juta dan Rp. 15,71 juta. Hal tersebut diperkuat dengan nilai inflasi



sampai dengan akhir tahun 2024 yang hanya sebesar 1,38%, menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Kota Surabaya semakin membaik.

Meningkatnya daya beli masyarakat yang seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, juga tidak lepas dari upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain pemberdayaan UMKM melalui fasilitasi pemasaran *online* pada e-Peken di mana sampai dengan tahun 2024 sebanyak 4.730 UMKM, pelaku usaha toko kelontong dan pada sentra wisata kuliner telah bergabung; fasilitasi toko daring pada eKatalog sebanyak 864 UMKM, serta pengelolaan Surabaya Kriya Gallery dan acara-acara yang melibatkan UMKM. Selain itu Pemerintah Kota Surabaya juga menjalankan program Padat Karya yang dilaksanakan di 106 lokasi yang tersebar di 21 kecamatan, dengan 23 kategori jenis usaha dan sebanyak 1.848 tenaga kerja yang terserap pada program Padat Karya. Pemerintah Kota Surabaya juga mengadakan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi, membuka peluang kerja melalui aplikasi Arek Suroboyo Siap Kerja (ASSiK), menyelenggarakan acara *job fair* secara rutin dan melibatkan partisipasi perusahaan swasta untuk penyerapan tenaga kerja. *Rebranding* destinasi wisata baru juga dilakukan pada kawasan Wisata Kota Lama dan menyelenggarakan lebih dari 12 *event* untuk meningkatkan omset dari para pelaku ekonomi.

Upaya peningkatan standar hidup layak bagi penduduk Kota Surabaya terus dilakukan dan berkembang. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya di tahun 2025 antara lain:

1. Peningkatan akses dan kualitas ekosistem industri kreatif serta mendorong produktivitas industri kreatif;
2. Melakukan pemeliharaan dan mendorong keberlangsungan sentra wisata kuliner;
3. Memberikan perhatian khusus pada anak, lansia dan difabel;
4. Melanjutkan program bazar murah, operasi pasar, dan pengendalian harga sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat serta
5. Peningkatan ketersediaan data dan informasi antara lain 1) aktivitas e-commerce 2) event bazar murah yang dilaksanakan pihak swasta dan 3) potensi kerawanan pangan yang dialami penduduk.

F. Indeks Harmoni Sosial

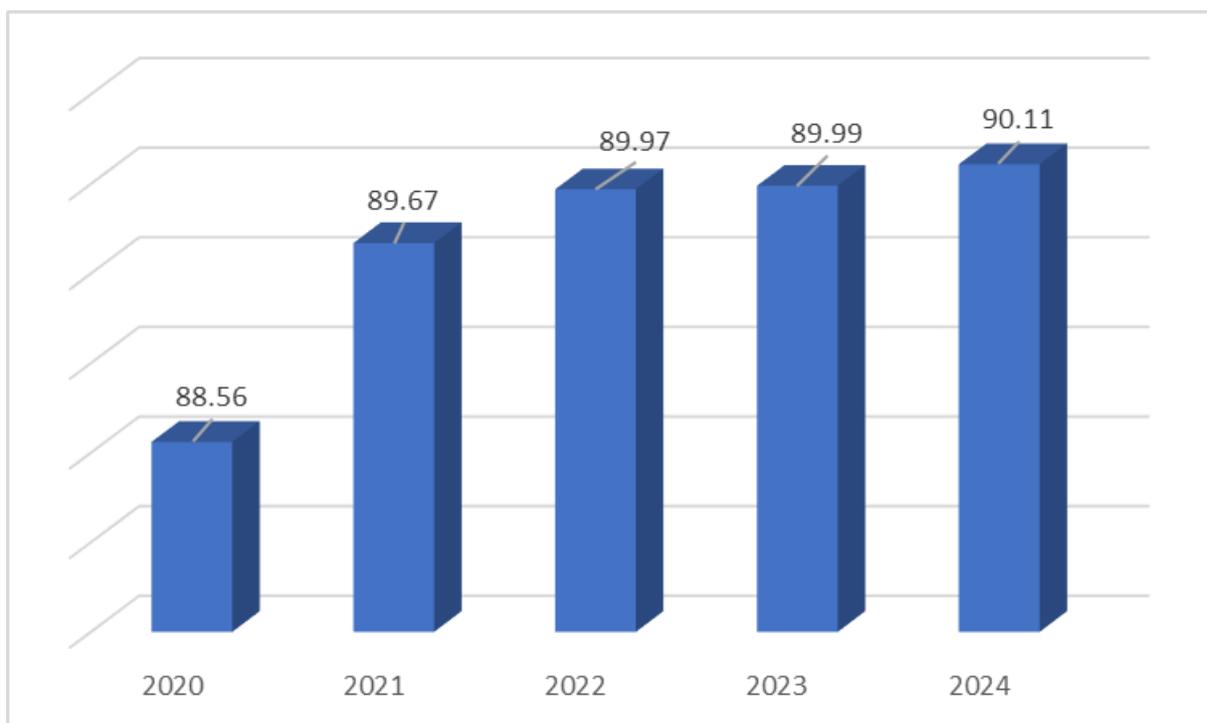
Indeks Harmoni Sosial merupakan indikator komposit yang terdiri dari Indeks Budaya Lokal, Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Indeks Kepedulian Sosial. Indeks ini menekankan pada paduan keselarasan, perpaduan antara keyakinan dan tingkah laku,



menghormati, menyayangi apa yang ada, merangkul, mensinergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial yang ditandai dengan adanya solidaritas dalam masyarakat yang beragam tersebut.

F.1 Indeks Budaya Lokal

Indeks Budaya Lokal disusun oleh melalui survei tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal (mengenai jenis seni budaya dan cagar budaya) dan tingkat kepedulian masyarakat dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan. Selama periode tahun 2018-2021, Indeks Budaya Lokal digunakan sebagai indikator keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat yang positif terhadap budaya lokal dan kepedulian masyarakat dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan.



Gambar 3.15 Indeks Budaya Lokal Tahun 2020 – 2024

Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2024

Tabel 3.10 Indeks Budaya Lokal Tahun 2020 – 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	80,00	81,50	88,90	89,30	90,00
Realisasi	88,56	89,67	89,97	89,99	90,11
Capaian	110,70%	110,02%	101,20%	100,77%	100,12%

Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2025

Indeks Budaya Lokal salah satunya dibentuk oleh hasil survei tingkat kepedulian masyarakat dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan dilakukan pada bulan



November-Desember 2024 secara daring. Tingkat kepedulian masyarakat diukur dengan menggunakan skala likert 1-7. Responden untuk survei ini sejumlah 225 responden dengan 24 kategori kegiatan yang dilakukan oleh warga yang bermanfaat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, dan menjadi salah satu ciri dari bangsa Indonesia yang terbagi dalam 4 sub survey (karakteristik responden untuk mengetahui keberagaman umur, pendidikan terakhir, bahasa yang digunakan sehari-hari, tempat kelahiran dan lama menetap di Surabaya. Pendapat masyarakat dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan, tingkat kepedulian kebangsaan berdasarkan kegiatan; serta Kegiatan Pemerintah) yang diukur dengan menggunakan skala likert 1-5.

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, Indeks Budaya Lokal Kota Surabaya mengalami peningkatan tiap tahunnya. Rata-rata tingkat kepedulian masyarakat Surabaya pada tahun 2024 terhadap kegiatan yang mendorong nilai kebangsaan sebesar 89,94% meningkat 0,13% dari tahun 2023 yaitu sebesar 89,81%. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian dan partisipasi masyarakat meningkat dalam kegiatan-kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan. Kepedulian ini terbentuk salah satunya melalui pembacaan Pancasila di sekolah-sekolah, mengumandangkan Lagu Indonesia Raya, penyelenggaraan Parade Juang, Wisata Kebangsaan, Peringatan Hari Pahlawan, menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, mengunjungi museum bersejarah, mengikuti kegiatan pramuka untuk anak-anak, memperingati hari besar nasional, melestarikan gotong royong dan siskamling di lingkungan tempat tinggal, pemahaman terkait lokasi taman makam pahlawan.

Sedangkan untuk survei tingkat pemahaman budaya juga dilakukan secara daring kepada 245 responden yang terbagi dalam 2 sub survey (Karakteristik responden untuk mengetahui keberagaman umur, pendidikan terakhir, bahasa yang digunakan sehari-hari, tempat kelahiran dan lama menetap di Surabaya serta Tingkat Pemahaman Budaya). Hasil survei menunjukkan tingkat pemahaman budaya lokal Surabaya tahun 2024 sebesar 90,28% meningkat dari tahun 2023 sebesar 90,17%. Peningkatan pemahaman ini ditunjukkan semakin banyaknya masyarakat yang memiliki wawasan dan pemahaman antara lain terkait:

- Jenis makanan lokal Surabaya seperti Rujak Cingur, Lontong Balap, Semanggi, Kupang, Sate Klopo, Tahu Tek, Rawon;
- Jenis budaya arek seperti Bahasa Arek, Campur Sari, Karawitan, Ludruk, Wayang Orang, Jaranan, Keroncong, Seni Nuansa Islam (Hadrah/Tanjidor), Tari (Misal Tari Remo), Lukis, dan Wayang Kulit;
- Mainan tradisional seperti Pathil Lele, Dakon, Gobak Sodor, Benteng-bentengan, Egrang, Engkle, Okol/Panco, Boi-boian, Adu Doro;



- Adat istiadat seperti Pernikahan Adat, Tahlil, Sedekah Bumi, Busana Adat (udeng batik, beskap, jarik), dan Upacara Adat Kelahiran;
- Cagar budaya seperti Tugu pahlawan/museum, Balai Pemuda, Balai Kota, Siola, Hotel Mojopahit, Koridor Tunjungan dan Kampung Ketandan, Kebun Binatang Surabaya, Kawasan Kampung Peneleh dan Rumah HOS Cokroaminoto, Masjid Ampel dan Kampung Arab, Kota Tua (Jln. Karet, Jln. Kembang Jepun, Hotel Ibis, PTPN), Gereja Katolik Kepanjen, Museum Bank Indonesia, Siropen Pabrik Es Jatim, Rumah W.R. Supratman, Benteng Kedung Cowek, Museum Kesehatan, Kampung Lawang Seketeng (Langgar Dukur, Sumur Jobong), Rumah Lahir Bung Karno;
- Pagelaran budaya seperti Festival Rujak Uleg, Surabaya Art and Culture Festival, Parade Budaya dan Bunga, Cross Culture Festival/ Festival Budaya Lintas Negara, Pemilihan Cak dan Ning dan terhadap
- Pengembangan wisata budaya dan sejarah antara lain kawasan Tunjungan Romansa, Wisata Peneleh dan Wisata Kota Lama; penyelenggaraan Festival Layang-layang, Susur Sungai Kalimas, Alun-alun Suroboyo, dan Kya-kya.

Meningkatnya pemahaman budaya masyarakat Surabaya didorong oleh tingginya jumlah penyelenggaraan *event* Kota Surabaya yang menarik perhatian dan minat masyarakat, wisatawan domestik dan mancanegara, seperti festival rujak uleg, peringatan Hari Tari Dunia, peringatan perobekan bendera, parade juang, Surabaya Vaganza, Sedekah Bumi serta pemilihan cak dan ning. Penyelenggaraan event yang diinformasikan dan dipromosikan melalui media sosial menjadi strategi yang efektif dalam pengenalan budaya lokal. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga memperbanyak ruang ekspresi seni dan sejarah serta secara aktif menggandeng 213 seniman dan 3 komunitas sejarah dalam kegiatan seni dan budaya.

Pada tahun 2022, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021-2026, Indeks Budaya Lokal disempurnakan menjadi Indeks Harmoni Sosial dengan menambahkan Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Indeks Kepedulian Sosial. Penambahan kedua indikator ini guna mendukung upaya pembentukan karakter masyarakat Kota Surabaya yang produktif, religius, berbudaya dan harmonis dalam bingkai kebhinnekaan.

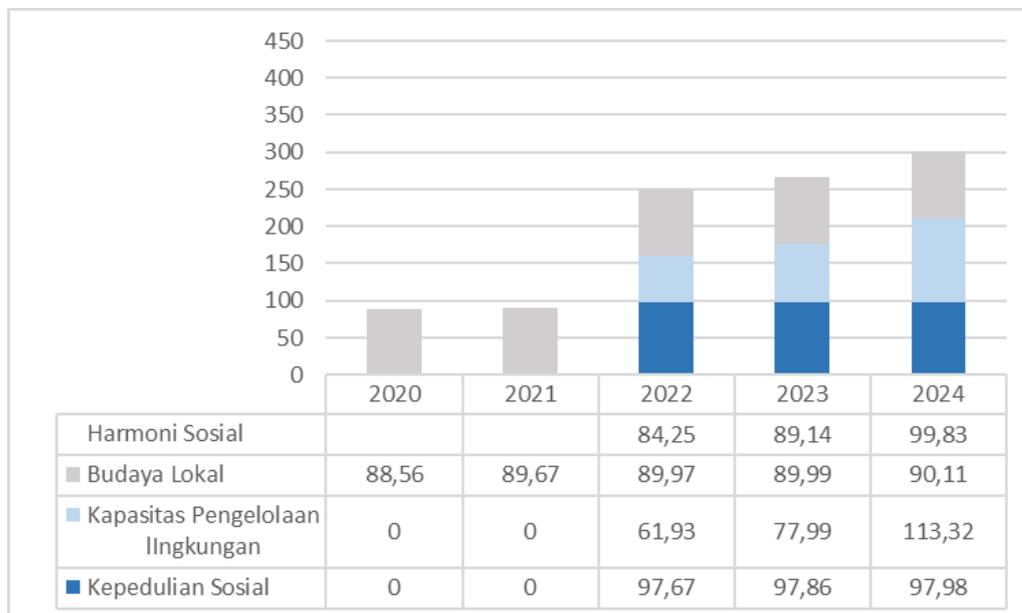
Tabel 3.11 Indeks Harmoni Sosial Beserta Indikator Penyusunnya Tahun 2024

No	Indikator Penyusun	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Harmoni Sosial	83,00	99,83	120,28%
1.a	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	64,94	113,32	174,5%



No	Indikator Penyusun	Target	Realisasi	Capaian
1.b	Indeks Kepedulian Sosial	97,96	97,98	100,02%
1.c	Indeks Budaya Lokal	90,00	90,11	100,12%

Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2024



Gambar 3.16 Komponen Indeks Harmoni Sosial Kota Surabaya 2020 – 2024

Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2024

Pencapaian Indeks Harmoni Sosial Kota Surabaya tahun 2024 sebesar 99,83% tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota dalam meningkatkan ragam dan frekuensi event budaya lokal, kepedulian lingkungan, serta penguatan karakter kebangsaan dan kerukunan antar masyarakat di Kota Surabaya.

F.2 Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan

Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan merupakan indeks komposit yang tersusun atas 4 komponen, yakni:

1. Persentase masyarakat yang pemahaman lingkungan hidupnya meningkat;
2. Persentase jumlah perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat;
3. Peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan, dan;
4. Persentase rumah sehat. Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dapat menggambarkan tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Pada tahun 2024 capaian Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan sebesar 113,32 yang meningkat dari tahun 2023 sebesar 77,99.



Pencapaian dalam aspek kapasitas pengelolaan lingkungan didukung oleh upaya edukasi lingkungan kepada masyarakat umum, pelajar maupun pelaku usaha mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada tahun 2024, beberapa upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya antara lain:

- 1) Pelatihan dan fasilitasi sarana prasarana pengolahan sampah bagi masyarakat, salah satunya pembinaan pengelolaan bank sampah di 660 unit bank sampah dan 120 kampung *zero waste*,
- 2) Pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim), Sekolah Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional, Kelurahan Berseri, dan ECO pesantren;
- 3) Pembinaan Perangkat Daerah dalam konservasi energi dan pemilahan sampah;
- 4) Pelibatan stakeholder khususnya akademisi, mahasiswa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan kompetisi lingkungan hidup tingkat kota maupun tingkat regional dan nasional untuk meningkatkan motivasi masyarakat antara lain lomba bank sampah, lomba kampung surabaya hebat, adiwiyata, surabaya ecoschool, dan lomba asah terampil;
- 6) Pembinaan masyarakat dan stakeholder dalam kompetisi Adipura, Kalpataru, Penganugerahan Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi (PSBE);
- 7) Pelibatan fasilitator lingkungan dalam pendampingan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan antara lain kepada RT, RW, pegiat lingkungan, lembaga pendidikan, Perangkat Daerah serta kepada pelaku usaha;
- 8) Adanya Tim yustisi untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada masyarakat yang melanggar peraturan yang terkait dengan lingkungan serta
- 9) Menggandeng pelaku usaha untuk pelaksanaan program-program pelestarian lingkungan dan kompetisi lingkungan hidup.

F.3 Indeks Kepedulian Sosial

Indeks Kepedulian Sosial merupakan indeks yang ditentukan melalui survei terhadap partisipasi masyarakat dalam aspek sosial, kemanusiaan, toleransi beragama dan kebangsaan. Indeks Kepedulian Sosial dapat menggambarkan tingkat kepedulian antar masyarakat dalam lingkup sosial sehari-hari. Nilai-nilai tersebut dianggap penting dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat terutama pada zaman modernisasi sekarang, di mana dengan berkembangnya teknologi informasi sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, serta lingkungan hidup yang mendukung aktivitas masyarakat.



Capaian Indeks Harmoni Sosial Tahun 2024 juga tidak lepas dari dukungan capaian Indeks Kepedulian Sosial yang mencapai 97,98. Nilai ini meningkat dari tahun 2023 sebesar 97,86. Capaian tersebut mencerminkan bahwa kesadaran masyarakat meningkat untuk saling menghargai, menghormati, serta saling tolong-menolong antar umat beragama yang pada akhirnya dapat menumbuhkan kerukunan antar umat beragama. Hal ini ditunjukkan salah satunya dengan tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Rembug Warga yang dilaksanakan setiap bulan serentak di 153 kelurahan yang salah satu agendanya adalah untuk bermusyawarah terkait penyelesaian permasalahan sarana dan prasarana lingkungan serta penyisiran kembali penduduk miskin yang memerlukan intervensi. Adapun pelaksanaan Rembug Warga tersebut diikuti oleh perwakilan Karang Taruna, PKK, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta Ketua dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan RT, RW, dan LPMK. Tidak hanya itu, sosialisasi terkait toleransi umat beragama dan anti-radikalisme juga rutin dilaksanakan 2 (dua) kali setiap tahun pada 31 kecamatan, yang salah satu manfaatnya adalah terbukti dengan tidak adanya permasalahan/konflik dalam pembangunan 265 rumah ibadah baru di tahun 2024.

Kinerja ini juga didorong oleh upaya pemantapan karakter kebangsaan dan ideologi Pancasila, serta penguatan kerukunan antar masyarakat melalui forum kerukunan umat beragama, mediasi konflik umat beragama, serta sosialisasi anti narkoba dan koordinasi operasi gabungan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang menyeluruh dan merata hingga tingkat kelurahan di Kota Surabaya. Selain itu, penyelenggaraan kegiatan wawasan kebangsaan juga dilaksanakan dengan menggandeng pihak eksternal.

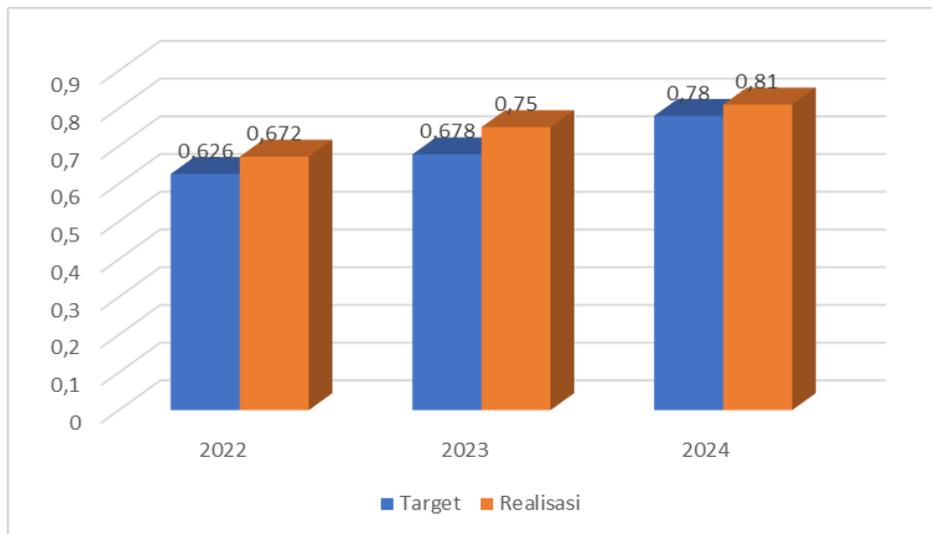
Pada tahun 2025, upaya peningkatan kepedulian sosial dapat dioptimalkan dengan menjalin kolaborasi bersama komunitas-komunitas di Kota Surabaya dalam berbagai kegiatan terkait, serta membangun sinergi antara Perangkat Daerah untuk meningkatkan dan memperkuat pendidikan karakter bagi generasi muda, salah satunya dalam hal kepedulian sosial, selain itu penguatan kampung madani dan kampung Pancasila perlu diintensifkan untuk mendorong kepedulian antar masyarakat.

G. Indeks Infrastruktur Kota

Indeks Infrastruktur Kota bertujuan mengukur keberhasilan dalam upaya peningkatan kualitas infrastruktur kota. Indeks Infrastruktur Kota menggambarkan implementasi penataan ruang kota yang terintegrasi melalui penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur kota yang terdiri dari tiga komponen, yaitu Indeks Kebinamargaan dan Pematusan, Indeks Keciptakarya, Penataan Ruang dan Pertanahan serta Indeks Penyelenggaraan Transportasi.



Pola perhitungan Indeks Infrastruktur Kota pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 telah dilakukan evaluasi dan perbaikan pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Hal ini dikarenakan diperlukan penyesuaian komponen perhitungan untuk mengakomodir aspek infrastruktur kota yang masih perlu ditingkatkan pada periode 2021-2026. Sehingga formulasi perhitungan sebelum tahun 2022 dengan tahun 2022-2024 berbeda dan capaiannya tidak dapat disejajarkan.



Gambar 3.17 Indeks Infrastruktur Kota Tahun 2022 – 2024

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, diolah, 2024

Tabel 3.12 Indeks Infrastruktur Kota Beserta Indikator Penyusunnya Tahun 2024

No	Indikator Penyusun	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Infrastruktur Kota	0,780	0,810	103,850%
1.a	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	0,820	0,830	101,22%
1.b	Indeks Keciptakayaan, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,780	0,820	105,130%
1.c	Indeks Penyelenggaraan Transportasi	0,743	0,780	104,980%

Catatan: Tahun 2023 sesuai Target RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, diolah, 2024

Pada tahun 2024, realisasi Indeks Infrastruktur Kota sebesar 0,810, di mana capaian ini mengalami kenaikan dari tahun 2023 yaitu sebesar 0,75. Hal tersebut tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan dan saluran serta kelengkapannya;

G.1 Indeks Kebinamargaan dan Pematusan

Kinerja Indeks Kebinamargaan dan Pematusan dicapai salah satunya melalui peningkatan kualitas jalan dan prasarana melalui pembangunan pedestrian dan pelaksanaan *overlay* (pelapisan ulang aspal) pada tahun 2022 sebanyak 2.072 ruas jalan, sebanyak 2.780



ruas jalan di tahun 2023 dan sebanyak 3537 ruas jalan di tahun 2024. Pemerintah Kota Surabaya juga terus berupaya dalam peningkatan konektivitas dan optimalisasi kinerja jalan melalui pembangunan jalan baru Jalan Lingkar Luar Barat di tahun 2022 dan *Radial Road* di tahun 2023 yang dilanjutkan pada tahun 2024 serta Pelebaran Jalan Wiyung di tahun 2024.

Selain itu, penanganan genangan juga berkontribusi terhadap capaian Indeks Kebinamargaan dan Pematusan. Penanganan genangan yang dilakukan melalui pembangunan dan/rehabilitasi sistem drainase pada tahun 2022 sebanyak 353 lokasi, pada tahun 2023 sebanyak 435 lokasi serta 159 lokasi pada tahun 2024 yang telah sesuai dengan rencana penyelesaian genangan. Selain itu Pemerintah Kota Surabaya juga menambah kapasitas dan membangun rumah pompa baru sebanyak 4 unit di tahun 2022 kemudian bertambah 7 unit di tahun 2023 dan bertambah 1 unit di tahun 2024. Selain itu untuk mengukur curah hujan sehingga dapat dilakukan analisa terkait bahaya genangan di Kota Surabaya maka dilakukan pengadaan dan pemasangan 6 stasiun hujan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 di beberapa rumah pompa antara lain Rumah Pompa Undaan, Rumah Pompa Gadukan, Rumah Pompa Kebraon, Rumah Pompa Wonorejo 1, Rumah Pompa Bulak, dan Rumah Pompa Merr serta pengerukan saluran primer, sekunder dan tersier di 1.192 lokasi di tahun 2022, sebanyak 1.348 lokasi di tahun 2023 dan 991 lokasi di tahun 2024, sesuai dengan rencana pemeliharaan rutin saluran. Hal ini ditandai dengan berkurangnya jumlah titik lokasi genangan di Kota Surabaya dari 414 titik lokasi genangan pada tahun 2022 menjadi 250 titik lokasi genangan pada tahun 2023 dan berkurang menjadi 180 titik lokasi genangan di tahun 2024.

G.2 Indeks Keciptakayaan, Penataan Ruang dan Pertanahan

Dari aspek Keciptakayaan, Penataan Ruang dan Pertanahan, Pemerintah Kota juga melakukan berbagai upaya yaitu penyediaan hunian layak melalui penyediaan rumah susun bagi masyarakat miskin, dengan 105 blok rusunawa pada tahun 2022, yang meningkat menjadi 109 blok sampai dengan tahun 2024. Program Dandan Omah juga dilaksanakan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni, dimulai dengan 929 unit rumah pada tahun 2022, meningkat menjadi 2.887 unit pada tahun 2023, dan 1.678 unit pada tahun 2024 yang dibiayai dari APBD. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga memfasilitasi penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan yang meningkat dari 22 lokasi pada tahun 2022 menjadi 35 lokasi pada tahun 2023, dan 63 lokasi pada tahun 2024. Upaya ini juga mencakup penyediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik yang lebih baik. Di bidang penataan ruang, pemerintah telah melakukan pelayanan penataan ruang dan bangunan yang terintegrasi dan berbasis teknologi.



Untuk meningkatkan keberhasilan kualitas infrastruktur kota, perlu terus dilakukan peningkatan kualitas jalan, pembangunan sarana dan prasarana jalan (jembatan dan pedestrian), pembangunan sarana dan prasarana drainase (saluran dan rumah pompa), penyediaan rutilahu, pembangunan/rehabilitasi bangunan gedung pemerintah, pembangunan/pemeliharaan rusunawa, penyediaan tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum, penambahan koridor layanan angkutan umum perkotaan, serta peningkatan sinergitas dengan *stakeholder* penyelenggaraan moda transportasi lain untuk meningkatkan konektivitas jaringan.

G.3 Indeks Penyelenggaraan Transportasi

Realisasi indeks penyelenggaraan transportasi pada tahun 2024 sebesar 0,78; meningkat dari tahun 2023 sebesar 0,74. Keberhasilan tersebut didukung oleh penyediaan layanan angkutan umum perkotaan antara lain Suroboyo Bus sebanyak 28 unit yang melayani 2 rute layanan sejak tahun 2018 hingga tahun 2024, serta Program Teman Bus hasil kerjasama dengan Kementerian Perhubungan yang mengoperasikan 17 unit bus di 1 rute. Selain itu, terdapat 12 unit Bus Listrik yang melayani 1 rute, serta 102 unit angkutan *feeder* yang melayani 11 rute sejak tahun 2022 hingga tahun 2024.

Untuk meningkatkan penggunaan transportasi umum dan mendorong peralihan dari kendaraan pribadi, Dinas Perhubungan aktif melakukan sosialisasi penggunaan angkutan umum serta aplikasi GOBIS. Sosialisasi ini dilakukan melalui media sosial dan kegiatan langsung, termasuk event di *Car Free Day* yang melibatkan seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Selain itu, capaian kinerja aspek transportasi juga diperkuat dengan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta koordinasi dengan berbagai untuk meningkatkan konektivitas antarmoda. Hal ini mencakup kerja sama dengan PT. KAI DAOP VIII Surabaya dalam meningkatkan integrasi transportasi di tiga stasiun serta koordinasi dengan PT PELINDO untuk pengelolaan transportasi di Pelabuhan Tanjung Perak. Di masa mendatang, kerjasama dengan Propinsi dan Wilayah Aglomerasi Surabaya raya, utamanya dalam penyediaan transportasi publik, perlu diintensifkan, hal ini karena setiap harinya rata-rata 390.777 perjalanan keluar masuk Kota Surabaya setiap harinya. Perjalanan keluar masuk tersebut sebagian besar berasal dari Gresik, Sidoarjo, Bangkalan, Mojokerto dan Lamongan, sehingga diperlukan kerjasama untuk menghadirkan transportasi publik untuk mengurangi intensitas penggunaan kendaraan pribadi.



H. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ditetapkan secara nasional sebagai indikator untuk menilai ketercapaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional.

Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Sedangkan untuk Indeks Kualitas Udara dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara. Indeks kualitas udara dipantau pada kepadatan transportasi tinggi, kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan area sekolah sehingga dapat mewakili kualitas udara ambien di Kota Surabaya. Perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) atau indeks tutupan hutan merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administratif kota. Karena Kota Surabaya tidak memiliki hutan maka digunakan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Kualitas dan kondisi udara, air dan tutupan tanah dipengaruhi oleh banyaknya jumlah kendaraan, industri besar, industri kecil, kepadatan lingkungan permukiman. Sedangkan kondisi tutupan lahan yang sangat dipengaruhi oleh luas lahan dan besaran Ruang Terbuka Hijau serta sistem persampahan dan sanitasi. Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S-318/ PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang Metode Perhitungan IKLH 2020-2024, terdapat perubahan metode perhitungan IKLH Tahun 2020-2024 yang diterapkan mulai tahun 2021. Dengan demikian, nilai IKLH tahun 2019 dan 2020 tidak dapat disandingkan dengan nilai IKLH tahun 2021-2024. Selain itu, terdapat perbedaan perhitungan nilai IKLH Nasional dan Jawa Timur dengan IKLH Kabupaten/Kota, di mana di tingkat Kabupaten/Kota tidak menyertakan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dalam perhitungan IKLH. Berikut capaian nilai IKLH Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2021-2024

Tabel 3.13 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2021 – 2024

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	
1	IKLH Kota Surabaya	67,78*	35,06	55,97	54,52	60,76
2	IKLH Provinsi Jawa Timur	-	68,49	69,92	69,59	71,14
3	IKLH Nasional	-	71,45	72,42	72,54	73,55

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, 2024.

*)Berdasarkan metode perhitungan RPJMD kota Surabaya tahun 2021 - 2026



Tabel 3.14 Indeks Penyusun IKLH Kota Surabaya Tahun 2021 – 2024

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	N/A*	49,15	49,02	49,26
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	74,38	75,76	70,15	85,68
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	22,56	31,07	35,06	34,39
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	35,06	55,97	54,52	60,76

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024. *) Indikator IKA tidak masuk dalam perhitungan

Selain IKLH, fokus peningkatan kualitas lingkungan di Kota Surabaya adalah pada pengelolaan sampah. Tingginya sampah yang dihasilkan seiring dengan tingginya jumlah penduduk Kota Surabaya sebesar 3.018.022 Jiwa dan tingginya aktivitas ekonomi, oleh karenanya dibutuhkan prioritas pengelolaan persampahan, sehingga Kota Surabaya melakukan penambahan Indeks Persampahan. Dengan demikian, indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup Kota Surabaya menggunakan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS) sebagai kinerja utama dengan komponen penyusun yang terdiri atas Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Persampahan.

Berpedoman kepada UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan/ atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Dengan demikian, perhitungan Indeks Persampahan mencakup 1) Pengurangan sampah yang terdiri atas peran serta masyarakat dan pengurangan sampah skala kawasan dan perkotaan; 2) Tingkat pelayanan persampahan yang mencakup sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya; 3) Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS) pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 berdasarkan pada evaluasi IKLHS RPJMD Kota Surabaya periode sebelumnya, yaitu Tahun 2016-2021, dengan tetap memperhatikan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S-318/ PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang Metode Perhitungan IKLH 2020-2024. Berikut merupakan



capaian Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Persampahan dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 3.15 Indeks Penyusun IKLHS Tahun 2020 – 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	56,05	58,18	57,91	58,50	57,65
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,31	90,28	90,55	86,61	83,72
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	42,63	42,63	42,64	42,65	42,68
4	Indeks Persampahan	75,84	76,62	82,91	83,79	83,84

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Tabel 3.16 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Target	65	65,1	68,32	68,54	71,04
Realisasi	65,08	65,71	70,82	70,35	69,53
Capaian	100,12%	100,94%	103,66%	102,64%	97,87%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2024

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator IKLHS tahun 2020 hingga 2022 mengalami peningkatan yang cukup konsisten. Tahun 2020 IKLHS Kota Surabaya sebesar 65,08 meningkat hingga 70,82 di tahun 2022. Nilai IKLHS mengalami kenaikan karena salah satu unsur pembentuk yaitu indeks persampahan mengalami kenaikan. Hal ini terjadi disebabkan beroperasinya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan secara optimal terutama di TPA Benowo yang sudah menggunakan teknologi ramah lingkungan pengolah sampah menjadi energi listrik. Adapun upaya lain yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan IKLHS antara lain pengelolaan dan pelayanan kebersihan secara terpadu dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, penghematan energi dengan cara konservasi energi yang dapat menurunkan pemakaian energi secara tidak tepat dan tidak efisien, serta upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan.

Mulai dari tahun 2023 hingga tahun 2024 IKLHS terus mengalami penurunan. Pada tahun 2023, IKLHS mengalami sedikit penurunan menjadi 70,35 dan berlanjut di tahun 2024 menjadi 69,53. Penurunan IKLHS disebabkan oleh relatif menurunnya Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air.

H.1 Indeks Kualitas Udara

Pada tahun 2023, nilai Indeks Kualitas Udara sebesar 86,61 dan menurun menjadi 83,72 di tahun 2024. Penurunan ini dikarenakan faktor iklim yaitu kemarau panjang yang menyebabkan suhu dan volume debu meningkat. Selain itu, emisi polutan dari sumber



bergerak belum dapat dikendalikan, karena semakin meningkatnya jumlah kendaraan dan meningkatnya aktivitas perekonomian.

Pemerintah Kota Surabaya terus mengupayakan kualitas udara yang lebih baik antara lain melalui: 1) Optimalisasi pengurangan/penyerapan polutan melalui RTH dengan diversifikasi jenis pohon/tanaman untuk meningkatkan efektivitas penyerapan polutan; 2) Penyebarluasan informasi dan pendampingan Program Kampung Iklim serta pelaksanaan Car Free Day pada 7 lokasi; 3) Inventarisasi emisi untuk mengidentifikasi kegiatan/usaha sumber pencemar yang berkontribusi dalam pencemaran/polusi udara agar dapat disusun rencana aksi dan strategi yang tepat sasaran; 4) Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi Program Langit Biru terkait pengendalian pencemaran udara antara lain penggunaan angkutan umum, pemanfaatan energi terbarukan, penyediaan sarana prasarana pejalan kaki dan sebagainya; serta 5) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup terkait perizinan dan pengawasan kegiatan/usaha yang berpotensi menyebabkan pencemaran/polusi udara.

Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan agar Indeks Kualitas Udara tercapai di tahun 2025 antara lain: 1) Pelaksanaan uji emisi sebagai upaya monitoring kualitas udara emisi dari sumber bergerak 2) Meningkatkan edukasi penggunaan kendaraan umum untuk mengurangi emisi; serta 3) Meningkatkan edukasi penggunaan bahan bakar ramah lingkungan kepada pelaku usaha.

H.2 Indeks Kualitas Air

Pada tahun 2023, nilai Indeks Kualitas Air sebesar 58,50 dan menurun menjadi 57,65 di tahun 2024. Penurunan indeks ini disebabkan salah satunya menurunnya volume air akibat kemarau panjang yang menyebabkan konsentrasi polutan lebih tinggi di badan air. Pemerintah Kota Surabaya terus mengupayakan kualitas air yang lebih baik antara lain melalui kegiatan pengawasan kegiatan usaha terkait dengan pengelolaan IPAL dan pemenuhan baku mutu air yang disesuaikan dengan jenis kegiatan usahanya serta sosialisasi dan pembinaan pengelolaan air limbah dan sampah terhadap masyarakat dan kegiatan/usaha, antara lain sosialisasi utamanya pada warga di area bantaran sungai untuk pencegahan dan penanggulangan buang sampah sembarangan dan BABS, bersih-bersih bantaran sungai, pantai, dan saluran air.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan deklarasi pilar 1 yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan dengan capaian 100% pada bulan Maret 2023 serta telah meraih capaian terbaik 1 nasional STBM Awards tingkat Pratama pada tahun 2023 serta terbaik 1 nasional STBM Awards



tingkat Madya. Di mana pada tahun 2024 dilaksanakan melalui pembangunan jamban. Selanjutnya di tahun 2025 Pemerintah Kota Surabaya akan fokus ke penanganan pilar ke empat dan kelima yaitu pemilahan sampah dan penanganan limbah cair rumah tangga.

Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan agar Indeks Kualitas Air tercapai di tahun 2025 antara lain:

- 1) Pembersihan secara rutin sungai/saluran dari sampah;
- 2) Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait perbaikan kualitas air dengan melakukan pembangunan IPAL;
- 3) Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait pemenuhan baku mutu;
- 4) Pelaksanaan sosialisasi kepada pelaku usaha untuk melakukan uji air limbah pada laboratorium yang telah terakreditasi;
- 5) Melakukan bimbingan teknis terkait pengelolaan aspek lingkungan air;
- 6) Berkolaborasi dengan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga terkait pengolahan limbah domestik;
- 7) Optimalisasi berupa sosialisasi dan pemasaran layanan Sedot Tinja (Senja) yang dikelola oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga; serta
- 8) Merekomendasikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pengolahan air limbah dengan pihak Ketiga.

H.3 Indeks Kualitas Lahan

Indeks Kualitas Lahan pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023 yaitu dari 42,65 menjadi sebesar 42,68. Hal ini dikarenakan adanya upaya dari Pemerintah Kota dalam melakukan pengembangan RTH publik melalui taman dan pemeliharaan RTH antara lain lapangan olahraga serta taman dan jalur hijau.

Ruang terbuka hijau menjadi salah satu fokus Pemerintah Kota dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Luas Ruang terbuka hijau publik pada tahun 2024 sebesar 7.363, 51 Ha atau 22,01%, luasan ini telah memenuhi standar Ruang Terbuka Hijau Publik pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yakni minimal 20%. Ruang Terbuka Hijau pada Tahun 2024 mengalami penambahan sebesar 115.260,86 m² yang berasal dari fasum fasos berupa RTH Taman. Selain itu, terdapat tambahan sebesar 220 m² dari pembangunan Taman Kawasan Bangkingan RW 2, sehingga komposisi Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya meningkat menjadi 22,06%. Adapun upaya yang akan dilakukan agar indeks kualitas lahan tercapai di tahun 2025 adalah melakukan



koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam upaya pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik.

H.4 Indeks Persampahan

Indeks Persampahan meningkat menjadi 83,84 pada tahun 2024, didukung adanya pengurangan sampah lingkungan melalui Bank sampah di RT-RW yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah, terdapat sarana prasarana pengelolaan persampahan yang beroperasi secara optimal antara lain berupa rumah kompos, TPS, TPS 3R yang pada tahun 2024 terdapat penambahan 2 (dua) pembangunan baru TPS 3R yaitu TPS 3R Tambak Wedi dan TPS 3R Sumberejo serta TPA Benowo yang sudah menggunakan teknologi ramah lingkungan pengolah sampah menjadi energi listrik. Selain itu, penyediaan sarana (armada) pengangkutan sampah dari TPS tercukupi sehingga pengangkutan sampah dari TPS dapat dilakukan secara rutin sesuai jadwal yang telah disusun.

Pada aspek produksi sampah, volume produksi sampah Kota Surabaya pada tahun 2020 sebanyak 2.222,62 ton/hari, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 1.752,50 ton/hari. Pada tahun 2022 sebanyak 1.792,72 ton/hari, sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 1.800,04 ton/hari dan pada tahun 2024 volume produksi sampah adalah 1.810,43 ton/hari. Hal ini menunjukkan bahwa, permasalahan sampah masih menjadi isu strategis di Kota Surabaya. Di tahun 2025 upaya pengurangan sampah melalui salah satunya penggalakan ekonomi sirkular, 3R, bank sampah serta pemilahan sampah organik dan anorganik serta optimalisasi TPS 3R. Perkembangan volume produksi sampah antar tahun disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.17 Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Volume Produksi Sampah (ton/hari)	2.222,62	1.752,50	1.792,72	1.800,04	1.810,43
Jumlah Sampah yang ditangani di TPA (ton/hari)	1.958,41	1.585,26	1.601	1.536,76	1.540,97

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Bappedalitbang Kota Surabaya, 2024

I. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah tolok ukur untuk menilai sejauh mana suatu instansi pemerintah telah melakukan perbaikan dalam tata kelola pemerintahannya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. IRB menilai berbagai aspek, termasuk: Manajemen Perubahan (bagaimana instansi mengelola perubahan dan inovasi dalam birokrasi); Penataan Regulasi (sejauh mana regulasi yang ada



mendukung efisiensi dan efektivitas birokrasi); Penataan Kelembagaan (bagaimana struktur dan kelembagaan birokrasi ditata agar lebih efisien); Penataan Tata Laksana (bagaimana proses bisnis dan tata laksana birokrasi disederhanakan dan ditingkatkan); Penataan Sumber Daya Manusia (bagaimana kualitas dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) ditingkatkan); Penguatan Akuntabilitas Kinerja (bagaimana akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diukur dan dievaluasi); Penguatan Pengawasan (bagaimana pengawasan terhadap kinerja birokrasi dilakukan); Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (bagaimana kualitas pelayanan publik ditingkatkan agar lebih mudah, cepat, dan terjangkau).

Mekanisme evaluasi pelaksanaan RB Tahun 2024 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Evaluasi RB pada tahun 2024 ditekankan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif, dan meliputi evaluasi atas pelaksanaan:

- a. RB General meliputi capaian strategi pelaksanaan dan capaian implementasi kebijakan RB General, serta capaian sasaran strategis reformasi birokrasi; dan
- b. RB Tematik meliputi strategi pelaksanaan dan capaian dampak RB Tematik. Evaluasi pelaksanaan RB Tematik difokuskan pada penilaian dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan merupakan hasil dari perbaikan tata kelola pada tema-tema prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, antara lain pengentasan kemiskinan, peningkatan realisasi investasi, digitalisasi pemerintahan, penanganan stunting, pengendalian inflasi, dan penggunaan produk dalam negeri.

Berdasarkan surat KemenPAN RB Nomor B/43/RB.04/2025 tanggal 26 Februari 2025 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi 2024, surat tersebut memuat hasil evaluasi sementara yang dapat diakses melalui www.portalrb.id, namun demikian sesuai dengan surat tersebut instansi pemerintah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sanggahan terhadap hasil sementara yang disampaikan dalam kurun waktu sepuluh hari kerja, sehingga capaian yang termuat dalam LKPJ ini bersifat sementara sampai dengan adanya ekspose hasil evaluasi reformasi birokrasi final. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kota Surabaya Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.18 Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024**

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	BB	A	82,61	83,41	97
Realisasi	BB 78,13	BB 78,38	A 80,14	A- 95,12*	A- 99,76**
Capaian	Tercapai	Tidak tercapai	97,01%	114,04%	102,85%

* Perhitungan realisasi berdasarkan Kepmen PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023

** Angka sementara

Tabel 3.19 Penilaian RB General Kota Surabaya Tahun 2024

No	Indikator Penilaian	Skor
1.	Rencana Aksi Pembangunan RB General	2,75
2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	97
3	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	5
4.	Tingkat Maturitas SPIP	3,5
5.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	1,5
6.	Nilai SAKIP	90,24
7.	Tingkat Digitalisasi Arsip	98,09
8.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	5
9.	Indeks Kualitas Kebijakan	85,48
10	Indeks Reformasi Hukum	96,98
11	Indeks Pembangunan Statistik	2,73
12	Indeks Tata Kelola Pengadaan	83,66
13	Indeks Sistem Merit	393
14	Indeks Pelayanan Publik	4,57
15	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	98,59
16	Indeks SPBE	4,54
17	Capaian IKU Makro	95,11
18	Capaian IKU Non Makro	96,56
19	Opini BPK	3



No	Indikator Penilaian	Skor
20	Tindak Lanjut Rekomendasi	96,45
21	Indeks BerAkhlak	84,21
22	Survei Penilaian Integritas	72,11
23	Survei Kepuasan Masyarakat	97,21

Sumber: Kementerian PAN-RB, 2025

Sedangkan RB Tematik mengusung beberapa tema antara lain Pengentasan Kemiskinan, Realisasi Investasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting, Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan Pengendalian Inflasi. Selain itu, RB Tematik juga tersusun dari beberapa indikator yang disajikan pada tabel berikut beserta dengan perolehan skor Kota Surabaya 2024.

Tabel 3.20 Penilaian RB Tematik Kota Surabaya Tahun 2024

No	Indikator Penilaian	Skor
1	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	0.92
2	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	0.71
3	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	0.92
4	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	1
5	Pengendalian Inflasi (Strategi Pembangunan)	0
6	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	2.45
7	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	2.08
8	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	2.34
9	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	2.95
10	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	0
11	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	3

Sumber: Bagian Organisasi, diolah, 2024

Indeks RB mengalami peningkatan predikat dari BB di tahun 2021 menjadi A di tahun 2022 dengan nilai 80,14 dan terus meningkat di tahun 2023 menjadi 95,12. Begitu pula di tahun 2024, Indeks RB terus mengalami peningkatan menjadi 99,76. Adapun beberapa upaya yang perlu disempurnakan untuk pencapaian Reformasi Birokrasi antara lain: (1) Penyusunan Rencana Aksi RB yang memenuhi aspek perencanaan, penganggaran, proses bisnis,



pengawasan, teknologi informasi dan adanya perbaikan/inovasi serta berfokus pada aktivitas-aktivitas intervensi yang mendukung prioritas permasalahan utama/kritis, (2) Menindaklanjuti proses Perkada tentang SOTK pasca penyederhanaan struktur organisasi ke tahap penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja, (3) Pengendalian dan pendampingan yang masif kepada SDM terkait manajemen risiko, (4) Peninjauan atas pohon kinerja mengutamakan Critical Success Factor (CSF) agar pencapaian kinerja strategis yang dipengaruhi dapat terkawal, (5) Pengendalian dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian tahun lalu serta kemampuan mencapai target, (6) Penetapan Standar Kompetensi Jabatan dan Menyusun profil pegawai berbasis pemetaan kompetensi dan talent pool untuk keseluruhan pegawai untuk mendapatkan analisis kesenjangan kompetensi untuk keseluruhan pegawai dan mengacu pada Standar Kompetensi Jabatan, (7) Melaksanakan praktik kerja, coaching, dan mentoring secara terjadwal dan disertai dengan evaluasinya serta menyempurnakan analisis permasalahan kinerja, (8) Melakukan kegiatan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan prinsip Satu Data Indonesia, serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas data secara berkesinambungan, (9) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal organisasi melalui optimalisasi penggunaan teknologi serta mengevaluasi pengguna layanan.

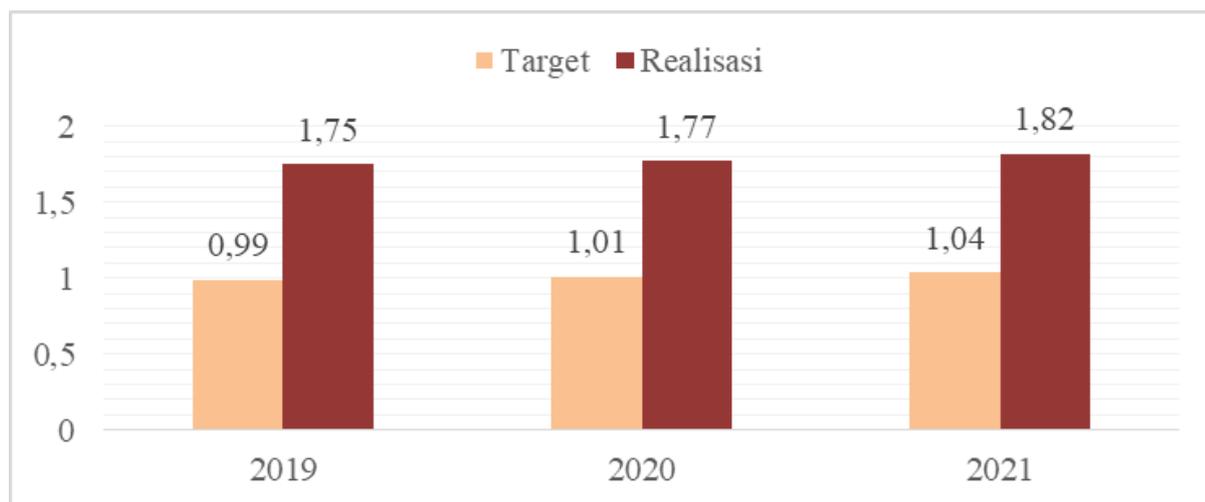
J. Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota

Penanggulangan bencana, ketertiban, dan ketentraman kota adalah faktor penting yang mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan serta memperkuat landasan pertimbangan investasi dan meningkatkan potensi penanaman modal di Kota Surabaya. Keberhasilan dalam pelaksanaan ketiga aspek ini diukur melalui Indeks Penanggulangan Bencana, Ketertiban, dan Ketentraman. Indeks ini bertujuan untuk melatih berbagai elemen masyarakat agar siap menghadapi bencana, meningkatkan ketentraman dan ketertiban, serta menyebarkan informasi mengenai penanganan bencana, ketentraman, dan ketertiban.

Selama periode tahun 2019-2021, kinerja ketertiban dan ketentraman kota diukur dengan Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota, dengan menghitung rata-rata invers banyaknya kejadian anarkis dan banyaknya pelanggaran Perda. Pada periode tiga tahun terakhir tersebut, Indeks Ketertiban dan Ketentraman menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, nilai Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota mencapai 1,82 meningkat 0,05 poin dibandingkan tahun 2020 sebagaimana diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum norma



dan peraturan yang berlaku, sehingga dapat menciptakan kondisi yang stabil dan kondusif bagi berjalannya kegiatan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 3.18 Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota Tahun 2019 – 2021

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2022

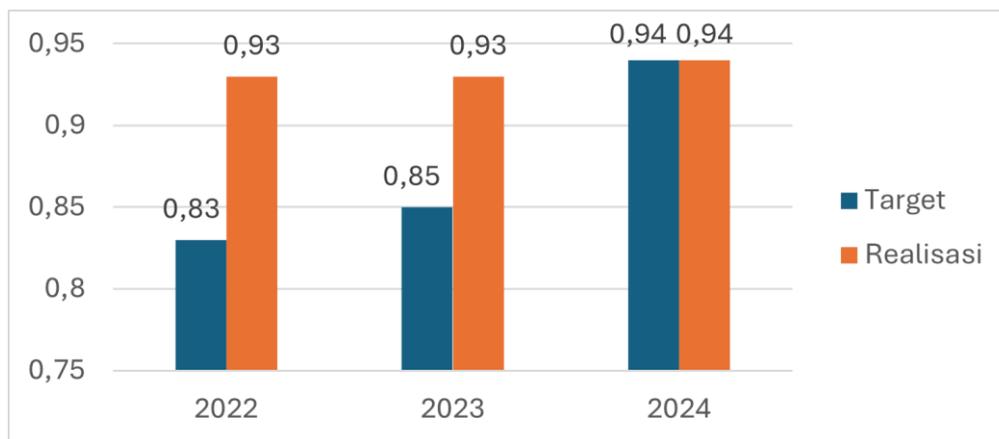
Sejalan dengan fokus penguatan upaya penanggulangan bencana yang tercantum dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, pengukuran kini diperluas dengan menambahkan Indeks Penanggulangan Bencana. Dengan demikian, terbentuklah Indeks Penanggulangan Bencana, Ketertiban, dan Ketentraman Kota, yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu Indeks Penanggulangan Bencana dan Indeks Ketentraman serta Ketertiban Kota.

Indeks Penanggulangan Bencana sendiri diperoleh dari perhitungan: (1) penanganan bencana yang terintegrasi dan (2) pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi. Sedangkan Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota mengalami perubahan formulasi dari periode sebelumnya, yakni menjadi diperoleh dari perhitungan rata-rata: (1) Penyelesaian konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan (IPOLEKSOSBUD) yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) serta (2) Penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan.

Tabel 3.21 Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota Beserta Indikator Penyusunnya Tahun 2024

No.	Indikator Penyusun	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,94	0,94	100,53%
1.a	Indeks Penanggulangan Bencana	0,92	0,96	104,35%
1.b	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,94	0,91	96,81%

Sumber: Bappedalitbang, diolah, 2024



Gambar 3.19 Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota Tahun 2022 - 2024

**Tahun 2022 dan 2023 sesuai Target RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026
Sumber: Bappedalitbang, 2024 (data diolah)*

J.1 Indeks Penanggulangan Bencana

Sebagaimana disajikan pada gambar di atas, kinerja Indeks Penanggulangan Bencana hingga 2024 tercapai. Hal ini menunjukkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mitigasi, kesiapsiagaan dan penanganan bencana yang sangat positif. Hal ini tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota dalam melakukan mitigasi, kesiapsiagaan dan penanganan bencana, antara lain 1) penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan pada 31 Kelurahan Tangguh Bencana Tingkat Pratama, 2) pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana yang diikuti 1.702 peserta dari unsur sekolah/madrasah, pegawai Rumah Sakit/Puskesmas hingga relawan, 3) penyediaan sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai, serta 4) penanganan dan distribusi logistik bagi korban bencana dan/atau kedaruratan secara optimal.

Tabel 3.22 Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Banjir/ Pasang Air Laut	0	0	0	0	0
2	Angin Puting Beliung/ Angin Kencang	2	4	0	0	0
3	Kebakaran	608	705	589	771	368
4	Gempa Bumi	0	0	0	0	0
5	Gelombang Tinggi	0	0	0	0	0
6	Cuaca Ekstrem	0	0	0	0	0

Sumber: BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, 2024

Pada tahun 2024, Kota Surabaya memiliki 6 (enam) jenis potensi bencana, yaitu banjir/pasang air laut, angin puting beliung/angin kencang, kebakaran, gempa bumi, gelombang tinggi, dan cuaca ekstrem. Selama periode tahun 2020 – 2024, kebakaran menjadi bencana yang paling sering terjadi. Namun demikian jumlah kejadian kebakaran di tahun 2024 menurun sekitar 50% dibandingkan tahun 2023.



Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Surabaya, dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah melakukan beberapa strategi dalam pengendalian, pengurangan, serta penanggulangan bencana kebakaran, antara lain:

1. Melakukan pemeriksaan dan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran pada 425 bangunan gedung, baik milik swasta maupun milik Pemerintah Kota Surabaya;
2. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi pencegahan dan penanganan kebakaran, kepada 1.380 orang di 66 kelurahan dan 31 kecamatan;
3. Meningkatkan kompetensi petugas pemadam kebakaran melalui pelatihan penanganan kebakaran pada 656 petugas yang dilaksanakan sebanyak 2 kali pada bulan Juni dan Oktober;
4. Meningkatkan sarana prasarana penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan melalui pembangunan hydrant sebanyak 3 unit di Jl. Keputran Kejambon III, Jl. Ngagel Timur V, dan Jl. Kebon Dalem V serta;
5. Meningkatkan waktu tanggap kejadian kebakaran dengan standar ≤ 7 menit dan cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran melalui peningkatan pelayanan pos rayon sebanyak 5 pos rayon, 17 pos pembantu serta pos komando taktis (poskotis) sebanyak 1 unit yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya, sehingga mampu memangkas jarak pelayanan petugas pemadam terhadap objek terjadinya kebakaran.

Optimalisasi upaya pengendalian, pengurangan, serta penanggulangan bencana kebakaran di tahun 2025 dapat diarahkan pada upaya peningkatan proteksi terhadap bangunan gedung terutama pada wilayah dengan intensitas pemanfaatan bangunan yang cenderung tinggi.

J.2 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota

Sebagaimana disajikan pada gambar di atas, Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota pada tahun 2024 sebesar 0,91, yang berarti indeks ini belum memenuhi target yang ditetapkan. Salah satu faktor penyebab ketidaktercapaian ini adalah masih adanya kasus pelanggaran perda yang belum terselesaikan, karena proses penyelidikan dan penyidikan yang masih berjalan. Selain itu, terdapat pelanggar perda yang kurang kooperatif dalam proses penindakan, sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut. Di samping itu, pelanggaran perda terkait penyalahgunaan aset pemerintah kota juga membutuhkan waktu untuk memeriksa status tanah yang terlibat. Namun demikian, pada tahun 2024 Pemerintah Kota Surabaya terus mengoptimalkan penegakan ketertiban umum



dengan upaya gabungan yang masif dan didukung oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam bertindak tertib/tidak melakukan pelanggaran aturan.

Pada aspek penanganan konflik dan potensi konflik yang akan terjadi, Pemerintah Kota Surabaya juga melaksanakan upaya pencegahan dan penindakan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain:

1. Pelaksanaan patroli rutin pada 266 lokasi yang berpotensi terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebanyak 19 kali;
3. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan bersama Kepolisian, TNI dan Kejaksaan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Penertiban pelanggaran Perda yang persuasif dan humanis dengan cara sosialisasi sebelum dilakukannya penertiban guna menemukan titik terang solusi dan mencegah adanya kesalahpahaman dan
5. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan wawasan dan kesadaran penegakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, salah satunya dalam bentuk Satpol PP *Goes to School* yang dilaksanakan di 28 sekolah serta pemberian apresiasi bagi generasi muda yang bertindak tertib/tidak melakukan pelanggaran aturan sehingga mendukung penciptaan kondisi yang tentram dan tertib di sekolah dan wilayahnya, dalam bentuk penancangan Duta Ketentraman dan Ketertiban umum.

Aspek lain yang mendukung capaian ketentraman dan ketertiban adalah kondisi kesatuan bangsa di Kota Surabaya. Dalam menjaga stabilitas kesatuan bangsa di masyarakat, pada tahun 2024 Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan upaya antara lain:

1. Pencegahan Intoleransi antar umat beragama dilakukan melalui:
 - a. Kegiatan rutin Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dilakukan setiap bulan;
 - b. Pemahaman pendirian rumah ibadat telah dilakukan 5 kali;
 - c. Giat dialog anti-radikalisme dilaksanakan 3 kali;
 - d. Survei izin pendirian rumah ibadah terlaksana 24 kali.
2. Revitalisasi stabilitas pengamanan kota melalui upaya bersama stakeholder terkait melalui rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 36 kali selama setahun.
3. Pemberdayaan organisasi masyarakat dilakukan kepada 86 ormas yang melaporkan aktivitas organisasinya secara berkala.
4. Pemantauan orang asing di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing pada 44 lokasi pemantauan.



5. Mengoptimalkan peran 10 (sepuluh) partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Surabaya untuk berpartisipasi aktif dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.

Kemudian, sebagai upaya untuk mengurangi risiko terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di seluruh wilayah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya juga memasang dan memelihara Penerangan Jalan Umum (PJU) yang sampai dengan tahun 2024 ada sebanyak 116.531 titik pada 12.764 lokasi. Di mana pada tahun 2025 pengembangan/pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) direncanakan pada 3.861 titik.

Rekomendasi terkait peningkatan ketentraman dan ketertiban pada tahun 2025 antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi antara Perangkat Daerah terkait guna menindaklanjuti hasil verifikasi dari Satpol PP, termasuk pemanfaatan dan pengendalian aset pasca penertiban;
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi/lembaga dan Perangkat Daerah terkait untuk percepatan pengecekan atas status tanah;
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sehingga masyarakat sadar hukum;
4. Peningkatan penyediaan data dan informasi untuk memotret perubahan perilaku masyarakat yang semakin positif dalam bertindak tertib, antara lain kondisi sebelum dan sesudah (perubahan) dan data sektoral masyarakat yang tertib/tidak melakukan pelanggaran serta
5. Pemberian apresiasi bagi warga yang bertindak tertib/tidak melakukan pelanggaran aturan sehingga mendukung penciptaan kondisi yang tentram dan tertib di wilayahnya.

3.1.1.2 Realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Sesuai dengan RPJMD Kota Surabaya 2021-2026, bidang urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 39 bidang urusan dengan capaian Indikator Kinerja Kunci sebagaimana disajikan dalam tabel 3.23. Pada tabel tersebut disajikan 39 bidang urusan dengan rata-rata capaian sebesar 105,74%. Hal ini menunjukkan bahwa bidang urusan telah diselenggarakan dengan baik, hal ini tidak lepas dari keberhasilan program kegiatan yang mendukung pencapaian pada 39 bidang urusan tersebut.



Tabel 3.23 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
Layanan Urusan Wajib Dasar					
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				
1.1	Indeks Pendidikan	79.33	77.61	97.83 %	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Surabaya sebagai salah satu unsur pembentuk Indeks Pendidikan berada di 10,89 tahun, sedangkan Harapan Lama Sekolah di mana pada tahun 2024 telah mencapai 14,87 tahun Mengingat pengelolaan pendidikan menengah merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pendidikan Tinggi kewenangan Nasional, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mendukung partisipasi sekolah di tingkat SMA/MA/SMK dan Perguruan Tinggi melalui 1) pemberian beasiswa SMA/MA/SMK dan bagi anak putus sekolah, 2) pendidikan kesetaraan berbasis vokasi melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), 3) Beasiswa Pemudah Tangguh untuk Mahasiswa , 4) Asrama Bibit Unggul, dan 5)menggandeng PKBM dalam menyelenggarakan kejar paket. Pemerintah Kota Surabaya juga bekerjasama dengan pelaku usaha melalui <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dalam pemberian beasiswa bagi siswa SMP dari keluarga miskin dan pramiskin serta dengan Baznas Kota Surabaya untuk bantuan tebus ijazah bagi siswa yang tidak mampu.



BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				
2.1	Angka Harapan Hidup	75.97	76.02	100.07 %	
2.2	Nilai Kepuasan Masyarakat	95.90 %	97.21 %	101.37 %	
2.2.1	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	95.90 %	95.31 %	99.38 %	<p>1. Masih adanya keluhan masyarakat terkait layanan kesehatan;</p> <p>2. Masih adanya Puskesmas yang belum optimal dalam memberikan pelayanan dan penyediaan sarana prasarana yang dimiliki sehingga berdampak pada kurangnya kepuasan pasien;</p> <p>3. Masih adanya permasalahan atas pelayanan pasien BPJS yang masih kurang efektif dari sisi sistem layanan (prosedur dan persyaratan).</p> <p>Penyelesaian permasalahan di atas diupayakan antara lain melalui:</p> <p>1. Evaluasi dan perbaikan pelayanan secara terus menerus, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">- penyesuaian jam buka loket pendaftaran;- waktu pelayanan sesuai estimasi pada lembar nomor antrian online;- pemenuhan kelengkapan serta perbaikan sarana prasarana yang kurang layak di setiap puskesmas.- pada rumah sakit disediakan anjungan untuk



BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
					<p>mengambil nomor antrian online (e-health).</p> <p>2. Meningkatkan kompetensi dan pelayanan SDM puskesmas dan rumah sakit, seperti dalam hal kedisiplinan dalam memberikan pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas respon perawat dalam menjawab pertanyaan pasien terutama terkait rencana tindakan pengobatan selanjutnya.</p> <p>3. Rumah sakit mengoptimalkan pelaksanaan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada pasien tentang persyaratan pelayanan.</p>
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				
3.1	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	0.820	0.83	101.22 %	
3.2	Indeks Keciptakarya, Penataan Ruang dan Pertanahan	0.78	0.82	105.13 %	
	3.2.1	Indeks Keciptakarya	0.425	0.48	112.94 %
	3.2.2	Indeks Penataan Ruang	0.288	0.32	111.11 %
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman				
4.1	Indeks Keciptakarya, Penataan Ruang dan Pertanahan	0.78	0.82	105.13 %	



BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
4.1.1	Indeks Keciptakarya	0.425	0.48	112.94 %	
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				
5.1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota	0.94	0.91	96.81 %	<p>1. Masih terdapat kasus pelanggaran perda yang belum terselesaikan dikarenakan terdapat proses yang masih berjalan yakni penyelidikan dan penyidikan;</p> <p>2. Terdapat pelanggar perda yang kurang kooperatif dalam proses penindakan, sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk proses penyelesaian pelanggaran tersebut.;</p> <p>3. Dalam hal pelanggaran perda berupa penyalahgunaan aset pemerintah kota dibutuhkan waktu untuk melakukan pengecekan atas status tanah.</p> <p>Penyelesaian permasalahan di atas diupayakan antara lain melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait guna menindaklanjuti hasil verifikasi dari Satpol PP. 2. Sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sehingga masyarakat sadar hukum. 3. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan lembaga/instansi yang terkait untuk percepatan pengecekan atas status tanah.



BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
5.1.1	Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan	80.77 %	81.31 %	100.67 %	
5.2	Indeks Penanggulangan Bencana	0.92	0.96	104.35 %	
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial				
6.1	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0.7	0.65	107.14 %	
6.2	Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk	1.46 %	0.81 %	144.52 %	
Layanan Urusan Wajib Non Dasar					
1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja				
1.1	Persentase tenaga kerja yang terserap	22.67 %	22.89 %	100.97 %	
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				
2.1	Indeks Pembangunan Gender	95.76	95.86	100.10 %	
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				
3.1	Skor Pola Pangan Harapan	95.20	95.53	100.35 %	



BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
3.1.1	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Pertanian	22 %	23.91 %	108.68 %	
4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				
4.1	Indeks Keciptakarya, Penataan Ruang dan Pertanian	0.78	0.82	105.13 %	
4.1.1	Indeks Pertanian	0.067	0.02	29.85 %	Adanya permasalahan hukum terkait kepemilikan persil, nilai dan luasannya sehingga mempengaruhi waktu penyelesaian pelaksanaan pengadaan tanah yang akan dibebaskan sesuai prioritas pembangunan oleh PD yang memerlukan tanah. Penyelesaian permasalahan di atas diupayakan melalui koordinasi antara lain dengan akademisi, Kantor Pertanian dan Pendampingan Hukum Kejaksaan terkait: a. Tahapan pengadaan tanah skala kecil b. verifikasi status alas hak persil dan subyek kepemilikan yang akan dibebaskan c. kesiapan pelaksanaan konsinyasi s/d eksekusi
5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				
5.1	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	64.94	113.32	174.50 %	



BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
5.2	Indeks Kualitas Air	57.58	57.65	100.12 %	
5.3	Indeks Kualitas Lahan	42.72	42.68	99.91 %	<ol style="list-style-type: none">1. Keterbatasan ruang untuk perluasan dan pengembangan RTH publik2. Identifikasi data RTH privat untuk perencanaan pengembangan RTH masih dalam tahap persiapan Untuk meningkatkan capaian Indeks Kualitas Lahan di tahun 2025, Dinas Lingkungan hidup berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dalam upaya pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik.
5.4	Indeks Kualitas Udara	90.34	83.72	92.67 %	<ol style="list-style-type: none">1. Faktor iklim yaitu kemarau panjang yang menyebabkan suhu dan volume debu meningkat.2. Emisi polutan dari sumber bergerak belum dapat dikendalikan, karena semakin meningkatnya jumlah kendaraan dan meningkatnya aktivitas perekonomian. Untuk meningkatkan capaian Indeks Kualitas Udara di tahun 2025, beberapa upaya yang akan dilakukan antara lain: <ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan antara lain terkait pelaksanaan uji emisi sebagai upaya monitoring kualitas udara emisi dari sumber bergerak serta peningkatan edukasi penggunaan kendaraan umum untuk mengurangi emisi.



BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
					2. Koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Perangkat Daerah terkait untuk edukasi penggunaan bahan bakar ramah lingkungan kepada pelaku usaha.
5.5	Indeks Persampahan	83.8	83.84	100.05 %	
6	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				
6.1	Nilai Kepuasan Masyarakat	95.90 %	97.21 %	101.37 %	
	6.1.1 Nilai Kepuasan Masyarakat pada Layanan Administrasi Kependudukan	95.90 %	94.38 %	98.42 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan jumlah blangko KTP-el dibandingkan dengan jumlah permohonan KTP el. 2. Belum terintegrasinya layanan publik lain yang berbasis kependudukan, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya sinkronisasi data kependudukan dengan data Imigrasi untuk pemantauan orang asing - Penggunaan Identitas Kependudukan Digital yang belum optimal dalam pengurusan perbankan - Pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih kurang terkait pemenuhan berkas persyaratan untuk pengajuan dokumen administrasi kependudukan 3. Kesadaran penduduk yang masih kurang untuk melakukan pemutakhiran informasi kependudukan termasuk, status/biodata pendidikan secara mandiri. <p>Peningkatan capaian Nilai Kepuasan Masyarakat pada</p>



BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
						<p>Layanan Administrasi Kependudukan pada tahun 2025, dilakukan antara lain melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Optimalisasi program aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) sebagai strategi alternatif penggunaan KTP-el fisik2. Sosialisasi pemanfaatan identitas kependudukan digital melalui surat kepada lembaga perbankan dan media sosial3. Inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, antara lain :<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan aplikasi pelayanan New Klampid Generation dengan adanya penambahan fitur chat konsultasi untuk memandu pemohon terkait pengajuan permohonan adminduk- Peningkatan pelayanan adminduk di balai RW dan berkolaborasi dengan RT Kalimasada supaya pemohon tidak perlu ke Kelurahan- Peningkatan kerjasama dengan rumah sakit, bidan, dan klinik untuk kemudahan dalam pengajuan permohonan akta kelahiran dan akta kematian;4. Kerjasama dengan Kemendikbudristek melalui program Magang Studi Independent Bersertifikat (MSIB) mahasiswa untuk mendorong kesadaran masyarakat terhadap adminduk sampai dengan level



BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
					RT. 5. Pembangunan kerjasama dengan kantor imigrasi terkait integrasi data orang asing.
7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				
7.1	Indeks Pembangunan Gender	95.76	95.86	100.10 %	
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana				
8.1	Angka Harapan Hidup	75.97	76.02	100.07 %	
	8.1.1 Indeks Bangga Kencana	68.87 %	69.09 %	100.32 %	
9	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan				
9.1	Indeks Penyelenggaraan Transportasi	0.743	0.78	104.98 %	
10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika				
10.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4.49	4.54	101.11 %	
11	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah				
11.1	Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran,	5.49 %	4.13 %	75.23 %	Penurunan PDRB kategori ini disebabkan oleh perlambatan pada Perdagangan mobil, Sepeda Motor dan



BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
	reparasi mobil dan sepeda motor				Reparasinya. Hal ini dikarenakan perubahan konsumsi masyarakat yang cenderung menahan belanja untuk yang bukan prioritas kebutuhan primer dan sekunder. Selain itu, aktivitas jual beli daring yang mendominasi perdagangan masih belum tercatat dengan baik, turut memperlambat PDRB. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan optimalisasi dan penguatan data dan informasi aktivitas ekonomi digital. Peran wilayah metropolitan (WM) Kota Surabaya melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antar wilayah juga perlu ditingkatkan.
11.2	Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	24.90 %	25.35 %	101.81 %	
12	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				
12.1	Nilai Kepuasan Masyarakat	95.90 %	97.21 %	101.37 %	
	12.1.1 Nilai Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	95.90 %	98.23 %	102.43 %	
12.2	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	7.67 %	7.72 %	100.65 %	
13	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga				



BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	
13.1	Indeks Pendidikan	79.33	77.61	97.83 %	<p>Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Surabaya sebagai salah satu unsur pembentuk Indeks Pendidikan berada di 10,89 tahun. Mengingat pengelolaan pendidikan menengah merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mendukung partisipasi sekolah di tingkat SMA/MA/SMK melalui 1) pemberian beasiswa SMA/MA/SMK dan bagi anak putus sekolah, 2) pendidikan kesetaraan berbasis vokasi melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan 3) menggandeng PKBM dalam menyelenggarakan kejar paket. Pemerintah Kota Surabaya juga bekerjasama dengan pelaku usaha melalui <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> dalam pemberian beasiswa bagi siswa SMP dari keluarga miskin dan pramiskin serta dengan Baznas Kota Surabaya untuk bantuan tebus ijazah bagi siswa yang tidak mampu. Untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah di mana pada tahun 2024 telah mencapai 14,87 tahun, Pemerintah Kota Surabaya memberikan beasiswa perguruan tinggi bagi mahasiswa terutama yang berasal dari keluarga miskin. Penyebarluasan informasi beasiswa melalui media sosial juga terus dilakukan sebagai bentuk peningkatan akses terhadap pendidikan tinggi.</p>	
	13.1.1	Indeks daya saing keolahragaan dan kepemudaan	0.76	1.17	153.95 %	



BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik				
14.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4.49	4.54	101.11 %	
	14.1.1 Persentase hasil analisa data yang terpublikasi	100 %	100 %	100.00 %	
15	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				
15.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4.49	4.54	101.11 %	
	15.1.1 Persentase serangan terhadap sistem keamanan informasi yang ditangani	100 %	100 %	100.00 %	
16	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				
16.1	Indeks Budaya Lokal	90	90.11	100.12 %	
17	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan				
17.1	Indeks Pendidikan	79.33	77.61	97.83 %	
	17.1.1 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat	69.4	100	144.09 %	



BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	
18	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan					
Layanan Urusan Pilihan						
1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan					
1.1	Skor Pola Pangan Harapan		95.20	95.53	100.35 %	
	1.1.1	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan	8.2 %	9.22 %	112.44 %	
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata					
2.1	Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum		7.9 %	7.38 %	93.42 %	<p>Beberapa hal yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB kategori ini ini antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pertumbuhan usaha industri makanan dan minuman di Kota Surabaya yang semakin pesat membuat persaingan semakin tinggi, sehingga pelaku usaha berupaya menekan margin keuntungan (<i>profit margin</i>) demi tetap bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat. 2) Keberadaan layanan berbasis digital seperti <i>cloud kitchen</i> dan <i>food delivery</i> yang berpotensi menggeser konsumsi restoran konvensional. <p>Untuk meningkatkan pertumbuhan PDRB kategori ini,</p>



BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	
					Pemerintah Kota Surabaya berupaya melalui peningkatan daya tarik wisata yang lebih masif dengan kegiatan promosi melalui event seni, kebudayaan dan sejarah dengan skala nasional serta melakukan penataan lanjutan destinasi wisata kota lama agar dapat menarik lebih banyak lagi wisatawan nusantara dan mancanegara berkunjung ke Kota Surabaya. Dengan demikian, akan memberikan dampak kepada usaha perhotelan dan makan minum di Kota Surabaya.	
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian					
3.1	Skor Pola Pangan Harapan	95.20	95.53	100.35 %		
	3.1.1	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Pertanian	22 %	23.91 %	108.68 %	
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan					
4.1	Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak		5.26 %	6.29 %	119.58 %	
4.2	Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor		5.49 %	4.13 %	75.23 %	Penurunan PDRB kategori ini disebabkan oleh perlambatan pada Perdagangan mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya. Hal ini dikarenakan perubahan konsumsi masyarakat yang cenderung menahan belanja untuk yang



BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
					bukan prioritas kebutuhan primer dan sekunder. Selain itu, aktivitas jual beli daring yang mendominasi perdagangan masih belum tercatat dengan baik, turut memperlambat PDRB. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan optimalisasi dan penguatan data dan informasi aktivitas ekonomi digital. Peran wilayah metropolitan (WM) Kota Surabaya melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antar wilayah juga perlu ditingkatkan.
4.3	Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	24.90 %	25.35 %	101.81 %	
5	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian				
5.1	Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan	3.96 %	5.48 %	138.38 %	
	5.1.1 Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan usaha	78 %	100 %	128.21 %	
Penunjang Urusan					
1	Sekretariat Daerah				



BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
1.1	Nilai SAKIP	84.02	90.24	107.40 %	
2	Sekretariat Dprd				
2.1.1	Persentase pelaksanaan fungsi DPRD	100 %	100	100.00 %	
3	Perencanaan				
3.1	Nilai SAKIP	84.02	90.24	107.40 %	
3.1.1	Nilai Perencanaan Kinerja dalam penilaian SAKIP	24.23	26.96	111.27 %	
4	Keuangan				
4.1	Opini BPK	WTP	WTP	100.00 %	
4.1.1	Persentase kontribusi Pendapatan terhadap APBD	89.50 %	97.97 %	109.46 %	
5	Kepegawaian				
5.1.1	Indeks Kualitas Pegawai	80.24	83.23	103.73 %	
6	Pendidikan Dan Pelatihan				



BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
6.1.1	Cakupan pegawai yang telah ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya	78.28 %	92.84 %	118.60 %	
7	Penelitian Dan Pengembangan				
7.1	Nilai SAKIP	84.02	90.24	107.40 %	
7.1.1	Nilai Indeks Inovasi Daerah	61	94.17	154.38 %	
8	Inspektorat Daerah				
8.1.1	Indeks kualitas pengawasan	83.55	98.26	117.61 %	
9	Kecamatan				
9.1	Nilai Kepuasan Masyarakat	95.90 %	97.21 %	101.37 %	
9.1.1	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	95.90 %	97.78 %	101.96 %	
10	Kesatuan Bangsa Dan Politik				
10.1	Indeks Kepedulian Sosial	97.96	97.98	100.02 %	
10.2	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota	0.94	0.91	96.81 %	



BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
10.2.1	Persentase penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan	95.67 %	100 %	104.53 %	



3.1.2 Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan Pada Setiap Urusan

3.1.2.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan pelayanan publik yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang mencakup penyelenggaraan pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di Kota Surabaya pada tahun 2024 telah berjalan dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara umum program dan kegiatan dalam **urusan wajib pelayanan dasar** telah memenuhi target sehingga **rata-rata capaian 110,02%**. Penjabaran pencapaian program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan pelayanan dasar yang dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di Kota Surabaya, dijabarkan dalam 6 Bidang urusan antara lain :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan beserta RSUD dr. Mohamad Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada;
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial



Tabel 3.24 Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	-Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 -Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045 -Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. -Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah. -Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri. -Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak. -Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	92.54 %	95.06 %	102.72 %				1. Sistem zona Kecamatan harap dievaluasi apakah % (persentase) nya perlu diperbesar agar bisa mencakup beberapa Kecamatan yang tidak memiliki SMPN atau jauh jaraknya	1. Pelaksanaan PPDB mengacu pada Permendikbudristek 1/2021. Pemerintah Kota Surabaya telah berinovasi dengan menciptakan zona 1 dan zona 2, sehingga semua kelurahan (153 kelurahan) memiliki kesempatan yang sama untuk diterima di SMP Negeri. Untuk jenjang SD tidak terjadi masalah zonasi.



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			<p>Daerah.</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini.</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.</p>								<p>2. Sudah saatnya ada pilot project terkait Smart School salah satunya penerapan system informasi manajemen sekolah (berbasis IT), maka bisa dimulai dari 10 sekolah dan berharap ke depan bisa diterapkan keseluruhan.</p> <p>3. Surabaya ada 153 kelurahan, tetapi SMP di Surabaya hanya 64 saja. Sehingga banyak kekurangan sekolah, akibatnya banyak anak sekolah yang tidak kebagian sekolah.</p>	<p>2. Terkait sekolah pilot project di wilayah Kota Surabaya, pada tahun 2024 telah dilaksanakan 41 sekolah, baik SD maupun SMP. Sedangkan saat ini di 2025 diperluas menjadi 93 sekolah dengan pemenuhan indikator utama Smart School, yakni: 1) elearning platform, 2) co-working space, 3) smart classroom (berbasis IoT), 4) edukasi BigData (ai dan coding), 5) literasi dan inklusi digital, 6) teknologi ramah anak berbasis komunitas, 7) pendidikan karakter, 8) pendidikan masyarakat, 9) infrastruktur digital. Sekolah tersebut secara bertahap dilengkapi sarana prasarana, media pembelajaran, serta peningkatan kompetensi guru. Proses tersebut dilakukan tidak hanya terhadap lima sekolah yg menjadi pilot project, namun juga terhadap seluruh sekolah negeri yang ada di Kota Surabaya.</p> <p>3. Surabaya dengan jumlah kecamatan sebanyak 31 Kecamatan dan 153 Kelurahan telah memiliki 63 SMP Negeri. Tahun 2025 akan ada penambahan 3 SMPN, penambahan SMPN baru akan dilakukan secara bertahap sesuai target pada RPJPD Kota</p>



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												Surabaya dengan memperhitungkan proyeksi jumlah lulusan SD dan daya tampung SMP Negeri dan Swasta di Kota Surabaya.
1.01.01.2.01		Dinas Pendidikan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam rangka Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 kegiatan	3 kegiatan	100.00 %				
93		Dinas Pendidikan		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	100.00 %				
1.01.01.2.02		Dinas Pendidikan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
94		Dinas Pendidikan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8621 Orang/bulan	8672 Orang/bulan	100.59 %				
1.01.01.2.06		Dinas Pendidikan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100.00 %				
1159		Dinas Pendidikan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100.00 %				
1.01.01.2.07		Dinas Pendidikan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	100%	100.00 %				
95		Dinas Pendidikan		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	636 Unit	636 Unit	100.00 %				
1.01.01.2.08		Dinas Pendidikan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100.00 %				
1161		Dinas Pendidikan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
1668		Dinas Pendidikan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
1.01.02		Dinas Pendidikan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100.00 %				
1.01.02		Dinas Pendidikan			Angka Kelulusan SMP/MTS	100%	100%	100.00 %				
1.01.02		Dinas Pendidikan			Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%	100%	100.00 %				
1.01.02		Dinas Pendidikan			Persentase guru PAUD yang kompeten	100%	100.31 %	100.31 %				
1.01.02		Dinas Pendidikan			Persentase guru yang mendapat pengembangan karir	38%	29.01 %	76.34 %	Guru cenderung lebih tertarik dan berkomitmen untuk mengikuti pelatihan yang memiliki manfaat	Pelatihan dirancang selain untuk memenuhi kebutuhan profesional atau tuntutan kerja guru,		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									nyata dan segera bagi mereka, misalnya untuk memenuhi portofolio bagi kenaikan pangkatnya, atau yang sesuai dengan kebutuhan/tuntutan profesi mereka.	juga mengandung benefit berupa pemenuhan kredit profesi mereka (JPL/SKP) yang berguna dalam penilaian kinerja dan kenaikan pangkat mereka		
1.01.02		Dinas Pendidikan			Persentase lembaga PAUD berkualitas	84.58 %	89.9 %	106.29 %				
1.01.02		Dinas Pendidikan			Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan	89.21 %	100%	112.10 %				
1.01.02		Dinas Pendidikan			Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan	90%	100%	111.11 %				
1.01.02		Dinas Pendidikan			Persentase SD terakreditasi minimal B	94.14 %	91.89 %	97.61 %	Kuota akreditasi yang ditetapkan dari BAN terbatas sehingga beberapa lembaga baru belum bisa diajukan untuk proses akreditasi, serta terdapat 12 lembaga baru yang memang belum masanya mengikuti akreditasi.	Melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan dan fasilitasi/pembinaan untuk persiapan pelaksanaan akreditasi terhadap satuan pendidikan.		
1.01.02		Dinas Pendidikan			Persentase SMP terakreditasi minimal B	96.79 %	93.47 %	96.57 %	Kuota akreditasi yang ditetapkan dari BAN terbatas sehingga beberapa lembaga baru belum bisa diajukan untuk proses akreditasi, serta terdapat beberapa lembaga baru yang memang belum masanya mengikuti akreditasi.	Melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan dan fasilitasi/pembinaan untuk persiapan pelaksanaan akreditasi terhadap satuan pendidikan.		
1.01.02.2.01		Dinas Pendidikan		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
1.01.02.2.01		Dinas Pendidikan			Jumlah laporan pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah dasar	4 laporan	4 laporan	100.00 %				
1.01.02.2.01		Dinas Pendidikan			Jumlah lembaga pendidikan dasar yang mendapatkan peningkatan mutu	692 Lembaga	692 Lembaga	100.00 %				
1.01.02.2.01		Dinas Pendidikan			Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%	100%	100.00 %				
1.01.02.2.01		Dinas Pendidikan			Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan	1 laporan	100.00 %				
96		Dinas Pendidikan		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	3 Paket	100.00 %				
97		Dinas Pendidikan		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang	38170 Peserta	38170 Peserta	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Didik	Didik					
98		Dinas Pendidikan		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	649 Satuan Pendidikan	649 Satuan Pendidikan	100.00 %				
99		Dinas Pendidikan		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	71390 Peserta Didik	71409 Peserta Didik	100.03 %				
104		Dinas Pendidikan		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3135 Orang	4563 Orang	145.55 %				
105		Dinas Pendidikan		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	259 Satuan Pendidikan	259 Satuan Pendidikan	100.00 %				
106		Dinas Pendidikan		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	587 Satuan Pendidikan	590 Satuan Pendidikan	100.51 %				
1246		Dinas Pendidikan		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	33 Paket	31 Paket	93.94 %	adanya perubahan anggaran antara saat usulan dan sinkronisasi/harmonisasi sehingga lembaga penerima sesuai dengan Rencana Kegiatan DAK fisik penganggaran 2024	melaksanakan pengadaan dan pendistribusian sesuai dengan RK DAK-Fisik dari Pusat		
3442		Dinas Pendidikan		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	7 Unit	7 Unit	100.00 %				
3443		Dinas Pendidikan		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	155 Unit	155 Unit	100.00 %				
1.01.02.2.02		Dinas Pendidikan		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
1.01.02.2.02		Dinas Pendidikan			Jumlah lembaga pendidikan menengah yang mendapatkan peningkatan mutu	305 Lembaga	376 Lembaga	123.28 %				
1.01.02.2.02		Dinas Pendidikan			Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%	100%	100.00 %				
1.01.02.2.02		Dinas Pendidikan			Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan	1 laporan	100.00 %				
1.01.02.2.02		Dinas Pendidikan			Pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah menengah tepat waktu	4 laporan	4 laporan	100.00 %				
107		Dinas Pendidikan		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	100.00 %				
109		Dinas Pendidikan		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang	16260 Peserta	16259 Peserta	99.99 %	adanya dinamika data gamis / pramis	menyesuaikan data dari profil sekolah dan		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Menengah Pertama	Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Didik	Didik			sinkronisasi dengan data sigakin		
111		Dinas Pendidikan		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	39248 Satuan Pendidikan	38606 Satuan Pendidikan	98.36 %	Adanya perubahan data peserta didik kelas 9 pada profil sekolah dikarenakan mutasi keluar kota.	Melakukan sinkronisasi pendataan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		
112		Dinas Pendidikan		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2122 Peserta Didik	2283 Peserta Didik	107.59 %				
114		Dinas Pendidikan		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1013 Orang	2061 Orang	203.46 %				
115		Dinas Pendidikan		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	256 Satuan Pendidikan	323 Satuan Pendidikan	126.17 %				
116		Dinas Pendidikan		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	272 Satuan Pendidikan	272 Satuan Pendidikan	100.00 %				
3444		Dinas Pendidikan		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	3 Unit	100.00 %				
3445		Dinas Pendidikan		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17 Unit	22 Unit	129.41 %				
1.01.02.2.03		Dinas Pendidikan		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
1.01.02.2.03		Dinas Pendidikan			Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik PAUD	12 laporan	12 laporan	100.00 %				
1.01.02.2.03		Dinas Pendidikan			Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan	1 laporan	100.00 %				
117		Dinas Pendidikan		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	209 Peserta Didik	349 Peserta Didik	166.99 %				
118		Dinas Pendidikan		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	88778 Peserta Didik	88778 Peserta Didik	100.00 %				
121		Dinas Pendidikan		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3092 Orang	3176 Orang	102.72 %				
122		Dinas Pendidikan		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	2217 Satuan Pendidikan	2217 Satuan Pendidikan	100.00 %				
1279		Dinas		Pembinaan Kelembagaan	Jumlah PAUD yang	2355	2355	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Pendidikan		dan Manajemen PAUD	Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan					
3539		Dinas Pendidikan		Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	3 Paket	4 Paket	133.33 %				
3582		Dinas Pendidikan		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	6 Unit	100.00 %				
4822		Dinas Pendidikan		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 unit	0 unit	0.00 %	Luasan lahan untuk area bermain luar ruang di satuan pendidik Paud sasaran TK Negeri Pembina II seluas 55,76 M2, sedangkan sesuai lampiran Peraturan Presiden nomor 57 tahun 2024 tentang Penunjuk Teknis Dana Alokasi Fisik Tahun 2024 minimal luas lahan yang dapat dibangun adalah 150 M2	Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui surat nomor 400.3.2 /16954/436.7.1/2024 tanggal 09 Juli 2024 terkait kendala tersebut dan mengoordinasikan solusi terbaik.		
4823		Dinas Pendidikan		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	1 paket	1 paket	100.00 %				
1.01.02.2.04		Dinas Pendidikan		Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
1.01.02.2.04		Dinas Pendidikan			Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik kesetaraan	12 laporan	12 laporan	100.00 %				
1.01.02.2.04		Dinas Pendidikan			Penanganan anak rentan putus sekolah dan putus sekolah	5 hari	1.01 hari	179.80 %				
124		Dinas Pendidikan		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	35 Peserta Didik	35 Peserta Didik	100.00 %				
125		Dinas Pendidikan		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	33 Peserta Didik	34 Peserta Didik	103.03 %				
127		Dinas Pendidikan		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang	253 Orang	101.20 %				
128		Dinas Pendidikan		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	153 Satuan Pendidikan	162 Satuan Pendidikan	105.88 %				
129		Dinas Pendidikan		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	25 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	100.00 %				
3538		Dinas		Pengadaan Perlengkapan	Jumlah Perlengkapan Sekolah	2 Paket	2 Paket	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Pendidikan		Sekolah	yang Tersedia							
1.01.04		Dinas Pendidikan		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru/ Murid jenjang SD	0.05	0.05	100.00 %				
1.01.04		Dinas Pendidikan			Rasio Guru/ Murid jenjang SMP	0.05	0.06	120.00 %				
1.01.04.2.01		Dinas Pendidikan		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	12685 orang	12920 orang	101.85 %				
1.01.04.2.01		Dinas Pendidikan			Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah	7725 orang	8856 orang	114.64 %				
133		Dinas Pendidikan		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
1275		Dinas Pendidikan		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	350 Laporan	434 Laporan	124.00 %				
1.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	-Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 -Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045 -Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	89.94 %	89.94 %	Masih adanya permintaan layanan kesekretariatan yang belum dapat terpenuhi dikarenakan kebutuhan prioritas seperti pemenuhan intervensi stunting dan Ibu Hamil, Pengadaan Sarpras RS baru dan proyek strategis lainnya	Optimalisasi perencanaan layanan kesekretariatan sesuai dengan kebutuhan	Terkait layanan kesehatan agar dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan rutin untuk peningkatan kualitas layanan baik di Puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik. 2. Puskesmas Kota Surabaya telah melaksanakan layanan telemedicine untuk penyakit umum dan dilaksanakan di semua puskesmas yang ada di Surabaya. Di bagian ini ada sorotan untuk pengelolaan Kader Surabaya Hebat yang setiap tahunnya menyedot anggaran dari uang	1. Dinas Kesehatan Kota Surabaya telah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk peningkatan kualitas layanan baik di Puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik. 2. Puskesmas Kota Surabaya telah melaksanakan layanan telemedicine berupa telekonsultasi antara pasien dengan tenaga medis, dan antara tenaga medis. 3. Jumlah Kader Surabaya Hebat (KSH) per bulan Desember sebesar 27.669, efektifitas kinerja KSH telah diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam program-program



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Surabaya.								rakyat sebesar Rp 200 milyar.	Pemerintah Kota Surabaya antara lain : a.
			-Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.								Sementara di sektor lain sangat membutuhkan	Melakukan pendataan terhadap warga Surabaya melalui
			-Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.								namun tidak mendapatkan alokasi anggaran, seperti pembangunan	aplikasi "Sayang Warga"; b. Membantu pelaksanaan kegiatan di Pos Binaan Terpadu (Posbindu); c.
			-Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.								sekolahan SMP.	Melaksanakan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia; d.
			-Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.									Melaksanakan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita atau Pemantauan Balita pada Masa Adaptasi
			-Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.									Kebiasaan Baru (Pelita Baru); e. Melaksanakan kegiatan Kelurahan Siaga; f. Melakukan pemantauan di masyarakat, antara lain: pemantauan jentik, Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), tracing/ pemantauan kontak jika ada kasus penyakit; g.
			-Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Eka Candrarini Kota Surabaya									Membagikan vitamin A kepada Balita, multivitamin pada lansia serta Tablet Tambah Darah untuk remaja putri; h. Melakukan pendataan produk olahan, penyehat tradisional serta pemanfaatan TOGA; i.
			-Peraturan Wali Kota Nomor 117 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Tuberkulosis Di Kota Surabaya									Melakukan pendampingan kontrol ke rumah sakit dan kunjungan Rumah bagi Pasien Paliatif serta Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Paliatif; j. Turut membantu dalam upaya pencegahan serta penurunan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); k. Sosialisasi



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												kepada Masyarakat terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). (sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota no 14 Tahun 2022)
1.02.01.2.02		Dinas Kesehatan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1502		Dinas Kesehatan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2253 Orang/bulan	2240 Orang/bulan	99.42 %	Adanya pengurangan jumlah ASN karena pensiun/purna tugas dan mutasi promosi jabatan	Pemutakhiran Data dengan Berkoordinasi dengan BKPSDM		
1.02.01.2.07		Dinas Kesehatan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	100.00 %				
1607		Dinas Kesehatan		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	9 Unit	225.00 %				
1.02.01.2.08		Dinas Kesehatan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100.00 %				
1608		Dinas Kesehatan		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi	3 jenis	3 jenis	100.00 %				
3599		Dinas Kesehatan		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan [63 Puskesmas]	63 Unit Kerja	63 Unit Kerja	100.00 %				
1.02.02		Dinas Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100%	100%	100.00 %				
1.02.02		Dinas Kesehatan			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	99.05 %	100.86 %	101.83 %				
1.02.02		Dinas Kesehatan			Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia	82.55 %	100%	121.14 %				
1.02.02		Dinas Kesehatan			Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes)	99.19 %	100.29 %	101.11 %				
1.02.02		Dinas Kesehatan			Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani ≤ 1 x 24 Jam	100%	100%	100.00 %				
1.02.02		Dinas Kesehatan			Persentase Fasilitas dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar	80.95 %	100%	123.53 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02		Dinas Kesehatan			Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu	100%	100%	100.00 %				
1.02.02		Dinas Kesehatan			Persentase Jaminan Kesehatan	97.30 %	99.3 %	102.06 %				
1.02.02		Dinas Kesehatan			Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	100%	100%	100.00 %				
1.02.02		Dinas Kesehatan			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	100%	100%	100.00 %				
1.02.02		Dinas Kesehatan			Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional	100%	100%	100.00 %				
1.02.02		Dinas Kesehatan			Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama	56%	60.32 %	107.71 %				
1.02.02		Dinas Kesehatan			Persentase Rumah Sehat	88.20 %	88.42 %	100.25 %				
1.02.02		Dinas Kesehatan			Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi	100%	100%	100.00 %				
1.02.02		Dinas Kesehatan			Prevalensi Balita Gizi Buruk	0.102 %	0.08 %	121.57 %				
1.02.02.2.01		Dinas Kesehatan		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peningkatan Fasilitas Kesehatan	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00 %				
1.02.02.2.01		Dinas Kesehatan			Jumlah Gedung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibangun dan dipelihara	16 unit	16 unit	100.00 %				
1.02.02.2.01		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi pemeliharaan dan pengadaan alat kesehatan	64 Unit	64 Unit	100.00 %				
1.02.02.2.01		Dinas Kesehatan			Jumlah unit layanan yang terpenuhi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan	64 Unit	64 Unit	100.00 %				
1610		Dinas Kesehatan		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	33 Unit	33 Unit	100.00 %				
1611		Dinas Kesehatan		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	88 Unit	88 Unit	100.00 %				
1612		Dinas Kesehatan		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	4 Unit	133.33 %				
1614		Dinas Kesehatan		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis	5 Paket	6 Paket	120.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan							
3453		Dinas Kesehatan		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	12 Unit	13 Unit	108.33 %				
3454		Dinas Kesehatan		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit	100.00 %				
3540		Dinas Kesehatan		Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	100.00 %				
3541		Dinas Kesehatan		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
5214		Dinas Kesehatan		Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5 Unit	5 Unit	100.00 %				
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaporan akreditasi puskesmas yang disusun	145 Dokumen	145 Dokumen	100.00 %				
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	4 kegiatan	6 kegiatan	150.00 %				
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	2 kegiatan	2 kegiatan	100.00 %				
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi di puskesmas	2 kegiatan	2 kegiatan	100.00 %				
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat di puskesmas	2 kegiatan	3 kegiatan	150.00 %				
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif di puskesmas	2 kegiatan	2 kegiatan	100.00 %				
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di puskesmas	3 kegiatan	3 kegiatan	100.00 %				
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah kegiatan penyediaan jaminan persalinan pada ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00 %				
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah lembaga yang melaksanakan pembinaan	153 Kelurahan	153 Kelurahan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)							
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah lokasi kejadian kegawatdaruratan yang dilayani	700 Lokasi	1004 Lokasi	143.43 %				
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas, dan bayi baru lahir	63 Unit	63 Unit	100.00 %				
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	63 Puskesmas	63 Puskesmas	100.00 %				
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	63 Puskesmas	63 Puskesmas	100.00 %				
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	63 Puskesmas	63 Puskesmas	100.00 %				
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	63 Puskesmas	63 Puskesmas	100.00 %				
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	63 Puskesmas	63 Puskesmas	100.00 %				
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Peningkatan Penerima Jaminan Kesehatan bagi PBPUP (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda	105 jiwa	-83935 jiwa	-79,938.10 %	1. Dari rekonsiliasi data dengan BPJS, diketahui adanya pengalihan segmentasi pembiayaan dari PBPUP APBD Kota Surabaya ke perusahaan/mandiri dan APBN 2. Adanya proses cleaning data kepesertaan PBPUP APBD Kota Surabaya dengan Data Warehouse Kemendagri untuk data yang sudah tidak berlaku (pindah, meninggal, dsb.).	Meningkatkan koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan masing-masing kelurahan untuk update e-dabu agar data kependudukan (check-in) sesuai, serta meningkatkan peserta aktif BPJS yang bersumber dari dana PBI APBD.		
1507		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
1588		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	37395 Orang	36837 Orang	98.51 %	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi ibu hamil yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu	Akan dilaksanakan pendampingan ibu hamil yang bekerjasama dengan TP PKK dan DP3APPKB serta KSH dalam pelaksanaan Pos		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									hamil sesuai jumlah riil telah yang ada telah terlayani	Ibi Hamil dan Pemeriksaan Calon Pengantin serta melakukan koordinasi yang intens dengan tim program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)		
1589		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	378637 Orang	367909 Orang	97.17 %	adanya jumlah lansia riil pada beberapa wilayah puskesmas yang dibawah jumlah sasaran lansia yang telah ditargetkan, hal ini dikarenakan adanya mobilitas dan domisili sasaran, akan tetapi seluruh lansia sesuai jumlah riil pada masing-masing wilayah telah terlayani	Melakukan peningkatan pelayanan Kesehatan melalui kegiatan posyandu lansia seperti pemeriksaan kesehatan serta senam rutin setiap minggu, sehingga lansia terpantau kesehatannya		
1590		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
1591		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
1593		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
1596		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1923364 Orang	1427657 Orang	74.23 %	Kurang optimalnya capaian layanan kesehatan penduduk usia produktif dikarenakan ketidaktersediaan data, selain itu kurangnya kesadaran masyarakat dengan usia produktif untuk mandiri melakukan skrining kesehatan	pelaksanaan skrining terintegrasi usia produktif dengan sasaran yang lebih meluas		
1597		Dinas Kesehatan		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	20 Dokumen	166.67 %				
1598		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
3671		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar							
3673		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Asemrowo]	791 Orang	659 Orang	83.31 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
3674		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	78502 Orang	84039 Orang	107.05 %				
3810		Dinas Kesehatan		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas [63 Puskesmas]	756 Dokumen	756 Dokumen	100.00 %				
3929		Dinas Kesehatan		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular [63 Puskesmas]	756 Dokumen	756 Dokumen	100.00 %				
3992		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat [63 Puskesmas]	756 Dokumen	756 Dokumen	100.00 %				
4055		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Asemrowo]	668 Orang	1022 Orang	152.99 %				
4056		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Balas Klumprik]	184 Orang	189 Orang	102.72 %				
4057		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Balongsari]	465 Orang	412 Orang	88.60 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan pemantauan/pendampingan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya Hebat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		
4058		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	204 Orang	188 Orang	92.16 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					[Puskesmas Bangkingan]				tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan pemantauan/pendampingan	Hebat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		
4059		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Banyu Urip]	782 Orang	575 Orang	73.53 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan pemantauan/pendampingan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya Hebat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		
4060		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Benowo]	724 Orang	786 Orang	108.56 %				
4061		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Bulak Banteng]	580 Orang	562 Orang	96.90 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan pemantauan/pendampingan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya Hebat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		
4062		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Dr. Soetomo]	687 Orang	658 Orang	95.78 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan pemantauan/pendampingan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya Hebat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4063		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Dukuh Kupang]	746 Orang	540 Orang	72.39 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan pemantauan/pendampingan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya Hebat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		
4064		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Dupak]	322 Orang	311 Orang	96.58 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan pemantauan/pendampingan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya Hebat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		
4065		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Gading]	1140 Orang	964 Orang	84.56 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan pemantauan/pendampingan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya Hebat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		
4066		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Gayungan]	587 Orang	499 Orang	85.01 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan pemantauan/pendampingan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya Hebat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		
4067		Dinas		Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Ibu Hamil yang	514 Orang	715 Orang	139.11 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kesehatan		Kesehatan Ibu Hamil	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Gundih]							
4068		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Gunung Anyar]	796 Orang	888 Orang	111.56 %				
4069		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Jagir]	705 Orang	725 Orang	102.84 %				
4070		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Jemursari]	248 Orang	624 Orang	251.61 %				
4071		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Jeruk]	259 Orang	282 Orang	108.88 %				
4072		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Kalijudan]	427 Orang	298 Orang	69.79 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan pemantauan/pendampingan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya Hebat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		
4073		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Kalirungkut]	710 Orang	572 Orang	80.56 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan pemantauan/pendampingan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya Hebat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		
4074		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Kebonsari]	747 Orang	806 Orang	107.90 %				
4075		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	549 Orang	449 Orang	81.79 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					[Puskesmas Kedungdoro]				tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan pemantauan/pendampingan	Hebat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		
4076		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Kedurus]	1043 Orang	970 Orang	93.00 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan pemantauan/pendampingan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya Hebat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		
4077		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Kenjeran]	525 Orang	491 Orang	93.52 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan pemantauan/pendampingan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya Hebat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		
4078		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Keputih]	559 Orang	514 Orang	91.95 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan pemantauan/pendampingan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya Hebat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		
4079		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Ketabang]	263 Orang	242 Orang	92.02 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan tenaga kesehatan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya Hebat dan Tim		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									puskesmas untuk melakukan pemantauan/pendampingan	Pendamping Keluarga (TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		
4080		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Klampis Ngasem]	351 Orang	530 Orang	151.00 %				
4081		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Krembangan Selatan]	506 Orang	458 Orang	90.51 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan pemantauan/pendampingan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya Hebat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		
4082		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Lidah Kulon]	353 Orang	228 Orang	64.59 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan pemantauan/pendampingan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya Hebat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		
4083		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Lontar]	578 Orang	608 Orang	105.19 %				
4084		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Made]	212 Orang	387 Orang	182.55 %				
4085		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Manukan Kulon]	798 Orang	763 Orang	95.61 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan tenaga kesehatan puskesmas untuk	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya Hebat dan Tim Pendamping Keluarga		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									melakukan pemantauan/pendampingan	(TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		
4086		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Medokan Ayu]	729 Orang	712 Orang	97.67 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan pemantauan/pendampingan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya Hebat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		
4087		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Menur]	412 Orang	275 Orang	66.75 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan pemantauan/pendampingan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya Hebat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		
4088		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Mojo]	1072 Orang	973 Orang	90.76 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan pemantauan/pendampingan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya Hebat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		
4089		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Moro Krembangan]	754 Orang	727 Orang	96.42 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya Hebat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									pemantauan/pendampingan	pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		
4090		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Mulyorejo]	527 Orang	350 Orang	66.41 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan pemantauan/pendampingan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya Hebat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		
4091		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Ngagel Rejo]	796 Orang	789 Orang	99.12 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan pemantauan/pendampingan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya Hebat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		
4092		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Pacar Keling]	545 Orang	638 Orang	117.06 %				
4093		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Pakis]	447 Orang	393 Orang	87.92 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan pemantauan/pendampingan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya Hebat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		
4094		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	370 Orang	342 Orang	92.43 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					[Puskesmas Pegirian]				tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan pemantauan/pendampingan	Hebat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		
4095		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Peneleh]	536 Orang	544 Orang	101.49 %				
4096		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Perak Timur]	995 Orang	902 Orang	90.65 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan pemantauan/pendampingan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya Hebat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		
4097		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Pucangsewu]	550 Orang	556 Orang	101.09 %				
4098		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Putat Jaya]	680 Orang	498 Orang	73.24 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan pemantauan/pendampingan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya Hebat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		
4099		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Rangkah]	512 Orang	476 Orang	92.97 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan pemantauan/pendampingan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya Hebat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		
4100		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Sawahan]	550 Orang	552 Orang	100.36 %				
4101		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Sawah Pulo]	413 Orang	417 Orang	100.97 %				
4102		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Sememi]	1204 Orang	974 Orang	80.90 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan pemantauan/pendampingan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya Hebat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		
4103		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Sidoseremo]	549 Orang	986 Orang	179.60 %				
4104		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Sidotopo]	422 Orang	489 Orang	115.88 %				
4105		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Sidotopo Wetan]	937 Orang	1005 Orang	107.26 %				
4106		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Simolawang]	469 Orang	454 Orang	96.80 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan pemantauan/pendampingan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya Hebat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		
4107		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	1080 Orang	1216 Orang	112.59 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Simomulyo]							
4108		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Siwalankerto]	228 Orang	227 Orang	99.56 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan pemantauan/pendampingan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya Hebat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		
4109		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Tambakrejo]	440 Orang	378 Orang	85.91 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan pemantauan/pendampingan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya Hebat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		
4110		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Tambak Wedi]	258 Orang	219 Orang	84.88 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan pemantauan/pendampingan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya Hebat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		
4111		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Tanah Kali Kedinding]	775 Orang	575 Orang	74.19 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan pemantauan/pendampingan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya Hebat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4112		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Tanjungsari]	334 Orang	329 Orang	98.50 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan pemantauan/pendampingan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya Hebat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		
4113		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Tembok Dukuh]	606 Orang	549 Orang	90.59 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan pemantauan/pendampingan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya Hebat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		
4114		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Tenggilis]	664 Orang	666 Orang	100.30 %				
4115		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Wiyung]	754 Orang	705 Orang	93.50 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan pemantauan/pendampingan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya Hebat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		
4116		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Wonokromo]	537 Orang	458 Orang	85.29 %	ibu hamil yang mempunyai tempat tinggal tidak tetap sehingga menyulitkan tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan pemantauan/pendampingan	Optimalisasi Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader Surabaya Hebat dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui pelaksanaan pemantauan ibu hamil di wilayah masing-masing dan		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										mengkoordinasikan dengan pihak puskesmas maupun RT/RW kelurahan setempat		
4117		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Wonokusumo]	1018 Orang	1049 Orang	103.05 %				
4181		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Balas Klumprik]	199 Orang	154 Orang	77.39 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4182		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Balongsari]	572 Orang	567 Orang	99.13 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4183		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Bangkingan]	259 Orang	138 Orang	53.28 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4184		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Banyu Urip]	1229 Orang	1047 Orang	85.19 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4185		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Benowo]	839 Orang	773 Orang	92.13 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4186		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Bulak Banteng]	766 Orang	380 Orang	49.61 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4187		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Dr. Soetomo]	1101 Orang	643 Orang	58.40 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4188		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Dukuh Kupang]	982 Orang	793 Orang	80.75 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4189		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Dupak]	453 Orang	457 Orang	100.88 %				
4190		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Gading]	1347 Orang	1104 Orang	81.96 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4191		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Gayungan]	677 Orang	437 Orang	64.55 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4192		Dinas		Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Orang Terduga	631 Orang	529 Orang	83.84 %	Penentuan jumlah sasaran	Optimalisasi pelaksanaan		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kesehatan		Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Gundih]				orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4193		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Gunung Anyar]	939 Orang	783 Orang	83.39 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4194		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Jagir]	876 Orang	701 Orang	80.02 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4195		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Jemursari]	336 Orang	284 Orang	84.52 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4196		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Jeruk]	530 Orang	445 Orang	83.96 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4197		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Kalijudan]	539 Orang	491 Orang	91.09 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4198		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Kalirungkut]	967 Orang	871 Orang	90.07 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4199		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Kebonsari]	875 Orang	583 Orang	66.63 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4200		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Kedungdoro]	1913 Orang	1918 Orang	100.26 %				
4201		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Kedurus]	1271 Orang	1011 Orang	79.54 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4202		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Kenjeran]	647 Orang	555 Orang	85.78 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4203		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Keputih]	711 Orang	579 Orang	81.43 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4204		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang	547 Orang	494 Orang	90.31 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Risiko Terinfeksi HIV	Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Ketabang]				terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4205		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Klampis Ngasem]	442 Orang	348 Orang	78.73 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4206		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Krembangan Selatan]	617 Orang	446 Orang	72.29 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4207		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Lidah Kulon]	458 Orang	336 Orang	73.36 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4208		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Lontar]	640 Orang	519 Orang	81.09 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4209		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Made]	224 Orang	80 Orang	35.71 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4210		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Manukan Kulon]	1156 Orang	941 Orang	81.40 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4211		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Medokan Ayu]	830 Orang	716 Orang	86.27 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4212		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Menur]	565 Orang	372 Orang	65.84 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4213		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Mojo]	1714 Orang	1492 Orang	87.05 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4214		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Moro Krebangan]	908 Orang	804 Orang	88.55 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4215		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Mulyorejo]	581 Orang	557 Orang	95.87 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4216		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Ngagel Rejo]	1101 Orang	1058 Orang	96.09 %	telah terlayani semuanya Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4217		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Pacar Keling]	704 Orang	649 Orang	92.19 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4218		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Pakis]	639 Orang	510 Orang	79.81 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4219		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Pegirian]	473 Orang	382 Orang	80.76 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4220		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Peneleh]	632 Orang	593 Orang	93.83 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4221		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Perak Timur]	1377 Orang	1002 Orang	72.77 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya			
4222		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Pucangsewu]	737 Orang	724 Orang	98.24 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4223		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Putat Jaya]	1048 Orang	748 Orang	71.37 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4224		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Rangkah]	640 Orang	493 Orang	77.03 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4225		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Sawahan]	862 Orang	723 Orang	83.87 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4226		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Sawah Pulo]	547 Orang	298 Orang	54.48 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4227		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas	1567 Orang	1252 Orang	79.90 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Sememij]				lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	lebih meluas		
4228		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Sidosermo]	638 Orang	531 Orang	83.23 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4229		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Sidotopo]	582 Orang	686 Orang	117.87 %				
4230		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Sidotopo Wetan]	1099 Orang	601 Orang	54.69 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4231		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Simolawang]	578 Orang	518 Orang	89.62 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4232		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Simomulyo]	1269 Orang	549 Orang	43.26 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4233		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Siwalankerto]	282 Orang	301 Orang	106.74 %				
4234		Dinas		Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Orang Terduga	576 Orang	492 Orang	85.42 %	Penentuan jumlah sasaran	Optimalisasi pelaksanaan		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kesehatan		Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Tambakrejo]				orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4235		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Tambak Wedi]	319 Orang	217 Orang	68.03 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4236		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Tanah Kali Kedinding]	984 Orang	823 Orang	83.64 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4237		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Tanjungsari]	451 Orang	239 Orang	52.99 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4238		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Tembok Dukuh]	734 Orang	572 Orang	77.93 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4239		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Tenggilis]	833 Orang	468 Orang	56.18 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah ditargetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4240		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Wiyung]	874 Orang	575 Orang	65.79 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4241		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Wonokromo]	629 Orang	531 Orang	84.42 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4242		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Wonokusumo]	1178 Orang	958 Orang	81.32 %	Penentuan jumlah sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita orang dengan risiko terinfeksi HIV telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan sasaran yang lebih meluas		
4243		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	49485 Orang	39500 Orang	79.82 %	adanya perbedaan antara proyeksi target yang telah ditetapkan dengan kondisi riil kasus dilapangan	Melakukan Perencanaan atau penetapan target kasus HIV di puskesmas akan disesuaikan/diprojeksikan dengan potensi kasus HIV di setiap puskesmas di tahun sebelumnya		
4244		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Asemrowo]	1253 Orang	1604 Orang	128.01 %				
4245		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Balas Klumprik]	384 Orang	428 Orang	111.46 %				
4246		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Balongsari]	917 Orang	914 Orang	99.67 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									terlayani semuanya			
4247		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Bangkingan]	391 Orang	389 Orang	99.49 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
4248		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Banyu Urip]	1651 Orang	1501 Orang	90.91 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
4249		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Benowo]	1579 Orang	1561 Orang	98.86 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
4250		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Bulak Banteng]	949 Orang	995 Orang	104.85 %				
4251		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Dr. Soetomo]	1492 Orang	1307 Orang	87.60 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
4252		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Dukuh Kupang]	1563 Orang	1552 Orang	99.30 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
4253		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Dupak]	596 Orang	835 Orang	140.10 %				
4254		Dinas		Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Orang Terduga	2448 Orang	3478 Orang	142.08 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kesehatan		Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Gading]							
4255		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Gayungan]	1143 Orang	1117 Orang	97.73 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
4256		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Gundih]	1065 Orang	1035 Orang	97.18 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
4257		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Gunung Anyar]	1584 Orang	1640 Orang	103.54 %				
4258		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Jagir]	1608 Orang	1891 Orang	117.60 %				
4259		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Jemursari]	547 Orang	539 Orang	98.54 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
4260		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Jeruk]	466 Orang	616 Orang	132.19 %				
4261		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Kalijudan]	1201 Orang	1866 Orang	155.37 %				
4262		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas	1380 Orang	1778 Orang	128.84 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Kalirungkut]							
4263		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Kebonsari]	1399 Orang	1380 Orang	98.64 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
4264		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Kedungdoro]	1093 Orang	1671 Orang	152.88 %				
4265		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Kedurus]	1974 Orang	2326 Orang	117.83 %				
4266		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Kenjeran]	1210 Orang	1074 Orang	88.76 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
4267		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Keputih]	1026 Orang	1687 Orang	164.42 %				
4268		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Ketabang]	502 Orang	1186 Orang	236.25 %				
4269		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Klampis Ngasem]	647 Orang	540 Orang	83.46 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
4270		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Krembangan Selatan]	1199 Orang	1159 Orang	96.66 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4271		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Lidah Kulon]	784 Orang	681 Orang	86.86 %	terlayani semuanya Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
4272		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Lontar]	1352 Orang	1262 Orang	93.34 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
4273		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Made]	392 Orang	407 Orang	103.83 %				
4274		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Manukan Kulon]	1481 Orang	1536 Orang	103.71 %				
4275		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Medokan Ayu]	1762 Orang	1606 Orang	91.15 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
4276		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Menur]	1308 Orang	1081 Orang	82.65 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
4277		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Mojo]	2102 Orang	2039 Orang	97.00 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
4278		Dinas		Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Orang Terduga	1219 Orang	1188 Orang	97.46 %	Penentuan jumlah sasaran	Optimalisasi pelaksanaan		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kesehatan		Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Moro Krembangan]				orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
4279		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Mulyorejo]	1089 Orang	1105 Orang	101.47 %				
4280		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Ngagel Rejo]	1451 Orang	1970 Orang	135.77 %				
4281		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Pacar Keling]	1637 Orang	1367 Orang	83.51 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
4282		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Pakis]	943 Orang	617 Orang	65.43 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
4283		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Pegirian]	819 Orang	935 Orang	114.16 %				
4284		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Peneleh]	1033 Orang	1361 Orang	131.75 %				
4285		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Perak Timur]	1967 Orang	1560 Orang	79.31 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
4286		Dinas		Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Orang Terduga	1423 Orang	1273 Orang	89.46 %	Penentuan jumlah sasaran	Optimalisasi pelaksanaan		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kesehatan		Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Pucangsewu]				orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
4287		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Putat Jaya]	1220 Orang	1200 Orang	98.36 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
4288		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Rangkah]	1866 Orang	2756 Orang	147.70 %				
4289		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Sawahan]	1433 Orang	1105 Orang	77.11 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
4290		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Sawah Pulo]	872 Orang	867 Orang	99.43 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
4291		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Sememij]	1841 Orang	1376 Orang	74.74 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
4292		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Sidosermo]	1090 Orang	1002 Orang	91.93 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4293		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Sidotopo]	1304 Orang	1524 Orang	116.87 %				
4294		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Sidotopo Wetan]	1631 Orang	1251 Orang	76.70 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
4295		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Simolawang]	998 Orang	2033 Orang	203.71 %				
4296		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Simomulyo]	2028 Orang	2884 Orang	142.21 %				
4297		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Siwalankerto]	452 Orang	429 Orang	94.91 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
4298		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Tambakrejo]	1461 Orang	1078 Orang	73.79 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
4299		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Tambak Wedi]	503 Orang	1424 Orang	283.10 %				
4300		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Tanah Kali Kedinding]	1585 Orang	1528 Orang	96.40 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4301		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Tanjungsari]	717 Orang	647 Orang	90.24 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
4302		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Tembok Dukuh]	1503 Orang	1483 Orang	98.67 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
4303		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Tenggilis]	1540 Orang	1464 Orang	95.06 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
4304		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Wiyung]	1568 Orang	1966 Orang	125.38 %				
4305		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Wonokromo]	1053 Orang	968 Orang	91.93 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
4306		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar [Puskesmas Wonokusumo]	1808 Orang	1765 Orang	97.62 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
4496		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan [63 Puskesmas]	756 Dokumen	756 Dokumen	100.00 %				
4638		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	727432 Orang	612182 Orang	84.16 %	Penentuan jumlah sasaran penderita hipertensi yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari	Optimalisasi pelaksanaan skrining terintegrasi pada penderita hipertensi dengan sasaran yang		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita hipertensi telah terlayani semuanya	lebih meluas		
4696		Dinas Kesehatan		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	666 Orang	2079 Orang	312.16 %				
4697		Dinas Kesehatan		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	205 Orang	1477 Orang	720.49 %				
4698		Dinas Kesehatan		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	10 Orang	100.00 %				
4810		Dinas Kesehatan		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
4811		Dinas Kesehatan		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
4824		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36208 Orang	40590 Orang	112.10 %				
4825		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	101979 Orang	91045 Orang	89.28 %	Penentuan jumlah sasaran penderita Diabetes Mellitus yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita diabetes mellitus telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining terintegrasi pada penderita diabetes mellitus dengan sasaran yang lebih meluas		
4826		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Asemrowo]	6854 Orang	3990 Orang	58.21 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4827		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Balas Klumprik]	2058 Orang	1357 Orang	65.94 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4828		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Balongsari]	3792 Orang	1659 Orang	43.75 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4829		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Bangkingan]	2025 Orang	1454 Orang	71.80 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4830		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Banyu Urip]	8177 Orang	2794 Orang	34.17 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4831		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Benowo]	8408 Orang	5526 Orang	65.72 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4832		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Bulak Banteng]	5340 Orang	9593 Orang	179.64 %				
4833		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Dr. Soetomo]	7128 Orang	2657 Orang	37.28 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD,	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									TK dan SD, SMP telah terlayani			
4834		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Dukuh Kupang]	7637 Orang	1144 Orang	14.98 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4835		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Dupak]	3137 Orang	1114 Orang	35.51 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4836		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Gading]	12278 Orang	7158 Orang	58.30 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4837		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Gayungan]	5657 Orang	2083 Orang	36.82 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4838		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Gundih]	5280 Orang	1491 Orang	28.24 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4839		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Gunung Anyar]	8167 Orang	3579 Orang	43.82 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4840		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Jagir]	7405 Orang	4324 Orang	58.39 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4841		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Jemursari]	2664 Orang	1809 Orang	67.91 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4842		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Jeruk]	2427 Orang	1940 Orang	79.93 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4843		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Kalijudan]	5544 Orang	8127 Orang	146.59 %				
4844		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Kalirungkut]	6786 Orang	4541 Orang	66.92 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4845		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Kebonsari]	7338 Orang	3787 Orang	51.61 %	terlayani Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4846		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Kedungdoro]	5456 Orang	1947 Orang	35.69 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4847		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Kedurus]	10492 Orang	10378 Orang	98.91 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4848		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Kenjeran]	6507 Orang	1605 Orang	24.67 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4849		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Keputih]	5316 Orang	4490 Orang	84.46 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4850		Dinas		Pengelolaan Pelayanan	Jumlah anak usia pendidikan	2540 Orang	3399 Orang	133.82 %	terlayani			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kesehatan		Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Ketabang]							
4851		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Klampis Ngasem]	3290 Orang	2165 Orang	65.81 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4852		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Krembangan Selatan]	5875 Orang	2749 Orang	46.79 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4853		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Lidah Kulon]	4085 Orang	2357 Orang	57.70 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4854		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Lontar]	6935 Orang	6750 Orang	97.33 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4855		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Made]	1980 Orang	2501 Orang	126.31 %				
4856		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Manukan]	7810 Orang	4704 Orang	60.23 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Kulon]				sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	usia pendidikan dasar		
4857		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Medokan Ayu]	9121 Orang	4082 Orang	44.75 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4858		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Menur]	6301 Orang	4822 Orang	76.53 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4859		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Mojo]	9713 Orang	1144 Orang	11.78 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4860		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Moro krebangan]	6511 Orang	748 Orang	11.49 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4861		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Mulyorejo]	6297 Orang	6252 Orang	118.03 %				
4862		Dinas		Pengelolaan Pelayanan	Jumlah anak usia pendidikan	6745 Orang	4941 Orang	73.25 %	Adanya Jumlah anak usia	Optimalisasi kegiatan		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kesehatan		Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Ngagel rejo]				pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4863		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Pacar Keling]	8070 Orang	2979 Orang	36.91 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4864		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Pakis]	4534 Orang	3572 Orang	78.78 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4865		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Pegirian]	4440 Orang	3798 Orang	85.54 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4866		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Peneleh]	4863 Orang	5253 Orang	108.02 %				
4867		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Perak Timur]	9833 Orang	4761 Orang	48.42 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4868		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Pucangsewu]	6417 Orang	2474 Orang	38.55 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4869		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Putat Jaya]	6406 Orang	4669 Orang	72.88 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4870		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Rangkah]	8924 Orang	6341 Orang	71.06 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4871		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Sawah Pulo]	4974 Orang	3438 Orang	69.12 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4872		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Sawahan]	6580 Orang	1694 Orang	25.74 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4873		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai	10144 Orang	10624 Orang	104.73 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					standar [Puskesmas Sememi]							
4874		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Sidoserma]	5405 Orang	2451 Orang	45.35 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4875		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Sidotopo]	7048 Orang	14406 Orang	204.40 %				
4876		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Sidotopo Wetan]	8886 Orang	5908 Orang	66.49 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4877		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Simolawang]	5249 Orang	5130 Orang	97.73 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4878		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Simomulyo]	10389 Orang	12202 Orang	117.45 %				
4879		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Siwalankerto]	2275 Orang	3380 Orang	148.57 %				
4880		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Tambak Wedi]	2971 Orang	1947 Orang	65.53 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani			
4881		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Tambakrejo]	7021 Orang	5706 Orang	81.27 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4882		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Tanah Kali Kedinding]	8835 Orang	6227 Orang	70.48 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4883		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Tanjungsari]	3238 Orang	499 Orang	15.41 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4884		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Tembok Dukuh]	7296 Orang	5855 Orang	80.25 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4885		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Tenggilis]	7520 Orang	4211 Orang	56.00 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4886		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Wiyung]	7421 Orang	2810 Orang	37.87 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4887		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Wonokromo]	5114 Orang	3814 Orang	74.58 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4888		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar [Puskesmas Wonokusumo]	10173 Orang	3627 Orang	35.65 %	Adanya Jumlah anak usia pendidikan dasar pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi yang telah di targetkan, akan tetapi seluruh anak usia pendidikan dasar di PAUD, TK dan SD, SMP telah terlayani	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas guna mencapai sasaran usia pendidikan dasar		
4889		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	73 Orang	556 Orang	761.64 %				
4954		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Asemrowo]	664 Orang	681 Orang	102.56 %				
4955		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Balas Klumprik]	183 Orang	156 Orang	85.25 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Bersalin		
4956		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Balongsari]	463 Orang	436 Orang	94.17 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Bersalin		
4957		Dinas		Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Ibu Bersalin yang	202 Orang	215 Orang	106.44 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kesehatan		Kesehatan Ibu Bersalin	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Bangkingan]							
4958		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Banyu Urip]	779 Orang	1344 Orang	172.53 %				
4959		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Benowo]	721 Orang	823 Orang	114.15 %				
4960		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Bulak Banteng]	577 Orang	1028 Orang	178.16 %				
4961		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Dr. Soetomo]	683 Orang	629 Orang	92.09 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Berssalin		
4962		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Dukuh Kupang]	742 Orang	572 Orang	77.09 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Berssalin		
4963		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Dupak]	320 Orang	252 Orang	78.75 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Berssalin		
4964		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Gading]	1133 Orang	968 Orang	85.44 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Berssalin		
4965		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Gayungan]	583 Orang	458 Orang	78.56 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Berssalin		
4966		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan	511 Orang	910 Orang	178.08 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Gundih]							
4967		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Gunung Anyar]	791 Orang	1254 Orang	158.53 %				
4968		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Jagir]	700 Orang	1117 Orang	159.57 %				
4969		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Jemursari]	246 Orang	239 Orang	97.15 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Berssalin		
4970		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Jeruk]	257 Orang	252 Orang	98.05 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Berssalin		
4971		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Kalijudan]	424 Orang	861 Orang	203.07 %				
4972		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Kalirungkut]	707 Orang	525 Orang	74.26 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Berssalin		
4973		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Kebonsari]	743 Orang	577 Orang	77.66 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Berssalin		
4974		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Kedungdoro]	545 Orang	445 Orang	81.65 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Berssalin		
4975		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1037 Orang	829 Orang	79.94 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					[Puskesmas Kedurus]				lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	Dasar (PONED) dan memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Berssalin		
4976		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Kenjeran]	521 Orang	497 Orang	95.39 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Berssalin		
4977		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Keputih]	556 Orang	550 Orang	98.92 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Berssalin		
4978		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Ketabang]	261 Orang	253 Orang	96.93 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Berssalin		
4979		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Klampis Ngasem]	350 Orang	574 Orang	164.00 %				
4980		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Krembangan Selatan]	504 Orang	418 Orang	82.94 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Berssalin		
4981		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Lidah Kulon]	351 Orang	798 Orang	227.35 %				
4982		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Lontar]	574 Orang	980 Orang	170.73 %				
4983		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Made]	210 Orang	210 Orang	100.00 %				
4984		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Manukan Kulon]	795 Orang	783 Orang	98.49 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Berssalin		
4985		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Medokan Ayu]	724 Orang	1423 Orang	196.55 %				
4986		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Menur]	410 Orang	680 Orang	165.85 %				
4987		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Mojo]	1066 Orang	1058 Orang	99.25 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Berssalin		
4988		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Moro krebangan]	750 Orang	770 Orang	102.67 %				
4989		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Mulyorejo]	524 Orang	372 Orang	70.99 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Berssalin		
4990		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Ngagel rejo]	791 Orang	836 Orang	105.69 %				
4991		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Pacar Keling]	542 Orang	514 Orang	94.83 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Berssalin		
4992		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Pakis]	445 Orang	352 Orang	79.10 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Berssalin		
4993		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Pegirian]	368 Orang	338 Orang	91.85 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Berssalin		
4994		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Peneleh]	533 Orang	536 Orang	100.56 %				
4995		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Perak Timur]	989 Orang	770 Orang	77.86 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Berssalin		
4996		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Pucangsewu]	548 Orang	375 Orang	68.43 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Berssalin		
4997		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Putat Jaya]	676 Orang	621 Orang	91.86 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Berssalin		
4998		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Rangkah]	509 Orang	470 Orang	92.34 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Berssalin		
4999		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Sawah Pulo]	411 Orang	815 Orang	198.30 %				
5000		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Sawahan]	546 Orang	487 Orang	89.19 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Berssalin		
5001		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Sememi]	1198 Orang	1081 Orang	90.23 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan memperkuat pendampingan Ibu Hamil		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
5002		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Sidosermo]	546 Orang	481 Orang	88.10 %	terlayani semuanya Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	dan Berssalin Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Berssalin		
5003		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Sidotopo]	419 Orang	401 Orang	95.70 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Berssalin		
5004		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Sidotopo Wetan]	932 Orang	788 Orang	84.55 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Berssalin		
5005		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Simolawang]	467 Orang	320 Orang	68.52 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Berssalin		
5006		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Simomulyo]	1075 Orang	1016 Orang	94.51 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Berssalin		
5007		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Siwalankerto]	227 Orang	194 Orang	85.46 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Berssalin		
5008		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Tambak Wedi]	257 Orang	240 Orang	93.39 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Berssalin		
5009		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan	437 Orang	868 Orang	198.63 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Tambakrejo]							
5010		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Tanah Kali Kedinding]	770 Orang	994 Orang	129.09 %				
5011		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Tanjungsari]	332 Orang	309 Orang	93.07 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Berssalin		
5012		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Tombok Dukuh]	603 Orang	598 Orang	99.17 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Berssalin		
5013		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Tenggilis]	663 Orang	664 Orang	100.15 %				
5014		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Wiyung]	749 Orang	720 Orang	96.13 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Berssalin		
5015		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Wonokromo]	534 Orang	467 Orang	87.45 %	Penentuan jumlah sasaran ibu bersalin yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh ibu bersalin telah terlayani semuanya	Akan meningkatkan Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan memperkuat pendampingan Ibu Hamil dan Berssalin		
5016		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [Puskesmas Wonokusumo]	1013 Orang	1167 Orang	115.20 %				
5017		Dinas Kesehatan		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak [63 Puskesmas]	63 Dokumen	63 Dokumen	100.00 %				
5080		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Asemrowo]	11 Orang	100 Orang	909.09 %				
5081		Dinas		Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Orang Dengan	11 Orang	20 Orang	181.82 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kesehatan		Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Balas Klumprik]							
5082		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Balongsari]	11 Orang	15 Orang	136.36 %				
5083		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Bangkingan]	11 Orang	4 Orang	36.36 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
5084		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Banyu Urip]	11 Orang	1 Orang	9.09 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
5085		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Benowo]	11 Orang	36 Orang	327.27 %				
5086		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Bulak Banteng]	11 Orang	60 Orang	545.45 %				
5087		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Dr. Soetomo]	11 Orang	55 Orang	500.00 %				
5088		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Dukuh Kupang]	11 Orang	256 Orang	2,327.27 %				
5089		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Dupak]	11 Orang	58 Orang	527.27 %				
5090		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang	11 Orang	32 Orang	290.91 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Tuberkulosis	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Gading]							
5091		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Gayungan]	11 Orang	5 Orang	45.45 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
5092		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Gundih]	11 Orang	87 Orang	790.91 %				
5093		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Gunung Anyar]	11 Orang	11 Orang	100.00 %				
5094		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Jagir]	11 Orang	60 Orang	545.45 %				
5095		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Jemursari]	11 Orang	7 Orang	63.64 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
5096		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Jeruk]	11 Orang	14 Orang	127.27 %				
5097		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Kalijudan]	11 Orang	11 Orang	100.00 %				
5098		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Kalirungkut]	11 Orang	20 Orang	181.82 %				
5099		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan	11 Orang	9 Orang	81.82 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Kesehatan Standar [Puskesmas Kebonsari]				oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	sasaran yang lebih meluas		
5100		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Kedungdoro]	11 Orang	1 Orang	9.09 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
5101		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Kedurus]	11 Orang	33 Orang	300.00 %				
5102		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Kenjeran]	11 Orang	1 Orang	9.09 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
5103		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Keputih]	11 Orang	45 Orang	409.09 %				
5104		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Ketabang]	11 Orang	49 Orang	445.45 %				
5105		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Klampis Ngasem]	11 Orang	6 Orang	54.55 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
5106		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Krembangan Selatan]	11 Orang	32 Orang	290.91 %				
5107		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang	11 Orang	16 Orang	145.45 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Tuberkulosis	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Lidah Kulon]							
5108		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Lontar]	11 Orang	30 Orang	272.73 %				
5109		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Made]	11 Orang	33 Orang	300.00 %				
5110		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Manukan Kulon]	11 Orang	15 Orang	136.36 %				
5111		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Medokan Ayu]	11 Orang	211 Orang	1,918.18 %				
5112		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Menur]	11 Orang	24 Orang	218.18 %				
5113		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Mojo]	11 Orang	11 Orang	100.00 %				
5114		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Moro krembangan]	11 Orang	0 Orang	0.00 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
5115		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Mulyorejo]	11 Orang	14 Orang	127.27 %				
5116		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Ngagel rejo]	11 Orang	84 Orang	763.64 %				
5117		Dinas		Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Orang Dengan	11 Orang	1 Orang	9.09 %	Penentuan jumlah sasaran	Optimalisasi pelaksanaan		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kesehatan		Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Pacar Keling]				orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
5118		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Pakis]	11 Orang	60 Orang	545.45 %				
5119		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Pegirian]	11 Orang	1 Orang	9.09 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
5120		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Peneleh]	11 Orang	108 Orang	981.82 %				
5121		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Perak Timur]	11 Orang	169 Orang	1,536.36 %				
5122		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Pucangsewu]	11 Orang	22 Orang	200.00 %				
5123		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Putat Jaya]	11 Orang	22 Orang	200.00 %				
5124		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Rangkah]	11 Orang	11 Orang	100.00 %				
5125		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Sawah Pulo]	11 Orang	15 Orang	136.36 %				
5126		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang	11 Orang	46 Orang	418.18 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Tuberkulosis	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Sawahan]							
5127		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Semem]	11 Orang	11 Orang	100.00 %				
5128		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Sidosermo]	11 Orang	11 Orang	100.00 %				
5129		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Sidotopo]	11 Orang	94 Orang	854.55 %				
5130		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Sidotopo Wetan]	11 Orang	41 Orang	372.73 %				
5131		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Simolawang]	11 Orang	182 Orang	1,654.55 %				
5132		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Simomulyo]	11 Orang	210 Orang	1,909.09 %				
5133		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Siwalankerto]	11 Orang	25 Orang	227.27 %				
5134		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Tambak Wedi]	11 Orang	5 Orang	45.45 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
5135		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Tambakrejo]	11 Orang	36 Orang	327.27 %				
5136		Dinas		Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Orang Dengan	11 Orang	204 Orang	1,854.55 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kesehatan		Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Tanah Kali Kedinding]							
5137		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Tanjungsari]	11 Orang	43 Orang	390.91 %				
5138		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Tembok Dukuh]	11 Orang	36 Orang	327.27 %				
5139		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Tenggilis]	11 Orang	10 Orang	90.91 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
5140		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Wiyung]	11 Orang	7 Orang	63.64 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
5141		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Wonokromo]	11 Orang	8 Orang	72.73 %	Penentuan jumlah sasaran orang terduga tuberkulosis yang sudah di targetkan oleh Kemenkes lebih tinggi dari kondisi riil dilapangan, akan tetapi seluruh penderita tuberkulosis telah terlayani semuanya	Optimalisasi pelaksanaan skrining pada penderita tuberkulosis dengan sasaran yang lebih meluas		
5142		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar [Puskesmas Wonokusumo]	11 Orang	267 Orang	2.427.27 %				
5143		Dinas Kesehatan		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	2 Paket	2 Paket	100.00 %				
5144		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
5145		Dinas Kesehatan		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya [63 Puskesmas]	756 Dokumen	756 Dokumen	100.00 %				
5208		Dinas Kesehatan		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
1.02.02.2.03		Dinas Kesehatan		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang diterapkan	3 Aplikasi	3 Aplikasi	100.00 %				
1618		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5 Dokumen	5 Dokumen	100.00 %				
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau	122 Lembaga	126 Lembaga	103.28 %				
1619		Dinas Kesehatan		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	63 Unit	63 Unit	100.00 %				
4693		Dinas Kesehatan		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
1.02.03		Dinas Kesehatan		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas	50.17 %	53.72 %	107.08 %				
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan	63 Orang	289 Orang	458.73 %				
1621		Dinas Kesehatan		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
1.02.03.2.03		Dinas Kesehatan		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %				
4953		Dinas Kesehatan		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	189 Orang	289 Orang	152.91 %				
1.02.04		Dinas Kesehatan		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	100%	100%	100.00 %				
1.02.04.2.06		Dinas Kesehatan		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan	Jumlah PIRT yang dibina	217 PIRT	217 PIRT	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga								
1622		Dinas Kesehatan		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	150 Unit	157 Unit	104.67 %				
1.02.05		Dinas Kesehatan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Aktif	100%	100%	100.00 %				
1.02.05.2.02		Dinas Kesehatan		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye GERMAS (CERDIK)	154 Kelurahan	154 Kelurahan	100.00 %				
1586		Dinas Kesehatan		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilakukan Puskesmas	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100.00 %				
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	63 Puskesmas	63 Puskesmas	100.00 %				
1506		Dinas Kesehatan		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
3675		Dinas Kesehatan		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) [63 Puskesmas]	756 Dokumen	756 Dokumen	100.00 %				
1.02.01		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang mencapai target	82.90 %	88.89 %	107.23 %			Manajemen antrian dalam layanan perlu dikaji ulang apakah perlu perbaikan dan dikaitkan dengan penerapan system IT. Masih saja terlihat banyaknya antrian orang yang berobat di sana.	1. Telah dilakukan perbaikan dalam penerapan sistem IT untuk antrian pendaftaran, baik secara online (e-health) maupun onsite (pendaftaran langsung di rumah sakit) 2. RSUD dr. Mohamad Soewandhie telah melakukan penyesuaian jam operasional loket



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												pendaftaran sehingga pasien tidak terlalu lama menunggu antrian sesuai sistem JKN dan e-health. 3. RSUD dr. Mohamad Soewandhie memberikan informasi kepada pasien tentang estimasi waktu pelayanan sesuai dengan jam dan nomor yang tertera pada lembar nomor antrian pada saat pendaftaran online. 4. Percepatan pelayanan dengan melengkapi semua loket pendaftaran rawat jalan dengan alat deteksi finger pasien termasuk kamera webcam untuk Face Recognition sebagai pemenuhan persyaratan pasien BPJS
1.02.01		RSUD dr. Mohamad Soewandhie			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	87.90 %	91.22 %	103.78 %				
1.02.01.2.02		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
336		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	811 Orang/bulan	809 Orang/bulan	99.75 %	Adanya pengurangan jumlah ASN karena pensiun/purna tugas dan mutasi promosi jabatan	Pemutakhiran Data dengan Berkoordinasi dengan BKPSDM		
1.02.01.2.08		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100.00 %				
360		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1.02.01.2.10		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di rumah sakit yang terpenuhi	100%	100%	100.00 %				
3021		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100.00 %				
1.02.02		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan kelas rumah	98.08 %	100%	101.96 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.01		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	sakit Persentase Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUD Mohamad Soewandhie	100%	100%	100.00 %				
329		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	3 Unit	300.00 %				
1.02.01		RSUD Bhakti Dharma Husada		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Bhakti Dharma Husada yang mencapai target	82%	95.96 %	117.02 %			Manajemen antrian dalam layanan perlu dikaji ulang apakah perlu perbaikan dan dikaitkan dengan penerapan system IT. Perluasan Gedung segera direalisasikan karena tuntutan Masyarakat terhadap pelayanan dan kenyamanan yang baik selalu meningkat.	1. Optimalisasi digitalisasi pelayanan RS dengan aplikasi PETIS RUJAK (Pendaftaran Otomatis Rujukan Tanpa Berkas) di Instalasi Rawat Jalan 2. Telah dilaksanakan digitalisasi permintaan layanan kesehatan diantaranya laboratorium/radiologi dan e-resep. 3. Menambah titik pengambilan obat yang semula 2 UPF menjadi 3 UPF untuk mengurai antrian pengambilan obat. 4. Percepatan pelayanan dengan memperbanyak titik bantuan layanan meliputi titik layanan finger print pasien IRJ, pengambilan jadwal antrian e-health, dan lain-lain. 5. RSUD Bhakti Dharma Husada telah berkoordinasi dengan pihak terkait tentang perluasan gedung dengan mempertimbangkan skala prioritas kota
1.02.01		RSUD Bhakti Dharma Husada			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%	92.21 %	103.61 %				
1.02.01.2.02		RSUD Bhakti Dharma Husada		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
91		RSUD Bhakti Dharma Husada		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	478 Orang/bulan	478 Orang/bulan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.01.2.08		RSUD Bhakti Dharma Husada		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100.00 %				
908		RSUD Bhakti Dharma Husada		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1.02.01.2.10		RSUD Bhakti Dharma Husada		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Jenis Kebutuhan Operasional Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS yang terpenuhi	100%	100%	100.00 %				
3172		RSUD Bhakti Dharma Husada		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100.00 %				
1.02.02		RSUD Bhakti Dharma Husada		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan kelas rumah sakit	98%	104.72 %	106.86 %				
1.02.02.2.01		RSUD Bhakti Dharma Husada		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100%	100%	100.00 %				
82		RSUD Bhakti Dharma Husada		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	24 Unit	16 Unit	66.67 %	Waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proses pengadaan tidak mencukupi	Berkoordinasi secara intensif dengan pihak terkait dan melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan		
4694		RSUD Bhakti Dharma Husada		Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit	100.00 %				
1.04.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	-Peraturan Daerah Kota Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman -Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 -Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	88.5 %	95.32 %	107.71 %			Perlunya pengawasan oleh Pemerintah Kota Surabaya terkait pemenuhan SLF termasuk bangunan apartemen. Melakukan evaluasi pengelolaan rumah susun terkait penghuni yang bermasalah.	-Telah diterbitkan 2165 buah Surat Keputusan Penerapan Sanksi pada unit yang ditemukan melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Pemakaian Rumah Susun.



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			<p>Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045</p> <p>-Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya.</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 131 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 74 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran</p>									



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan -Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya. -Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung. -Peraturan Wali Kota Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum									
1.04.01.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis	2 jenis	100.00 %				
1203		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100.00 %				
1.04.01.2.02		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1205		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/bulan	100 Orang/bulan	99.01 %	Adanya pengurangan jumlah ASN karena pensiun/purna tugas dan mutasi promosi jabatan	Permutakhiran Data dengan Berkoordinasi dengan BKPSDM		
1.04.01.2.06		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	3 Jenis	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		serta Pertanahan										
1207		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	100.00 %				
1.04.01.2.09		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis	2 Jenis	100.00 %				
1461		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89 Unit	89 Unit	100.00 %				
1.04.02		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penghuni rusunawa yang sesuai dengan kriteria	100%	85.7 %	85.70 %	Penindakan terhadap penghuni yang tidak sesuai kriteria dapat memicu reaksi negatif dari masyarakat atau penghuni yang kurang memahami ketentuan yang berlaku.	Menjadwalkan penindakan atas hunian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diawali dengan sosialisasi, sehingga dapat fokus pada kegiatan tanpa adanya upaya politisasi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.		
1.04.02.2.05		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Unit Hunian rumah susun Pemerintah Kota Surabaya	5233 Unit Hunian	5233 Unit Hunian	100.00 %				
166		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	109 Dokumen	109 Dokumen	100.00 %				
1.04.03		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni	95%	111.87 %	117.76 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		serta Pertanahan										
1.04.03.2.03		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jenis perbaikan rumah tapak tidak layak huni	2 jenis	2 jenis	100.00 %				
3471		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1500 Unit Rumah	1678 Unit Rumah	111.87 %				
1.04.04		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah susun sederhana sewa	100%	100%	100.00 %				
1.04.04.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pelaksanaan pencegahan permukiman kumuh	8 lokasi	9 lokasi	112.50 %				
172		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	9 Unit Rumah	9 Unit Rumah	100.00 %				
1.04.05		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik	60%	91.23 %	152.05 %				
1.04.05.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara administrasi yang diproses	15 dokumen	22 dokumen	146.67 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Pertanahan										
229		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	50 Laporan	62 Laporan	124.00 %				
1.03.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	<p>-Peraturan Daerah Kota Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman</p> <p>-Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024</p> <p>-Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045</p> <p>-Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 131 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.</p>	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan yang ber IMB	2.35 %	1.93 %	82.13 %	<p>1. Banyaknya pemohon Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang belum melengkapi dokumen administrasi persyaratan perijinan 2. Menurunnya jumlah pengembangan kawasan perumahan baru oleh pengembang sebagai salah satu dampak mwenurunya daya beli masyarakat di sektor properti serta semakin menurunnya luas lahan di Kota Surabaya untuk perumahan tapak 3. Masih rendahnya kesadaran penduduk kawasan permukiman non-siteplan dalam mengurus IMB 4. Dampak PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang dilaksanakan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2023 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di mana retribusi PBG bangunan rumah tinggal naik 600% sehingga minat warga untuk mengurus IMB menurun 5. Banyaknya bangunan dengan status kepemilikan tanah yang belum jelas/milik instansi lain.</p>	<p>1. Mendorong agar kelengkapan segera dipenuhi oleh pemohon 2. Berkolaborasi dengan Kecamatan untuk mengadakan sosialisasi kepada warga terutama di permukiman non-siteplan terkait pengurusan IMB 3. Melaksanakan pengawasan secara berkala pada koridor jalan arteri, kolektor dan lokal 4. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran denda administratif denda atas pelanggaran perda bangunan pada hari-hari tertentu 5. Memberikan kemudahan dalam pembayaran retribusi IMB dengan cara mengangsur 6. Melakukan monitoring secara berkala terkait pengawasan pembangunan pada koridor lingkungan.</p>	<p>Perlu nya pengawasan oleh Pemerintah Kota Surabaya terkait pemenuhan SLF termasuk bangunan apartemen. Melakukan evaluasi pengelolaan rumah susun terkait penghuni yang bermasalah.</p>	<p>- Telah melaksanakan pengawasan terkait pemenuhan SLF terhadap bangunan dengan fungsi apartemen, hotel, dan lain-lain dan hasilnya telah memiliki SLF sebanyak 427 bangunan dari 896 bangunan yang wajib memiliki SLF.</p>



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			-Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Pendirian Bangunan di Kota Surabaya. -Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024. -Peraturan Wali Kota Nomor 83 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Eropa Kota Lama Surabaya. -Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pecinan Kota Lama Surabaya. -Peraturan Wali Kota Nomor 85 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Ampel Kota Lama Surabaya. -Peraturan Wali Kota Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum -Peraturan Wali Kota Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 70 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Reklame									
1.03.08		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan			Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik	90.73 %	90.86 %	100.14 %				
1.03.08		Dinas Perumahan			Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non	85%	58.91 %	69.31 %	1. Ketersediaan dan kompetensi petugas	1. Penyederhanaan persyaratan untuk		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan			perizinan lingkup bangunan yang diselesaikan				<p>pemroses perijinan yang belum merata untuk memenuhi standar pelayanan penyelesaian perijinan yang lebih cepat.</p> <p>2. Adanya rekomendasi teknis yang perlu dipenuhi dari Perangkat Daerah lain sebelum perizinan diterbitkan</p> <p>3. Masih kurangnya pemahaman pemohon terkait kelengkapan persyaratan PBG.</p>	<p>mempermudah pengajuan PBG rumah tinggal sederhana dan non-rumah tinggal sederhana</p> <p>2. Penyederhanaan alur proses pelayanan 'berkas IMB/PBG yang telah masuk</p> <p>3. Sosialisasi kepada masyarakat terkait persyaratan sesuai perwali agar dapat dipersiapkan dengan baik dan tidak banyak pengembalian berkas.</p> <p>4. Pendataan dan pengawasan bangunan bersama Kecamatan, serta penyampaian update data bangunan belum berIMB/PBG kepada Kecamatan</p> <p>5. Koordinasi terkait data hasil pendataan bangunan di Kota Surabaya dengan Dinas Sosial, Bapemkesra dan Diskominfo serta mengidentifikasi bangunan pada kawasan/siteplan untuk membangun data terintegrasi</p> <p>6. Berkolaborasi dengan Kecamatan dan Satpol PP terkait peneraan sanksi pada pemohon untuk percepatan pemenuhan kelengkapan persyaratan PBG</p> <p>7. Melakukan In House Training kepada petugas pelayanan dan pemroses PBG terkait pemrosesan PBG agar lebih efektif dan efisien.</p> <p>8. Melakukan monitoring secara berkala untuk memantau pergerakan berkas.</p>		
1.03.08.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik	Jumlah bangunan gedung daerah yang dibangun/direhabilitasi dan dilakukan pemeliharaan	244 Bangunan	256 Bangunan	104.92 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		serta Pertanahan		Fungsi Bangunan Gedung								
1.03.08.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan			Jumlah berkas Perizinan dan Non Perizinan Bidang Tata Bangunan yang diproses	1747 Berkas	2503 Berkas	143.27 %				
1.03.08.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan			Jumlah dokumen penataan bangunan yang terbit dan disahkan	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
1.03.08.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan			Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan dan pengawasan bangunan yang dilaksanakan	1882 Lokasi	2108 Lokasi	112.01 %				
201		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	61 Dokumen	68 Dokumen	111.48 %				
202		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	158 Bangunan Gedung	167 Bangunan Gedung	105.70 %				
204		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	1861 Orang	2124 Orang	114.13 %				
221		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB),	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG							
222		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
3592		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	142 Bangunan Gedung	142 Bangunan Gedung	100.00 %				
1.03.11		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas perusahaan jasa konstruksi	95%	100%	105.26 %				
1.03.11.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jenis kelembagaan konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	5 jenis	5 jenis	100.00 %				
3470		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Lembaga	12 Lembaga	100.00 %				
1.03.12		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pelayanan penataan ruang	95%	102.19 %	107.57 %				
1.03.12.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTt) Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau Kajian teknis pendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci	3 dokumen	3 dokumen	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Pertanahan			Tata Ruang (RtR) Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan							
173		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00 %				
1.03.12.2.03		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota dan informasi penataan ruang kota yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	100.00 %				
176		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
547		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
1.03.01	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	93%	99.13 %	106.59 %			1. Menyiapkan alat dengan spesifikasi khusus agar dapat menjangkau pembersihan saluran-saluran di daerah pemukiman padat penduduk.	1. Pembersihan saluran pada permukiman padat penduduk dapat dilakukan dengan alat berat kecil sedangkan untuk bangunan-bangunan ataupun inritan warga yang menutup saluran, pembersihan dilakukan memakai tenaga manual (satgas)
1.03.01	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga				Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	86.25 %	92.96 %	107.78 %			2. Monitoring ketersediaan dan fungsi sanitasi umum untuk masyarakat luas.	2. 1. Telah berkoordinasi secara intens dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup terkait monitoring ketersediaan dan fungsi sanitasi di Kota Surabaya. 2. Telah dilakukan pemantauan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												terhadap fungsi sanitasi umum melalui kegiatan penyedotan dan pengolahan air limbah domestik di IPLT yang bisa dimonitoring pada aplikasi Senja dan Replica. 3. Telah dilakukan monitoring dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Keputih Surabaya serta seluruh IPAL aset Pemerintah Kota Surabaya (SWK, Rusunawa, Puskesmas, Kantor, Sekolah, dll) yang bisa dimonitoring pada aplikasi SimiPAL.
1.03.01.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%	100%	100.00 %				
715		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	100.00 %				
1.03.01.2.02		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1016		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	202 Orang/bulan	202 Orang/bulan	100.00 %				
1.03.01.2.06		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	100.00 %				
1011		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100.00 %				
1.03.01.2.09		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	300 unit	300 unit	100.00 %				
1.03.01.2.09		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak operasional	100%	100%	100.00 %				
586		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	73 Unit	73 Unit	100.00 %				
587		Dinas Sumber		Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan Dinas	227 Unit	227 Unit	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Daya Air dan Bina Marga		Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
849		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	7 Unit	116.67 %				
1.03.02		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase rumah pompa yang beroperasi	100%	100%	100.00 %				
1.03.02.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah pompa dan kelengkapannya yang dipelihara	62 unit	63 unit	101.61 %				
157		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	270 Unit	270 Unit	100.00 %				
1.03.05		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman	100%	100%	100.00 %				
1.03.05		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			Volume kapasitas operasional pelayanan pengolahan air limbah yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya	911 m3	913 m3	100.22 %				
1.03.05.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun	1 kelurahan	1 kelurahan	100.00 %				
1.03.05.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			Jumlah jenis lokasi IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik	4 Jenis	4 Jenis	100.00 %				
192		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	200 Rumah Tangga	200 Rumah Tangga	100.00 %				
870		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	96 Unit	96 Unit	100.00 %				
5218		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100.00 %				
1.03.06		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	100%	100%	100.00 %				
1.03.06.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun	80 dokumen	85 dokumen	106.25 %				
1.03.06.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan			Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem	1170 lokasi	1299 lokasi	111.03 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Bina Marga			drainase							
1.03.06.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan	50 lokasi	52 lokasi	104.00 %				
143		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	30 Sistem Drainase Perkotaan	30 Sistem Drainase Perkotaan	100.00 %				
158		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	15 Sistem Drainase Perkotaan	21 Sistem Drainase Perkotaan	140.00 %				
159		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	50 Dokumen	56 Dokumen	112.00 %				
160		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	10 Sistem Drainase Perkotaan	10 Sistem Drainase Perkotaan	100.00 %				
161		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis	15 Sistem Drainase Perkotaan	16 Sistem Drainase Perkotaan	106.67 %				
3456		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	7500 M	9685.02 M	129.13 %				
1.03.07		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain	9%	10.03 %	111.44 %				
1.03.07		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu	100%	100%	100.00 %				
1.03.07.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah permohonan masuk yang sudah diproses	240 berkas	243 berkas	101.25 %				
1.03.07.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			Jumlah SK Walikota tentang penetapan formulasi sewa tanah yang ditetapkan	13 Dokumen	15 Dokumen	115.38 %				
154		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	240 Unit	243 Unit	101.25 %				
3520		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	13 Unit	15 Unit	115.38 %				
1.03.10		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Luas jalan yang diperbaiki	170000 m2	446332.96 m2	262.55 %				
1.03.10		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun	11400 meter	53290.07 meter	467.46 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.03.10.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	137 dokumen	146 dokumen	106.57 %				
1.03.10.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun	200 lokasi	218 lokasi	109.00 %				
1.03.10.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dipelihara	2700 lokasi	3525 lokasi	130.56 %				
1.03.10.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			Jumlah lokasi pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur	5 lokasi	6 lokasi	120.00 %				
62		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	29.39 KM	53.29 KM	181.32 %				
146		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	1 KM	1.02 KM	102.00 %				
147		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	90 KM	179.27 KM	199.19 %				
148		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	29.39 KM	53.29 KM	181.32 %				
149		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	70 Dokumen	77 Dokumen	110.00 %				
150		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.8 KM	1.58 KM	197.50 %				
1.05.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja	-Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 -Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045 -Peraturan Daerah Kota Nomor 8 Tahun 2024 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97%	96.79 %	99.78 %	Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai Satpol PP	Dilakukan upaya peningkatan pelayanan dengan menyesuaikan kebutuhan	Perlu adanya koordinasi dengan pihak kepolisian terkait pengawasan dan penertiban untuk daerah perkampungan dan jalan raya yang rawan. Serta perlu evaluasi barang hasil sitaan agar tidak disalahgunakan oleh oknum. Dan mengevaluasi penentuan target,	1. Telah dilaksanakan kegiatan rutin Patroli Asuhan Rembulan setiap malam bekerjasama dengan jajaran Polrestabes Surabaya, Polres Tanjung Perak dan Kogartap III Surabaya 2. Telah dilaksanakan inventarisasi serta pengawasan terkait barang hasil dari penertiban dengan didukung adanya berita acara dan hasil bukti



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			<p>dan Prekursor Narkotika</p> <p>-Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 99 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</p>								<p>pencapaian realisasi indeks ketentraman, ketertiban dan bencana dengan memperhatikan kondisi di lapangan / masyarakat.</p>	<p>pembayaran denda sidang pelanggaran Tipiring 3. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan atas realisasi indeks ketentraman dan ketertiban dengan memperhatikan kondisi di lapangan / masyarakat.</p>
1.05.01.2.02		Satuan Polisi Pamong Praja		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1490		Satuan Polisi Pamong Praja		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/bulan	103 Orang/bulan	100.00 %				
1.05.01.2.06		Satuan Polisi Pamong Praja		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100.00 %				
2920		Satuan Polisi Pamong Praja		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	100.00 %				
1.05.01.2.08		Satuan Polisi Pamong Praja		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	100%	100.00 %				
2921		Satuan Polisi Pamong Praja		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1.05.02		Satuan Polisi Pamong Praja		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%	100%	100.00 %				
1.05.02		Satuan Polisi Pamong Praja			Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%	100%	100.00 %				
1.05.02		Satuan Polisi			Persentase PPNS yang dibina	100%	100%	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Pamong Praja										
1.05.02		Satuan Polisi Pamong Praja			Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya	100%	100%	100.00 %				
1.05.02		Satuan Polisi Pamong Praja			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%	100.00 %				
1.05.02.2.01		Satuan Polisi Pamong Praja		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang berkerjasama dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	11 Lembaga	11 Lembaga	100.00 %				
1.05.02.2.01		Satuan Polisi Pamong Praja			Jumlah lokasi penertiban pelanggaran Perda dan Perkada	104 Titik/Lokasi	104 Titik/Lokasi	100.00 %				
1.05.02.2.01		Satuan Polisi Pamong Praja			Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	192 Kali	210 Kali	109.38 %				
1.05.02.2.01		Satuan Polisi Pamong Praja			Jumlah Warga Sekitar lokasi penegakan Perda/Perkada yang berpotensi terkena dampak penegakan Perda/Perkada yang mendapatkan layanan	1280 Orang	1296 Orang	101.25 %				
1296		Satuan Polisi Pamong Praja		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1314		Satuan Polisi Pamong Praja		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	978 Orang	1426 Orang	145.81 %				
1508		Satuan Polisi Pamong Praja		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
3447		Satuan Polisi Pamong Praja		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
3529		Satuan Polisi		Pencegahan Gangguan	Jumlah Laporan Gangguan	12 laporan	12 laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Pamong Praja		Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan							
3530		Satuan Polisi Pamong Praja		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1.05.02.2.02		Satuan Polisi Pamong Praja		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang diselidiki, dilakukan penyidikan, dan diselesaikan	94 Objek	96 Objek	102.13 %				
1.05.02.2.02		Satuan Polisi Pamong Praja			Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang ditindak dan diselesaikan	4230 Objek	4975 Objek	117.61 %				
1510		Satuan Polisi Pamong Praja		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1511		Satuan Polisi Pamong Praja		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
4699		Satuan Polisi Pamong Praja		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
1.05.02.2.03		Satuan Polisi Pamong Praja		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang mendapatkan pengembangan kapasitas	75 Orang	79 Orang	105.33 %				
2909		Satuan Polisi Pamong Praja		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
1.05.01		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	94%	96.14 %	102.28 %			1. Perlunya antisipasi terhadap bencana alam yang berhubungan dengan iklim (hidrometeorologi) dengan membangun atau	1. Bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan berbagai macam kegiatan sebagai antisipasi terhadap bencana alam hidrometeorologi yaitu berupa pelaksanaan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											mempersiapkan posko tanggap bencana.	kegiatan sosialisasi pelatihan mitigasi bencana yang diberikan kepada sekolah, rumah susun, dan warga masyarakat, sosialisasi melalui berbagai platform media sosial, serta mempersiapkan posko tanggap bencana yang tersebar di berbagai wilayah Kota Surabaya (7 Posko Terpadu dan 18 Pos Pantau) untuk mengantisipasi berbagai jenis kejadian kedaruratan bencana hidrometeorologi seperti angin puting beliung, pohon tumbang, banjir rob, genangan dan sebagainya.
											2. Sosialisasi kebencanaan terhadap Masyarakat perlu massif atau di perkuat agar Masyarakat bisa mampu mengantisipasi secara mandiri dalam hal kebencanaan.	2. Pemerintah Kota Surabaya sudah melakukan sosialisasi mitigasi bencana dengan berbagai target sasaran yaitu sekolah, rumah susun, puskesmas, rumah sakit, dan warga masyarakat, serta telah mengedukasi masyarakat melalui berbagai platform media sosial untuk membangun kesadaran bencana masyarakat
											3. Perlu di masyarakatkan content dalam bentuk video terkait urgensi dan langkah langkah pencegahan bencana. Bisa melalui iklan Masyarakat.	3. Pemerintah Kota Surabaya melakukan kerjasama dengan unsur akademisi untuk pembuatan media edukasi kebencanaan kepada masyarakat melalui video dan penyebaran informasi melalui sosial media BPBD Kota Surabaya di Platform, Youtube, Instagram dan Tiktok. Konten edukasi dibuat menarik agar



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												masyarakat lebih tertarik terhadap informasi kebencanaan yang sangat cepat sekali mengalami perubahan.
1.05.01.2.02		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
472		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	34 Orang/bulan	103.03 %				
1.05.01.2.06		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100.00 %				
1232		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	18 Paket	120.00 %				
1.05.01.2.08		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	100%	100.00 %				
721		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1.05.03		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit	100%	99.99 %	99.99 %	1. Akan terjadi kendala apabila di waktu yang hampir bersamaan di jam masuk kerja atau jam pulang kerja, terjadi kejadian kedaruratan yang memerlukan penanganan di beberapa lokasi sekaligus 2. Kesulitan menemukan titik lokasi kejadian kedaruratan karena alamat tidak jelas atau kurang akuratnya titik lokasi yang dikirimkan (karena gangguan cuaca)	1. meluncurkan tim back up penanganan dari wilayah lain untuk melakukan respon apabila tim di wilayah tersebut belum menyelesaikan penanganan kejadian darurat yang lain 2. CC room akan membantu mengarahkan melalui HT setelah konfirmasi lokasi kepada pelapor		
1.05.03		Badan Penanggulangan Bencana Daerah			Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana	100%	99.82 %	99.82 %	Variasi peserta pelatihan yang beragam telah kami antisipasi dengan melakukan diversifikasi materi dan metode penyampaian pelatihan menyesuaikan terhadap jenis/kelompok sasaran peserta pelatihan sehingga masyarakat dapat memahami materi dengan lebih baik, namun demikian tetap ada beberapa peserta yang kurang memahami	BPBD akan melakukan pendampingan khusus kepada peserta yang tidak memenuhi standar post test dan melakukan pengulangan materi terhadap hal yang belum dimengerti.		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									sehingga tidak mampu mencapai standard yang diinginkan			
1.05.03.2.02		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	42 Kegiatan	42 Kegiatan	100.00 %				
195		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	5 Unit	5 Unit	100.00 %				
363		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1650 Kawasan	1702 Kawasan	103.15 %				
752		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	31 Kawasan	31 Kawasan	100.00 %				
1.05.03.2.03		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jenis kejadian bencana yang ditangani dalam Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10 Jenis	10 Jenis	100.00 %				
189		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	11000 Orang	19277 Orang	175.25 %				
194		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	467 Orang	1082 Orang	231.69 %				
1.05.01		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	88%	97.65 %	110.97 %			Untuk ditingkatkan pelatihan tanggap darurat pada security atau bidang- bidang lainnya di gedung, hotel, perkantoran, plaza dan gedung Pemerintahan. Perlu adanya SOP untuk pemeliharaan APAR. Mohon dialokasikan anggaran untuk penyediaan APAR	1. Jadwal kegiatan sosialisasi dan simulasi kebakaran untuk masyarakat tahun 2024 telah disusun 2. Juknis pemeliharaan APAR sudah disampaikan dan diedukasikan ke masyarakat pada setiap kegiatan sosialisasi dan simulasi masyarakat 3. Bahwa sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 28 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											di tiap-tiap RW.	Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, Pasal 7 ayat (4) yang berbunyi "Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, berupa sarana penanggulangan kebakaran termasuk dengan pengisian ulang" menjadi kewenangan Kelurahan
1.05.01.2.02		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
251		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	129 Orang/bulan	128 Orang/bulan	99.22 %	Adanya pengurangan jumlah ASN karena pensiun/purna tugas dan mutasi promosi jabatan	Pemutakhiran Data dengan Berkoordinasi dengan BKPSDM		
1.05.01.2.06		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 laporan	12 laporan	100.00 %				
940		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100.00 %				
1.05.01.2.08		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	3 paket	3 paket	100.00 %				
846		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1.05.04		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya	47	38.1	118.94 %				
1.05.04		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	100%	100%	100.00 %				
1.05.04.2.01		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilatih	656 Petugas	656 Petugas	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								
1.05.04.2.01		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			Persentase sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang berfungsi baik	100%	100%	100.00 %				
231		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
232		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10 Orang	15 Orang	150.00 %				
233		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
234		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	849 Unit	850 Unit	100.12 %				
1.05.04.2.02		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah berkas pemeriksaan sistem proteksi kebakaran bangunan/gedung	480 Berkas	480 Berkas	100.00 %				
240		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelainan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	2 Dokumen	3 Dokumen	150.00 %				
1.05.04.2.04		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi	90 Kegiatan	90 Kegiatan	100.00 %				
235		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	900 Orang	1380 Orang	153.33 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD	
1.06.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	<p>-Peraturan Daerah Kota Nomor 2 Tahun 2024 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan</p> <p>-Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024</p> <p>-Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045</p> <p>-Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 78 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Surabaya.</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya.</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 09 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Bagi Disabilitas di Kota Surabaya.</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Biaya Operasional untuk Mobil Ambulans yang Digunakan untuk Pelayanan Penanganan Sosial di Kota Surabaya.</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.</p>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	88%	94.01 %	106.83 %				1. Diupayakan Dinas Sosial saat ini melakukan update data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar distribusi bansos semakin membaik mengingat masih banyak warga yang berhak belum terdata.	1. 1. Telah dilakukan verifikasi dalam rangka pemutakhiran data keluarga miskin melalui musyawarah kelurahan atau muskel secara berkala setiap bulan oleh Dinas Sosial bersama dengan RT, RW, LPMK, Kelurahan dan Kecamatan 2. Dinas Sosial telah melakukan sinkronisasi data keluarga miskin dengan DTKS setiap bulan dalam rangka pengusulan bantuan sosial untuk keluarga miskin



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			-Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.								2. Mencermati penyaluran bansos mengenai ketepatan dan kecepatannya sampai pada sasaran agar terhindar dari penyimpangan dan tepat sasaran.	2. 1. Penyaluran bantuan sosial telah dilakukan berdasarkan data keluarga miskin yang telah dimutakhirkan melalui musyawarah kelurahan (Muskel) secara berkala setiap bulan oleh Dinas Sosial bersama dengan RT, RW, LPMK, Kelurahan dan Kecamatan, sehingga penerima bantuan sosial tepat sasaran. 2. Terkait dengan kegiatan penyaluran bantuan sosial, Dinas Sosial telah berkoordinasi dengan pendamping PKH, Kecamatan dan Kelurahan sehingga penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan dengan tepat dan cepat
			-Peraturan Wali Kota Nomor 114 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial								3. Penurunan angka orang miskin atau gamis, bukan karena warga miskin benar benar berkurang tetapi devinisi orang miskin yang diubah sehingga secara otomatis orang yang benar benar miskin menjadi tidak memenuhi syarat miskin. Dengan demikian jumlah orang miskin disebut berkurang.	3. Keluarga Miskin adalah keluarga yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan, dimana hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 117 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin. Terkait dengan data keluarga miskin Kota Surabaya, Dinas Sosial telah melakukan verifikasi bersama dengan RT, RW, Kelurahan, Kecamatan melalui musyawarah kelurahan yang dilaksanakan setiap bulan.
1.06.01.2.02		Dinas Sosial		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1497		Dinas Sosial		Penyediaan Gaji dan	Jumlah Orang yang Menerima	48	47	97.92 %	Adanya pengurangan	Pemutakhiran Data		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Orang/bulan		jumlah ASN karena pensiun/purna tugas dan mutasi promosi jabatan	dengan Berkoordinasi dengan BKPSDM		
1.06.01.2.06		Dinas Sosial		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor	100%	100%	100.00 %				
1402		Dinas Sosial		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100.00 %				
1.06.01.2.08		Dinas Sosial		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100.00 %				
1387		Dinas Sosial		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1.06.02		Dinas Sosial		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepelawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	88.24 %	100%	113.33 %				
1.06.02		Dinas Sosial			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	86.96 %	87%	100.05 %				
1.06.02.2.03		Dinas Sosial		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis PSKS perorangan yang dibina	6 jenis	6 jenis	100.00 %				
1.06.02.2.03		Dinas Sosial			Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS kelembagaan	852 orang	1104 orang	129.58 %				
1240		Dinas Sosial		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Lembaga	8 Lembaga	100.00 %				
3537		Dinas Sosial		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	583 Orang	897 Orang	153.86 %				
1.06.04		Dinas Sosial		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%	100%	100.00 %				
1.06.04		Dinas Sosial			Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%	100%	100.00 %				
1.06.04		Dinas Sosial			Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%	100%	100.00 %				
1.06.04		Dinas Sosial			Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan	100%	100%	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial							
1.06.04.2.01		Dinas Sosial		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah kegiatan pelayanan reunifikasi bagi PMKS	12 kali	12 kali	100.00 %				
1.06.04.2.01		Dinas Sosial			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Anak	12 kali	12 kali	100.00 %				
1.06.04.2.01		Dinas Sosial			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Lanjut Usia	12 kali	12 kali	100.00 %				
1.06.04.2.01		Dinas Sosial			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas	12 kali	12 kali	100.00 %				
1225		Dinas Sosial		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1299 Orang	1828 Orang	140.72 %				
1311		Dinas Sosial		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	230 Orang	224 Orang	97.39 %	1. Pemberian layanan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial menyesuaikan dengan jumlah lansia di UPTD Griya Wreda dan Liponsos Kusta Babat Jerawat (adanya lansia terlantar di UPTD Griya Wreda yang meninggal dunia) 2. Adanya kesadaran keluarga dalam merawat orang tua	Mengoptimalkan koordinasi dengan Kecamatan, Kelurahan dan PSKS terkait dengan adanya lansia terlantar		
3669		Dinas Sosial		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	99 Orang	99.00 %	1. Pemberian layanan pendidikan dan kesehatan dasar menyesuaikan dengan jumlah anak terlantar dan anak disabilitas terlantar di UPTD Kampung Anak Negeri dan Kalijudan 2. Adanya peningkatan kesadaran keluarga dalam mengasuh anak dan anak disabilitas	Mengoptimalkan koordinasi dengan Kecamatan, Kelurahan dan PSKS terkait dengan adanya anak terlantar dan anak disabilitas terlantar		
3670		Dinas Sosial		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	49 Orang	50 Orang	102.04 %				
4704		Dinas Sosial		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	2171 Orang	2329 Orang	107.28 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.06.04.2.02		Dinas Sosial		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial	12 kali	12 kali	100.00 %				
1.06.04.2.02		Dinas Sosial			Jumlah laporan pemberian layanan kedaruratan	12 laporan	12 laporan	100.00 %				
1230		Dinas Sosial		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1810 Orang	1877 Orang	103.70 %				
1239		Dinas Sosial		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	8150 Orang	11095 Orang	136.13 %				
1.06.05		Dinas Sosial		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87%	98.07 %	112.72 %				
1.06.05.2.02		Dinas Sosial		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan monitoring intervensi sosial	12 laporan	12 laporan	100.00 %				
1.06.05.2.02		Dinas Sosial			Jumlah laporan pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR	12 laporan	12 laporan	100.00 %				
1189		Dinas Sosial		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	42029 Keluarga	42408 Keluarga	100.90 %				
1266		Dinas Sosial		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	42014 Keluarga	42407 Keluarga	100.94 %				
3449		Dinas Sosial		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	116945 Orang	118222 Orang	101.09 %				
4670		Dinas Sosial		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1071 Orang	1071 Orang	100.00 %				
1.06.07		Dinas Sosial		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik	100%	100%	100.00 %				
1.06.07.2.01		Dinas Sosial		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	3 Jenis	3 Jenis	100.00 %				
3441		Dinas Sosial		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	7 Makam	7 Makam	100.00 %				



3.1.2.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu penyelenggaraan pada bidang Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan Dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, serta Kearsipan. Penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Kota Surabaya telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari capaian program dan kegiatan yang positif. Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dilaksanakan melalui :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja;
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ;
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian;
4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan;
5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika;



11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan;
12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Serta Pariwisata;
14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika;
15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika;
16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Serta Pariwisata;
17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan;
18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan.

Berikut ini merupakan penjabaran pencapaian pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Pemerintah Kota Surabaya tahun 2024.



Tabel 3.25 Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2.07.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	<p>-Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024</p> <p>-Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045</p> <p>-Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 87 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</p>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%	95.6 %	102.80 %				1. Menyediakan BLK untuk memenuhi kebutuhan anak-anak lulusan SMA/SMK serta di usia produktif yang ingin bekerja. Memastikan perusahaan di wilayah Kota Surabaya untuk merekrut tenaga kerja di wilayah sekitar.	1. 1. Pemerintah Kota Surabaya belum memiliki BLK maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melakukan kerja sama dalam kegiatan pelatihan dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Jawa Timur dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) di Surabaya. Selain itu, terkait kompetensi sertifikasi bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk menambah keahlian dan kompetensi dari pencari lulusan SMA/SMK sesuai dengan pasar kerja. 2. Pemerintah Kota Surabaya telah membuat Nota Kesepakatan dengan Hotel, dan pengelola pusat perbelanjaan (mall) di Surabaya diantaranya berkomitmen untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja penduduk Kota Surabaya dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di lingkungan perusahaan; 3. Mengundang perusahaan di Kawasan SIER, Margomulyo dan sekitarnya, serta perusahaan alih daya untuk diberikan himbauan agar memprioritaskan penduduk Surabaya pada saat pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja; 4. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyampaikan Surat Edaran kepada perusahaan-perusahaan yang berisi himbauan untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja penduduk Surabaya dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di lingkungan perusahaan. 5. Pemerintah Kota Surabaya dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran pada tahun ini dengan melakukan pendataan perusahaan terkait kebutuhan tenaga kerja dan memberikan info lowongan kepada Kelurahan / Kecamatan di sekitar perusahaan. 6. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja telah melakukan kerjasama dengan perusahaan-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												perusahaan di wilayah Kota Surabaya dalam rangka fasilitasi kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan-perusahaan dan menginformasikan lowongan tersebut kepada pencari kerja warga Kota Surabaya dengan melakukan rekrutmen langsung dan proses seleksi di Kantor Dinas yang dilakukan secara rutin untuk menciptakan penempatan tenaga kerja guna mengurangi pengangguran.
2.07.01.2.02		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1020		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	50 Orang/bulan	96.15 %	Adanya pengurangan jumlah ASN karena pensiun/purna tugas dan mutasi promosi jabatan	Pemutakhiran Data dengan Berkoordinasi dengan BKPSDM		
2.07.01.2.08		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.07.01.2.08		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1018		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3519		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.07.03		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten	81.02 %	94.02 %	116.05 %				
2.07.03		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	90.5 %	99.6 %	110.06 %				
2.07.03.2.01		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
2.07.03.2.01		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			Jumlah laporan pelaksanaan pemagangan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kerja										
705		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	720 Orang	752 Orang	104.44 %				
719		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	12 Lembaga	14 Lembaga	116.67 %				
2.07.03.2.04		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
1700		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	50 Perusahaan	53 Perusahaan	106.00 %				
2.07.03.2.05		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
720		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00 %				
2.07.04		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan	3%	3%	100.00 %				
2.07.04.2.01		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis	9 laporan	9 laporan	100.00 %				
594		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	1100 Orang	1100 Orang	100.00 %				
779		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	1950 Orang	2002 Orang	102.67 %				
914		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	250 Orang	274 Orang	109.60 %				
2.07.04.2.03		Dinas		Pengelolaan Informasi Pasar	Jumlah laporan	5 Laporan	5 Laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Perindustrian dan Tenaga Kerja		KERJA	penyelenggaraan Kegiatan Jobfair/Bursa Kerja							
1120		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	250 Orang	324 Orang	129.60 %				
2.07.04.2.04		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	5 Laporan	5 Laporan	100.00 %				
728		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	250 Orang	250 Orang	100.00 %				
2.07.05		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama	13.77 %	14.37 %	104.36 %				
2.07.05		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan	40%	41.27 %	103.18 %				
2.07.05.2.01		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
539		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1576		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	220 Perusahaan	294 Perusahaan	133.64 %				
2.07.05.2.02		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan	Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kerja		Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota							
542		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara	64 Perkara	128.00 %				
729		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselaikan	110 Perkara	120 Perkara	109.09 %				
2.08.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 -Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045 -Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. -Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak. -Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025. -Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	98.24 %	98.24 %	Terdapat perubahan perencanaan kebutuhan yang dialihkan pada kebutuhan yang lebih prioritas	mengoptimalkan perencanaan sesuai kebutuhan	1. Melakukan kolaborasi dengan pihak terkait dalam pengawasan dan penanganan permasalahan kenakalan anak atau remaja. Monitoring pada pekerja anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi eksploitasi anak.	1. 1) Melakukan kegiatan penyadaran oleh PUSPAGA SEMANGGI Kota Surabaya melalui sosialisasi/edukasi/parenting, bimbingan teknis fasilitator dan bimbingan masyarakat berupa pengembangan Puspaga RW, Webinar Kelas Parenting setiap Selasa Pukul 15.00 WIB, Talkshow, Instagram live, Puspaga Goes To School dan Puspaga Go To Community, serta Kelas Inspirasi. 2) UPTD PPA berkolaborasi dengan Perangkat Daerah terkait, jajaran samping, LSM dan psikolog volunteer terkait penanganan kenakalan anak dan remaja serta dilakukan monitoring bagi pekerja / eksplotasi pada anak 3) Melakukan sosialisasi dan edukasi melalui program Sosialisasi Dinamika Remaja di sekolah sekolah dasar dan tingkat menengah pertama (SD/SMP) dan sederajat serta pesantren tentang berbagai permasalahan yang terjadi pada usia anak hingga remaja dalam lingkup ranah pendidikan serta upaya-upaya perlindungan dari hal tersebut 4) Peningkatan peran dan partisipasi anak melalui Forum Anak Surabaya (FAS) sebagai upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan pemenuhan hak anak kepada anak-anak melalui kegiatan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024. -Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2024 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Kota Layak Anak. -Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2024 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Perlindungan Khusus kepada Anak.									sosialisasi oleh FAS untuk anak-anak di usia sekolah terkait bahaya bullying dan permasalahan anak lainnya serta membantu program Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan Kota Layak Anak 5) Melakukan konseling remaja melalui PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) dan kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) serta Kelas Remaja Surabaya Kreatif, Tangguh Mandiri 6) Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) di tingkat RW sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pengawasan orang tua dalam memberikan pengasuhan yang tepat bagi anaknya
2.08.01.2.02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1309		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	35 Orang/bulan	102.94 %				
2.08.01.2.06		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100.00 %				
1307		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.08.01.2.08		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
1308		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Laporan	11 Laporan	100.00 %				
2.08.02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud	100%	100%	100.00 %				
2.08.02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender	100%	100%	100.00 %				
2.08.02.2.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00 %				
1675		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk	58 Perangkat Daerah	58 Perangkat Daerah	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Keluarga Berencana			Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota							
2.08.02.2.02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	610 Orang	101.67 %				
1673		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Organisasi	58 Organisasi	105.45 %				
2.08.02.2.03		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Kegiatan	22 Kegiatan	104.76 %				
3070		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	740 Orang	745 Orang	100.68 %				
2.08.03		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%	100%	100.00 %				
2.08.03		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan			Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan	64.51 %	64.52 %	100.02 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			perempuan							
2.08.03.2.02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	70 kasus	100 kasus	142.86 %				
1699		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	70 Orang	100 Orang	142.86 %				
2.08.03.2.03		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	20 kecamatan	20 kecamatan	100.00 %				
1702		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
2.08.04		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	246	333	135.37 %				
2.08.04.2.03		Dinas		Penyediaan Layanan bagi	Jumlah laporan	12 laporan	12 laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	penyediaan layanan keluarga oleh Ruang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)							
1381		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Layanan	2 Layanan	100.00 %				
2.08.05		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	100%	100%	100.00 %				
2.08.05.2.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai data gender dan anak	58 Lembaga	58 Lembaga	100.00 %				
1677		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
2.08.06		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kelurahan Layak Anak	79.87 %	100%	125.20 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Berencana										
2.08.06.2.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00 %				
1704		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30 Organisasi	31 Organisasi	103.33 %				
2.08.06.2.02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator Kota Layak Anak	3 kegiatan	3 kegiatan	100.00 %				
1706		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
1708		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Orang	43 Orang	130.30 %				
2.08.07		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan	100%	100%	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam							
2.08.07		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	64.51 %	64.52 %	100.02 %				
2.08.07.2.02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	20 lembaga	20 lembaga	100.00 %				
2.08.07.2.02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	206 kasus	242 kasus	117.48 %				
1710		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	206 Orang	242 Orang	117.48 %				
1713		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	206 Orang	242 Orang	117.48 %				
2.13.05	URUSAN	Dinas	-Peraturan Daerah Kota Nomor	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Implementasi	100%	100%	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
	PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 -Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045 -Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025. -Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.	LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Program Pokok PKK dimasyarakat							
2.13.05.2.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	53 Kegiatan	57 Kegiatan	107.55 %				
4700		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
2.14.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan	-Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 -Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	63.06 %	76.03 %	120.57 %			1. Melakukan kolaborasi dengan pihak terkait dalam pengawasan dan penanganan permasalahan	1. 1) Melakukan kegiatan penyadaran oleh PUSPAGA SEMANGGI Kota Surabaya melalui sosialisasi/edukasi/parenting, bimbingan teknis fasilitator dan bimbingan masyarakat berupa pengembangan Puspaga RW,



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Keluarga Berencana	<p>Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045</p> <p>-Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.</p>								<p>kenakalan anak atau remaja. Monitoring pada pekerja anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi eksploitasi anak.</p>	<p>Webinar Kelas Parenting setiap Selasa Pukul 15.00 WIB, Talkshow, Intagram live, Puspaga Goes To School dan Puspaga Go To Community, serta Kelas Inspirasi. 2) UPTD PPA berkolaborasi dengan Perangkat Daerah terkait, jajaran samping, LSM dan psikolog volunteer terkait penanganan kenakalan anak dan remaja serta dilakukan monitoring bagi pekerja / eksploitasi pada anak 3) Melakukan sosialisasi dan edukasi melalui program Sosialisasi Dinamika Remaja di sekolah sekolah dasar dan tingkat menengah pertama (SD/SMP) dan sederajat serta pesantren tentang berbagai permasalahan yang terjadi pada usia anak hingga remaja dalam lingkup ranah pendidikan serta upaya-upaya perlindungan dari hal tersebut 4) Peningkatan peran dan partisipasi anak melalui Forum Anak Surabaya (FAS) sebagai upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan pemenuhan hak anak kepada anak-anak melalui kegiatan sosialisasi oleh FAS untuk anak-anak di usia sekolah terkait bahaya bullying dan permasalahan anak lainnya serta membantu program Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan Kota Layak Anak 5) Melakukan konseling remaja melalui PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) dan kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) serta Kelas Remaja Surabaya Kreatif, Tangguh Mandiri 6) Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) di tingkat RW sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pengawasan orang tua dalam memberikan pengawasan yang tepat bagi anaknya</p>
2.14.02.2.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah peserta sosialisasi pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	160 Orang	400 Orang	250.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1684		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	80 Satuan Pendidikan	275 Satuan Pendidikan	343.75 %				
2.14.02.2.02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan	58 Perangkat Daerah	58 Perangkat Daerah	100.00 %				
1685		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
4812		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
4816		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
2.14.03		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi	18.10 %	15.05 %	116.85 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Keluarga Berencana										
2.14.03		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi	84%	84.02 %	100.02 %				
2.14.03.2.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Mini Lokakarya	31 Kecamatan	31 Kecamatan	100.00 %				
4663		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
4665		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
4814		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
4817		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana	31 Organisasi	31 Organisasi	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Mitra Kerja	(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja							
2.14.03.2.02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Pertemuan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB) bersama dengan kader IMP	12 Kali	12 Kali	100.00 %				
3064		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
3065		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1566 Orang	1566 Orang	100.00 %				
2.14.03.2.03		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern (mCPR)	417003 Orang	417081 Orang	100.02 %				
3063		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Keluarga Berencana			Jaringan dan Jejaringnya							
3067		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1950 Orang	1950 Orang	100.00 %				
4813		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
2.14.03.2.04		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan di Kampung KB	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
3069		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	31 Kampung	31 Kampung	100.00 %				
4818		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
2.14.04		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Median usia kawin pertama perempuan	21 tahun	22.4 tahun	106.67 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
2.14.04		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Persentase balita yang mengikuti PAUD	41.56 %	117.91 %	283.71 %				
2.14.04		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial	47.50 %	104.23 %	219.43 %				
2.14.04		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya	42%	100%	238.10 %				
2.14.04.2.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok kegiatan UPPKA yang didampingi	10 Kelompok	10 Kelompok	100.00 %				
2.14.04.2.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Jumlah laporan kegiatan penyediaan biaya operasional bagi kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (DAK)	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
2.14.04.2.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan			Jumlah laporan pembentukan Kelompok Ketahanan dan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Kesejahteraan Keluarga							
2.14.04.2.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Jumlah laporan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
1676		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	153 Kelompok	153 Kelompok	100.00 %				
1678		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
1679		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	40 Unit	51 Unit	127.50 %				
1681		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,	6642 Orang	6642 Orang	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan							
3023		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	930 Orang	930 Orang	100.00 %				
2.14.04.2.02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	jumlah Tim Pendamping Keluarga yang berpartisipasi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6642 Orang	6642 Orang	100.00 %				
5216		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 laporan	1 laporan	100.00 %				
5217		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan	1 laporan	100.00 %				
2.09.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 -Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94%	94.58 %	100.62 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045 -Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025. -Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.									
2.09.01.2.02		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1501		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	100.00 %				
2.09.01.2.08		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100.00 %				
1645		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1646		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.09.03		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Indeks Kecukupan Pangan Pokok	1.22	3.18	260.66 %				
2.09.03.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah jenis pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	4 Jenis	4 Jenis	100.00 %				
988		Dinas Ketahanan		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan	15 Laporan	15 Laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Pangan dan Pertanian		dan Harga Pangan Pokok Strategis	stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis							
2.09.03.2.04		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jenis pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	3 Jenis	3 Jenis	100.00 %				
990		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
2.09.05		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman	97.89 %	100%	102.16 %				
2.09.05.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
989		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	36 Dokumen	36 Dokumen	100.00 %				
2.10.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	-Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 -Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045 -Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025. -Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	43886.90 M2	10151.3 M2	23.13 %	1. Menyesuaikan program prioritas pembangunan di tingkat kota, khususnya dalam pemulihan ekonomi dan penanganan genangan yang masih dalam proses verifikasi dan validasi status tanah sehingga berpengaruh terhadap luasan yang dibebaskan	Melakukan koordinasi lebih intensif dengan : 1. Kantor Pertanahan Surabaya, Kantor ATR/BPN Provinsi Jawa Timur untuk: a. Pendampingan dalam proses pengadaan tanah b. verifikasi status tanah yang direncanakan pengadaan 2. PD terkait, Kecamatan dan Kelurahan untuk mengidentifikasi kejelasan status tanah yang dilakukan pengajuan kebutuhan pengadaan		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Surabaya Tahun 2024.									
2.10.05.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengadaan/pembelian tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	2 lokasi	4 lokasi	200.00 %				
643		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	4 Dokumen	200.00 %				
2.11.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	-Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 -Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045 -Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya. -Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025. -Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024. -Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2024 tentang Program Kampung Iklim di Kota	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	86%	91.49 %	106.38 %			1. Penyediaan lahan TPS di masing-masing kelurahan. 2. Perlu adanya evaluasi terkait penataan SWK	1. Penyediaan TPS sangat bergantung dengan ketersediaan Lahan Aset Pemerintah Kota Surabaya yang ada di Masing-masing Kelurahan. Termasuk Persetujuan dari Warga yang berdekatan dan akses jalan yang tersedia. Saat ini telah tersedia 191 Lokasi TPS yang telah terbangun dan beroperasi di Kota Surabaya. Bagi Kelurahan yang belum tersedia akan dilayani di TPS yang berada di Kelurahan terdekat. 2. Sampah yang dihasilkan dari Kegiatan SWK atau Fasilitas Umum Lainnya yang saat ini sudah



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Surabaya.								<p>atau fasilitas umum lainnya yang lokasinya dekat dengan TPS. Khusus masalah Tempat pembuatan Akhir (TPA) Benowo), dalam pembahasan terungkap bahwa dalam perjanjian antara PT Sumber organik (SO) dengan pemerintah kota banyak kejanggalaan. Dalam perjanjian itu Pemkot dalam posisi yang dirugikan. Dimana kalau sampai di Surabaya berkurang dari 1000 ton per hari, maka Pemkot tetap harus bayar 1000 ton. Sedangkan jika sampai di Surabaya lebih dari 1000 maka pemkot harus banyak sesuai kenyataan. Selain itu, hasil jual listrik tidak disepakati masuk kas pemkot. Sehingga penjualan listrik itu malah menguntungkan PT SO. Dan pembayaran Tiping Fee pertahun yang selalu meningkat juga di rasakan sangat merugikan APBD. Untuk tahun 2023 saja pemkot harus</p>	<p>terbangun dapat di tempung di TPS Terdekat. Adapun kewajiban Pemerintah Kota Surabaya untuk mengirimkan sampah 1000 ton/hari ke TPA Benowo, terkait dengan kapasitas dan spesifikasi Fasilitas pengolahan sampah di Gasifikasi Powerplant. Pemerintah Kota membayarkan Biaya Pengolahan Sampah kepada PT. Sumber Organik sesuai dengan Jumlah sampah yang masuk dan diolah di TPA Benowo. Sesuai dengan dengan Kontrak Perjanjian Kerjasama, PT Sumber Organik mempunyai Hak untuk memperoleh dan memanfaatkan hasil pengolahan sampah dalam bentuk apapun. Ini merupakan bagian dari Pengembalian Investasi yang telah dilakukan.</p>



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											menguras 136 Milyar atau 220.000 per ton. Sehingga kami merekomendasikan agar ada evaluasi kerjasama ini yang berakhir pada 2032 ini.	
2.11.01.2.02		Dinas Lingkungan Hidup		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1040		Dinas Lingkungan Hidup		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	193 Orang/bulan	192 Orang/bulan	99.48 %	Adanya pengurangan jumlah ASN karena pensiun/purna tugas dan mutasi promosi jabatan	Pemutakhiran Data dengan Berkoordinasi dengan BKPSDM		
2.11.01.2.08		Dinas Lingkungan Hidup		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100.00 %				
958		Dinas Lingkungan Hidup		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.11.01.2.09		Dinas Lingkungan Hidup		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan	100%	100%	100.00 %				
995		Dinas Lingkungan Hidup		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	50 Unit	100.00 %				
2.11.03		Dinas Lingkungan Hidup		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik	46%	40.59 %	88.24 %	Meningkatnya konsentrasi polutan akibat perubahan iklim dan penambahan kegiatan usaha baru	1. Dinas Lingkungan Hidup melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam pemenuhan baku mutu 2. Dinas Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan Dinas terkait dalam memperbaiki kualitas air dengan pembangunan IPAL 3. Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembersihan rutin sungai/saluran dari sampah		
2.11.03		Dinas Lingkungan Hidup			Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	86%	93.44 %	108.65 %				
2.11.03.2.01		Dinas Lingkungan		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan	Jenis kualitas lingkungan yang dimonitoring selama	2 jenis	2 jenis	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Hidup		Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1 tahun							
2.11.03.2.01		Dinas Lingkungan Hidup			jumlah rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00 %				
171		Dinas Lingkungan Hidup		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00 %				
174		Dinas Lingkungan Hidup		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
2.11.03.2.02		Dinas Lingkungan Hidup		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) yang digunakan untuk menentukan ISPU kota dalam 1 tahun	2 stasiun	2 stasiun	100.00 %				
175		Dinas Lingkungan Hidup		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
2.11.04		Dinas Lingkungan Hidup		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase kelestarian keanekaragaman hayati	99.49 %	101.93 %	102.45 %				
2.11.04.2.01		Dinas Lingkungan Hidup		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	100.00 %				
2.11.04.2.01		Dinas Lingkungan Hidup			Pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	2.83 Ha	2.88 Ha	101.77 %				
177		Dinas Lingkungan Hidup		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	275.86 Ha	275.86 Ha	100.00 %				
3025		Dinas Lingkungan Hidup		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	125 Unit	125 Unit	100.00 %				
3044		Dinas Lingkungan Hidup		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan	14 Unit	14 Unit	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Kabupaten/Kota							
3543		Dinas Lingkungan Hidup		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
2.11.05		Dinas Lingkungan Hidup		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ketepatan waktu rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	80%	100%	125.00 %				
2.11.05		Dinas Lingkungan Hidup			Persentase peningkatan jumlah lokasi penanganan limbah B3/Sampah spesifik	90%	120%	133.33 %				
2.11.05.2.01		Dinas Lingkungan Hidup		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	250 berkas	273 berkas	109.20 %				
291		Dinas Lingkungan Hidup		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	255 Dokumen	304 Dokumen	119.22 %				
2.11.05.2.02		Dinas Lingkungan Hidup		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00 %				
861		Dinas Lingkungan Hidup		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
2.11.06		Dinas Lingkungan Hidup		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN	Persentase ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan	70%	59%	84.29 %	1. Kurangnya komitmen Pelaku Usaha dalam memahami persetujuan lingkungan 2. Kurangnya pemahaman Pelaku	1. Melakukan bimbingan teknis terkait pengelolaan aspek lingkungan baik aspek pengelolaan air, udara dan limbah B3 2.		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				HIDUP (PPLH)					Usaha dalam pengelolaan air limbah 3. Kegiatan usaha kurang disiplin dalam melakukan pengujian air limbah, dan udara emisi ambien secara rutin 4. Kegiatan usaha belum memenuhi kelengkapan administrasi	Melakukan pendampingan terkait pelaporan pelaksanaan persetujuan lingkungan melalui aplikasi esimpel 3. Dinas lingkungan Hidup memberikan penghargaan kepada kegiatan usaha yang taat terhadap semua aspek lingkungan 4. Berkolaborasi dengan DSDABM terkait pengolahan limbah domestik 5. Merekomendasikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pengolahan air limbah dengan pihak ketiga		
2.11.06.2.01		Dinas Lingkungan Hidup		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah obyek kegiatan usaha dan titik IPAL yang dibina dan diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya	432 obyek	432 obyek	100.00 %				
2.11.06.2.01		Dinas Lingkungan Hidup			Persentase ketepatan waktu persetujuan lingkungan yang diterbitkan	80%	100%	125.00 %				
181		Dinas Lingkungan Hidup		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	300 Dokumen	321 Dokumen	107.00 %				
183		Dinas Lingkungan Hidup		Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	254 Badan Usaha	254 Badan Usaha	100.00 %				
2.11.08		Dinas Lingkungan Hidup		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	61.04 %	129.77 %	212.60 %				
2.11.08		Dinas			Persentase peningkatan	59.77 %	115.54 %	193.31 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Lingkungan Hidup			peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan							
2.11.08.2.01		Dinas Lingkungan Hidup		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1 jenis	1 jenis	100.00 %				
2.11.08.2.01		Dinas Lingkungan Hidup			Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang dibutuhkan	12 kali	13 kali	108.33 %				
76		Dinas Lingkungan Hidup		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 Dokumen	13 Dokumen	108.33 %				
4695		Dinas Lingkungan Hidup		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1615 Orang	1645 Orang	101.86 %				
2.11.09		Dinas Lingkungan Hidup		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase jumlah perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat	71.20 %	112%	157.30 %				
2.11.09.2.01		Dinas Lingkungan Hidup		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang di usulkan	4 penghargaan	4 penghargaan	100.00 %				
77		Dinas Lingkungan Hidup		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	10 Entitas	10 Entitas	100.00 %				
2.11.10		Dinas Lingkungan Hidup		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah penyelesaian permasalahan lingkungan hidup melalui upaya pemberian sanksi administrasi dan non sanksi administrasi	48 obyek	41 obyek	114.58 %				
2.11.10.2.01		Dinas Lingkungan Hidup		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	100%	100.00 %				
184		Dinas Lingkungan		Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran	Jumlah pengaduan permasalahan	48 Pengaduan	41 Pengaduan	85.42 %	Minimnya kepedulian masyarakat untuk	Sosialisasi dan koordinasi dengan		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Hidup		dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				melaporkan permasalahan lingkungan.	pemangku wilayah serta OPD terkait dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat.		
2.11.11		Dinas Lingkungan Hidup		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang beroperasi dengan baik	5.12 %	5.13 %	100.20 %				
2.11.11		Dinas Lingkungan Hidup			Persentase pengangkutan sampah ke TPA ≤ 1 hari	88.01 %	100%	113.62 %				
2.11.11		Dinas Lingkungan Hidup			Persentase pengolahan sampah di TPS 3R	51%	53.45 %	104.80 %				
2.11.11.2.01		Dinas Lingkungan Hidup		Pengelolaan Sampah	Jumlah jenis kegiatan pemanfaatan sampah yang dilakukan	3 jenis	3 jenis	100.00 %				
2.11.11.2.01		Dinas Lingkungan Hidup			Jumlah jenis kegiatan penanganan sampah yang dilakukan	2 jenis	2 jenis	100.00 %				
2.11.11.2.01		Dinas Lingkungan Hidup			Jumlah jenis sarana dan prasarana persampahan yang disediakan dan dikelola	4 jenis	4 jenis	100.00 %				
855		Dinas Lingkungan Hidup		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	650430 Ton	562452.89 Ton	86.47 %	1. Adanya Penambahan jumlah TPS 3R sebagai upaya pengurangan sampah di Sumbernya. 2. Pengurangan sampah lingkungan melalui Bank sampah di RT-RW yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah, didukung oleh : - Pembinaan bank sampah dengan menggandeng bank sampah induk surabaya dan LSM bersama dengan kader surabaya hebat dan kader lingkungan - Adanya Sistem Informasi Bank Sampah (Sibasam) untuk memudahkan monitoring hasil pengelolaan sampah	1. Pengadaan truk compactor untuk optimalisasi volume pengangkutan sampah ke TPA 2. Pengadaan troli sampah ukuran 660 liter untuk meningkatkan penampungan sampah di TPS sebelum diangkut ke TPA 3. Pembangunan TPS 3R		
856		Dinas		Penanganan sampah melalui	Jumlah sampah yang	515238 Ton	503856.48	97.79 %	- Komitmen DLH untuk	1. Pengadaan truk		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Lingkungan Hidup		pengangkutan	tertangani melalui proses pengangkutan		Ton		melakukan pengangkutan sampah dari TPS secara rutin sesuai jadwal yang telah disusun yang perlu didukung oleh kecukupan sarana (armada) pengangkutan sampah dari TPS - Kebutuhan pemeliharaan kendaraan yang terjadwal - Adanya Penambahan jumlah TPS 3R sebagai upaya pengurangan sampah di Sumbernya	compactor untuk optimalisasi volume pengangkutan sampah ke TPA 2. Pengadaan trolly sampah ukuran 660 liter untuk meningkatkan penampungan sampah di TPS sebelum diangkut ke TPA		
1623		Dinas Lingkungan Hidup		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	230 Unit	230 Unit	100.00 %				
5215		Dinas Lingkungan Hidup		Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	365000 ton	290217.68 ton	79.51 %	- Adanya kerusakan pada Instalasi Gasifikasi Powerplant sehingga berhenti beroperasi - Adanya kegiatan pemeliharaan yang telah terjadwal, sehingga mengurangi hari operasi Instalasi Gasifikasi Powerplant - Adanya kegiatan di Stadion Gelora Bung Tomo, sehingga terjadi penyesuaian jam operasional TPA Benowo	Berkoordinasi dengan PT. Sumber Organik selaku operator TPA Benowo agar melakukan pemeliharaan secara terjadwal.		
2.12.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 -Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045 -Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	86.68 %	92.85 %	107.12 %			1. Penyederhanaan administrasi birokrasi dalam pengurusan data kependudukan sehingga selesai di tingkat kelurahan. Validasi data kependudukan khususnya terkait dengan profesi dan tingkat pendidikan.	1. - Pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kelurahan telah dilaksanakan, selain itu juga dilaksanakan pelayanan administrasi kependudukan di Balai RW pada jam kerja dan pelayanan malam di hari Selasa. Sebagai layanan tambahan, Disdukcapil juga memiliki inovasi RT Kalimasada dimana warga dapat mengajukan pelayanan administrasi kependudukan melalui Ketua RT yang telah bekerjasama. - Telah dilaksanakan upaya kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan Dinas Pendidikan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			-Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. -Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025. -Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.									Provinsi Jawa Timur untuk update data pendidikan terakhir. Terdapat inovasi Kalimasada dimana Ketua RT dan Kader Surabaya Hebat mendorong warga untuk mengajukan update data kependudukan (profesi, tingkat pendidikan, dll). Dengan adanya kemudahan pelayanan adminduk mendorong peningkatan jumlah permohonan pelayanan adminduk yang signifikan.
2.12.01.2.01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis	2 jenis	100.00 %				
1556		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	100.00 %				
2.12.01.2.02		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1492		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	182 Orang/bulan	180 Orang/bulan	98.90 %	Adanya pengurangan jumlah ASN karena pensiun/purna tugas dan mutasi promosi jabatan	Pemutakhiran Data dengan Berkoordinasi dengan BKPSDM		
2.12.01.2.06		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kebutuhan sekretariat Dinas	100%	100%	100.00 %				
1631		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100.00 %				
2.12.01.2.08		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100.00 %				
1632		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.12.02		Dinas		PROGRAM PENDAFTARAN	Persentase dokumen	95%	100%	105.26 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil		PENDUDUK	pendaftaran penduduk yang diterbitkan							
2.12.02.2.01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	156000 berkas	209925 berkas	134.57 %				
1540		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
2.12.02.2.03		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	295000 berkas	513843 berkas	174.18 %				
3526		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
2.12.03		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	95%	100%	105.26 %				
2.12.03.2.01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	36000 berkas	40594 berkas	112.76 %				
1542		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
2.12.03.2.02		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Berkas Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil yang diterbitkan	36000 berkas	83465 berkas	231.85 %				
3527		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.12.04		Dinas Kependudukan		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI	Persentase jumlah layanan kependudukan	71%	100%	140.85 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		dan Pencatatan Sipil		KEPENDUDUKAN	dan Pencatatan Sipil yang berbasis IT							
2.12.04		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Persentase jumlah PD/Lembaga yang Melakukan kerjasama	60%	118.18 %	196.97 %				
2.12.04		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Persentase kesesuaian data penduduk antara Data Kementerian Bersih dengan data penduduk layanan	97%	99.53 %	102.61 %				
2.12.04.2.01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Data Penduduk yang diidentifikasi	13068 data	16737 data	128.08 %				
3532		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
2.12.04.2.03		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	5 Lembaga	10 Lembaga	200.00 %				
3531		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	5 Dokumen	10 Dokumen	200.00 %				
3534		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	6 Dokumen	120.00 %				
2.12.04.2.04		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	32 unit layanan	32 unit layanan	100.00 %				
3533		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.12.05		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	100%	100%	100.00 %				
2.12.05.2.01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah jenis informasi yang dilaporkan dalam dokumen Profil Perkembangan Kependudukan	4 Informasi	4 Informasi	100.00 %				
1548		Dinas Kependudukan dan Pencatatan		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Sipil		Kebutuhan yang Lain	serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun							
2.15.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	<p>-Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024</p> <p>-Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045</p> <p>-Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2024 tentang Peningkatan Layanan Angkutan Perkotaan.</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.</p>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	92%	94.39 %	102.60 %			<p>1. Pengawasan potensi pendapatan parkir agar tidak terjadi kebocoran. Pemanfaatan jalan harus sesuai dengan kelas jalan, antara pengguna jalan umum dengan truk, trailer dan kendaraan besar lainnya. Untuk meminimalisir kerusakan jalan. Banyak kebocoran untuk parkir tepi jalan, sehingga target yang ditetapkan tidak pernah tercapai. Padahal target itu masih di bawah potensi.</p>	<p>1. 1. Melakukan upaya intensikasi dengan peningkatan pengawasan patroli rutin dan penanganan langsung segera di lapangan terkait kegiatan parkir insidentil; 2. Meningkatkan volume kegiatan patroli gabungan bersama jajaran samping TNI/POLRI dan instansi terkait lainnya dalam hal penertiban parkir, penindakan pelanggaran parkir dan jukir liar; 3. Menindaklanjuti upaya ekstensifikasi dari pelaku usaha terkait pemanfaatan lahan parkir tepi jalan umum untuk berkontibusi langsung dalam PAD baik melalui pembayaran parkir insidentil, maupun melalui virtual account rekening BLUD UPT Parkir TJU, 4. Melakukan upaya sosialisasi melalui sosial media terkait pemberlakuan pembayaran parkir non tunai baik QRIS maupun voucher parkir; 5. Pemetaan titik baru dan peningkatan jumlah potensi titik parkir eksisting melalui survei & pendataan di lapangan; 6. Telah dilakukan pembinaan koordinator jukir terkait peningkatan setoran di masing-masing wilayah yang menjadi tanggung jawabnya dan melakukan diskusi dengan pengurus / perwakilan Paguyuban Juru Parkir dalam upaya mendukung penerapan pembayaran parkir non tunai; 7. serta sedang merancang aplikasi sistim manajemen potensi parkir; 8. Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Nomor : 188.45/40330/426.7.12/2023 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Nomor : 188.45/5491/436.7.14/2017 tentang Penetapan Kawasan Parkir Zona di Kota Surabaya menetapkan 105 ruas jalan menjadi kawasan parkir zona; 9. Menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Nomor : 500.11/ 436.7.12/2024 Tentang Penetapan Lokasi Parkir Tepi Jalan Umum Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabayaq menjadi 1438 titik</p>



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												parkir zona.
2.15.01.2.02		Dinas Perhubungan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
467		Dinas Perhubungan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	258 Orang/bulan	256 Orang/bulan	99.22 %	Adanya pengurangan jumlah ASN karena pensiun/purna tugas dan mutasi promosi jabatan	Pemutakhiran Data dengan Berkoordinasi dengan BKPSDM		
2.15.01.2.06		Dinas Perhubungan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	100%	100%	100.00 %				
923		Dinas Perhubungan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	14 Paket	107.69 %				
2.15.01.2.08		Dinas Perhubungan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Umum	100%	100%	100.00 %				
722		Dinas Perhubungan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	5 Laporan	166.67 %				
2.15.01.2.10		Dinas Perhubungan		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD Parkir Tepi Jalan Umum	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.15.01.2.10		Dinas Perhubungan			Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD Pengelolaan Transportasi Umum	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
4819		Dinas Perhubungan		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100.00 %				
4820		Dinas Perhubungan		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100.00 %				
2.15.02		Dinas Perhubungan		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	45 km/jam	45.17 km/jam	100.38 %				
2.15.02		Dinas Perhubungan			Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	48.70 %	48.86 %	100.33 %				
2.15.02		Dinas Perhubungan			Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya	80%	81.28 %	101.60 %				
2.15.02		Dinas Perhubungan			Persentase kepuasan masyarakat terkait operasional Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	80%	92.54 %	115.68 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.15.02.2.02		Dinas Perhubungan		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	31 Kawasan	31 Kawasan	100.00 %				
2.15.02.2.02		Dinas Perhubungan			Penyelenggaraan Prasarana Jalan di Kota Surabaya	9 Lokasi	9 Lokasi	100.00 %				
1648		Dinas Perhubungan		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	7500 Unit	10685 Unit	142.47 %				
1649		Dinas Perhubungan		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	105846 Unit	105846 Unit	100.00 %				
1650		Dinas Perhubungan		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2500 Unit	2051 Unit	82.04 %	1. Kondisi geografis lapangan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemasangan perlengkapan jalan. 2. Umur teknis dari perlengkapan jalan yang masih laik fungsi, sehingga tidak diperlukan untuk dilakukan pemasangan perlengkapan jalan yang baru.	Koordinasi dengan perangkat daerah dan stakeholder lainnya terkait kebutuhan pemenuhan perlengkapan jalan untuk keselamatan masyarakat pengguna jalan.		
1651		Dinas Perhubungan		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	9000 Unit	9000 Unit	100.00 %				
2.15.02.2.03		Dinas Perhubungan		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan	14 Lokasi	14 Lokasi	100.00 %				
316		Dinas Perhubungan		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	14 Unit	14 Unit	100.00 %				
2.15.02.2.04		Dinas Perhubungan		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	60 Berkas	94 Berkas	156.67 %				
1652		Dinas Perhubungan		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.15.02.2.05		Dinas Perhubungan		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR	134525 Unit	119969 Unit	89.18 %	1. Masih Banyaknya Kendaraan Wajib Uji yang beroperasi di jalan tidak melaksanakan Uji,	Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat Pemilik Kendaraan Wajib Uji akan Pentingnya		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									dikarenakan kurangnya kesadaran Masyarakat/Pemilik Kendaraan Wajib Uji akan pentingnya kendaraan yang laik jalan; 2. Terdapat Perubahan Aturan yaitu Sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Revisi dan Sanksi Pengujian Kendaraan Bermotor di tiadakan , hal ini membuat masyarakat mengabaikan Pelaksanaan Uji Kendaraan karena tidak adanya sanksi yang tegas.	Pelaksanaan Uji Kendaraan Bermotor melalui Media Sosial dan Aplikasi Mobile		
1653		Dinas Perhubungan		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	33 Unit	34 Unit	103.03 %				
2.15.02.2.06		Dinas Perhubungan		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasi dan Dikendalikan	7 Jenis	7 Jenis	100.00 %				
2.15.02.2.06		Dinas Perhubungan			Jumlah Implementasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	10 Lokasi	10 Lokasi	100.00 %				
320		Dinas Perhubungan		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	13 Laporan	13 Laporan	100.00 %				
321		Dinas Perhubungan		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.15.02.2.09		Dinas Perhubungan		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya	8 Koridor	18 Koridor	225.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.15.02.2.09		Dinas Perhubungan			Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Abdi Yasa Teladan	75 Orang	75 Orang	100.00 %				
310		Dinas Perhubungan		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
469		Dinas Perhubungan		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	92 Unit	167 Unit	181.52 %				
2.15.02.2.11		Dinas Perhubungan		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan	1 Jaringan	1 Jaringan	100.00 %				
311		Dinas Perhubungan		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	100.00 %				
2.15.03		Dinas Perhubungan		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan	100%	100%	100.00 %				
2.15.03.2.04		Dinas Perhubungan		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan	2 Kali	2 Kali	100.00 %				
324		Dinas Perhubungan		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
2.15.05		Dinas Perhubungan		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian	100%	100%	100.00 %				
2.15.05.2.01		Dinas Perhubungan		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Kegiatan Pengembangan,	2 Kali	2 Kali	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Penetapan Kebijakan, dan Sosialisasi Keselamatan serta Rencana Induk Perkeretaapian							
326		Dinas Perhubungan		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
2.16.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika	<p>-Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024</p> <p>-Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045</p> <p>-Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.</p>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	89.56 %	93.36 %	104.24 %			1. Menambah kecepatan kecepatan bandwidth pada lokasi pelayanan publik. Koordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait peningkatan fungsi CCTV.	1. - Penambahan kecepatan bandwidth telah teranggarkan di tahun 2025, hal tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi di tahun 2024 dan hasil kajian bersama narasumber. - Terkait peningkatan fungsi CCTV, telah dilakukan pengkajian terkait pemanfaatan fungsi CCTV untuk pengawasan parkir tepi jalan dan lahan parkir objek pajak. Uji coba implementasi sistem tersebut telah dilaksanakan dengan hasil yang signifikan. Pemanfaatan fungsi CCTV tersebut direncanakan untuk proses penganggaran di tahun 2025.
2.16.01.2.02		Dinas Komunikasi dan Informatika		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1222		Dinas Komunikasi dan Informatika		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	55 Orang/bulan	98.21 %	Adanya pengurangan jumlah ASN karena pensiun/purna tugas dan mutasi promosi jabatan	Pemutakhiran Data dengan Berkoordinasi dengan BKPSDM		
2.16.01.2.06		Dinas Komunikasi dan Informatika		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100.00 %				
1223		Dinas Komunikasi dan Informatika		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	4 Paket	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Informatika			yang Disediakan							
2.16.01.2.09		Dinas Komunikasi dan Informatika		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	100%	100.00 %				
1224		Dinas Komunikasi dan Informatika		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	90 Unit	100.00 %				
2.16.02		Dinas Komunikasi dan Informatika		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu ≤ 24 jam	87%	99.97 %	114.91 %				
2.16.02.2.01		Dinas Komunikasi dan Informatika		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan	4 Jenis	4 Jenis	100.00 %				
2.16.02.2.01		Dinas Komunikasi dan Informatika			Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPID ≤ 17 hari kerja	100%	100%	100.00 %				
1214		Dinas Komunikasi dan Informatika		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
1218		Dinas Komunikasi dan Informatika		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
1219		Dinas Komunikasi dan Informatika		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
2.16.03		Dinas Komunikasi dan Informatika		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.	100%	100%	100.00 %				
2.16.03.2.01		Dinas Komunikasi dan Informatika		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO ≤ 1 x 24 jam b. Jaringan FO ≤ 3 x 24 jam	100%	100%	100.00 %				
1211		Dinas Komunikasi dan Informatika		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	306 Unit	306 Unit	100.00 %				
2.16.03.2.02		Dinas Komunikasi dan Informatika		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi ≤ 1 x 24 jam	100%	100%	100.00 %				
2.16.03.2.02		Dinas Komunikasi dan Informatika			Persentase pengelolaan pusat data yang dipelihara dan dimonitoring	100%	100%	100.00 %				
1202		Dinas Komunikasi dan		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan	58 Dokumen	58 Dokumen	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Informatika		Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah							
1206		Dinas Komunikasi dan Informatika		Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	58 Dokumen	58 Dokumen	100.00 %				
1209		Dinas Komunikasi dan Informatika		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	190 Unit	190 Unit	100.00 %				
1210		Dinas Komunikasi dan Informatika		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
2.20.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Dinas Komunikasi dan Informatika	-Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 -Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045 -Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025. -Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	100%	100%	100.00 %				
2.20.02.2.01		Dinas Komunikasi dan Informatika		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sektor yang dianalisa	5 Sektor	5 Sektor	100.00 %				
1220		Dinas Komunikasi dan Informatika		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Data Statistik Sektoral	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral							
2.21.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Dinas Komunikasi dan Informatika	-Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 -Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045 -Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025. -Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	27%	27.59 %	102.19 %				
2.21.02.2.01		Dinas Komunikasi dan Informatika		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas Komunikasi dan Informatika	3 kali/per hari	3 kali/per hari	100.00 %				
1213		Dinas Komunikasi dan Informatika		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	13 Perangkat Daerah	16 Perangkat Daerah	123.08 %				
2.21.02.2.02		Dinas Komunikasi dan Informatika		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi komunikasi sandi antar PD yang diselenggarakan	6 Kali	6 Kali	100.00 %				
1212		Dinas Komunikasi dan Informatika		Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	58 Perangkat Daerah	58 Perangkat Daerah	100.00 %				
2.17.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	91%	94.03 %	103.33 %			1. Dinas ini sangat penting. Namun fakta di lapangan banyak koperasi yang sudah tidak jalan dan	1. - Telah dilakukan identifikasi dan monitoring koperasi sesuai dengan alamat Badan Hukum/arsip di Dinas - Pembaruan data koperasi-koperasi yang sudah tidak aktif di Online Data System milik Kementerian Koperasi



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											organisasinya namun tetap dibiarkan saja.	dan UKM
			-Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045								2. Salah satu contoh Sentra Wisata Kuliner (SWK) yang diurus dinas ini banyak yang mangkrak. Dari 49 SWK se Surabaya tidak lebih dari separo saja yang jalan atau beroperasi. Itu pun hanya terkesan jalan di tempat.	2. 1. Monitoring secara berkala untuk mengoptimalkan okupansi SWK 2. Sosialisasi kepada pemangku wilayah terkait ketersediaan stand di SWK di wilayah tersebut sehingga bisa diupayakan pemberdayaan masyarakat sekitar 3. Telah mengadakan kegiatan rutin di beberapa SWK untuk menarik kunjungan masyarakat ke SWK tersebut sehingga meningkatkan omset pedagang SWK
			-Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025								3. Dalam pembahasan banyak terungkap jika tim pendamping yang rutin datang ke SWK tidak menguasai masalah bisnis kuliner.	3. Telah dilaksanakan evaluasi rutin setiap bulan terhadap pendamping SWK yang memiliki latar belakang kompetensi yang beragam. Ke depannya akan lebih diintensifkan koordinasi dan sinergi pendampingan dengan instansi yang kompeten dalam bidang pengembangan bisnis kuliner.
			-Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.								4. Selain itu, masih banyak ditemukan sejumlah PKL yang berjualan tidak jauh dari lokasi SWK. Dan ironisnya kondisi seperti ini dibiarkan sampai sekarang padahal jeritan pedagang di SWK sudah sering dilontarkan lewat macam macam cara.	4. Koordinasi dengan pemangku wilayah dan Satpol PP terkait penertiban PKL
			-Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.								5. Serapan anggaran seharusnya bisa dimaksimalkan mendekati 100%. Pada tahun 2023 serapannya 90,62%, mengingat masih banyaknya	5. Pertimbangan efisiensi anggaran, penyerapan pengadaan yang efisien, dan kerjasama dengan beberapa instansi dan akademisi sehingga kegiatan bisa terlaksana dengan lebih efisien.



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											persoalan yang bisa dikerjakan oleh dinas ini. Diantaranya untuk memberdayakan UMKM yang butuh intervensi Pemkot.	
											6. Sinergitas UMKM dengan toko modern (minimarket) juga belum maksimal, padahal sudah ada payung hukum berupa perda dan perwali. Yaitu dalam bentuk ikut menjajakan produk UMKM di toko toko modern.	6. Telah dilakukan fasilitasi business matching yang mempertemukan toko modern dan UMKM yang produknya telah siap untuk dipasarkan di toko modern, bentuk kegiatan kurasi dan pemilihan produk-produk UKM untuk dipasarkan oleh toko modern pada tahun 2024.
2.17.01.2.02		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
3403		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	99 Orang/bulan	97 Orang/bulan	97.98 %	Adanya pengurangan jumlah ASN karena pensiun/purna tugas dan mutasi promosi jabatan	Pemutakhiran Data dengan Berkoordinasi dengan BKPSDM		
2.17.01.2.08		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.17.01.2.08		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan			Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3424		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3425		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.17.02		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam	30%	30.36 %	101.20 %				
2.17.02.2.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi	Jumlah koperasi yang mengajukan permohonan	30 koperasi	30 koperasi	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Menengah dan Perdagangan		dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	izin usaha simpan pinjam							
3420		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	100.00 %				
2.17.03		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkatkan kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)	69%	85.54 %	123.97 %				
2.17.03.2.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan	415 koperasi	415 koperasi	100.00 %				
3421		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	415 Unit Usaha	415 Unit Usaha	100.00 %				
2.17.05		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.	43%	44.26 %	102.93 %				
2.17.05.2.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah target yang ditetapkan oleh kementerian sebagai penerima manfaat	103 Orang	103 Orang	100.00 %				
3422		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	103 Orang	103 Orang	100.00 %				
2.17.06		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha	60%	60%	100.00 %				
2.17.06.2.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha koperasi	83 koperasi	83 koperasi	100.00 %				
3423		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar,	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai	83 Unit Usaha	83 Unit Usaha	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Menengah dan Perdagangan		Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha							
2.17.07		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha	29.86 %	29.87 %	100.03 %				
2.17.07		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan			Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya	100%	87.76 %	87.76 %	Belum semua sentra terisi paling sedikit 75% pelaku usaha mikro, dikarenakan : 1. Belum adanya kegiatan rutin untuk menarik pengunjung terutama sentra yang memiliki lokasi kurang potensial 2. Kurang kuatnya pola pikir untuk bersaing dan bertahan dari pedagang baru	1. Berupaya untuk mengadakan agenda rutin di SWK, berkolaborasi dengan pihak eksternal, dalam rangka promosi dan meramaikan sentra 2. Re-layout area SWK menjadi lebih bermanfaat		
2.17.07.2.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan	136 Orang	139 Orang	102.21 %				
2.17.07.2.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan			Jumlah sentra usaha yang pelaku usaha mikro nya mendapatkan fasilitasi pembinaan	10 sentra	11 sentra	110.00 %				
3427		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	136 Unit Usaha	139 Unit Usaha	102.21 %				
3428		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	10 Unit Usaha	11 Unit Usaha	110.00 %				
2.17.08		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkatkan skala kinerja usahanya	76%	77.88 %	102.47 %				
2.17.08.2.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan	Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang	500 orang	500 orang	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Menengah dan Perdagangan		Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	mendapatkan fasilitasi pembinaan untuk meningkatkan kinerja usaha							
3429		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	500 Unit Usaha	500 Unit Usaha	100.00 %				
2.18.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<p>-Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024</p> <p>-Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045</p> <p>-Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.</p>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	91%	94.82 %	104.20 %			1. Sistem pencatatan investasi di kota Surabaya harus di upgrade dan jelas datanya. Membuat aplikasi yang memetakan investasi baru di Kota Surabaya, agar potensi peluang kerja terpetakan.	1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya, untuk pencatatan nilai investasi berasal dari data tarikan aplikasi Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) yang bersifat nasional dan diperkuat dengan koordinasi dengan DPMPSTP Jawa Timur dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya, untuk mendorong investasi mempunyai aplikasi peta potensi investasi yang salah satunya memuat informasi perusahaan eksisting di masing-masing wilayah sebagai bentuk rekomendasi atau rujukan dalam melakukan investasi ditingkat Kecamatan di Kota Surabaya serta ditunjang dengan Klinik Investasi yang merupakan sarana pendampingan investor atau calon investor. Diharapkan dengan Upaya ini investasi akan tumbuh dan berdampak pada peningkatan lapangan kerja.
2.18.01.2.02		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Terpadu Satu Pintu										
1494		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	100.00 %				
2.18.01.2.08		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100%	100%	100.00 %				
2.18.01.2.08		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	100.00 %				
1695		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1703		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.18.02		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMA/PMDN	190 Perusahaan	194 Perusahaan	102.11 %				
2.18.02.2.02		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	74%	83.99 %	113.50 %				
965		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00 %				
2.18.03		Dinas Penanaman		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Calon Investor / Investor yang	55%	58.36 %	106.11 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			Mempunyai Minat Berinvestasi							
2.18.03.2.01		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	250 Calon Investor / Investor	293 Calon Investor / Investor	117.20 %				
967		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	4 Dokumen	133.33 %				
2.18.04		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100%	100%	100.00 %				
2.18.04.2.01		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan	110000 berkas	117393 berkas	106.72 %				
2.18.04.2.01		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			Jumlah kegiatan usaha yang ijin usahanya dilakukan pemantauan	11500 Kegiatan usaha	11602 Kegiatan usaha	100.89 %				
962		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	11500 Kegiatan Usaha	11602 Kegiatan Usaha	100.89 %				
970		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	12000 Pelaku Usaha	12174 Pelaku Usaha	101.45 %				
2.18.05		Dinas		PROGRAM PENGENDALIAN	Persentase perusahaan	44%	51.9 %	117.95 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis							
2.18.05.2.01		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek	1300 perusahaan	1551 perusahaan	119.31 %				
1096		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	2900 Kegiatan Usaha	3047 Kegiatan Usaha	105.07 %				
1097		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	270 Pelaku Usaha	289 Pelaku Usaha	107.04 %				
2.18.06		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	20 lembaga	23 lembaga	115.00 %				
2.18.06.2.01		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	400 perusahaan	407 perusahaan	101.75 %				
994		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.19.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 -Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045 -Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025. -Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024. -Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Kepemudaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	24%	24.52 %	102.17 %			1. Optimalisasi pemanfaatan cagar budaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, agar sarana dan prasarana lebih dioptimalkan untuk kebutuhan atlet-atlet.	1. Optimalisasi pemanfaatan cagar budaya untuk meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif : 1. Telah dilakukan Penataan Kawasan Kota Lama meliputi Zona Eropa, Zona Pecinan, dan Zona Melayu sesuai dengan rencana penataan dalam dokumen RTBL (Perwali Nomor 83 Tahun 2024, Perwali Nomor 84 Tahun 2024, dan Perwali Nomor 85 Tahun 2024) 2. Telah dilakukan kolaborasi Pentahelix Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pemanfaatan dan pengembangan kawasan cagar budaya seperti penyelenggaraan event dan promosi (Surabaya Heritage Fest, Festival Rujak Uleg, Refleksi Perobekan Bendera di Hotel Majapahit, Parade Juang, Festival Cap Go Meh/Kya Kya Culture Show, Kya Kya Moon Cake Festival) Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, agar sarana dan prasarana lebih dioptimalkan untuk kebutuhan atlet-atlet : 1. Telah dilaksanakan kegiatan pemeliharaan lapangan olahraga di 405 lokasi termasuk lapangan olahraga yang berada di kawasan permukiman 2. Telah dilaksanakan pembangunan dan peningkatan lapangan olahraga di 24 lokasi termasuk 3 lapangan olahraga baru yang dibangun di kawasan permukiman
2.19.02		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata			Persentase pemuda yang menjadi wirasaha mandiri	24%	24.07 %	100.29 %				
2.19.02		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata			Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	47.23 %	47.99 %	101.61 %				
2.19.02.2.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda Pemula, dan Pemuda	Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Daya Saing Wira Usaha Pemula	2 jenis	2 jenis	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Kader Kabupaten/Kota								
2.19.02.2.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata			Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Pemuda Pelopor, Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja dan Pemuda Pasukan Pengibar Bendera	23 jenis	22 jenis	95.65 %	Terdapat 1 jenis kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu kegiatan kepramukaan (karnaval) dikarenakan bertepatan dengan masa tenang pilkada sesuai arahan pimpinan kwarcab	Untuk kedepannya, dalam penyusunan program perencanaan kegiatan agar lebih responsif untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada		
2.19.02.2.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Kepada Siswa/Siswi SMA/SMK Sederajat dan Mahasiswa/Mahasiswi Berprestasi	1 laporan	1 laporan	100.00 %				
3412		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	825 Orang	825 Orang	100.00 %				
3413		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	700 Orang	700 Orang	100.00 %				
3415		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	925 Orang	925 Orang	100.00 %				
3416		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	3500 Orang	3515 Orang	100.43 %				
2.19.03		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	185 medali	223 medali	120.54 %				
2.19.03		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata			Persentase Penambahan dan Peningkatan Fasilitas Olahraga	18%	18%	100.00 %				
2.19.03.2.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang	Jumlah wilayah yang memperoleh penambahan prasarana olahraga	5 kecamatan	5 kecamatan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		dan Olah Raga serta Pariwisata		Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
3525		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	24 Unit	24 Unit	100.00 %				
2.19.03.2.03		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina	45 cabang olahraga	47 cabang olahraga	104.44 %				
3408		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	661 Orang	769 Orang	116.34 %				
2.19.03.2.05		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan Peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi	4 dokumen	4 dokumen	100.00 %				
2.19.03.2.05		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata			Jumlah Prasarana Olahraga yang Difasilitasi dan Dipelihara	405 lokasi	405 lokasi	100.00 %				
3409		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	7 Dokumen	7 Dokumen	100.00 %				
3410		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	405 Unit	405 Unit	100.00 %				
2.22.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-Peraturan Daerah Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya -Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 -Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	91%	94.35 %	103.68 %			1. Optimalisasi pemanfaatan cagar budaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, agar sarana dan prasarana lebih dioptimalkan untuk kebutuhan atlet-	1. Optimalisasi pemanfaatan cagar budaya untuk meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif : 1. Telah dilakukan Penataan Kawasan Kota Lama meliputi Zona Eropa, Zona Pecinan, dan Zona Melayu sesuai dengan rencana penataan dalam dokumen RTBL (Perwali Nomor 83 Tahun 2024, Perwali Nomor 84 Tahun 2024, dan Perwali Nomor 85 Tahun 2024) 2. Telah dilakukan kolaborasi Pentahelix Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pemanfaatan dan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			-Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya. -Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025. -Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.								atlet.	pengembangan kawasan cagar budaya seperti penyelenggaraan event dan promosi (Surabaya Heritage Fest, Festival Rujak Uleg, Refleksi Perobekan Bendera di Hotel Majapahit, Parade Juang, Festival Cap Go Meh/Kya Kya Culture Show, Kya Kya Moon Cake Festival) Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, agar sarana dan prasarana lebih dioptimalkan untuk kebutuhan atlet-atlet : 1. Telah dilaksanakan kegiatan pemeliharaan lapangan olahraga di 405 lokasi termasuk lapangan olahraga yang berada di kawasan permukiman 2. Telah dilaksanakan pembangunan dan peningkatan lapangan olahraga di 24 lokasi termasuk 3 lapangan olahraga baru yang dibangun di kawasan permukiman
2.22.01.2.02		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
3385		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/bulan	79 Orang/bulan	100.00 %				
2.22.01.2.08		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran.	100%	100%	100.00 %				
2.22.01.2.08		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata			Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	100%	100.00 %				
3386		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3387		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		serta Pariwisata										
2.22.02		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal	80%	80%	100.00 %				
2.22.02.2.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan tampilan pemanfaatan budaya daerah	380 kali	408 kali	107.37 %				
3378		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	2 Objek	100.00 %				
2.22.03		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	60.00 %	60.56 %	100.93 %				
2.22.03.2.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian tradisional	12 dokumen	12 dokumen	100.00 %				
3380		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	1400 Orang	1436 Orang	102.57 %				
2.22.04		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase siswa yang memahami materi sejarah	76%	77.55 %	102.04 %				
2.22.04.2.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Event yang bertema sejarah dan kepahlawanan	10 kali	10 kali	100.00 %				
3384		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00 %				
2.22.05		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian	92.04 %	95.11 %	103.34 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.22.05.2.02		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian	275 lokasi	275 lokasi	100.00 %				
3377		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	275 Objek	275 Objek	100.00 %				
2.22.06		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase museum yang berhasil dikembangkan	100%	100%	100.00 %				
2.22.06.2.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah museum dan bangunan sejarah yang dikelola	9 lokasi	9 lokasi	100.00 %				
3381		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
3382		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	730 Unit	730 Unit	100.00 %				
3383		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	8 Unit	8 Unit	100.00 %				
3468		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	9 Unit	9 Unit	100.00 %				
2.23.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 -Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045 -Peraturan Daerah Kota Nomor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.04 %	98.28 %	101.28 %			1. Melakukan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, terkait rumah jurnal untuk karya ilmiah. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan berkaitan dengan penguatan literasi di sekolah-	1. Telah dibuatnya rumah jurnal karya tulis ilmiah para guru pada aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan (SIPUS), maka saat ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses jurnal online Dinas Pendidikan Kota Surabaya melalui link akses : https://sipus.surabaya.go.id sehingga diharapkan mampu menunjang penguatan literasi masyarakat pada umumnya serta memperkaya



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. -Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025. -Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.								sekolah.	khasanah pendidikan di Kota Surabaya
2.23.01.2.02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
802		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	69 Orang/bulan	98.57 %	Adanya pengurangan jumlah ASN karena pensiun/purna tugas dan mutasi promosi jabatan	Pemutakhiran Data dengan Berkoordinasi dengan BKPSDM		
2.23.01.2.06		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100.00 %				
877		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	100.00 %				
2.23.01.2.07		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	100%	100.00 %				
814		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	16 Unit	106.67 %				
2.23.01.2.08		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100.00 %				
876		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
878		Dinas		Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Perpustakaan dan Kearsipan		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							
2.23.02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase event literasi yang diselenggarakan	58.8 %	58.8 %	100.00 %				
2.23.02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			Persentase pemenuhan koleksi buku baru sesuai dengan hasil analisis kebutuhan	59.92 %	100.09 %	167.04 %				
2.23.02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	78.14 %	80.33 %	102.80 %				
2.23.02.2.01		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis buku yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	100.00 %				
2.23.02.2.01		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			Jumlah perpustakaan / layanan baca yang dibina	306 Lembaga	306 Lembaga	100.00 %				
2.23.02.2.01		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			Tingkat Kepuasan Pemustaka	82.5 nilai	97.03 nilai	117.61 %				
727		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1500 Perpustakaan	1500 Perpustakaan	100.00 %				
736		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	106 Perpustakaan	106 Perpustakaan	100.00 %				
737		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	200 Perpustakaan	200 Perpustakaan	100.00 %				
738		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Orang	511 Orang	102.20 %				
739		Dinas Perpustakaan		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang	1500 Eksemplar	1500 Eksemplar	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		dan Kearsipan		Pustaka	Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan							
2.23.02.2.02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bibit penulis dan pendongeng	5461 orang	5461 orang	100.00 %				
740		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	250 Lokus	250 Lokus	100.00 %				
2.24.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 -Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045 -Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025. -Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	28.84 %	29.38 %	101.87 %				
2.24.02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	76.21 %	77.72 %	101.98 %				
2.24.02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			Persentase jumlah jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	14.07 %	15.21 %	108.10 %				
2.24.02.2.01		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsipnya	9000 item	9000 item	100.00 %				
2.24.02.2.01		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			Jumlah PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan	54 lembaga	57 lembaga	105.56 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Internal dengan kategori Cukup							
1892		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	471 Berkas	471 Berkas	100.00 %				
3136		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	66 Laporan	66 Laporan	100.00 %				
2.24.02.2.02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Arsip yang dialih mediakan	8640 Lembar	8640 Lembar	100.00 %				
1898		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	300 Arsip	300 Arsip	100.00 %				
2.24.02.2.03		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	7200 item	7783 item	108.10 %				
2.24.02.2.03		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			PD, Unit Kerja, BUMD yang mendapatkan evaluasi sistem kearsipan	70 Lembaga	70 Lembaga	100.00 %				
1947		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1200 Pengguna	9661 Pengguna	805.08 %				
1951		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	70 Laporan	70 Laporan	100.00 %				
2.24.03		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang dinilai dan direkomendasikan untuk dimusnahkan	59.97 %	59.98 %	100.02 %				
2.24.03.2.01		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Dokumen proses penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
3458		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	880 Arsip	1016 Arsip	115.45 %				



3.1.2.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh Pemerintahan Daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan yang menjadi kekhasan daerah. Pemerintah Kota Surabaya menjalankan urusan pilihan diantaranya Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan dan Perindustrian.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Surabaya telah berhasil memaksimalkan pengembangan potensi dan kekhasan daerah dimana terlihat dari program dan kegiatan yang telah mencapai target yang ditentukan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dilaksanakan melalui bidang urusan sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata;
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Berikut merupakan penjabaran pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan pilihan pada tahun 2024.



Tabel 3.26 Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3.25.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<p>-Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024</p> <p>-Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045</p> <p>-Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.</p>	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai	40%	45.59 %	113.98 %				1. Mengoptimalkan produk urban farming supaya bisa menjangkau supermarket di Kota Surabaya. Perlu adanya inovasi dan peningkatan kualitas dari budidaya maggot dan perikanan. Banyak program di dinas ini tapi tidak pernah merubah nasib petani perkotaan untuk hidup lebih baik. Sebab, program tersebut memang tidak bisa meningkatkan pendapatan para petani kota.	1. 1. Di tahun 2024 Bidang Pertanian telah melakukan intervensi berupa pelatihan teknis budidaya ke Kelompok Tani Urban Farming binaan DKPP yang meliputi : a. Pelatihan Budidaya Hidroponik Sayur b. Pelatihan Budidaya Hidroponik Buah c. Pelatihan Tanaman Sayuran dalam Pot dan pembinaan teknis pengembangan usaha dan mutu produk melalui pelatihan d. Pelatihan Teknik Pembuatan Video Profil Kampung Sayur e. Pelatihan untuk Membangun Pemasaran dan Branding Kampung Sayur Sesuai Target Pasar f. Pelatihan Membangun Kampung Eduwisata Kasurboyo Melalui Penguatan Teknis Budidaya Sayur dan BuahPemasaran hasil budidaya saat ini telah dilakukan di Pasar Modern Citraland, terutama untuk produk sayuran hidroponik. Pengembangan usaha petani Urban Farming diarahkan tidak hanya budidaya tapi juga diversifikasi usaha non budidaya yaitu eduwisata dan olahan produk 2. Inovasi dan peningkatan kualitas dari budidaya maggot telah ditindaklanjuti dengan melakukan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												pendampingan yang menerapkan teknologi tepat guna ramah lingkungan melalui pemanfaatan limbah rumah tangga dan rumah makan untuk mengurangi biaya operasional dengan meminimalkan pakan komersial pada proses budidaya maggot, pendampingan melibatkan mahasiswa PKL serta magang MSIB di DKPP guna lebih meningkatkan minat serta keterlibatan generasi muda dalam usaha budidaya maggot 3. Telah ditindaklanjuti dengan pemberian obat-obatan ikan penunjang proses budidaya ikan yaitu Paket Antibiotik untuk Budidaya Ikan sebagai salah satu penunjang dari proses teknologi tepat guna dalam budidaya perikanan serta pemberian pakan ikan guna meminimalisir biaya pengeluaran para pembudidaya/petani perkotaan
3.25.03.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan penyediaan sarana usaha perikanan tangkap	1 laporan	1 laporan	100.00 %				
969		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	60 Unit	60 Unit	100.00 %				
3.25.04		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah pembudidaya perikanan yang memproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	30 orang/kelompok	30 orang/kelompok	100.00 %				
3.25.04.2.02		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan	36 kali	36 kali	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1042		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	30 Kelompok	31 Kelompok	103.33 %				
3.25.04.2.04		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah laporan penyediaan sarana budidaya ikan	1 laporan	1 laporan	100.00 %				
1021		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	58 Unit	58 Unit	100.00 %				
3.25.05		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah kasus nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan	0 kasus	0 kasus	100.00 %				
3.25.05.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap	12 Kali	12 Kali	100.00 %				
1047		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
3.25.06		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif	70%	70%	100.00 %				
3.25.06.2.03		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sentra ikan yang dikelola	2 sentra	2 sentra	100.00 %				
1281		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	180 Pelaku Usaha	180 Pelaku Usaha	100.00 %				
3.27.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten	35 Orang	35 Orang	100.00 %			1. Mengoptimalkan produk urban	1. 1. Di tahun 2024 Bidang Pertanian telah melakukan intervensi



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			<p>Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024</p> <p>-Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045</p> <p>-Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.</p>		dengan hasil layak dipasarkan						<p>farming supaya bisa menjangkau supermarket di Kota Surabaya. Perlu adanya inovasi dan peningkatan kualitas dari budidaya maggot dan perikanan. Banyak program di dinas ini tapi tidak pernah merubah nasib petani perkotaan untuk hidup lebih baik. Sebab, program tersebut memang tidak bisa meningkatkan pendapatan para petani kota.</p>	<p>berupa pelatihan teknis budidaya ke Kelompok Tani Urban Farming binaan DKPP yang meliputi : a. Pelatihan Budidaya Hidroponik Sayur b. Pelatihan Budidaya Hidroponik Buah c. Pelatihan Tanaman Sayuran dalam Pot dan pembinaan teknis pengembangan usaha dan mutu produk melalui pelatihan d. Pelatihan Teknik Pembuatan Video Profil Kampung Sayur e. Pelatihan untuk Membangun Pemasaran dan Branding Kampung Sayur Sesuai Target Pasar f. Pelatihan Membangun Kampung Eduwisata Kasurboyo Melalui Penguatan Teknis Budidaya Sayur dan Buah Pemasaran hasil budidaya saat ini telah dilakukan di Pasar Modern Citraland, terutama untuk produk sayuran hidroponik. Pengembangan usaha petani Urban Farming diarahkan tidak hanya budidaya tapi juga diversifikasi usaha non budidaya yaitu eduwisata dan olahan produk 2. Inovasi dan peningkatan kualitas dari budidaya maggot telah ditindaklanjuti dengan melakukan pendampingan yang menerapkan teknologi tepat guna ramah lingkungan melalui pemanfaatan limbah rumah tangga dan rumah makan untuk</p>



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												mengurangi biaya operasional dengan meminimalkan pakan komersial pada proses budidaya maggot, pendampingan melibatkan mahasiswa PKL serta magang MSIB di DKPP guna lebih meningkatkan minat serta keterlibatan generasi muda dalam usaha budidaya maggot 3. Telah ditindaklanjuti dengan pemberian obat obatan ikan penunjang proses budidaya ikan yaitu Paket Antibiotik untuk Budidaya Ikan sebagai salah satu penunjang dari proses teknologi tepat guna dalam budidaya perikanan serta pemberian pakan ikan guna meminimalisir biaya pengeluaran para pembudidaya/petani perkotaan
3.27.02.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pembudidaya Pekarangan	10 Jenis	10 Jenis	100.00 %				
367		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
4800		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
3.27.02.2.03		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Jenis	6 Jenis	100.00 %				
1216		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil							
3.27.03		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	24 Lokasi	24 Lokasi	100.00 %				
3.27.03		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			Peningkatan luas taman hutan raya yang dikelola sebagai pendukung cadangan pangan masyarakat	2 Ha	2 Ha	100.00 %				
3.27.03.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pengelola lahan aset untuk budidaya pertanian	4 Jenis	4 Jenis	100.00 %				
933		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	16 Laporan	16 Laporan	100.00 %				
3.27.03.2.02		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah laporan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
482		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
3.27.04		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah pembudidaya ternak yang memproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	6 kelompok	6 kelompok	100.00 %				
3.27.04		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	89.5 %	90.58 %	101.21 %				
3.27.04.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan	80%	89.15 %	111.44 %				
813		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3.27.04.2.04		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pelaksanaan pendampingan unit usaha dan produk asal hewan	35 Unit	36 Unit	102.86 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1204		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	35 Unit Usaha	36 Unit Usaha	102.86 %				
3.27.06		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perizinan usaha lingkup pertanian yang diproses	100%	100%	100.00 %				
3.27.06.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha sektor pertanian dan perikanan	80%	100%	125.00 %				
874		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
3.27.07		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh	100%	100%	100.00 %				
3.27.07		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			Tingkat Produktivitas Pertanian	5.9 ton/ha	6.72 ton/ha	113.90 %				
3.27.07.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani	7 kali	7 kali	100.00 %				
3.27.07.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			Jumlah penyuluh yang mengikuti bimtek/pelatihan	25 orang	25 orang	100.00 %				
485		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Unit	7 Unit	100.00 %				
1164		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1 Unit	100.00 %				
3.26.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 -Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	50%	50%	100.00 %			1. Optimalisasi pemanfaatan cagar budaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Peningkatan sarana dan	1. Optimalisasi pemanfaatan cagar budaya untuk meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif : 1. Telah dilakukan Penataan Kawasan Kota Lama



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			<p>Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045</p> <p>-Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.</p>								<p>prasarana yang memadai, agar sarana dan prasarana lebih dioptimalkan untuk kebutuhan atlet-atlet.</p>	<p>meliputi Zona Eropa, Zona Pecinan, dan Zona Melayu sesuai dengan rencana penataan dalam dokumen RTBL (Perwali Nomor 83 Tahun 2024, Perwali Nomor 84 Tahun 2024, dan Perwali Nomor 85 Tahun 2024) 2. Telah dilakukan kolaborasi Pentahelix Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pemanfaatan dan pengembangan kawasan cagar budaya seperti penyelenggaraan event dan promosi (Surabaya Heritage Fest, Festival Rujak Uleg, Refleksi Perobekan Bendera di Hotel Majapahit, Parade Juang, Festival Cap Go Meh/Kya Kya Culture Show, Kya Kya Moon Cake Festival)</p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, agar sarana dan prasarana lebih dioptimalkan untuk kebutuhan atlet-atlet : 1. Telah dilaksanakan kegiatan pemeliharaan lapangan olahraga di 405 lokasi termasuk lapangan olahraga yang berada di kawasan permukiman 2. Telah dilaksanakan pembangunan dan peningkatan lapangan olahraga di 24 lokasi termasuk 3 lapangan olahraga baru yang dibangun di kawasan permukiman</p>
3.26.02.2.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi daya tarik wisata yang dikelola	2 lokasi	2 lokasi	100.00 %				
3374		Dinas Kebudayaan,		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Lokasi Daya	2 Lokasi	2 Lokasi	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)							
3.26.02.2.03		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	1 lokasi	1 lokasi	100.00 %				
3370		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	1 Lokasi	100.00 %				
3375		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
4622		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	60 Laporan	60 Laporan	100.00 %				
3.26.03		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata	43.5 %	116.18 %	267.08 %				
3.26.03.2.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	2 jenis	2 jenis	100.00 %				
3368		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %				
3.26.05		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan	80%	100%	125.00 %				
3.26.05		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata			Persentase peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata	24%	24.11 %	100.46 %				
3.26.05		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata			Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder pariwisata yang dilaksanakan 20 kesepakatan	60%	60%	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3.26.05.2.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah jenis kelompok pemangku kepentingan pariwisata yang dilakukan penjajakan kerjasama	2 jenis	2 jenis	100.00 %				
3.26.05.2.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata			Jumlah laporan pelaksanaan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat	1 laporan	1 laporan	100.00 %				
3371		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	250 Orang	276 Orang	110.40 %				
3372		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	60 Orang	60 Orang	100.00 %				
3.26.05.2.02		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah produk ekonomi kreatif yang dihasilkan	4 Produk	4 Produk	100.00 %				
3376		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	220 Orang	220 Orang	100.00 %				
3.30.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 -Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045 -Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase ketepatan waktu pelayanan	94%	97.57 %	103.80 %			1. Serapan anggaran seharusnya bisa dimaksimalkan mendekati 100%. Pada tahun 2023 serapannya 90,62%, mengingat masih banyaknya persoalannya yang bisa dikerjakan oleh dinas ini. Diantaranya untuk memberdayakan UMKM yang butuh intervensi Pemkot.	1. Pertimbangan efisiensi anggaran, penyerapan pengadaan yang efisien, dan kerjasama dengan beberapa instansi dan akademisi sehingga kegiatan bisa terlaksana dengan lebih efisien.



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Perdagangan dan Perindustrian di Bidang Pasar Rakyat.									
			-Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.								2. Sinergitas UMKM dengan toko modern (minimarket) juga belum maksimal, padahal sudah ada payung hukum berupa perda dan perwali. Yaitu dalam bentuk ikut menjajakan produk UMKM di toko toko modern.	2. Telah dilakukan fasilitasi business matching yang mempertemukan toko modern dan UMKM yang produknya telah siap untuk dipasarkan di toko modern, bentuk kegiatan kurasi dan pemilihan produk-produk UKM untuk dipasarkan oleh toko modern pada tahun 2024.
			-Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.								3. Banyak toko modern yang tidak mematuhi aturan jam buka dan tutup sesuai ketentuan perda. Sehingga makin menggerus pasar pasar rakyat (tradisional). Perlu ada tindakan tegas kepada toko toko modern yang terbukti melanggar perda termasuk jarak minimal dengan pasar modern.	3. 1. Dinkopumdag secara rutin telah melakukan pengawasan pada toko modern termasuk kaitanya dengan jam operasional dan melakukan pembinaan pada toko modern yang melanggar ketentuan dengan mengenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Perdagangan dan Perindustrian 2. Sedangkan terkait ketentuan jarak toko modern dengan pasar tradisional, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko toko modern termasuk dalam kategori resiko rendah dimana perizinannya dapat terbit secara otomatis, adapun selain wajib memenuhi perizinan berusaha pelaku usaha juga wajib memenuhi persyaratan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												dasar perizinan berusaha meliputi PBG dan KKPR yang mempertimbangkan jarak pasar rakyat dengan toko modern sesuai Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian
3.30.02.2.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Laporan Pemenuhan Komitmen Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3395		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	450 Dokumen	616 Dokumen	136.89 %				
3.30.02.2.02		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Laporan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3396		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	160 Dokumen	203 Dokumen	126.88 %				
3.30.02.2.03		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3563		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	24 Dokumen	27 Dokumen	112.50 %				
3.30.02.2.04		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Perdagangan		Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri							
3564		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	24 Dokumen	27 Dokumen	112.50 %				
3.30.02.2.05		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3399		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	40 Dokumen	45 Dokumen	112.50 %				
3.30.03		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
3.30.03.2.02		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3388		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	611 Dokumen	645 Dokumen	105.56 %				
3.30.04		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase intervensi ketersediaan komoditas	100%	100%	100.00 %				
3.30.04.2.02		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Usaha Distribusi Barang							
3.30.04.2.02		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3389		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3390		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3.30.06		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pelayanan tera yang tepat waktu	100%	100%	100.00 %				
3.30.06.2.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3401		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	23340 Unit	23358 Unit	100.08 %				
3402		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1200 Orang	1222 Orang	101.83 %				
3.30.07		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	100%	100%	100.00 %				
3.30.07.2.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah laporan usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	12 laporan	12 laporan	100.00 %				
3393		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	5220 UMKM	5220 UMKM	100.00 %				
3.31.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 -Peraturan Daerah Kota	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan	20%	20.01 %	100.05 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045 -Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian di Bidang Pasar Rakyat. -Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025. -Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.									
3.31.02.2.01		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemberdayaan pelaku usaha	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3431		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
4701		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
3.31.03		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya	85%	85.21 %	100.25 %				
3.31.03.2.01		Dinas Perindustrian dan		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin	Jumlah laporan hasil	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Tenaga Kerja		Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	pengawasan izin usaha							
3281		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
3.31.04		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung kebijakan perencanaan Industri	100%	100%	100.00 %				
3.31.04.2.01		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan penyusunan dokumen data pelaku usaha dan analisis sektor industri, yang berlokasi di Kota Surabaya	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
3432		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				



3.1.2.4 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Unsur pendukung urusan pemerintahan ini merupakan unsur yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Surabaya dan unsur pelayanan administrasi serta pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surabaya.



Tabel 3.27 Capaian Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4.01.01	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah	<p>-Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024</p> <p>-Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045</p> <p>-Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025</p>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100.00 %			<p>1. Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Surabaya agar melibatkan RT, RW dan LPMK</p> <p>2. Perlu melakukan evaluasi terkait efektivitas dan efisiensi pada OPD yang beban kerjanya tidak berimbang.</p> <p>3. Melakukan pemetaan kondisi sarana dan prasarana di kelurahan dan kecamatan yang berkaitan dengan pemenuhan layanan pada masyarakat. Pada bagian ini, pemerintah kota juga</p>	<p>1. Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Surabaya, Bagian Hukum dan Kerjasama telah melibatkan RT, RW, dan LPMK dalam rangka memberikan pemahaman agar peraturan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan informasi yang disampaikan dapat tersebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di Kota Surabaya. Selain itu, dalam proses penyusunan Perda dan Perwali juga melibatkan masyarakat yang berpotensi terdampak peraturan yang dimaksud.</p> <p>2. Pembentukan perangkat daerah di lingkungan Kota Surabaya telah sesuai dengan PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terkait perumpunan urusan yang diampu. Terkait dengan evaluasi efektifitas dan efisiensi perangkat daerah, kami sepakat.</p> <p>3. 1. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat telah membuat website basis data kewilayahan yang didalamnya mencakup data-data yang ada di Kecamatan dan Kelurahan; 2. Beasiswa Pemuda Tangguh telah</p>



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											menggagggarkan untuk pembayaran sekolah bagi orang-orang yang tidak mampu. Namun, banyak warga yang masih tidak bisa mendapatkan bantuan, karena syaratnya rumit.	difokuskan kepada warga miskin di Tahun 2024 sebanyak % untuk Warga miskin dan % untuk Pra Miskin jika dibandingkan 2023 yang kita akomodir semua warga ber-KTP Surabaya dengan jumlah penerima Beasiswa sebanyak 21.000 orang
			-Peraturan Wali Kota Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 78 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Surabaya.								4. Menyusun regulasi berkaitan dengan tindak lanjut barang milik daerah ataupun barang sitaan yang dapat menghasilkan PAD atau perlu dimusnahkan.	4. Pengadaan barang milik daerah termasuk yang menghasilkan PAD dikoordinasikan antara BPKAD dengan BPBJAP, untuk kemudian pengelolaan BMD tersebut dilaksanakan oleh BPKAD. Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh BPKAD sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Permendagri 19 Tahun 2016, Perda 1 Tahun 2020 dan Perwali 109 Tahun 2021.
			-Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Sambikerep, Kecamatan Lakarsantri dan Kecamatan Pabean Cantian dalam Wilayah Kota Surabaya.								5. Perlu adanya perbaikan dan peningkatan kualitas yang harus di laukan terhadap BUMD. Banyak juga badan usaha milik daerah yang dibawah pengawasan Bagian perekonomian yang tidak bisa setor deviden.	5. 1. Seluruh BUMD yang beroperasi telah menyetorkan deviden di tahun 2024 ada 9 BUMD telah menyetorkan deviden, untuk tahun 2023 hanya 1 (PT Surya Karsa Utama) yang belum menyetorkan deviden karena sudah tidak beroperasi lagi 2. BUMD yang berkinerja sehat sebanyak 7 BUMD, meningkat apabila dibandingkan tahun 2023 sebanyak 6 BUMD"
			-Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.								6. Bagian umum perlu mengembangkan aplikasi feedback ke warga berbasis IT	6. Sehubungan dengan peningkatan fasilitas pelayanan surat di Bagian Umum Prokopim telah dilaksanakan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											<p>dalam hal surat menyurat agar warga mengetahui status surat yang dikirimkan itu sampai proses Dimana.</p>	<p>pengembangan aplikasi SEMPOL (Surat Elektronik Masuk dan Pelacakan secara Online). Melalui aplikasi ini pelayanan surat menjadi lebih Efisien, transparan dan terbuka serta bersifat informatif karena masyarakat dapat melacak posisi surat dan tindak lanjutnya di OPD yang menerima surat.</p>
				-Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.							<p>7. Perlu dirumuskan pula sinergi dengan dinas Pendidikan untuk mencari bibit yang bisa diberikan tugas dalam hal event yang terkait kegiatan pimpinan seperti bidang MC, content creator dan lain lain, bisa dimulai dengan membuat lomba untuk menemukan bibit terkait hal tersebut diatas.</p>	<p>7. Dalam hal regenerasi personil kegiatan kedinasan pimpinan, Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan akan mendukung secara penuh terhadap pelaksanaan kegiatan pembibitan personil kegiatan kedinasan pimpinan yang diadakan oleh Dinas-dinas teknis terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata</p>
				-Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan/Honorarium Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya.							<p>8. Dalam rangka mempersempit praktek rentenir yang terjadi ditengah Masyarakat, maka dengan kinerja SAU yang sudah baik agar dapatnya Pemkot memberikan tambahan penyertaan modal kepada BPR SAU agar dapat dijadikan alat penunjang pemberian kredit mikro kepada Masyarakat.</p>	<p>8. 1. Nilai modal disetor Pemerintah Kota Surabaya kepada PT BPR SAU Perseroda sampai dengan tahun 2024 menjadi Rp29,8 miliar 2. Jumlah pemberian kredit BPR SAU tahun 2024 sebesar Rp.217.697.891.296 kepada 2.930 nasabah, meningkat 23,27 % dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp.176.606.322.235 atau sebanyak 2.664 nasabah 3. PT. BPR SAU telah menyalurkan kredit mikro kepada</p>



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												<p>masyarakat yang ber KTP Surabaya samoai dengan 31 Desember 2024 sebanyak 2.414 orang., pinjaman kepada UMKM Kota Surabaya melalui PUSPITA dan SIKUMIS sebanyak 250 orang dengan baki debet (sisa pinjaman) sebesar Rp. 376.751.438,-</p>
											<p>9. Perlu ada revitalisasi dan pemenuhan sarana prasarana pasar tradisional. Selain itu perlu adanya pembenahan Manajemen PD Pasar Surya agar nilai hasil audit wajar tanpa pengecualian. Yang tidak kalah pentingnya kebersihan pasar sangat perlu diperhatikan untuk kenyamanan pengunjung.</p>	<p>9. 1. Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan perbaikan dan rehabilitasi pasar sebanyak 2 Pasar di tahun 2024, yaitu Pasar Kembang dan Pasar Dupak Rukun Pemerintah Kota Surabaya juga berkolaborasi dengan Bank Jatim untuk melakukan revitalisasi Pasar Kembang. Saat ini PD Pasar Surya sedang melakukan proses revitalisasi untuk 3 pasar, meliputi Pasar Kembang, Pasar Keputran Selatan, Pasar Dupak Rukun yang akan selesai di tahun 2025. 2. Dalam rangka peingkatan kinerja, PD Pasar Surya melakukan pembenahan sistem keuangan melalui digitalisasi dan penyempurnaan Chart of Account, juga berkolaborasi dengan lembaga perbankan dalam digitalisasi pembayaran rekening.. Saat ini pasar yang sudah menerapkan proses digitalisasi sebanyak 6 pasar yaitu Pasar Pucang Anom, Pasar Dupak Rukun, Pasar Kapasan, Pasar Pabean, Pasar</p>



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												<p>Tambahrejo, dan Pasar Rungkut. 3. PD Pasar Surya telah menggunakan Sistem Informasi Pasar Surya (SIPS) untuk mempermudah mekanisme kontrol terhadap pemberkasan perpasaran, penagihan, kontrol bahan pokok.</p>
											<p>10. Menajemen KBS agar selalu melakukan inovasi-inovasi agar menambah pengunjung dengan begitu akan meningkatkan pendapatan KBS. Selain itu kebersihan dan keindahan kandang hewan juga perlu diperhatikan. Melakukan Kerjasama dengan pihak ke 3 untuk mempercantik atau memperindah KBS.</p>	<p>10. Inovasi dan pengembangan yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kunjungan KBS antara lain: 1. Optimalisasi wahana kidzoo untuk di tingkatkan di upgrade agar lebih menarik 2. Proses pembahasan kerjasama dengan pihak ketiga memanfaatkan lahan di KBS untuk sarana edukasi dan iklan 3. Bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya untuk memfasilitasi pekerja seni kota surabaya untuk tampil di Kebun Binatang Surabaya 4. Pembahasan kerjasama dengan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya untuk memasukkan KBS dalam rute Bus wisata Surabaya SSCT 5. Melakukan pertukaran satwa untuk menambah jenis satwa maupun untuk menjaga keragaman genetik 6. Pengembangan Wahana dengan konsep visual</p>



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												dari video mapping satwa serta audio dan desain immersive, menghadirkan nuansa alam berupa hutan dan permainan Cahaya. 7. Bekerjasama dengan travel agent untuk mobilisasi pengunjung. 8. Melakukan kegiatan Goes to school untuk memperkenalkan program yang ada di KBS di sekolah-sekolah, agar dapat memobilisasi pengunjung dari segmen pelajar. 9. Menambah tiket bundling tiket masuk dengan wahana-wahana. Terkait peningkatan kebersihan dan keindahan kandang hewan serta peningkatan lingkungan KBS, telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut: 1. Penjadwalan pembersihan kandang secara rutin oleh keeper dengan baik dari sisi area lantai, dinding maupun sarana pendukung berupa kebersihan satwa sendiri 2. Untuk menjamin keindahan maka dilakukan proses enrichment kandang berupa sarana dan prasarana bagi satwa yang ada, yang bertujuan untuk membuat lingkungan kandang semirip dengan lingkungan aslinya. Peningkatan kandang satwa antara lain penambahan pepohonan maupun tanaman hias agar pengunjung melihat tampak indah dan asri.



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												3. Kerjasama dengan Rotary Club untuk penyediaan sarana wastafel di lingkungan KBS dan hibah bunga anggrek.
											11. Perlu pilot project jika memang investasi keseluruhan adalah berat dan mahal terkait pelayanan air yang bersih sesuai standart kesehatan agar masyarakat atau public secara bertahap juga mengetahui atau memahami jika ada langkah langkah perbaikan yang akan berdampak pada kenaikan iuran PDAM.	11. Pada tahun 2024 PDAM telah melakukan rehabilitasi pipa terutama pipa yang telah berusia tua sepanjang 52,8 kilometer.
											12. Segera dibuatkan payung hukum terkait sewa lahan antara Pemkot dengan RPH, agar tidak ada kendala atau masalah dikemudian hari. Perpindahan tempat pemotongan babi di Kawasan pegirian ke Kawasan Banjarsugihan sama saja dengan memindahkan masalah. Dimana warga di tempat baru tidak berkenan dengan pemotongan babi tersebut.	12. sampai saat ini belum ada payung hukum terkait sewa lahan antara Pemkot Surabaya dengan RPH Kota Surabaya di 2 lokasi tersebut di Pegirian (Serambi Ampel) dan Aset Pemkot Surabaya (Banjarsugihan) dalam bentuk RPH Non Halal. Berkaitan dengan hubungan hukum antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PD RPH atas aset di Banjarsugihan berupa tanah, bangunan, dan peralatan potong babi akan menjadi penambahan penyertaan modal Daerah kepada PD RPH yang telah diakomodir dalam raperda PT RPH Perseroda
4.01.01		Sekretariat Daerah			Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat	100%	100%	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					menyurat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
4.01.01		Sekretariat Daerah			Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses ≤ 30 Hari Kerja	94%	99.64 %	106.00 %				
4.01.01		Sekretariat Daerah			Persentase perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan reviu kelembagaan yang dilakukan	85%	100%	117.65 %				
4.01.01		Sekretariat Daerah			Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A	69.44 %	100%	144.01 %				
4.01.01		Sekretariat Daerah			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100.00 %				
4.01.01		Sekretariat Daerah			Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar.	100%	100%	100.00 %				
4.01.01		Sekretariat Daerah			Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
4.01.01		Sekretariat Daerah			Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik	98%	100%	102.04 %				
4.01.01		Sekretariat Daerah			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100%	95.45 %	95.45 %	Adanya penyesuaian anggaran menyesuaikan dengan prioritas Pemerintah Daerah Kota Surabaya	Optimalisasi anggaran dan penggunaan stok barang yang masih tersedia		
4.01.01.2.02		Sekretariat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1182		Sekretariat Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	197 Orang/bulan	200 Orang/bulan	101.52 %				
4.01.01.2.05		Sekretariat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 laporan	12 laporan	100.00 %				
274		Sekretariat Daerah		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	5 Paket	100.00 %				
4.01.01.2.07		Sekretariat Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	12 laporan	12 laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
283		Sekretariat Daerah		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1500 Unit	6366 Unit	424.40 %				
4.01.01.2.08		Sekretariat Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan PD	100%	100%	100.00 %				
4.01.01.2.08		Sekretariat Daerah			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100.00 %				
4.01.01.2.08		Sekretariat Daerah			Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran	100%	100%	100.00 %				
164		Sekretariat Daerah		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1680		Sekretariat Daerah		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1698		Sekretariat Daerah		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
4.01.01.2.11		Sekretariat Daerah		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah	100%	100%	100.00 %				
1185		Sekretariat Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100.00 %				
1186		Sekretariat Daerah		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100.00 %				
4.01.01.2.13		Sekretariat Daerah		Penataan Organisasi	Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penerapan SAKIP	58 instansi	58 instansi	100.00 %				
4.01.01.2.13		Sekretariat Daerah			Jumlah perangkat daerah yang didampingi penyusunan evaluasi kelembagaan dan/atau analisis jabatan/analisis beban kerja sesuai kelembagaan yang berlaku	58 instansi	58 instansi	100.00 %				
4.01.01.2.13		Sekretariat Daerah			Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang didampingi untuk peningkatan kualitas layanan	253 unit	253 unit	100.00 %				
67		Sekretariat		Monitoring, Evaluasi dan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Daerah		Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana							
68		Sekretariat Daerah		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
69		Sekretariat Daerah		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
4.01.01.2.14		Sekretariat Daerah		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12 laporan	12 laporan	100.00 %				
4.01.01.2.14		Sekretariat Daerah			Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100.00 %				
322		Sekretariat Daerah		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3365		Sekretariat Daerah		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
4.01.02		Sekretariat Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kecepatan waktu pelaporan outreach	2 hari	2 hari	100.00 %				
4.01.02		Sekretariat Daerah			Kecepatan waktu rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat SIMPROLAMAS yang di laporkan	14 hari	14 hari	100.00 %				
4.01.02		Sekretariat Daerah			Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi	95%	100%	105.26 %				
4.01.02		Sekretariat Daerah			Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan	85%	100%	117.65 %				
4.01.02		Sekretariat Daerah			Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	100%	100%	100.00 %				
4.01.02		Sekretariat Daerah			Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahannya	58.37 %	79.33 %	135.91 %				
4.01.02		Sekretariat Daerah			Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan	98.5 %	100%	101.52 %				
4.01.02		Sekretariat Daerah			Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	83.87 %	87.1 %	103.85 %				
4.01.02		Sekretariat Daerah			Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100.00 %				
4.01.02		Sekretariat Daerah			Persentase produk hukum yang disebarluaskan	100%	100%	100.00 %				
4.01.02		Sekretariat			Persentase realisasi produk	100%	100%	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Daerah			hukum daerah yang dihasilkan							
4.01.02		Sekretariat Daerah			Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan	100%	100%	100.00 %				
4.01.02.2.01		Sekretariat Daerah		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah memahami materi pembinaan	108 Lembaga	142 Lembaga	131.48 %				
4.01.02.2.01		Sekretariat Daerah			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
4.01.02.2.01		Sekretariat Daerah			Jumlah pendataan batas wilayah kecamatan	26 Kecamatan	27 Kecamatan	103.85 %				
873		Sekretariat Daerah		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
1627		Sekretariat Daerah		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
1628		Sekretariat Daerah		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
4.01.02.2.02		Sekretariat Daerah		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan evaluasi pengelolaan bina mental spiritual	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
4.01.02.2.02		Sekretariat Daerah			Jumlah kegiatan pelaksanaan outreach	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %				
4.01.02.2.02		Sekretariat Daerah			Jumlah kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan pelayanan masyarakat pada Aplikasi SIMPROLAMAS	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %				
1669		Sekretariat Daerah		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
1670		Sekretariat Daerah		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
3593		Sekretariat		Pelaksanaan Kebijakan,	Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Daerah		Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas							
4.01.02.2.03		Sekretariat Daerah		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah permasalahan hukum yang ditangani	20 permasalahan hukum	21 permasalahan hukum	105.00 %				
4.01.02.2.03		Sekretariat Daerah			Jumlah produk hukum yang dipublikasi	60 produk hukum	67 produk hukum	111.67 %				
4.01.02.2.03		Sekretariat Daerah			Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun	60 rancangan produk hukum	67 rancangan produk hukum	111.67 %				
811		Sekretariat Daerah		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	60 Dokumen	67 Dokumen	111.67 %				
821		Sekretariat Daerah		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20 Kasus	21 Kasus	105.00 %				
822		Sekretariat Daerah		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	60 Dokumen	67 Dokumen	111.67 %				
4.01.02.2.04		Sekretariat Daerah		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah evaluasi kerjasama yang dilakukan	31 Lembaga	31 Lembaga	100.00 %				
4.01.02.2.04		Sekretariat Daerah			Jumlah kerjasama dalam negeri yang difasilitasi	20 Lembaga	20 Lembaga	100.00 %				
4.01.02.2.04		Sekretariat Daerah			Jumlah kerjasama luar negeri yang difasilitasi	11 Lembaga	11 Lembaga	100.00 %				
140		Sekretariat Daerah		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
141		Sekretariat Daerah		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
3597		Sekretariat Daerah		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
4.01.03		Sekretariat Daerah		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	100%	100%	100.00 %				
4.01.03		Sekretariat Daerah			Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya \geq 76%	85%	85.07 %	100.08 %				
4.01.03		Sekretariat Daerah			Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD	85%	100%	117.65 %				
4.01.03.2.01		Sekretariat Daerah		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian	12 laporan	12 laporan	100.00 %				
49		Sekretariat Daerah		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD							
50		Sekretariat Daerah		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
51		Sekretariat Daerah		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00 %				
4.01.03.2.02		Sekretariat Daerah		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
452		Sekretariat Daerah		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
453		Sekretariat Daerah		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16 Laporan	16 Laporan	100.00 %				
4.01.03.2.03		Sekretariat Daerah		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan	94%	100%	106.38 %				
4.01.03.2.03		Sekretariat Daerah			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100.00 %				
270		Sekretariat Daerah		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	98 Dokumen	102 Dokumen	104.08 %				
284		Sekretariat Daerah		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	308 Orang	102.67 %				
4.01.03.2.04		Sekretariat Daerah		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah laporan pemantauan kebijakan sumber daya alam	1 laporan	1 laporan	100.00 %				
3594		Sekretariat Daerah		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
4.02.01	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat DPRD	-Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 -Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%	92.74 %	99.72 %	Belum Optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan paling utama	1. Di mohon untuk diperhatikan terkait kelengkapan sarana dan prasarana serta perawatan gedung.	1. Kelengkapan sarana dan prasarana serta perawatan gedung sudah diperhatikan dan sepanjang tahun 2024 sampai saat ini sudah banyak perbaikan yang dilakukan oleh



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045 -Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025. -Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.									Sekretariat DPRD berkoordinasi dengan DPRKPP untuk mengakomodir kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD.
4.02.01.2.02		Sekretariat DPRD		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1374		Sekretariat DPRD		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	51 Orang/bulan	100.00 %				
4.02.01.2.06		Sekretariat DPRD		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100.00 %				
1375		Sekretariat DPRD		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	100.00 %				
4.02.01.2.09		Sekretariat DPRD		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata waktu penyiapan Kelengkapan sarana dan prasarana rapat	1 Hari	1.02 Hari	98.00 %	Adanya komitmen dari Sekretariat DPRD untuk menyelesaikan penyiapan kelengkapan sarana dan prasarana rapat secara tepat waktu.	Adanya komitmen dari Sekretariat DPRD untuk menyelesaikan penyiapan kelengkapan sarana dan prasarana rapat secara tepat waktu.		
1376		Sekretariat DPRD		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	204 Unit	206 Unit	100.98 %				
4.02.01.2.14		Sekretariat DPRD		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rata-rata waktu Penyjapan kelengkapan administrasi perjalanan Dinas	1 Hari	1 Hari	100.00 %				
1377		Sekretariat		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil	96 Laporan	97 Laporan	101.04 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		DPRD			Fasilitasi Keprotokolan							
4.02.01.2.15		Sekretariat DPRD		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	100%	100%	100.00 %				
1378		Sekretariat DPRD		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	100.00 %				
4.02.01.2.16		Sekretariat DPRD		Layanan Administrasi DPRD	Rata-rata Waktu Penyelesaian Laporan Perjalanan Dinas	2 Hari	1.27 Hari	136.50 %				
1379		Sekretariat DPRD		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	16 Laporan	11 Laporan	68.75 %	Pelaksanaan kunjungan kerja unsur DPRD Kota Surabaya yang berkurang dari periode sebelumnya, dikarenakan adanya masa Pemilu di tahun 2024	Menyesuaikan undangan dari ASDEKSI dan FORKOM		
4.02.02		Sekretariat DPRD		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
4.02.02.2.01		Sekretariat DPRD		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang dibahas	6 Dokumen	6 Dokumen	100.00 %				
1358		Sekretariat DPRD		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	100.00 %				
4.02.02.2.04		Sekretariat DPRD		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas	50 Orang	28 Orang	56.00 %	1. Tidak semua anggota DPRD Kota Surabaya mendapatkan undangan bimtek/diklat dari Partai Politiknya masing-masing. 2. Tidak semua anggota DPRD Kota Surabaya yang mendapat undangan, dapat menghadiri bimtek/diklat.	1. Meningkatkan komunikasi dengan Partai Politik terkait undangan bimtek/diklat bagi seluruh unsur DPRD Kota Surabaya. 2. Meningkatkan komunikasi dengan unsur DPRD Kota Surabaya agar dapat menghadiri bimtek/diklat, setidaknya sekali dalam setahun.		
1371		Sekretariat DPRD		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00 %				
3201		Sekretariat DPRD		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Dokumen	6 Dokumen	300.00 %				
4.02.02.2.05		Sekretariat DPRD		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah dokumen pelaksanaan reses	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
1372		Sekretariat DPRD		Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	100 Dokumen	100 Dokumen	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4.02.02.2.08		Sekretariat DPRD		Fasilitasi Tugas DPRD	Rata rata waktu penyelesaian risalah rapat paripurna dan notulensi rapat	2 Hari	1 Hari	150.00 %				
1373		Sekretariat DPRD		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	36 Dokumen	55 Dokumen	152.78 %				



3.1.2.5 Pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Unsur penunjang urusan pemerintahan dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang meliputi pelaksanaan fungsi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur penunjang urusan Pemerintahan dilaksanakan melalui :

1. Bidang Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
2. Bidang Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Bidang kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan di Kota Surabaya pada tahun 2024 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang ditentukan. Pencapaian pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan Kota Surabaya tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut.



Tabel 3.28 Capaian Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5.01.01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 -Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045 -Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025. -Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95.55 %	97.47 %	102.01 %				
5.01.01.2.01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis	2 jenis	100.00 %				
1383		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	100.00 %				
5.01.01.2.02		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1292		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	69 Orang/bulan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
5.01.01.2.08		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	100%	100.00 %				
1293		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1635		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
5.01.02		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	100%	100%	100.00 %				
5.01.02		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	100%	100%	100.00 %				
5.01.02		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100.00 %				
5.01.02.2.01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	6 dokumen	6 dokumen	100.00 %				
1295		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
5.01.02.2.02		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah pengampu data urusan	58 PD	58 PD	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Penelitian dan Pengembangan										
1392		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
5.01.02.2.03		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah	58 PD	58 PD	100.00 %				
1391		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
5.01.03		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76%	98.43 %	98.82 %	100.40 %				
5.01.03.2.01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
1435		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
1436		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
5.01.03.2.02		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian dan Bidang SDA yang disusun	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1561		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
1562		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
5.01.03.2.03		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur dan Bidang Kewilayahan yang disusun	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
2375		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
2376		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
5.05.02	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 -Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045 -Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025. -Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100.00 %			1. Mohon bagian litbang mengkaji orang terkait program padat karya, ingin sukses di dunia entrepreneur yang harus belajar atau didampingi oleh entrepreneur yang sukses bukan menugasi OPD sebagai pendamping. Pemkot perlu merubah padat karya dengan Kerjasama dengan pihak ke 3 yang bisa jadi coach pelaku	1. Monitoring dan evaluasi pengelolaan padat karya sedang dilaksanakan oleh Peangkat Daerah yang memiliki kewenangan dan akan dilakukan perbaikan sehingga menjadi lebih efektif serta perlu dikaitkan dengan industri/ekonomi kreatif yang nantinya akan digerakkan di masing-masing kecamatan. Kajian Hub Produk Kreatif dan Tempat Kreatif pada masing-masing Kecamatan akan dilakukan pada tahun 2025.



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.								padat karya dan bisa membuat mereka sukses dengan mindset entrepreneur. Kenyataan di lapangan, banyak program padat karya yang berguguran.	
5.05.02.2.04		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi serta pelaksanaan diseminasi yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00 %				
1388		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
3430		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
5.02.01	KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 -Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045 -Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Wali Kota Nomor 01 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Surabaya. -Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	92%	93.83 %	101.99 %			1. Perlu ada penanganan serius terkait asset Pemkot karena tidak sedikit lahan Pemkot yang masih di kuasai pihak lain bahkan menjadi sumber penghasilan mereka.	1. 1. BPKAD berkoordinasi dengan lurah dan Camat serta PD terkait untuk melakukan pengawasan terhadap tanah aset Pemkot Surabaya yang dimanfaatkan pihak lain tanpa adanya hubungan hukum 2. Dalam hal terdapat klaim kepemilikan Warga, penanganan terhadap aset Pemerintah Kota Surabaya dilakukan dengan cara Upaya hukum Non-Litigasi atau Litigasi 3. Dalam rangka pengamanan aset, Pemerintah Kota Surabaya melakukan permohonan pendampingan kepada BPK, KPK, dan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Daerah pada Retribusi Perizinan Tertentu.									Kejaksanaan 4. Pada Tahun 2024 telah dilakukan pengamanan aset sejumlah 4 lokasi
			-Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Masyarakat dalam Rangka Menyambut Hari Jadi Kota Surabaya ke 731.									
			-Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan/atau Keterlambatan Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya ke 731.									
			-Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Retribusi Pemakaian Tanah kepada Masyarakat Pemegang Izin Pemakaian Tanah dalam Rangka Memperingati Hari Kartini.									
			-Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Kebun Raya Mangrove, Adventure Land Romokalisari dan Hutan Kota pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.									
			-Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan.									
			-Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah									



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Retribusi Jasa Umum.									
			-Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 109 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.									
			-Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelayanan Pemakaian Tanah.									
			-Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bidang Pajak Daerah.									
			-Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penambahan Detail Rincian Objek Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Tempat Khusus Parkir pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.									
			-Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penambahan Detail Rincian Objek Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.									
			-Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.									
			-Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2024 tentang Tarif Pelayanan Non Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya dalam Melakukan Kerja Sama dengan Pihak Lain.									
			-Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan									



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			<p>atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2024 tentang Tarif Pelayanan Non Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya dalam Melakukan Kerja Sama dengan Pihak Lain.</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 74 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan</p> <p>-Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penambahan Detail Rincian Objek Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Tempat Khusus Parkir pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota</p>								<p>2. Ada permula pemanfaat asset untuk dunia usaha yang bisa menjadi PAD tapi dengan skema yang lebih ringan dengan dunia usaha missal sewa lebih murah dan lain lain agar aset tidak mangkrak. Dalam hal serifikasi lahan pemkot, selama ini sudah cukup baik. Ada peningkatan jumlah sertifikat.</p> <p>3. Namun kenyataan di lapangan masih banyak tanah aset pemkot yang dikuasai pihak lain. Tapi sampai sekarang tetap dibiarkan. Sehingga ada kerugian pendapatan di</p>	<p>2. Untuk memfasilitasi pemanfaatan/ penggunaan aset tanah dan atau bangunan berpedoman pada : 1. PP No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlin dungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 2. Perwali No 1 tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perwali No 25 tahun 2024 tentang formula tarif sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan atau bangunan</p> <p>3. Peraturan Wali Kota (PERWAL) Kota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 tentang Program Padat Karya di Kota Surabaya.</p> <p>3. Terhadap aset Pemerintah Kota Surabaya yang digunakan oleh Pihak Lain dilakukan dengan cara sosialisasi dan pemberian surat pemberitahuan kepada warga yang memanfaatkan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan hubungan</p>



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Surabaya.								retribusi pemkot.	hukum dengan Pemerintah Kota Surabaya
			-Peraturan Wali Kota Nomor 102 Tahun 2024 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda Dan Gelora Bung Tomo Pada Peraturan Daerah Kota Suraaya Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah								4. Belum maksimal memanfaatkan semua aset yang ada sehingga meski pendapatan naik dibandingkan tahun sebelumnya tapi tidak sebanding dengan keseluruhan nilai aset. Menurut data ada 8.542 aset teregister (5.319 di antaranya sudah bersertifikat), tapi pendapatan hanya 105,6 M. selain itu beberapa aset yang seharusnya mudah untuk mendatangkan revenue malah menganggur di antaranya bekas THR dan Surabaya Mall dan juga lapangan tembak internasional yang kini mangkrak.	4. Untuk optimalisasi pemanfaatan tanah dan/atau bangunan akan terus melakukan identifikasi tanah dan bangunan melalui : 1. menginformasikan kepada pengguna barang terhadap pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya oleh pihak lain tanpa ijin, agar diterbitkan hubungan hukum dan dilakukan pembayaran sewa/retribusinya; 2. memetakan aset yang masih idle untuk ditawarkan kepada masyarakat yang berminat memanfaatkannya 3. melakukan penawaran pada investor khususnya persil kawasan bekas THR dan Hi-Tech Mall
			-Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Retribusi Jasa Usaha								5. Hasil appraisal jika di sewakan Surabaya Mall bisa mencapai 20 M / Tahun. Sudah 5 Tahun aset ini mangkrak, jadi pemkot kehilangan potensi pendapatan sebesar 20 M x 5 = 100 M. sementara lapangan tembak	5. Dampak Pandemi terhadap kondisi perekonomian mengakibatkan menurunnya daya beli dan kemampuan bayar investor peminat pengelola Gedung Eks Hitech Mall. Saat ini Pemerintah Kota Surabaya tetap berusaha memberikan wadah sebagai bentuk pelayanan bagi pedagang / badan usaha yang masih



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											yang sudah di bangun dengan anggaran ratusan miliar rupiah tidak pernah di pakai sesuai peruntukannya, sempat di pakai sebagai rumah sakit lapangan saat covid setelah itu mangkrak lagi.	berminat untuk berdagang dan berusaha di Gedung Eks Hitech Mall
5.02.01.2.02		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1113		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/bulan	89 Orang/bulan	100.00 %				
5.02.01.2.07		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
271		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	200 Unit	200 Unit	100.00 %				
5.02.01.2.08		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100.00 %				
5.02.01.2.08		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	100%	100.00 %				
1167		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1707		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
5.02.01.2.09		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketepatan pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%	100%	100.00 %				
286		Badan		Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan	1531 Unit	1821 Unit	118.94 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
5.02.02		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	100%	100%	100.00 %				
5.02.02.2.01		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang disusun	7 Dokumen	7 Dokumen	100.00 %				
1139		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
1143		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
3439		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
3440		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
5.02.02.2.02		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang	97500 berkas	108992 berkas	111.79 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					dilayani							
5.02.02.2.02		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Jumlah Dokumen Laporan dan Perhitungan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola	244 Dokumen	244 Dokumen	100.00 %				
1122		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	97500 Dokumen	108992 Dokumen	111.79 %				
1130		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	244 Dokumen	244 Dokumen	100.00 %				
5.02.02.2.03		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	24 Dokumen	24 Dokumen	100.00 %				
1119		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	24 Dokumen	24 Dokumen	100.00 %				
5.02.02.2.04		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana	100%	100%	100.00 %				
5.02.02.2.04		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Persentase realisasi dana darurat dan mendesak	25%	25%	100.00 %				
1144		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
1169		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
5.02.03		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang	33.3 %	34%	102.10 %				
5.02.03.2.01		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	30 Dokumen	31 Dokumen	103.33 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
5.02.03.2.01		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola	100%	100%	100.00 %				
635		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7679 Dokumen	8554 Dokumen	111.39 %				
637		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
638		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30 Laporan	31 Laporan	103.33 %				
3518		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	100.00 %				
5.02.01		Badan Pendapatan Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	92%	95.94 %	104.28 %		Mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk lebih inovatif menyiapkan strategi cadangan guna pencapaian target pendapatan. Penerapan ekonomi inklusif untuk dijadikan dasar arah pelaksanaan indikator program guna perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.		Telah dikembangkan sistem aplikasi berbasis online guna mencegah kebocoran pajak daerah, serta bekerja sama dengan lintas sektor dalam upaya menggali potensi Pajak Daerah dan mengelola PAD secara optimal antara lain sebagai berikut: - Melakukan sosialisasi terkait persiapan opsen PKB dan BBNKB bekerjasama dengan Bapenda Provinsi Jawa Timur; - Mengikuti program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) bekerjasama dengan universitas seperti Universitas Airlangga dan UPN Jatim, melibatkan mahasiswa dalam tugas lapangan seperti membantu penagihan dan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												pendataan objek pajak; - Mengadakan diklat pemeriksa pajak serta menambah personil pemeriksa pajak yang berasal dari OPD lain dalam upaya menggali potensi Pajak Daerah.
5.02.01.2.02		Badan Pendapatan Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
3461		Badan Pendapatan Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119 Orang/bulan	119 Orang/bulan	100.00 %				
5.02.01.2.04		Badan Pendapatan Daerah		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
3463		Badan Pendapatan Daerah		Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
5.02.01.2.08		Badan Pendapatan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100.00 %				
3459		Badan Pendapatan Daerah		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3460		Badan Pendapatan Daerah		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
5.02.02		Badan Pendapatan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%	100%	100.00 %				
5.02.02.2.02		Badan Pendapatan Daerah		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 dokumen	4 dokumen	100.00 %				
1131		Badan Pendapatan		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi,	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Daerah		Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya							
5.02.04		Badan Pendapatan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan	83%	99.96 %	120.43 %				
5.02.04		Badan Pendapatan Daerah			Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir	69%	69.06 %	100.09 %				
5.02.04		Badan Pendapatan Daerah			Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	60%	77.37 %	128.95 %				
5.02.04.2.01		Badan Pendapatan Daerah		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
5.02.04.2.01		Badan Pendapatan Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
5.02.04.2.01		Badan Pendapatan Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
5.02.04.2.01		Badan Pendapatan Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
5.02.04.2.01		Badan Pendapatan Daerah			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	19814 Objek Pajak	22318 Objek Pajak	112.64 %				
1046		Badan Pendapatan Daerah		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
1067		Badan Pendapatan Daerah		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
1117		Badan Pendapatan Daerah		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1123		Badan Pendapatan Daerah		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	19814 Obyek Pajak	22318 Obyek Pajak	112.64 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)								
3462		Badan Pendapatan Daerah		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
5.03.01	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 -Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045 -Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025. -Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%	94.18 %	105.82 %				
5.03.01.2.02		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
858		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	100.00 %				
5.03.01.2.06		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100.00 %				
862		Badan Kepegawaian		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	15 Paket	125.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			yang Disediakan							
5.03.01.2.08		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100.00 %				
859		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
5.03.02		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
5.03.02		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Persentase pegawai yang berkinerja minimal baik	93%	99.88 %	107.40 %				
5.03.02		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Persentase pegawai yang disiplin	96.74 %	97.33 %	100.61 %				
5.03.02		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen	32.43 %	26.19 %	80.76 %	Masih terdapat pegawai yang kurang memenuhi syarat pelaksanaan asesmen	1. Melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi kompetensi yang perlu ditingkatkan. 2. menyediakan program pelatihan yang relevan dan berkualitas.		
5.03.02.2.01		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Surabaya	92%	100%	108.70 %				
266		Badan Kepegawaian dan Pengembangan		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Sumber Daya Manusia										
267		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
268		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
5.03.02.2.02		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah berkas mutasi, promosi dan rotasi jabatan serta penataan administrasi kepegawaian	8555 berkas	11789 berkas	137.80 %				
263		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
264		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
265		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
5.03.02.2.04		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah intervensi peningkatan kinerja aparatur	2 jenis	2 jenis	100.00 %				
5.03.02.2.04		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Jumlah jenis intervensi asesmen pegawai	1 jenis	1 jenis	100.00 %				
5.03.02.2.04		Badan Kepegawaian			Jumlah Jenis intervensi Disiplin	5 jenis	5 jenis	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		dan Pengembangan Sumber Daya Manusia										
757		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	5 Laporan	100.00 %				
763		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5797 Dokumen	5939 Dokumen	102.45 %				
3528		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
5.04.02	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 -Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045 -Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025. -Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning	95%	100%	105.26 %			1. Perlu penguatan kapasitas tertentu seperti untuk ASN di pos pos layanan public agar betul betul sesuai standart tidak hanya service excellent tapi sudah di level care terhadap costumer.	1. Telah dilakukan pengembangan kompetensi untuk penguatan kompetensi teknis masing-masing pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya seperti diklat pelayanan prima, juru sita pajak, administrasi kepegawaian, diklat pemadam kebakaran level 1, dan lain-lain.
5.04.02.2.01		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	2232 orang	2232 orang	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Manusia										
795		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2232 Orang	2232 Orang	100.00 %				
5.04.02.2.02		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mendapatkan fasilitasi Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	168 orang	176 orang	104.76 %				
791		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	5 Laporan	125.00 %				



3.1.2.6 Pelaksanaan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Unsur pengawasan urusan pemerintahan dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Unsur pengawasan urusan pemerintahan mencakup Urusan Pemerintahan bidang Inspektorat Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pelaksanaan unsur pengawasan urusan pemerintahan di Kota Surabaya pada tahun 2024 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang ditentukan. Pencapaian pelaksanaan unsur pengawasan urusan pemerintahan Kota Surabaya tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut.



Tabel 3.29 Capaian Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
6.01.01	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	-Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 -Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045 -Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025. -Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	97.88 %	97.88 %	Adanya penyesuaian kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	Melakukan identifikasi dan pemenuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta melakukan koordinasi antar bidang untuk memenuhi capaian organisasi dengan memprioritaskan kebutuhan bersama	1. Dalam pemenuhan SDM untuk auditor harap disesuaikan dengan analisis beban harap disesuaikan dengan analisis beban kerja agar pengawasan kerja di internal lebih maksimal dan memudahkan dalam menjalankan kinerja yang ada.	1. 1. Telah dilakukan penambahan APIP Inspektorat Kota Surabaya melalui penambahan PPUPD sebanyak 4 orang pada pengadaan CPNS Tahun 2024 dan penambahan auditor pada pembentukan jabatan fungsional auditor ahli pertama sebanyak 2 orang. 2. Telah dilakukan upaya permohonan penambahan auditor dari lulusan STAN dalam pemenuhan kuantitas SDM auditor Inspektorat Kota Surabaya
6.01.01.2.02		Inspektorat		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1489		Inspektorat		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	100.00 %				
6.01.01.2.06		Inspektorat		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100.00 %				
1599		Inspektorat		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	150.00 %				
6.01.01.2.08		Inspektorat		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100.00 %				
1602		Inspektorat		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
6.01.02		Inspektorat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
6.01.02		Inspektorat			Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu	100%	100%	100.00 %				
6.01.02		Inspektorat			Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
6.01.02.2.01		Inspektorat		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah dokumen hasil reviu laporan kinerja dan keuangan	17 Dokumen	17 Dokumen	100.00 %				
6.01.02.2.01		Inspektorat			Jumlah hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Surabaya yang ditindaklanjuti oleh PD dan dilakukan monev	142 Rekomendasi	147 Rekomendasi	103.52 %				
6.01.02.2.01		Inspektorat			Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan internal	60 lembaga	60 lembaga	100.00 %				
1560		Inspektorat		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	60 Laporan	60 Laporan	100.00 %				
1563		Inspektorat		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	142 Dokumen	147 Dokumen	103.52 %				
3286		Inspektorat		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	10 Laporan	100.00 %				
3287		Inspektorat		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	7 Laporan	7 Laporan	100.00 %				
6.01.02.2.02		Inspektorat		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan dengan tujuan tertentu	20 lembaga	20 lembaga	100.00 %				
1566		Inspektorat		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan	20 Laporan	100.00 %				
3446		Inspektorat		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan	5 Laporan	100.00 %				
6.01.03		Inspektorat		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi	100%	100%	100.00 %				
6.01.03		Inspektorat			Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan	100%	100%	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					daerah							
6.01.03		Inspektorat			Persentase rumusan kebijakan bidang pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100.00 %				
6.01.03.2.01		Inspektorat		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan	4 dokumen	8 dokumen	200.00 %				
1564		Inspektorat		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	100.00 %				
3282		Inspektorat		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	100.00 %				
6.01.03.2.02		Inspektorat		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah frekuensi yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Reformasi Birokrasi, Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Integritas	45 Kali	95 Kali	211.11 %				
6.01.03.2.02		Inspektorat			Jumlah laporan yang dihasilkan dalam hal pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	60 Laporan	60 Laporan	100.00 %				
1565		Inspektorat		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	60 perangkat daerah	60 perangkat daerah	100.00 %				
3288		Inspektorat		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	60 perangkat daerah	60 perangkat daerah	100.00 %				
3289		Inspektorat		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	25 Kegiatan	25 Kegiatan	100.00 %				
3290		Inspektorat		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan,	10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas							



3.1.2.7 Pelaksanaan Unsur Kewilayahan

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Unsur Kewilayahan ini meliputi Bidang Kecamatan yang dilaksanakan oleh 31 Kecamatan.

Pelaksanaan unsur Kewilayahan di Kota Surabaya pada tahun 2024 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang ditentukan. Pencapaian pelaksanaan unsur Kewilayahan Kota Surabaya tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut.



Tabel 3.30 Capaian Unsur Kewilayahan Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01.01	KECAMATAN	Kec. Genteng	-Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 -Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045 -Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025. -Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.50 %	97.88 %	100.39 %				
7.01.01.2.02		Kec. Genteng		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
843		Kec. Genteng		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	59 Orang/bulan	101.72 %				
7.01.01.2.06		Kec. Genteng		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
1840		Kec. Genteng		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Genteng		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
1841		Kec. Genteng		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	100.00 %				
7.01.02		Kec. Genteng		PROGRAM	Persentase data	100%	100%	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah							
7.01.02		Kec. Genteng			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Genteng			Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	23.38 %	63.56 %	271.86 %				
7.01.02.2.01		Kec. Genteng		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
1775		Kec. Genteng		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Genteng		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga masyarakat yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	364 Lembaga	364 Lembaga	100.00 %				
1811		Kec. Genteng		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Genteng		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Genteng			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Genteng			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
1823		Kec. Genteng		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1825		Kec. Genteng		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				yang Dilimpahkan	Dilimpahkan							
1862		Kec. Genteng		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
7.01.03		Kec. Genteng		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.50 %	62.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Genteng			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Genteng		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Genteng			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	6 kelurahan	120.00 %				
1829		Kec. Genteng		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	9 Unit	112.50 %				
1830		Kec. Genteng		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	100.00 %				
1831		Kec. Genteng		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	100.00 %				
1832		Kec. Genteng		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	100.00 %				
1833		Kec. Genteng		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	100.00 %				
1834		Kec. Genteng		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
1835		Kec. Genteng		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
1836		Kec. Genteng		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	150.00 %				
1837		Kec. Genteng		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1838		Kec. Genteng		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2526		Kec. Genteng		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	116.67 %				
7.01.03.2.03		Kec. Genteng		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	61 Lembaga	61 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Genteng			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	15 Lembaga	15 Lembaga	100.00 %				
3219		Kec. Genteng		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
4671		Kec. Genteng		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	61 Unit	61 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Genteng		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Genteng		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	12 Lokasi	100.00 %				
1842		Kec. Genteng		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Genteng		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Genteng		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama	9 Kasus	12 Kasus	133.33 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Babinsa/Babinkamtibas							
7.01.05.2.01		Kec. Genteng			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
1844		Kec. Genteng		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	58 Orang	68 Orang	117.24 %				
1886		Kec. Genteng		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Simokerto		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.50 %	97.3 %	99.79 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran.	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan paling utama.		
7.01.01.2.02		Kec. Simokerto		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
378		Kec. Simokerto		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Simokerto		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
905		Kec. Simokerto		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Simokerto		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
1333		Kec. Simokerto		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	15 Unit	60.00 %	Penggunaan sarana dan prasarana kantor sesuai standar dan efisien sehingga kondisi sarana prasarana masih optimal (dalam kondisi baik), dan adanya lelang kendaraan dinas yang sudah tidak optimal kondisinya.	Melakukan updating kondisi barang di aplikasi SIMBADA dan segera melakukan pengembalian aset serta terus berkomitmen untuk melakukan efisiensi penggunaan sarana prasarana.		
7.01.02		Kec. Simokerto		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02		Kec. Simokerto			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Simokerto			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	67.53 %	53.66 %	79.46 %	Adanya usulan penyediaan barang yang tidak dapat dipertimbangkan dikarenakan adanya prioritas terhadap usulan yang lebih urgent.	1) Meningkatkan koordinasi dengan PD dan lembaga kemasyarakatan terkait mengenai skala prioritas di kecamatan. 2) Meningkatkan komunikasi dengan masyarakat agar bersedia memahami dan dapat diusulkan kembali di musrenbang tahun selanjutnya.		
7.01.02.2.01		Kec. Simokerto			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	5 lembaga	5 lembaga	100.00 %			
3073		Kec. Simokerto			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %			
7.01.02.2.02		Kec. Simokerto			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga masyarakat yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	356 lembaga	356 lembaga	100.00 %			
1788		Kec. Simokerto			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Simokerto			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Simokerto				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Simokerto				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			
1790		Kec. Simokerto			Pelaksanaan Urusan	Jumlah Dokumen Non	20 Dokumen	74 Dokumen	370.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Perizinan Usaha yang Dilaksanakan							
1791		Kec. Simokerto		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1792		Kec. Simokerto		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Simokerto		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.5 %	62.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Simokerto			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Simokerto		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Simokerto			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	5 kelurahan	100.00 %				
3115		Kec. Simokerto		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
3123		Kec. Simokerto		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	100.00 %				
3128		Kec. Simokerto		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	100.00 %				
3132		Kec. Simokerto		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	25 Unit	100.00 %				
3137		Kec. Simokerto		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	100.00 %				
3138		Kec. Simokerto		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3 Unit	150.00 %				
3147		Kec. Simokerto		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100.00 %				
3149		Kec. Simokerto		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
3150		Kec. Simokerto		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	100.00 %				
3154		Kec. Simokerto		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
3155		Kec. Simokerto		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Simokerto		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	48 Lembaga	48 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Simokerto			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Lembaga	50 Lembaga	100.00 %				
3114		Kec. Simokerto		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
4673		Kec. Simokerto		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	48 Unit	48 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Simokerto		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Simokerto		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi	14 Lokasi	100.00 %				
3118		Kec. Simokerto		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Simokerto		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Persentase penanganan potensi konflik tidak	100%	100%	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				PEMERINTAHAN UMUM	menjadi konflik di Kecamatan							
7.01.05.2.01		Kec. Simokerto		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	7 Kasus	13 Kasus	185.71 %				
7.01.05.2.01		Kec. Simokerto			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
3119		Kec. Simokerto		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	53 Orang	53 Orang	100.00 %				
3120		Kec. Simokerto		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Tegalsari		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.15 %	95.4 %	97.20 %	Belum sepenuhnya terpenuhinya kebutuhan pelayanan barang jasa.	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan paling utama.		
7.01.01.2.02		Kec. Tegalsari		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1175		Kec. Tegalsari		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Tegalsari		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2310		Kec. Tegalsari		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	30 Paket	111.11 %				
7.01.01.2.09		Kec. Tegalsari		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2755		Kec. Tegalsari		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	100.00 %				
7.01.02		Kec. Tegalsari		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat	100%	99.53 %	99.53 %	Kurangnya kesadaran masyarakat pelaku usaha untuk mendaftar NIB	Perlu dukungan dari lembaga kemasyarakatan dalam pendampingan		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				PELAYANAN PUBLIK	Daerah				disebabkan karena ketakutan terkait kewajiban setelah memiliki NIB.	pelaku usaha dan kerjasama dengan PD terkait dalam proses pendampingan pelaku usaha.		
7.01.02		Kec. Tegalsari			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Tegalsari			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.25 %	58.18 %	250.24 %				
7.01.02.2.01		Kec. Tegalsari		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
2292		Kec. Tegalsari		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	125 Laporan	125 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Tegalsari		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	364 Lembaga	364 Lembaga	100.00 %				
2580		Kec. Tegalsari		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Tegalsari		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Tegalsari			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Tegalsari			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
2289		Kec. Tegalsari		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
2296		Kec. Tegalsari		Pelaksanaan Urusan	Jumlah Laporan	4140 Laporan	4210 Laporan	101.69 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan							
2297		Kec. Tegalsari		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00 %				
7.01.03		Kec. Tegalsari		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.5 %	62.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Tegalsari			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Tegalsari		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Tegalsari			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	5 kelurahan	100.00 %				
3090		Kec. Tegalsari		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
3101		Kec. Tegalsari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	13 Unit	108.33 %				
3102		Kec. Tegalsari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	100.00 %				
3103		Kec. Tegalsari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	100.00 %				
3104		Kec. Tegalsari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	14 Unit	116.67 %				
3105		Kec. Tegalsari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	10 Unit	111.11 %				
3106		Kec. Tegalsari		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
3107		Kec. Tegalsari		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
3108		Kec. Tegalsari		Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pokmas dan	2 Pokmas /	2 Pokmas /	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				di Kelurahan	Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas	Ormas					
3109		Kec. Tegalsari		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
3110		Kec. Tegalsari		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Tegalsari		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarasannya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	48 Lembaga	48 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Tegalsari			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	192 Lembaga	192 Lembaga	100.00 %				
3082		Kec. Tegalsari		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	55 Laporan	114.58 %				
4651		Kec. Tegalsari		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	48 Unit	48 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Tegalsari		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Tegalsari		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	21 Lokasi	21 Lokasi	100.00 %				
3060		Kec. Tegalsari		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Tegalsari		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Tegalsari		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah potensi konflik yang dapat	62 Kasus	62 Kasus	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Penugasan Kepala Daerah	ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas							
7.01.05.2.01		Kec. Tegalsari			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
3061		Kec. Tegalsari		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	47 Orang	45 Orang	95.74 %	Pelaksanaan acara di jam kerja yang mengakibatkan beberapa peserta target tidak dapat hadir.	Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan sasaran peserta supaya acara selanjutnya dapat diikuti oleh semua peserta.		
3062		Kec. Tegalsari		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Bubutan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.06 %	96.58 %	100.54 %				
7.01.01.2.02		Kec. Bubutan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1491		Kec. Bubutan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Bubutan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2288		Kec. Bubutan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	29 Paket	126.09 %				
7.01.01.2.09		Kec. Bubutan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2294		Kec. Bubutan		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	6 Unit	120.00 %				
7.01.02		Kec. Bubutan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Bubutan			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02		Kec. Bubutan			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.37 %	33.33 %	136.77 %				
7.01.02.2.01		Kec. Bubutan		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	7 Lembaga	116.67 %				
1923		Kec. Bubutan		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Bubutan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga masyarakat yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	414 Lembaga	414 Lembaga	100.00 %				
1939		Kec. Bubutan		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Bubutan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Bubutan			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Bubutan			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
1724		Kec. Bubutan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	40 Dokumen	102 Dokumen	255.00 %				
1725		Kec. Bubutan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1726		Kec. Bubutan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Bubutan		PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase kelurahan	62.5 %	62.5 %	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	yang menindaklanjuti konsep inovasi							
7.01.03		Kec. Bubutan			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Bubutan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Bubutan			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 Kelurahan	5 Kelurahan	100.00 %				
1784		Kec. Bubutan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	100.00 %				
1786		Kec. Bubutan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
1865		Kec. Bubutan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	11 Unit	122.22 %				
1868		Kec. Bubutan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	11 Unit	110.00 %				
1870		Kec. Bubutan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	100.00 %				
1872		Kec. Bubutan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	100.00 %				
1873		Kec. Bubutan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
1876		Kec. Bubutan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
1877		Kec. Bubutan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
1878		Kec. Bubutan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
1888		Kec. Bubutan		Peningkatan Partisipasi	Jumlah Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kemasyarakatan	Kemasyarakatan					
7.01.03.2.03		Kec. Bubutan		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarasannya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga	44 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Bubutan			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	440 Lembaga	440 Lembaga	100.00 %				
1764		Kec. Bubutan		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	6 Laporan	100.00 %				
4659		Kec. Bubutan		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit	44 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Bubutan		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Bubutan		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	15 Lokasi	100.00 %				
1758		Kec. Bubutan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Bubutan		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Bubutan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	29 Kasus	30 Kasus	103.45 %				
7.01.05.2.01		Kec. Bubutan			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1755		Kec. Bubutan		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Orang	20 Orang	100.00 %				
1756		Kec. Bubutan		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Kenjeran		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.72 %	97.29 %	98.55 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan paling utama		
7.01.01.2.02		Kec. Kenjeran		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
488		Kec. Kenjeran		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Kenjeran		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2955		Kec. Kenjeran		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	27 Paket	225.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Kenjeran		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2956		Kec. Kenjeran		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	6 Unit	120.00 %				
7.01.02		Kec. Kenjeran		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Kenjeran			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Kenjeran			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	33.33 %	51.22 %	153.68 %				
7.01.02.2.01		Kec. Kenjeran		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
1728		Kec. Kenjeran		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Kenjeran		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	460 Lembaga	460 Lembaga	100.00 %				
1774		Kec. Kenjeran		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Kenjeran		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Kenjeran			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Kenjeran			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
1780		Kec. Kenjeran		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100 Dokumen	142 Dokumen	142.00 %				
2121		Kec. Kenjeran		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2127		Kec. Kenjeran		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Kenjeran		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.5 %	62.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Kenjeran			Persentase Potensi	100%	100%	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Usaha yang difasilitasi							
7.01.03.2.02		Kec. Kenjeran		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Kenjeran			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	4 kelurahan	100.00 %				
2272		Kec. Kenjeran		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	100.00 %				
2273		Kec. Kenjeran		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	100.00 %				
2274		Kec. Kenjeran		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	100.00 %				
2276		Kec. Kenjeran		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	100.00 %				
2277		Kec. Kenjeran		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2278		Kec. Kenjeran		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2280		Kec. Kenjeran		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2281		Kec. Kenjeran		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2959		Kec. Kenjeran		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Kenjeran		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	38 Lembaga	38 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Kenjeran			Jumlah Potensi Usaha	100 pelaku	120 pelaku	120.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					yang difasilitasi	usaha	usaha					
3465		Kec. Kenjeran		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
4653		Kec. Kenjeran		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	38 Unit	38 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Kenjeran		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Kenjeran		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	10 Lokasi	10 Lokasi	100.00 %				
2914		Kec. Kenjeran		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Kenjeran		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Kenjeran		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	24 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Kenjeran			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
2922		Kec. Kenjeran		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	418 Orang	418 Orang	100.00 %				
2923		Kec. Kenjeran		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01		Kec. Pabean Cantian		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.80 %	95.72 %	97.87 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan karena adanya pengalihan untuk kegiatan prioritas skala kota.	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan prioritas.		
7.01.01.2.02		Kec. Pabean Cantian		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
827		Kec. Pabean Cantian		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Pabean Cantian		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2322		Kec. Pabean Cantian		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	7 Paket	116.67 %				
7.01.01.2.09		Kec. Pabean Cantian		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2323		Kec. Pabean Cantian		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	7 Unit	175.00 %				
7.01.02		Kec. Pabean Cantian		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	99.72 %	99.72 %	Kurangnya kesadaran warga terkait pentingnya nomor identitas pelaku usaha (NIB).	Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya.		
7.01.02		Kec. Pabean Cantian			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Pabean Cantian			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	17%	32.79 %	192.88 %				
7.01.02.2.01		Kec. Pabean Cantian		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	7 Lembaga	116.67 %				
2050		Kec. Pabean Cantian		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Pabean Cantian		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung	371 Lembaga	371 Lembaga	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	penyelenggaraan urusan pemerintahan							
2076		Kec. Pabean Cantian		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Pabean Cantian		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Pabean Cantian			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Pabean Cantian			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
2077		Kec. Pabean Cantian		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
2078		Kec. Pabean Cantian		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2079		Kec. Pabean Cantian		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Pabean Cantian		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.5 %	62.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Pabean Cantian			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Pabean Cantian		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Pabean Cantian			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	4 kelurahan	100.00 %				
2057		Kec. Pabean Cantian		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Kelurahan							
2060		Kec. Pabean Cantian		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
2061		Kec. Pabean Cantian		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2062		Kec. Pabean Cantian		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
2063		Kec. Pabean Cantian		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
2066		Kec. Pabean Cantian		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2067		Kec. Pabean Cantian		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
4702		Kec. Pabean Cantian		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
4703		Kec. Pabean Cantian		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Pabean Cantian		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	50 Lembaga	50 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Pabean Cantian			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	50 Lembaga	50 Lembaga	100.00 %				
3121		Kec. Pabean Cantian		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
4641		Kec. Pabean Cantian		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Pabean Cantian		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Pabean		Koordinasi Upaya	Objek yang berpotensi	12 Lokasi	12 Lokasi	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Cantian		Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan							
2073		Kec. Pabean Cantian		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Pabean Cantian		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Pabean Cantian		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus	23 Kasus	115.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Pabean Cantian			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
2074		Kec. Pabean Cantian		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	120 Orang	100.00 %				
2075		Kec. Pabean Cantian		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Semampir		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95.42 %	97.15 %	101.81 %				
7.01.01.2.02		Kec. Semampir		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
964		Kec. Semampir		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Semampir		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2282		Kec. Semampir		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	20 Paket	133.33 %				
7.01.01.2.09		Kec. Semampir		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2284		Kec. Semampir		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	11 Unit	183.33 %				
7.01.02		Kec. Semampir		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Semampir			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Semampir			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.91 %	43.12 %	180.34 %				
7.01.02.2.01		Kec. Semampir		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga	4 Lembaga	100.00 %				
2115		Kec. Semampir		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Semampir		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga masyarakat yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	636 Lembaga	636 Lembaga	100.00 %				
2275		Kec. Semampir		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30 Laporan	30 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Semampir		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Semampir			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					kepada Camat							
7.01.02.2.04		Kec. Semampir			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
2124		Kec. Semampir		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen	12 Dokumen	120.00 %				
2126		Kec. Semampir		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2130		Kec. Semampir		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Semampir		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.5 %	62.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Semampir			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Semampir		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Semampir			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	5 kelurahan	100.00 %				
3203		Kec. Semampir		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
3205		Kec. Semampir		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
3206		Kec. Semampir		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
3207		Kec. Semampir		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3208		Kec. Semampir		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	133.33 %				
3209		Kec. Semampir		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
3210		Kec. Semampir		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	7 Unit	140.00 %				
3211		Kec. Semampir		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	6 Unit	300.00 %				
3212		Kec. Semampir		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	9 Unit	300.00 %				
3213		Kec. Semampir		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	8 Unit	200.00 %				
3214		Kec. Semampir		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	7 Unit	350.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Semampir		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	70 Lembaga	70 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Semampir			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	140 Unit Usaha	140 Unit Usaha	100.00 %				
3204		Kec. Semampir		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
4650		Kec. Semampir		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	70 Unit	70 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Semampir		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Semampir		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	16 Lokasi	16 Lokasi	100.00 %				
3053		Kec. Semampir		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
7.01.05		Kec. Semampir		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Semampir		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	21 Kasus	21 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Semampir			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	4 Topik	200.00 %				
3054		Kec. Semampir		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	561 Orang	457 Orang	81.46 %	Kurangnya sinkronisasi antara target dengan anggaran yang tersedia.	Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan PD terkait pengelolaan target output dan anggaran.		
3055		Kec. Semampir		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Krembangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.34 %	95.9 %	98.52 %	Adanya pengadaan barang yang tidak terealisasi disebabkan pengalihan prioritas untuk kebutuhan di skala kota	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan prioritas		
7.01.01.2.02		Kec. Krembangan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
548		Kec. Krembangan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Krembangan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
1280		Kec. Krembangan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Krembangan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
549		Kec. Krembangan		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	8 Unit	114.29 %				
7.01.02		Kec. Krembangan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Krembangan			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Krembangan			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37.11 %	31.72 %	85.48 %	masih banyak usulan yang tidak bisa realisasi karena status lahan milik instansi lain	koordinasi dengan dinas pengampu terkait usulan yang tidak bisa di realisasikan untuk di alihkan ke usulan lain (lokasi usulan)		
7.01.02.2.01		Kec. Krembangan		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
1722		Kec. Krembangan		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Krembangan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga masyarakat yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	431 Lembaga	431 Lembaga	100.00 %				
1746		Kec. Krembangan		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Krembangan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Krembangan			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Krembangan			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					usaha yang dilimpahkan kepada Camat							
1818		Kec. Krembangan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen	24 Dokumen	100.00 %				
1819		Kec. Krembangan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1820		Kec. Krembangan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Krembangan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang mindaklanjuti konsep inovasi	62.5 %	62.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Krembangan			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Krembangan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Krembangan			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 Lembaga	5 Lembaga	100.00 %				
2082		Kec. Krembangan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2083		Kec. Krembangan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	100.00 %				
2117		Kec. Krembangan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2156		Kec. Krembangan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2159		Kec. Krembangan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2160		Kec. Krembangan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
2187		Kec. Krembangan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	4 Unit	133.33 %				
2188		Kec. Krembangan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
2190		Kec. Krembangan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	100.00 %				
2191		Kec. Krembangan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
2503		Kec. Krembangan		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Krembangan		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga	44 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Krembangan			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100.00 %				
3268		Kec. Krembangan		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
4652		Kec. Krembangan		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit	44 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Krembangan		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Krembangan		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1794		Kec. Krembangan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Kecamatan							
7.01.05		Kec. Krembangan		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Krembangan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Krembangan			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	35 Orang	35 Orang	100.00 %				
1821		Kec. Krembangan		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	35 Orang	35 Orang	100.00 %				
1822		Kec. Krembangan		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Tambaksari		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.67 %	97.37 %	99.69 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan karena adanya pengalihan anggaran untuk kegiatan prioritas skala kota.	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan paling utama		
7.01.01.2.02		Kec. Tambaksari		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1504		Kec. Tambaksari		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 Orang/bulan	82 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Tambaksari		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2405		Kec. Tambaksari		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Tambaksari		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2407		Kec. Tambaksari		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	50 Unit	17 Unit	34.00 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam	Melakukan pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan prioritas		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				memenuhi kebutuhan perkantoran dan adanya rasionalisasi anggaran			
7.01.02		Kec. Tambaksari		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	99.41 %	99.41 %	Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mendaftar NIB disebabkan karena ketakutan terkait kewajiban setelah memiliki NIB.	Perlu dukungan dari lembaga kemasyarakatan dalam pendampingan pelaku usaha dan kerjasama dengan PD terkait dalam proses pendampingan pelaku usaha.		
7.01.02		Kec. Tambaksari			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Tambaksari			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	47.02 %	78.63 %	167.23 %				
7.01.02.2.01		Kec. Tambaksari		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	7 Lembaga	116.67 %				
2325		Kec. Tambaksari		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Tambaksari		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga masyarakat yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	751 Lembaga	751 Lembaga	100.00 %				
2430		Kec. Tambaksari		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Tambaksari		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Tambaksari			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Tambaksari			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					kepada Camat							
2347		Kec. Tambaksari		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
2357		Kec. Tambaksari		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	192 Dokumen	400.00 %				
2366		Kec. Tambaksari		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Tambaksari		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.5 %	62.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Tambaksari			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Tambaksari		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 kelurahan	2 kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Tambaksari			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	8 kelurahan	8 kelurahan	100.00 %				
2844		Kec. Tambaksari		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
2851		Kec. Tambaksari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	9 Unit	128.57 %				
2853		Kec. Tambaksari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	100.00 %				
2854		Kec. Tambaksari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	100.00 %				
2867		Kec. Tambaksari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	13 Unit	108.33 %				
2870		Kec. Tambaksari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	100.00 %				
2871		Kec. Tambaksari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	100.00 %				
2872		Kec. Tambaksari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Unit	1 Unit	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					yang Terbangun							
2873		Kec. Tambaksari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	100.00 %				
2879		Kec. Tambaksari		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2880		Kec. Tambaksari		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2881		Kec. Tambaksari		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2882		Kec. Tambaksari		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2883		Kec. Tambaksari		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2884		Kec. Tambaksari		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2885		Kec. Tambaksari		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2886		Kec. Tambaksari		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Tambaksari		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarasannya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	78 Lembaga	78 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Tambaksari			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	150 pelaku usaha	150 pelaku usaha	100.00 %				
3267		Kec. Tambaksari		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Usaha Ekonomi Masyarakat							
4690		Kec. Tambaksari		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	78 Unit	78 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Tambaksari		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Tambaksari		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	17 lokasi	17 lokasi	100.00 %				
3270		Kec. Tambaksari		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Tambaksari		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Tambaksari		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	2 kasus	12 kasus	600.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Tambaksari			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
3271		Kec. Tambaksari		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	663 Orang	310 Orang	46.76 %	Kurangnya sinkronisasi antara target dengan anggaran yang tersedia.	Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan PD terkait pengelolaan target output dan anggaran.		
3272		Kec. Tambaksari		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Gubeng		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan	96.97 %	96.51 %	99.53 %	kurang optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam	mengoptimalkan pelayanan kesekretariatan dalam		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					kesekretariatan				sarana dan prasarana karena adanya pengalihan untuk kebutuhan prioritas skala kota	pemenuhan kebutuhan perkantoran		
7.01.01.2.02		Kec. Gubeng		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
614		Kec. Gubeng		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Gubeng		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2857		Kec. Gubeng		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	11 Paket	110.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Gubeng		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2858		Kec. Gubeng		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	100.00 %				
7.01.02		Kec. Gubeng		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Gubeng			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Gubeng			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	30.77 %	52.94 %	172.05 %				
7.01.02.2.01		Kec. Gubeng		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
1727		Kec. Gubeng		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Gubeng		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan	480 Lembaga	480 Lembaga	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Kecamatan	pemerintahan							
1730		Kec. Gubeng		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Gubeng		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Gubeng			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Gubeng			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
1734		Kec. Gubeng		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	35 Dokumen	35 Dokumen	100.00 %				
1742		Kec. Gubeng		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1749		Kec. Gubeng		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Gubeng		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.50 %	62.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Gubeng			Persentase potensi usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Gubeng		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Gubeng			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	6 kelurahan	100.00 %				
1757		Kec. Gubeng		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	100.00 %				
2469		Kec. Gubeng		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Masyarakat di Kelurahan							
2473		Kec. Gubeng		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	100.00 %				
2492		Kec. Gubeng		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2612		Kec. Gubeng		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
2627		Kec. Gubeng		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2629		Kec. Gubeng		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	4 Unit	200.00 %				
2637		Kec. Gubeng		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2643		Kec. Gubeng		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	100.00 %				
2652		Kec. Gubeng		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2656		Kec. Gubeng		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2657		Kec. Gubeng		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
2850		Kec. Gubeng		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	120.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Gubeng		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	52 Lembaga	52 Lembaga	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.03		Kec. Gubeng			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	90 Unit Kerja	90 Unit Kerja	100.00 %				
3273		Kec. Gubeng		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
4657		Kec. Gubeng		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	52 Unit	52 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Gubeng		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Gubeng		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi	24 Lokasi	100.00 %				
3274		Kec. Gubeng		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Gubeng		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Gubeng		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	24 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Gubeng			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
3275		Kec. Gubeng		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	124 Orang	124 Orang	100.00 %				
3276		Kec. Gubeng		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Perundang-Undangan							
7.01.01		Kec. Rungkut		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.06 %	96%	98.91 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan karena adanya pengalihan untuk kegiatan prioritas skala kota.	Melakukan Evaluasi terstruktur dan koordinasi dengan OPD terkait		
7.01.01.2.02		Kec. Rungkut		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
781		Kec. Rungkut		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	66 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Rungkut		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2545		Kec. Rungkut		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	17 Paket	113.33 %				
7.01.01.2.09		Kec. Rungkut		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2546		Kec. Rungkut		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	8 Unit	133.33 %				
7.01.02		Kec. Rungkut		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Rungkut			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Rungkut			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37.16 %	81.08 %	218.19 %				
7.01.02.2.01		Kec. Rungkut		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
2094		Kec. Rungkut		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Instansi Vertikal Terkait							
7.01.02.2.02		Kec. Rungkut		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	497 Lembaga	497 Lembaga	100.00 %				
2099		Kec. Rungkut		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Rungkut		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	7 Bidang Urusan	116.67 %				
7.01.02.2.04		Kec. Rungkut			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Rungkut			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	33 Dokumen	110.00 %				
2138		Kec. Rungkut		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2916		Kec. Rungkut		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
2917		Kec. Rungkut		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	33 Dokumen	110.00 %				
7.01.03		Kec. Rungkut		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang mindaklanjuti konsep inovasi	62.5 %	62.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Rungkut			Persentase potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Rungkut		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Rungkut			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
2197		Kec. Rungkut		Peningkatan Partisipasi	Jumlah Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kemasyarakatan	Kemasyarakatan					
2198		Kec. Rungkut		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	100.00 %				
2199		Kec. Rungkut		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	100.00 %				
2200		Kec. Rungkut		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	100.00 %				
2202		Kec. Rungkut		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	100.00 %				
2204		Kec. Rungkut		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	100.00 %				
2206		Kec. Rungkut		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	9 Unit	112.50 %				
2209		Kec. Rungkut		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2210		Kec. Rungkut		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2212		Kec. Rungkut		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2215		Kec. Rungkut		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2217		Kec. Rungkut		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2218		Kec. Rungkut		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
7.01.03.2.03		Kec. Rungkut		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	74 Lembaga	74 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Rungkut			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	110 Unit Usaha	110 Unit Usaha	100.00 %				
3135		Kec. Rungkut		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
4655		Kec. Rungkut		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	74 Unit	74 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Rungkut		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Rungkut		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	22 Lokasi	22 Lokasi	100.00 %				
3141		Kec. Rungkut		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Rungkut		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Rungkut		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	150 Kasus	150 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Rungkut			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
3145		Kec. Rungkut		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,	120 Orang	120 Orang	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Ketahanan Nasional	Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						
3146		Kec. Rungkut			Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5 Laporan	5 Laporan	100.00 %			
7.01.01		Kec. Gunung Anyar		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.03 %	96.11 %	98.04 %	Kurang optimalnya pelayanan sarana dan prasarana sekretariat	Meningkatkan koordinasi dengan PD terkait penyediaan barang/jasa serta sarana dan prasarana perkantoran.		
7.01.01.2.02		Kec. Gunung Anyar		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
698		Kec. Gunung Anyar			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	100.00 %			
7.01.01.2.06		Kec. Gunung Anyar		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	29 Paket	29 Paket	100.00 %				
2583		Kec. Gunung Anyar			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket	29 Paket	100.00 %			
7.01.01.2.09		Kec. Gunung Anyar		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	100.00 %				
2584		Kec. Gunung Anyar			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	100.00 %			
7.01.02		Kec. Gunung Anyar		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	85.77 %	85.77 %	Masih banyak pelaku usaha yang belum ber-NIB karena kurangnya kesadaran pelaku usaha akan manfaat NIB.	Meningkatkan intensitas pendampingan secara berkelanjutan.		
7.01.02		Kec. Gunung Anyar			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Gunung Anyar			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50%	62.37 %	124.74 %				
7.01.02.2.01		Kec. Gunung Anyar		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	2 laporan	2 laporan	100.00 %				
3595		Kec. Gunung			Koordinasi/Sinergi	Jumlah Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Anyar		Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
7.01.02.2.02		Kec. Gunung Anyar		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga masyarakat yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	219 Lembaga	219 Lembaga	100.00 %				
2560		Kec. Gunung Anyar		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Gunung Anyar		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen non perijinan usaha yang dilaksanakan	625 Dokumen	362 Dokumen	57.92 %	Kurang optimalnya pemrosesan dikarenakan persyaratan untuk diterimanya permohonan IMB (antara lain: alas hak kepemilikan dan tarif).	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Gunung Anyar.		
7.01.02.2.04		Kec. Gunung Anyar			Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 laporan	12 laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Gunung Anyar			Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan	12 laporan	12 laporan	100.00 %				
2573		Kec. Gunung Anyar		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	625 Dokumen	362 Dokumen	57.92 %	Kurang optimalnya pemrosesan dikarenakan persyaratan untuk diterimanya permohonan IMB (antara lain: alas hak kepemilikan dan tarif).	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Gunung Anyar.		
2577		Kec. Gunung Anyar		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2579		Kec. Gunung Anyar		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Gunung Anyar		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.50 %	62.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Gunung Anyar			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Gunung Anyar		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02		Kec. Gunung Anyar			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	4 kelurahan	100.00 %				
3085		Kec. Gunung Anyar		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
3089		Kec. Gunung Anyar		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	100.00 %				
3091		Kec. Gunung Anyar		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2 Unit	200.00 %				
3092		Kec. Gunung Anyar		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	6 Unit	150.00 %				
3093		Kec. Gunung Anyar		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	6 Unit	300.00 %				
3094		Kec. Gunung Anyar		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
3095		Kec. Gunung Anyar		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
3096		Kec. Gunung Anyar		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
3097		Kec. Gunung Anyar		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Gunung Anyar		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	29 Lembaga	29 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Gunung Anyar			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha	120.00 %				
3098		Kec. Gunung Anyar		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Masyarakat							
4649		Kec. Gunung Anyar		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	29 Unit	29 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Gunung Anyar		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Gunung Anyar		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	26 Lokasi	173.33 %				
3099		Kec. Gunung Anyar		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Gunung Anyar		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Gunung Anyar		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 kasus	24 kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Gunung Anyar			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
3100		Kec. Gunung Anyar		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	47 Orang	47 Orang	100.00 %				
3122		Kec. Gunung Anyar		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Tenggilis Mejoyo		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95.98 %	96.94 %	101.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01.2.02		Kec. Tenggilis Mejoyo		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1423		Kec. Tenggilis Mejoyo		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Tenggilis Mejoyo		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	24 Paket	126.32 %				
2149		Kec. Tenggilis Mejoyo		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	24 Paket	126.32 %				
7.01.01.2.09		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	18 Unit	90.00 %	Adanya prioritas belanja dari skala kota	Berkoordinasi dengan tim anggaran terkait dengan rencana realisasi kegiatan		
1427		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	18 Unit	90.00 %	penggunaan sarana dan prasarana kantor sesuai standar dan efisien sehingga kondisi sarana prasarana masih optimal (dalam kondisi baik), dan adanya lelang kendaraan dinas yang sudah tidak optimal kondisinya	melakukan updating kondisi barang di aplikasi SIMBADA dan segera melakukan pengembalian aset serta terus berkomitmen untuk melakukan efisiensi penggunaan sarana prasarana		
7.01.02		Kec. Tenggilis Mejoyo		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	99.98 %	99.98 %	Kurangnya kesadaran masyarakat pelaku usaha untuk mendaftar NIB disebabkan karena ketakutan terkait kewajiban setelah memiliki NIB.	Perlu dukungan dari lembaga kemasyarakatan dalam pendampingan pelaku usaha dan kerjasama dengan PD terkait dalam proses pendampingan pelaku usaha.		
7.01.02		Kec. Tenggilis Mejoyo			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Tenggilis Mejoyo			Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	24.73 %	74.36 %	300.69 %				
7.01.02.2.01		Kec. Tenggilis Mejoyo		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
1918		Kec. Tenggilis Mejoyo		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Instansi Vertikal Terkait	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
7.01.02.2.02		Kec. Tenggilis Mejoyo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	185 Lembaga	185 Lembaga	100.00 %				
1934		Kec. Tenggilis Mejoyo		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Laporan	2 Laporan	200.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Tenggilis Mejoyo			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Tenggilis Mejoyo			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
1965		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	2 Dokumen	200.00 %				
1967		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
1971		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Tenggilis Mejoyo		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.5 %	62.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Tenggilis Mejoyo			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Tenggilis Mejoyo		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Tenggilis Mejoyo			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	2 Pokmas/Ormas	200.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02		Kec. Tenggilis Mejoyo			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	34 Unit	3,400.00 %				
2016		Kec. Tenggilis Mejoyo		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
2020		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	3 Unit	300.00 %				
2022		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	11 Unit	1,100.00 %				
2025		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	10 Unit	1,000.00 %				
2026		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	10 Unit	1,000.00 %				
2027		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2028		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2029		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2030		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarasannya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	25 Lembaga	25 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Tenggilis Mejoyo			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	60 Pelaku Usaha	62 Pelaku Usaha	103.33 %				
3464		Kec. Tenggilis Mejoyo		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4654		Kec. Tenggilis Mejoyo		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	25 Unit	25 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Tenggilis Mejoyo		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Tenggilis Mejoyo		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14 lokasi	14 lokasi	100.00 %				
2112		Kec. Tenggilis Mejoyo		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Tenggilis Mejoyo		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Tenggilis Mejoyo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Tenggilis Mejoyo			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	24 kasus	20 kasus	83.33 %	Kegiatan dilaksanakan pada jam kerja sehingga peserta yang hadir tidak bisa 100 %	Melakukan pendekatan kepada Tokoh Masyarakat, Kader KSH, Karang Taruna dan PKK untuk dapatnya ikut dalam Sosialisasi		
2113		Kec. Tenggilis Mejoyo		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	92 Orang	92.00 %	Tingkat Kehadiran peserta Sosialisasi tidak bisa 100 %	Melakukan Pendekatan kepada Tokoh Masyarakat, Kader KSH, Karang Taruna dan PKK untuk ikut serta dalam kegiatan Sosialisasi		
2114		Kec. Tenggilis Mejoyo		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Sukolilo		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Tingkat kepuasan pegawai terhadap	97.11 %	96.15 %	99.01 %	Belum optimalnya pelayanan	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				DAERAH KABUPATEN/KOTA	pelayanan kesekretariatan				kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran	paling utama		
7.01.01.2.02		Kec. Sukolilo		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
816		Kec. Sukolilo		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Sukolilo		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
817		Kec. Sukolilo		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Sukolilo		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
819		Kec. Sukolilo		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 Unit	10 Unit	29.41 %	Penggunaan sarana dan prasarana kantor sesuai standar dan efisien sehingga kondisi sarana prasarana masih optimal (dalam kondisi baik), dan adanya lelang kendaraan dinas yang sudah tidak optimal kondisinya	Melakukan updating kondisi barang di aplikasi SIMBADA dan segera melakukan pengembalian aset serta terus berkomitmen untuk melakukan efisiensi penggunaan sarana prasarana		
7.01.02		Kec. Sukolilo		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Sukolilo			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Sukolilo			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	26.71 %	50.89 %	190.53 %				
7.01.02.2.01		Kec. Sukolilo		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
1737		Kec. Sukolilo		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Sukolilo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	Jumlah lembaga masyarakat yang	441 Lembaga	441 Lembaga	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan							
1778		Kec. Sukolilo		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	60 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Sukolilo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Sukolilo			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Sukolilo			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
1779		Kec. Sukolilo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	50 Dokumen	36 Dokumen	72.00 %	Kurang optimalnya pemrosesan dikarenakan persyaratan untuk diterimanya permohonan IMB (antara lain: alas hak kepemilikan dan tarif).	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Sukolilo		
1781		Kec. Sukolilo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
2673		Kec. Sukolilo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Sukolilo		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.5 %	62.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Sukolilo			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Sukolilo		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Sukolilo			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	7 kelurahan	7 kelurahan	100.00 %				
2930		Kec. Sukolilo		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pembangunan di Kelurahan	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
2935		Kec. Sukolilo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	5 Unit	125.00 %				
2937		Kec. Sukolilo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	11 Unit	275.00 %				
2938		Kec. Sukolilo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	6 Unit	120.00 %				
2939		Kec. Sukolilo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	8 Unit	160.00 %				
2941		Kec. Sukolilo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	100.00 %				
2943		Kec. Sukolilo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	18 Unit	150.00 %				
2944		Kec. Sukolilo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2945		Kec. Sukolilo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	9 Unit	150.00 %				
2946		Kec. Sukolilo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2947		Kec. Sukolilo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	133.33 %				
2948		Kec. Sukolilo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2949		Kec. Sukolilo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2950		Kec. Sukolilo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	4 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	125.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
2951		Kec. Sukolilo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Sukolilo		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarasannya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	67 Lembaga	67 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Sukolilo			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	100.00 %				
3074		Kec. Sukolilo		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
4631		Kec. Sukolilo		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	67 Unit	67 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Sukolilo		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Sukolilo		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	11 Lokasi	11 Lokasi	100.00 %				
3083		Kec. Sukolilo		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Sukolilo		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Sukolilo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	2 Kasus	5 Kasus	250.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Sukolilo			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan	2 Topik	2 Topik	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					kebangsaan dan ketahanan nasional							
3112		Kec. Sukolilo		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang	160 Orang	100.00 %				
3113		Kec. Sukolilo		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Mulyorejo		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.96 %	96.84 %	99.88 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran.	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan paling utama.		
7.01.01.2.02		Kec. Mulyorejo		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1493		Kec. Mulyorejo		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan	67 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Mulyorejo		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
1717		Kec. Mulyorejo		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	27 Paket	122.73 %				
7.01.01.2.09		Kec. Mulyorejo		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
1720		Kec. Mulyorejo		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	100.00 %				
7.01.02		Kec. Mulyorejo		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Mulyorejo			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Mulyorejo			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	40.51 %	55.56 %	137.15 %				
7.01.02.2.01		Kec. Mulyorejo		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Tingkat Kecamatan	kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan							
1729		Kec. Mulyorejo		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Mulyorejo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga masyarakat yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	346 Lembaga	346 Lembaga	100.00 %				
1845		Kec. Mulyorejo		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Mulyorejo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Mulyorejo			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Mulyorejo			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
1847		Kec. Mulyorejo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	230 Dokumen	766.67 %				
1850		Kec. Mulyorejo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1852		Kec. Mulyorejo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Mulyorejo		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.5 %	62.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Mulyorejo			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Mulyorejo		Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah kelurahan yang	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Kelurahan	dikembangkan potensi wilayahnya							
7.01.03.2.02		Kec. Mulyorejo			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	6 kelurahan	100.00 %				
2350		Kec. Mulyorejo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	9 Unit	900.00 %				
2351		Kec. Mulyorejo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	9 Unit	900.00 %				
2353		Kec. Mulyorejo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	14 Unit	1,400.00 %				
2354		Kec. Mulyorejo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	6 Unit	600.00 %				
2355		Kec. Mulyorejo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	10 Unit	1,000.00 %				
2356		Kec. Mulyorejo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	12 Unit	1,200.00 %				
2358		Kec. Mulyorejo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2359		Kec. Mulyorejo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2360		Kec. Mulyorejo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2361		Kec. Mulyorejo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2363		Kec. Mulyorejo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2364		Kec. Mulyorejo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
2604		Kec. Mulyorejo		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	116.67 %				
7.01.03.2.03		Kec. Mulyorejo		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarasannya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	53 Lembaga	53 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Mulyorejo			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100.00 %				
3466		Kec. Mulyorejo		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
4656		Kec. Mulyorejo		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	53 Unit	53 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Mulyorejo		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Mulyorejo		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	26 Lokasi	26 Lokasi	100.00 %				
1854		Kec. Mulyorejo		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Mulyorejo		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Mulyorejo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	24 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Mulyorejo			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan	2 Topik	2 Topik	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional							
1856		Kec. Mulyorejo		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	54 Orang	110 Orang	203.70 %				
1857		Kec. Mulyorejo		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Wonokromo		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.10 %	98.06 %	99.96 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan karena adanya pengalihan untuk kegiatan prioritas skala kota.	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan paling utama		
7.01.01.2.02		Kec. Wonokromo		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1286		Kec. Wonokromo		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	71 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Wonokromo		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2309		Kec. Wonokromo		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	27 Paket	117.39 %				
7.01.01.2.09		Kec. Wonokromo		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2313		Kec. Wonokromo		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	100.00 %				
7.01.02		Kec. Wonokromo		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Wonokromo			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Wonokromo			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	35.29 %	69.64 %	197.34 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.01		Kec. Wonokromo		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga	4 Lembaga	100.00 %				
1744		Kec. Wonokromo		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Wonokromo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga masyarakat yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	568 Lembaga	568 Lembaga	100.00 %				
2732		Kec. Wonokromo		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Wonokromo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Wonokromo			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Wonokromo			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
1761		Kec. Wonokromo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
1763		Kec. Wonokromo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1769		Kec. Wonokromo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Wonokromo		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.5 %	62.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec.			Persentase Potensi	100%	100%	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Wonokromo			Usaha yang difasilitasi							
7.01.03.2.02		Kec. Wonokromo		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	4 Kelurahan	4 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Wonokromo			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	6 kelurahan	100.00 %				
2207		Kec. Wonokromo		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	125.00 %				
2221		Kec. Wonokromo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	100.00 %				
2225		Kec. Wonokromo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	100.00 %				
2227		Kec. Wonokromo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	100.00 %				
2229		Kec. Wonokromo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	100.00 %				
2232		Kec. Wonokromo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	100.00 %				
2234		Kec. Wonokromo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	100.00 %				
2237		Kec. Wonokromo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2238		Kec. Wonokromo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2241		Kec. Wonokromo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2242		Kec. Wonokromo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Masyarakat di Kelurahan							
2243		Kec. Wonokromo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2244		Kec. Wonokromo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Wonokromo		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	58 Lembaga	58 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Wonokromo			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Unit Usaha	117 Unit Usaha	100.86 %				
3157		Kec. Wonokromo		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
4683		Kec. Wonokromo		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	58 Unit	58 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Wonokromo		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Wonokromo		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	20 Lokasi	20 Lokasi	100.00 %				
3158		Kec. Wonokromo		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Wonokromo		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Wonokromo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Kasus	12 Kasus	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.05.2.01		Kec. Wonokromo			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
3159		Kec. Wonokromo		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	120 Orang	100.00 %				
3160		Kec. Wonokromo		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Karangpilang		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.78 %	95.81 %	99.00 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan paling utama		
7.01.01.2.02		Kec. Karangpilang		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1495		Kec. Karangpilang		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Karangpilang		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
1572		Kec. Karangpilang		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	19 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Karangpilang		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
1575		Kec. Karangpilang		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	29 Unit	100.00 %				
7.01.02		Kec. Karangpilang		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Karangpilang			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Karangpilang			Persentase usulan musrenbang kecamatan	89.1 %	49.61 %	55.68 %	Adanya usulan penyediaan barang yang	Meningkatkan komunikasi dengan masyarakat agar		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					yang dipertimbangkan				tidak dapat dipertimbangkan dikarenakan adanya prioritas terhadap usulan yang lebih urgent.	bersedia memahami.		
7.01.02.2.01		Kec. Karangpilang		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
2606		Kec. Karangpilang		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Karangpilang		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	220 Lembaga	220 Lembaga	100.00 %				
2640		Kec. Karangpilang		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Karangpilang		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Karangpilang			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Karangpilang			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
2634		Kec. Karangpilang		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	66 Dokumen	137.50 %				
2649		Kec. Karangpilang		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2651		Kec. Karangpilang		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				yang Dilimpahkan	Dilimpahkan							
7.01.03		Kec. Karangpilang		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.5 %	62.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Karangpilang			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Karangpilang		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Karangpilang			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	4 kelurahan	100.00 %				
2856		Kec. Karangpilang		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
2861		Kec. Karangpilang		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2862		Kec. Karangpilang		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2863		Kec. Karangpilang		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2864		Kec. Karangpilang		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2865		Kec. Karangpilang		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	100.00 %				
2866		Kec. Karangpilang		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	100.00 %				
2868		Kec. Karangpilang		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	100.00 %				
2869		Kec. Karangpilang		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.03		Kec. Karangpilang		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarasannya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	29 Lembaga	29 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Karangpilang			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Lembaga	116 Lembaga	100.00 %				
2805		Kec. Karangpilang		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
4681		Kec. Karangpilang		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	29 Unit	29 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Karangpilang		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Karangpilang		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi	8 Lokasi	100.00 %				
2770		Kec. Karangpilang		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Karangpilang		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Karangpilang		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	73 Kasus	73 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Karangpilang			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
2785		Kec. Karangpilang		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan	51 Orang	51 Orang	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					dan Ketahanan Nasional							
2788		Kec. Karangpilang		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Dukuh Pakis		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.30 %	96.41 %	99.09 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran.	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan paling utama		
7.01.01.2.02		Kec. Dukuh Pakis		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1416		Kec. Dukuh Pakis		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	51 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Dukuh Pakis		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2419		Kec. Dukuh Pakis		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Dukuh Pakis		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2422		Kec. Dukuh Pakis		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	100.00 %				
7.01.02		Kec. Dukuh Pakis		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Dukuh Pakis			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Dukuh Pakis			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	26.32 %	45.45 %	172.68 %				
7.01.02.2.01		Kec. Dukuh Pakis		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga	4 Lembaga	100.00 %				
1858		Kec. Dukuh Pakis		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Instansi Vertikal Terkait							
7.01.02.2.02		Kec. Dukuh Pakis		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	196 Lembaga	196 Lembaga	100.00 %				
1709		Kec. Dukuh Pakis		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Dukuh Pakis		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Dukuh Pakis			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Dukuh Pakis			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
1855		Kec. Dukuh Pakis		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1861		Kec. Dukuh Pakis		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
1863		Kec. Dukuh Pakis		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Dukuh Pakis		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.5 %	62.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Dukuh Pakis			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Dukuh Pakis		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	4 Kelurahan	4 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Dukuh Pakis			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan	4 Kelurahan	100.00 %				
1921		Kec. Dukuh Pakis		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 Unit	6 Unit	200.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					yang Terbangun							
1922		Kec. Dukuh Pakis		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
1990		Kec. Dukuh Pakis		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	12 Unit	1,200.00 %				
1992		Kec. Dukuh Pakis		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	8 Unit	266.67 %				
1994		Kec. Dukuh Pakis		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	7 Unit	233.33 %				
2001		Kec. Dukuh Pakis		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
2003		Kec. Dukuh Pakis		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2004		Kec. Dukuh Pakis		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2005		Kec. Dukuh Pakis		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Dukuh Pakis		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	31 Lembaga	31 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Dukuh Pakis			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	25 Lembaga	25 Lembaga	100.00 %				
1905		Kec. Dukuh Pakis		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
4640		Kec. Dukuh Pakis		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	31 Unit	31 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Dukuh		PROGRAM KOORDINASI	Persentase koordinasi	100%	100%	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Pakis		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan							
7.01.04.2.01		Kec. Dukuh Pakis		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	12 Lokasi	100.00 %				
3144		Kec. Dukuh Pakis		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Dukuh Pakis		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Dukuh Pakis		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	36 Kasus	36 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Dukuh Pakis			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
3193		Kec. Dukuh Pakis		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang	212 Orang	132.50 %				
3199		Kec. Dukuh Pakis		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Gayungan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.81 %	96.49 %	97.65 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan paling utama		
7.01.01.2.02		Kec. Gayungan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1051		Kec. Gayungan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	64 Orang/bulan	64 Orang/bulan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Tunjangan ASN							
7.01.01.2.06		Kec. Gayungan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2464		Kec. Gayungan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	27 Paket	122.73 %				
7.01.01.2.09		Kec. Gayungan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
3134		Kec. Gayungan		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	100.00 %				
7.01.02		Kec. Gayungan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Gayungan			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Gayungan			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	30.15 %	54.39 %	180.40 %				
7.01.02.2.01		Kec. Gayungan		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
1969		Kec. Gayungan		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Gayungan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga masyarakat yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	197 Lembaga	197 Lembaga	100.00 %				
2718		Kec. Gayungan		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Gayungan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Camat							
7.01.02.2.04		Kec. Gayungan			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Gayungan			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
1972		Kec. Gayungan			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	48 Dokumen	100.00 %			
1973		Kec. Gayungan			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %			
1974		Kec. Gayungan			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %			
7.01.03		Kec. Gayungan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.50 %	62.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Gayungan			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Gayungan			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Gayungan			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	4 kelurahan	100.00 %				
2059		Kec. Gayungan			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	120.00 %			
2887		Kec. Gayungan			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	100.00 %			
2892		Kec. Gayungan			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	100.00 %			
2893		Kec. Gayungan			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	100.00 %			
2894		Kec. Gayungan			Pembangunan Sarana dan	Jumlah Sarana dan	9 Unit	10 Unit	111.11 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Prasarana Kelurahan	Prasarana Kelurahan yang Terbangun							
2895		Kec. Gayungan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2896		Kec. Gayungan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2899		Kec. Gayungan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2901		Kec. Gayungan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Gayungan		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarasannya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	30 Lembaga	30 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Gayungan			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	120 Lembaga	120 Lembaga	100.00 %				
3148		Kec. Gayungan		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
4684		Kec. Gayungan		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	30 Unit	30 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Gayungan		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Gayungan		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi	26 Lokasi	108.33 %				
3151		Kec. Gayungan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Vertikal di Wilayah Kecamatan							
7.01.05		Kec. Gayungan		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Gayungan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	45 Kasus	45 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Gayungan			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 topik	2 topik	100.00 %				
3152		Kec. Gayungan		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40 Orang	40 Orang	100.00 %				
3153		Kec. Gayungan		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Jambangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.39 %	97.08 %	98.67 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan paling utama		
7.01.01.2.02		Kec. Jambangan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1098		Kec. Jambangan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan	59 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Jambangan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2608		Kec. Jambangan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	105 Paket	105.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Jambangan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2610		Kec. Jambangan		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	100 Unit	96 Unit	96.00 %	Penggunaan sarana dan prasarana kantor sesuai standar dan efisien	Melakukan updating kondisi barang di aplikasi SIMBADA dan segera		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				sehingga kondisi sarana prasarana masih optimal (dalam kondisi baik), dan adanya lelang kendaraan dinas yang sudah tidak optimal kondisinya	melakukan pengembalian aset serta terus berkomitmen untuk melakukan efisiensi penggunaan sarana prasarana		
7.01.02		Kec. Jambangan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	99.71 %	99.71 %	Kurangnya kesadaran masyarakat pelaku usaha untuk mendaftar NIB disebabkan karena ketakutan terkait kewajiban setelah memiliki NIB.	Perlu dukungan dari lembaga kemasyarakatan dalam pendampingan pelaku usaha dan kerjasama dengan PD terkait dalam proses pendampingan pelaku usaha.		
7.01.02		Kec. Jambangan			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Jambangan			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	27.76 %	52.85 %	190.38 %				
7.01.02.2.01		Kec. Jambangan		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
2592		Kec. Jambangan		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	178 Laporan	178 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Jambangan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga masyarakat yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	168 Lembaga	214 Lembaga	127.38 %				
2593		Kec. Jambangan		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Jambangan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Jambangan			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec.			Jumlah Bidang urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Jambangan			pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat							
2594		Kec. Jambangan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	16 Dokumen	32 Dokumen	200.00 %				
2595		Kec. Jambangan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4277 Laporan	4277 Laporan	100.00 %				
2596		Kec. Jambangan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Jambangan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.5 %	62.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Jambangan			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Jambangan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Jambangan			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	4 kelurahan	100.00 %				
2625		Kec. Jambangan		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
2776		Kec. Jambangan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2777		Kec. Jambangan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	11 Unit	110.00 %				
2781		Kec. Jambangan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2782		Kec. Jambangan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Masyarakat di Kelurahan							
2783		Kec. Jambangan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2784		Kec. Jambangan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	100.00 %				
2786		Kec. Jambangan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	100.00 %				
2787		Kec. Jambangan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Jambangan		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	26 Lembaga	26 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Jambangan			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	100 Lembaga	109 Lembaga	109.00 %				
2623		Kec. Jambangan		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	48 Laporan	100.00 %				
4674		Kec. Jambangan		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	26 Unit	26 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Jambangan		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Jambangan		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi	8 Lokasi	100.00 %				
2268		Kec. Jambangan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan	360 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Jambangan		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec.		Penyelenggaraan Urusan	Jumlah potensi konflik	33 Kasus	35 Kasus	106.06 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Jambangan		Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas							
7.01.05.2.01		Kec. Jambangan			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
2771		Kec. Jambangan		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	27 Orang	30 Orang	111.11 %				
2772		Kec. Jambangan		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	33 Laporan	33 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Wonocolo		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.30 %	96.3 %	98.97 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan paling utama		
7.01.01.2.02		Kec. Wonocolo		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1496		Kec. Wonocolo		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Wonocolo		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2819		Kec. Wonocolo		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	124 Paket	124.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Wonocolo		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2806		Kec. Wonocolo		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	78 Unit	78.00 %	penggunaan sarana dan prasarana kantor sesuai standar dan efisien sehingga kondisi sarana prasarana masih optimal (dalam kondisi baik), dan adanya lelang kendaraan dinas yang sudah tidak optimal kondisinya	melakukan updating kondisi barang di aplikasi SIMBADA dan segera melakukan pengembalian aset serta terus berkomitmen untuk melakukan efisiensi penggunaan sarana prasarana		
7.01.02		Kec. Wonocolo		PROGRAM	Persentase data	100%	99.41 %	99.41 %	Kurangnya kesadaran	Perlu dukungan dari		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah				masyarakat pelaku usaha untuk mendaftar NIB disebabkan karena ketakutan terkait kewajiban setelah memiliki NIB.	lembaga kemasyarakatan dalam pendampingan pelaku usaha dan kerjasama dengan PD terkait dalam proses pendampingan pelaku usaha.		
7.01.02		Kec. Wonocolo			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Wonocolo			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	32.34 %	57.5 %	177.80 %				
7.01.02.2.01		Kec. Wonocolo		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat Kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
2791		Kec. Wonocolo		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Wonocolo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	281 Lembaga	281 Lembaga	100.00 %				
2902		Kec. Wonocolo		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Wonocolo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Wonocolo			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Wonocolo			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
2876		Kec. Wonocolo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	95 Dokumen	197.92 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Non Usaha								
2877		Kec. Wonocolo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2878		Kec. Wonocolo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Wonocolo		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.5 %	62.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Wonocolo			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Wonocolo		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Wonocolo			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	5 kelurahan	100.00 %				
3250		Kec. Wonocolo		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
3251		Kec. Wonocolo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	200.00 %				
3252		Kec. Wonocolo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
3253		Kec. Wonocolo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
3254		Kec. Wonocolo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
3255		Kec. Wonocolo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Masyarakat di Kelurahan							
3256		Kec. Wonocolo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	100.00 %				
3257		Kec. Wonocolo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	11 Unit	137.50 %				
3258		Kec. Wonocolo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	14 Unit	116.67 %				
3259		Kec. Wonocolo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	5 Unit	250.00 %				
3260		Kec. Wonocolo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Wonocolo		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga	44 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Wonocolo			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	156 Lembaga	156 Lembaga	100.00 %				
3261		Kec. Wonocolo		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	48 Laporan	100.00 %				
4643		Kec. Wonocolo		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit	44 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Wonocolo		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Wonocolo		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi	8 Lokasi	100.00 %				
3262		Kec. Wonocolo		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan	360 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Wonocolo		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.05.2.01		Kec. Wonocolo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	88 Kasus	88 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Wonocolo			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
3263		Kec. Wonocolo		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	35 Orang	35 Orang	100.00 %				
3264		Kec. Wonocolo		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	88 Laporan	88 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Sawahan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.70 %	96.19 %	99.47 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan paling utama		
7.01.01.2.02		Kec. Sawahan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
823		Kec. Sawahan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Sawahan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2423		Kec. Sawahan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	34 Paket	178.95 %				
7.01.01.2.09		Kec. Sawahan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
3133		Kec. Sawahan		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	5 Unit	166.67 %				
7.01.02		Kec. Sawahan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02		Kec. Sawahan			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Sawahan			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	58.44 %	51.72 %	88.50 %	Adanya usulan penyediaan barang yang tidak dapat dipertimbangkan dikarenakan adanya prioritas terhadap usulan yang lebih urgent.	Meningkatkan komunikasi dengan masyarakat agar bersedia memahami dan dapat diusulkan kembali di musrenbang tahun selanjutnya.		
7.01.02.2.01		Kec. Sawahan		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	6 lembaga	100.00 %				
1869		Kec. Sawahan		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Sawahan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	627 lembaga	627 lembaga	100.00 %				
1874		Kec. Sawahan		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Sawahan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Sawahan			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Sawahan			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
1882		Kec. Sawahan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
1883		Kec. Sawahan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Jumlah Laporan Pelaksanaan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				dengan Nonperizinan	Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan							
1884		Kec. Sawahan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Sawahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.5 %	62.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Sawahan			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Sawahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Sawahan			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	6 kelurahan	100.00 %				
1938		Kec. Sawahan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	9 Unit	450.00 %				
1941		Kec. Sawahan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	11 Unit	550.00 %				
1985		Kec. Sawahan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	15 Unit	750.00 %				
1986		Kec. Sawahan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	11 Unit	550.00 %				
1987		Kec. Sawahan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	18 Unit	900.00 %				
1988		Kec. Sawahan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	5 Unit	250.00 %				
1989		Kec. Sawahan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
1991		Kec. Sawahan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
1993		Kec. Sawahan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
1995		Kec. Sawahan		Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pokmas dan	1 Pokmas /	1 Pokmas /	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				di Kelurahan	Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas	Ormas					
1996		Kec. Sawahan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
1997		Kec. Sawahan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	150.00 %				
2049		Kec. Sawahan		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Sawahan		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	72 Lembaga	72 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Sawahan			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	288 Lembaga	288 Lembaga	100.00 %				
3139		Kec. Sawahan		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	100.00 %				
4632		Kec. Sawahan		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	72 Unit	72 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Sawahan		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Sawahan		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi	14 Lokasi	100.00 %				
3140		Kec. Sawahan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Kecamatan							
7.01.05		Kec. Sawahan		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Sawahan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	144 Kasus	144 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Sawahan			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
3142		Kec. Sawahan		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	93 Orang	93 Orang	100.00 %				
3143		Kec. Sawahan		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Wiyung		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.41 %	98.04 %	99.62 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan paling utama		
7.01.01.2.02		Kec. Wiyung		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
511		Kec. Wiyung		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Wiyung		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2111		Kec. Wiyung		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Wiyung		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
1980		Kec. Wiyung		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	5 Unit	5 Unit	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Dipelihara/Direhabilitasi							
7.01.02		Kec. Wiyung		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Wiyung			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Wiyung			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	55.81 %	39.58 %	70.92 %	adanya prioritas kegiatan sehingga tidak semua usulan disetujui	1. Berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam survey/usulan musrenbang 2. Melakukan koordinasi/sosialisasi dengan masyarakat terkait prioritas usulan musrenbang 3. Usulan yang belum disetujui diusulkan kembali di periode berikutnya		
7.01.02.2.01		Kec. Wiyung		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	6 lembaga	100.00 %				
1843		Kec. Wiyung		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Wiyung		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga masyarakat yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	211 lembaga	211 lembaga	100.00 %				
1846		Kec. Wiyung		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Wiyung		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Wiyung			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Wiyung			Jumlah Bidang urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat							
1848		Kec. Wiyung		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
1849		Kec. Wiyung		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
1851		Kec. Wiyung		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Wiyung		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.5 %	62.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Wiyung			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Wiyung		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Wiyung			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan	4 Kelurahan	100.00 %				
1879		Kec. Wiyung		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	100.00 %				
1880		Kec. Wiyung		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	100.00 %				
1924		Kec. Wiyung		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	11 Unit	122.22 %				
1926		Kec. Wiyung		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
1928		Kec. Wiyung		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
1929		Kec. Wiyung		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1930		Kec. Wiyung		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
1937		Kec. Wiyung		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	100.00 %				
1952		Kec. Wiyung		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Wiyung		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	34 Lembaga	34 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Wiyung			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	20 unit usaha	20 unit usaha	100.00 %				
3124		Kec. Wiyung		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
4646		Kec. Wiyung		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	34 Unit	34 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Wiyung		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Wiyung		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 lokasi	15 lokasi	100.00 %				
3127		Kec. Wiyung		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Wiyung		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Wiyung		Penyelenggaraan Urusan	Jumlah potensi konflik	24 kasus	24 kasus	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas							
7.01.05.2.01		Kec. Wiyung			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
3129		Kec. Wiyung		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80 Orang	80 Orang	100.00 %				
3130		Kec. Wiyung		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Tandes		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.88 %	95.8 %	98.89 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan karena masih belum terpenuhinya kebutuhan sarpras dan barjas sebagai akibat pengalihan anggaran untuk menunjang kegiatan prioritas skala kota.	Melakukan koordinasi lebih intens dengan TAPD dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kesekretariatan		
7.01.01.2.02		Kec. Tandes		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
627		Kec. Tandes		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	71 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Tandes		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2731		Kec. Tandes		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Tandes		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
3125		Kec. Tandes		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	60 Unit	60 Unit	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Dipelihara/Direhabilitasi							
7.01.02		Kec. Tandes		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Tandes			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Tandes			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50.51 %	52.5 %	103.94 %				
7.01.02.2.01		Kec. Tandes		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	6 lembaga	100.00 %				
2965		Kec. Tandes		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Tandes		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga masyarakat yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	371 lembaga	371 lembaga	100.00 %				
2966		Kec. Tandes		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Tandes		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Tandes			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Tandes			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
2967		Kec. Tandes		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	35 Dokumen	35 Dokumen	100.00 %				
2968		Kec. Tandes		Pelaksanaan Urusan	Jumlah Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan							
2969		Kec. Tandes		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Tandes		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.5 %	62.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Tandes			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Tandes		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Tandes			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	6 kelurahan	100.00 %				
2533		Kec. Tandes		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	100.00 %				
2537		Kec. Tandes		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
2539		Kec. Tandes		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	7 Unit	350.00 %				
2541		Kec. Tandes		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	100.00 %				
2542		Kec. Tandes		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	4 Unit	133.33 %				
2543		Kec. Tandes		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	9 Unit	128.57 %				
2548		Kec. Tandes		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2549		Kec. Tandes		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2550		Kec. Tandes		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2551		Kec. Tandes		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2552		Kec. Tandes		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2553		Kec. Tandes		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2615		Kec. Tandes		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Tandes		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarasannya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	51 Lembaga	51 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Tandes			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100.00 %				
3043		Kec. Tandes		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
4658		Kec. Tandes		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	51 Unit	51 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Tandes		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Tandes		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 lokasi	15 lokasi	100.00 %				
3071		Kec. Tandes		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Vertikal di Wilayah Kecamatan							
7.01.05		Kec. Tandes		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Tandes		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus	24 Kasus	120.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Tandes			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
3072		Kec. Tandes		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3111		Kec. Tandes		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	110 Orang	110 Orang	100.00 %				
7.01.01		Kec. Asemrowo		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99.77 %	97.06 %	97.28 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan paling utama		
7.01.01.2.02		Kec. Asemrowo		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1001		Kec. Asemrowo		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Asemrowo		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
1024		Kec. Asemrowo		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Asemrowo		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
3052		Kec. Asemrowo		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	4 Unit	4 Unit	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							
7.01.02		Kec. Asemrowo		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	97.83 %	97.83 %	Masih banyak pelaku usaha belum ber-NIB yang sudah didata namun tidak aktif atau pindah, sehingga kesulitan untuk melakukan pendampingan secara lebih intensif.	Melakukan komunikasi yang lebih intensif sebelum dilakukan pendataan dan pendampingan secara berkelanjutan.		
7.01.02		Kec. Asemrowo			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Asemrowo			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	27.27 %	44.44 %	162.96 %				
7.01.02.2.01		Kec. Asemrowo		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
2175		Kec. Asemrowo		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Asemrowo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	139 Lembaga	139 Lembaga	100.00 %				
2176		Kec. Asemrowo		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Asemrowo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Asemrowo			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Asemrowo			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					kepada Camat							
2180		Kec. Asemrowo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	87 Dokumen	87 Dokumen	100.00 %				
2181		Kec. Asemrowo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2182		Kec. Asemrowo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Asemrowo		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.50 %	62.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Asemrowo			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Asemrowo		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Asemrowo			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	3 kelurahan	3 kelurahan	100.00 %				
2489		Kec. Asemrowo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2490		Kec. Asemrowo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2496		Kec. Asemrowo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2523		Kec. Asemrowo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	100.00 %				
2525		Kec. Asemrowo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	100.00 %				
2528		Kec. Asemrowo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	100.00 %				
2534		Kec. Asemrowo		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pembangunan di Kelurahan	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
7.01.03.2.03		Kec. Asemrowo		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarasannya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	17 Lembaga	17 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Asemrowo			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	174 Unit Usaha	174 Unit Usaha	100.00 %				
3280		Kec. Asemrowo		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
4630		Kec. Asemrowo		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	17 Unit	17 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Asemrowo		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Asemrowo		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	5 Lokasi	5 Lokasi	100.00 %				
3277		Kec. Asemrowo		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Asemrowo		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Asemrowo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus	20 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Asemrowo			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
3278		Kec. Asemrowo		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,	82 Orang	82 Orang	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							
3279		Kec. Asemrowo		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Sukomanunggal		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.88 %	97.29 %	99.40 %	Terdapat beberapa komponen yang sudah tidak diproduksi pabrik, sehingga perlu penyesuaian kembali.	Melakukan revisi komponen yang sudah diproduksi pabrik. Bagi perencanaan berikutnya, memastikan kembali komponen yang dibutuhkan tersedia di pasaran		
7.01.01.2.02		Kec. Sukomanunggal		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
590		Kec. Sukomanunggal		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	62 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Sukomanunggal		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
937		Kec. Sukomanunggal		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Sukomanunggal		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
592		Kec. Sukomanunggal		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	100.00 %				
7.01.02		Kec. Sukomanunggal		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Sukomanunggal			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Sukomanunggal			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	51%	48.81 %	95.71 %	Adanya usulan penyediaan barang yang tidak dapat dipertimbangkan dikarenakan adanya prioritas terhadap	Meningkatkan komunikasi dengan masyarakat agar bersedia memahami dan dapat diusulkan kembali di musrenbang tahun selanjutnya.		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									usulan yang lebih urgent.			
7.01.02.2.01		Kec. Sukomanunggal		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
2635		Kec. Sukomanunggal		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Sukomanunggal		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga masyarakat yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	323 Lembaga	323 Lembaga	100.00 %				
2638		Kec. Sukomanunggal		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	63 Laporan	63 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Sukomanunggal		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Sukomanunggal			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Sukomanunggal			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
2641		Kec. Sukomanunggal		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	51 Dokumen	170.00 %				
2642		Kec. Sukomanunggal		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2644		Kec. Sukomanunggal		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Sukomanunggal		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.5 %	62.5 %	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03		Kec. Sukomanunggal			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Sukomanunggal		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Sukomanunggal			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	6 kelurahan	100.00 %				
2664		Kec. Sukomanunggal		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
2679		Kec. Sukomanunggal		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	100.00 %				
2681		Kec. Sukomanunggal		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	100.00 %				
2684		Kec. Sukomanunggal		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	100.00 %				
2686		Kec. Sukomanunggal		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	100.00 %				
2688		Kec. Sukomanunggal		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	100.00 %				
2690		Kec. Sukomanunggal		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	7 Unit	175.00 %				
2693		Kec. Sukomanunggal		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2694		Kec. Sukomanunggal		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2695		Kec. Sukomanunggal		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2696		Kec. Sukomanunggal		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
2697		Kec. Sukomanunggal		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2698		Kec. Sukomanunggal		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Sukomanunggal		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarasannya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	36 Lembaga	36 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Sukomanunggal			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100.00 %				
3467		Kec. Sukomanunggal		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
4689		Kec. Sukomanunggal		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	36 Unit	36 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Sukomanunggal		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Sukomanunggal		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi	24 Lokasi	100.00 %				
2702		Kec. Sukomanunggal		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Sukomanunggal		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Sukomanunggal		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama	24 kasus	24 kasus	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					babinsa/babinkamtibas							
7.01.05.2.01		Kec. Sukomanunggal			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
2706		Kec. Sukomanunggal		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	169 Orang	116 Orang	68.64 %	Kurangnya sinkronisasi antara target dengan anggaran yang tersedia.	Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan PD terkait pengelolaan target output dan anggaran.		
2707		Kec. Sukomanunggal		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Benowo		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.91 %	94.16 %	96.17 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran.	Melakukan penyediaan pelayanan sesuai dengan kebutuhan prioritas		
7.01.01.2.02		Kec. Benowo		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1459		Kec. Benowo		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Benowo		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2486		Kec. Benowo		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Benowo		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2488		Kec. Benowo		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	100.00 %				
7.01.02		Kec. Benowo		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Benowo			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Benowo			Persentase usulan	34.45 %	26.12 %	75.82 %	Adanya Prioritas	1. Berkoordinasi dengan		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan				Kegiatan Sehingga Tidak Semua Usulan Disetujui	perangkat daerah terkait dalam survey/usulan musrenbang 2. Melakukan sosialisasi dengan masyarakat terkait prioritas usulan musrenbang 3. Usulan yang tidak terealisasi dapat diusulkan kembali di periode selanjutnya		
7.01.02.2.01		Kec. Benowo		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	6 lembaga	100.00 %				
2307		Kec. Benowo		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Benowo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	193 lembaga	193 lembaga	100.00 %				
2463		Kec. Benowo		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Benowo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Benowo			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Benowo			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
2352		Kec. Benowo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	15 Dokumen	15 Dokumen	100.00 %				
2367		Kec. Benowo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Jumlah Laporan Pelaksanaan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				dengan Nonperizinan	Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan							
2370		Kec. Benowo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Benowo		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.50 %	62.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Benowo			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Benowo		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Benowo			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	4 kelurahan	100.00 %				
2675		Kec. Benowo		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
2680		Kec. Benowo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	100.00 %				
2682		Kec. Benowo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	6 Unit	200.00 %				
2683		Kec. Benowo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	100.00 %				
2685		Kec. Benowo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	100.00 %				
2687		Kec. Benowo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2689		Kec. Benowo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2691		Kec. Benowo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2692		Kec. Benowo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Benowo		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	26 Lembaga	26 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Benowo			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Potensi usaha	50 Potensi usaha	100.00 %				
3284		Kec. Benowo		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
4633		Kec. Benowo		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	26 Unit	26 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Benowo		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Benowo		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi	14 Lokasi	100.00 %				
3434		Kec. Benowo		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Benowo		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Benowo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	24 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Benowo			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
3435		Kec. Benowo		Fasilitasi, Koordinasi dan	Jumlah Orang yang	12 Orang	12 Orang	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							
3436		Kec. Benowo		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Lakarsantri		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.24 %	97.59 %	100.36 %				
7.01.01.2.02		Kec. Lakarsantri		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1498		Kec. Lakarsantri		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	72 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Lakarsantri		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2320		Kec. Lakarsantri		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Lakarsantri		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2321		Kec. Lakarsantri		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	100.00 %				
7.01.02		Kec. Lakarsantri		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	99.93 %	99.93 %	Kurangnya kesadaran masyarakat pelaku usaha untuk mendaftar NIB disebabkan karena ketakutan terkait kewajiban setelah memiliki NIB.	Perlu dukungan dari lembaga kemasyarakatan dalam pendampingan pelaku usaha dan kerjasama dengan PD terkait dalam proses pendampingan pelaku usaha.		
7.01.02		Kec. Lakarsantri			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Lakarsantri			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.91 %	44.71 %	186.99 %				
7.01.02.2.01		Kec. Lakarsantri		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Tingkat Kecamatan	kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan							
1715		Kec. Lakarsantri		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	6 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Lakarsantri		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga masyarakat yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	205 Lembaga	205 Lembaga	100.00 %				
1797		Kec. Lakarsantri		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Lakarsantri		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Lakarsantri			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Lakarsantri			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
1968		Kec. Lakarsantri		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	42 Dokumen	42 Dokumen	100.00 %				
1975		Kec. Lakarsantri		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2923 Laporan	3039 Laporan	103.97 %				
1976		Kec. Lakarsantri		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Lakarsantri		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.5 %	62.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Lakarsantri			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Lakarsantri		Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah kelurahan yang	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Kelurahan	dikembangkan potensi wilayahnya							
7.01.03.2.02		Kec. Lakarsantri			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	6 kelurahan	100.00 %				
2007		Kec. Lakarsantri		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
2012		Kec. Lakarsantri		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	100.00 %				
2014		Kec. Lakarsantri		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	6 Unit	200.00 %				
2019		Kec. Lakarsantri		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	11 Unit	1,100.00 %				
2021		Kec. Lakarsantri		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	100.00 %				
2023		Kec. Lakarsantri		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	5 Unit	166.67 %				
2024		Kec. Lakarsantri		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	4 Unit	400.00 %				
2031		Kec. Lakarsantri		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2032		Kec. Lakarsantri		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2033		Kec. Lakarsantri		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2034		Kec. Lakarsantri		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2036		Kec. Lakarsantri		Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pokmas dan	2 Pokmas /	2 Pokmas /	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					di Kelurahan	Ormas	Ormas					
2037		Kec. Lakarsantri			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %			
7.01.03.2.03		Kec. Lakarsantri			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarasannya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	32 Lembaga	32 Lembaga	100.00 %			
7.01.03.2.03		Kec. Lakarsantri				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	124 Lembaga	124 Lembaga	100.00 %			
1982		Kec. Lakarsantri			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	49 Laporan	102.08 %			
4639		Kec. Lakarsantri			Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	32 Unit	32 Unit	100.00 %			
7.01.04		Kec. Lakarsantri			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %			
7.01.04.2.01		Kec. Lakarsantri			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	12 Lokasi	100.00 %			
2118		Kec. Lakarsantri			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %			
7.01.05		Kec. Lakarsantri			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %			
7.01.05.2.01		Kec. Lakarsantri			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	44 Kasus	44 Kasus	100.00 %			
7.01.05.2.01		Kec. Lakarsantri				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan	2 Topik	2 Topik	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional							
2123		Kec. Lakarsantri		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang	160 Orang	100.00 %				
2132		Kec. Lakarsantri		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6 Laporan	6 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Sambikerep		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.94 %	97.45 %	98.49 %	Kurangnya monitoring berkala terhadap inventaris perlengkapan dan peralatan kantor. Sehingga belum maksimal dalam hal alokasi stock dan kebutuhan per pegawai dan program.	Melakukan monitoring berkala setiap bulan terhadap perlengkapan dan peralatan kantor untuk menunjang kinerja pegawai dan memastikan program pelayanan publik berjalan dengan lancar.		
7.01.01.2.02		Kec. Sambikerep		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1500		Kec. Sambikerep		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Sambikerep		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	22 Paket	22 Paket	100.00 %				
3017		Kec. Sambikerep		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	22 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Sambikerep		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
3018		Kec. Sambikerep		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit	32 Unit	100.00 %				
7.01.02		Kec. Sambikerep		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	99.3 %	99.30 %	Kurangnya Tingkat Partisipasi Pemilik Usaha Ketika disurvei oleh petugas	Memberikan pemahaman tentang penting dan manfaatnya usaha yang terdata di kecamatan, seperti: mendapatkan pelatihan dan akses modal usaha.		
7.01.02		Kec.			Persentase jenis	100%	100%	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Sambikerep			elayanan yang dinilai baik oleh masyarakat							
7.01.02		Kec. Sambikerep			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.37 %	54.08 %	221.91 %				
7.01.02.2.01		Kec. Sambikerep		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
1932		Kec. Sambikerep		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Sambikerep		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	261 Lembaga	261 Lembaga	100.00 %				
2903		Kec. Sambikerep		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Sambikerep		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Sambikerep			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Sambikerep			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
2258		Kec. Sambikerep		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	38 Dokumen	230 Dokumen	605.26 %				
2260		Kec. Sambikerep		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
3249		Kec. Sambikerep		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Urusan Pemerintahan							
7.01.03		Kec. Sambikerep		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.50 %	62.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Sambikerep			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Sambikerep		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Sambikerep			jumlah Kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan	4 Kelurahan	100.00 %				
3001		Kec. Sambikerep		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
3004		Kec. Sambikerep		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	100.00 %				
3005		Kec. Sambikerep		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	15 Unit	750.00 %				
3006		Kec. Sambikerep		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	9 Unit	128.57 %				
3007		Kec. Sambikerep		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	15 Unit	750.00 %				
3008		Kec. Sambikerep		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
3009		Kec. Sambikerep		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
3010		Kec. Sambikerep		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
3011		Kec. Sambikerep		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.03		Kec. Sambikerep		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarasannya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	38 Lembaga	38 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Sambikerep			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	148 Lembaga	149 Lembaga	100.68 %				
3013		Kec. Sambikerep		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	48 Laporan	100.00 %				
4685		Kec. Sambikerep		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	38 Unit	38 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Sambikerep		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Sambikerep		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	15 Lokasi	100.00 %				
2137		Kec. Sambikerep		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan	360 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Sambikerep		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Sambikerep		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	37 Kasus	37 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Sambikerep			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
2155		Kec. Sambikerep		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	37 Laporan	37 Laporan	100.00 %				
2875		Kec. Sambikerep		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,	80 Orang	80 Orang	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							
7.01.01		Kec. Pakal		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.40 %	96.23 %	98.80 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan paling utama		
7.01.01.2.02		Kec. Pakal		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
681		Kec. Pakal		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Pakal		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2561		Kec. Pakal		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	501 Paket	501 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Pakal		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
2578		Kec. Pakal		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	19 Unit	100.00 %				
7.01.02		Kec. Pakal		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Pakal			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Pakal			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	53.19 %	57.86 %	108.78 %				
7.01.02.2.01		Kec. Pakal		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
2179		Kec. Pakal		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Instansi Vertikal Terkait							
7.01.02.2.02		Kec. Pakal		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	229 Lembaga	229 Lembaga	100.00 %				
2230		Kec. Pakal		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Pakal		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Pakal			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Pakal			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
2254		Kec. Pakal		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen	12 Dokumen	120.00 %				
2963		Kec. Pakal		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
2964		Kec. Pakal		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Pakal		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.5 %	62.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Pakal			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Pakal		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Pakal			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan	4 Kelurahan	100.00 %				
2794		Kec. Pakal		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan	33 Unit	33 Unit	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					yang Terbangun							
2795		Kec. Pakal		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	9 Unit	150.00 %				
2797		Kec. Pakal		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	5 Unit	166.67 %				
2798		Kec. Pakal		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	20 Unit	100.00 %				
2799		Kec. Pakal		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2800		Kec. Pakal		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2801		Kec. Pakal		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2803		Kec. Pakal		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2927		Kec. Pakal		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Pakal		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	34 Lembaga	34 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Pakal			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha	100 pelaku usaha	100.00 %				
3469		Kec. Pakal		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	48 Laporan	100.00 %				
4687		Kec. Pakal		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	34 Unit	34 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Pakal		PROGRAM KOORDINASI	Persentase koordinasi	100%	100%	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan							
7.01.04.2.01		Kec. Pakal		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	15 Lokasi	100.00 %				
2385		Kec. Pakal		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Pakal		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Pakal		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Kasus	12 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Pakal			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
2395		Kec. Pakal		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	166 Orang	166 Orang	100.00 %				
2408		Kec. Pakal		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Bulak		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.90 %	97.73 %	98.82 %	Belum optimalnya sarpras penunjang pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran.	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan prioritas.		
7.01.01.2.02		Kec. Bulak		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1499		Kec. Bulak		Penyediaan Gaji dan	Jumlah Orang yang	51 Orang/bulan	51 Orang/bulan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Tunjangan ASN	Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							
7.01.01.2.06		Kec. Bulak		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 paket	23 paket	115.00 %				
2308		Kec. Bulak		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	23 Paket	115.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Bulak		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	2 unit	100.00 %				
2298		Kec. Bulak		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
7.01.02		Kec. Bulak		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Bulak			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Bulak			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.91 %	51.85 %	216.85 %				
7.01.02.2.01		Kec. Bulak		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
2116		Kec. Bulak		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Bulak		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	158 Lembaga	158 Lembaga	100.00 %				
2120		Kec. Bulak		Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Wilayah Kecamatan							
7.01.02.2.04		Kec. Bulak		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	4 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	150.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Bulak			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha Yang Dilaksanakan Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	24 Dokumen	24 Dokumen	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Bulak			Jumlah Pelayanan non perizinan yang ditangani	11 Layanan	12 Layanan	109.09 %				
2122		Kec. Bulak		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen	24 Dokumen	100.00 %				
2128		Kec. Bulak		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2131		Kec. Bulak		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Bulak		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.5 %	62.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Bulak			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Bulak		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Bulak			jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga	8 Lembaga	160.00 %				
2153		Kec. Bulak		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	100.00 %				
2157		Kec. Bulak		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2514		Kec. Bulak		Peningkatan Partisipasi	Jumlah Lembaga	5 Lembaga	8 Lembaga	160.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kemasyarakatan	Kemasyarakatan					
2517		Kec. Bulak		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	100.00 %				
2518		Kec. Bulak		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	100.00 %				
2519		Kec. Bulak		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	100.00 %				
2520		Kec. Bulak		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2521		Kec. Bulak		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
2522		Kec. Bulak		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Bulak		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	21 Lembaga	21 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Bulak			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	440 Lembaga	440 Lembaga	100.00 %				
3225		Kec. Bulak		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
4634		Kec. Bulak		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	21 Unit	21 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Bulak		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Bulak		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan							
3226		Kec. Bulak		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Bulak		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Bulak		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Bulak			Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	33 Orang	46 Orang	139.39 %				
3227		Kec. Bulak		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	46 Orang	46 Orang	100.00 %				
3228		Kec. Bulak		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				



3.1.2.8 Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Unsur Pemerintahan Umum mencakup urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pelaksanaan unsur Pemerintahan Umum di Kota Surabaya pada tahun 2024 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang ditentukan. Pencapaian pelaksanaan unsur Pemerintahan Umum Kota Surabaya tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut.



Tabel 3.31 Capaian Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
8.01.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 -Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045 -Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 -Peraturan Daerah Kota Nomor 8 Tahun 2024 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika -Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 58 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadat dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Rumah Ibadat. -Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025. -Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	97.9 %	97.90 %	Belum optimalnya pelayanan barjas kesekretariatan dikarenakan keterbatasan sarana prasarana untuk pelayanan.	Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada untuk pekerjaan pelayanan barjas kesekretariatan.	1. Sosialisasi terhadap para siswa di sekolah terkait bahaya kenakalan remaja perlu dimasikan khususnya di wilayah atau daerah yang sering berpotensi terjadinya tawuran atau kenakalan remaja, mengingat tahun 2023 di Surabaya masih ada beberapa kejadian tersebut yang terjadi dan itu sangat meresahkan Masyarakat.	1. 1. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk kegiatan outbound Sekolah Kebangsaan dengan peserta setingkat SMA/Mahasiswa yang berasal dari Penjangkauan Satpol PP dan binaan PD lain seperti Disbudporapar, DP3APPKB, Bapemkesra, dan Dinas Sosial. Berdasarkan kegiatan sosialisasi sepanjang tahun 2024, terdapat 85 peserta yang telah menjalani kegiatan outbound Sekolah Kebangsaan. 2. Sosialisasi pencegahan Kenakalan Remaja juga dilaksanakan bersinergi dengan DP3APPKB, Satpol PP, dan Dinas Pendidikan.
8.01.01.2.02		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
1483		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	100.00 %				
8.01.01.2.06		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam	100%	100%	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					kondisi baik							
1484		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100.00 %				
8.01.01.2.08		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	100%	100.00 %				
1485		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
8.01.02		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan	92%	92.78 %	100.85 %				
8.01.02.2.01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Lembaga RW di Kota Surabaya yang Mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	291 Lembaga	291 Lembaga	100.00 %				
810		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	291 Orang	291 Orang	100.00 %				
8.01.03		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	54%	54.23 %	100.43 %				
8.01.03.2.01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi	30 Lembaga	30 Lembaga	100.00 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
820		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Politik							
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	60 Orang	60 Orang	100.00 %				
8.01.04		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	60%	100%	166.67 %				
8.01.04.2.01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	31 Lembaga	31 Lembaga	100.00 %				
850		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
8.01.05		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina	100%	100%	100.00 %				
8.01.05.2.01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Lembaga yang Berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8 Lembaga	8 Lembaga	100.00 %				
853		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	690 Orang	702 Orang	101.74 %				



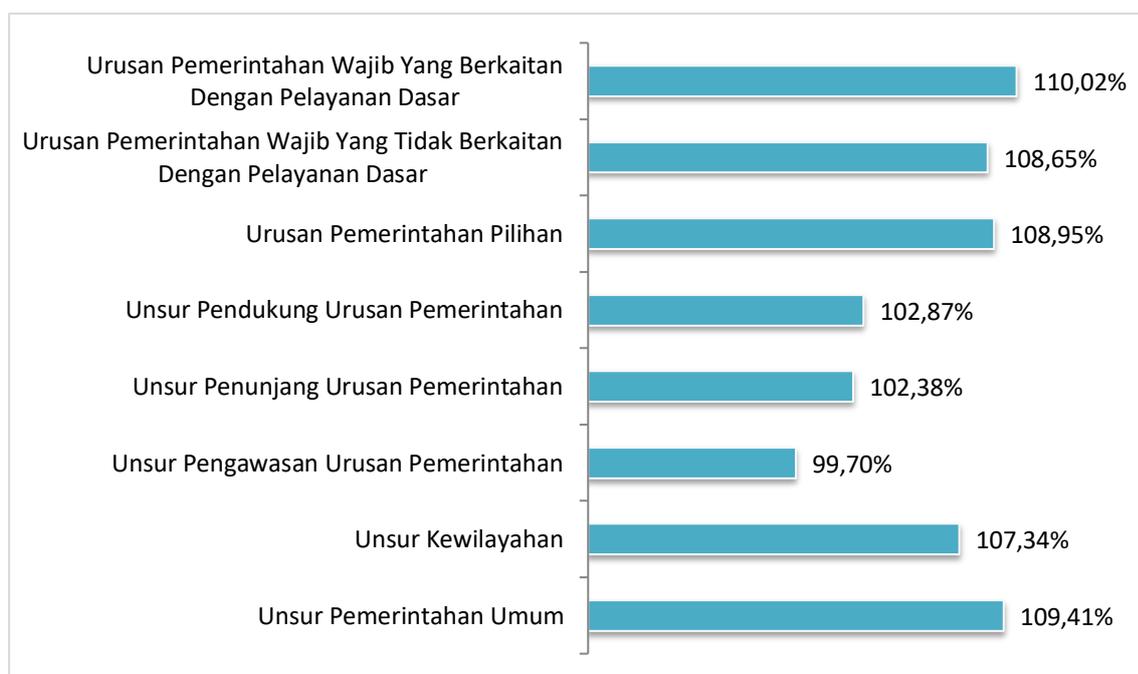
NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							
8.01.06		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti	100%	100%	100.00 %				
8.01.06		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti	100%	100%	100.00 %				
8.01.06.2.01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional	14 Lembaga	14 Lembaga	100.00 %				
8.01.06.2.01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Penanganan Konflik Sosial	17 Lembaga	17 Lembaga	100.00 %				
1010		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	44 Laporan	45 Laporan	102.27 %				
1277		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar	17 Orang	24 Orang	141.18 %				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Penanganan Konflik di Daerah	Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							



Berdasarkan data capaian kinerja dapat diketahui Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan, dan Unsur Pemerintahan Umum rata-rata mampu mencapai yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi dan fleksibilitas penyelenggara pemerintahan kota cukup tinggi dari semua elemen, dalam menghadapi tantangan yang cukup berat pada masa pandemi tersebut. Fungsi dan peran birokrasi pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan publik khususnya pelayanan dasar masih tetap dapat dipertahankan dengan baik.



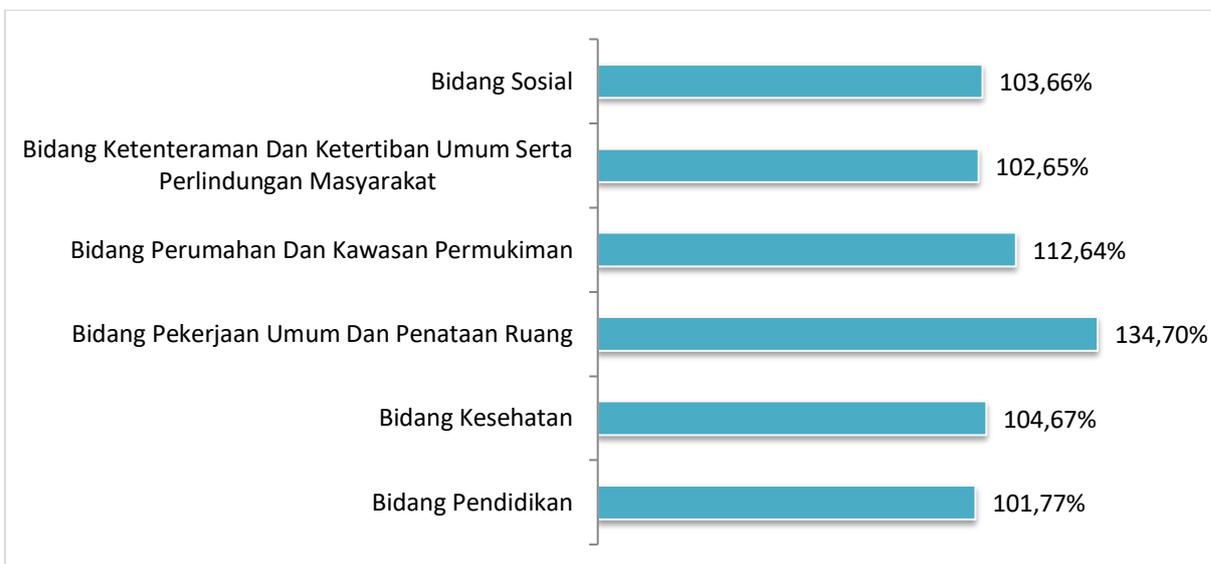
Gambar 3.20
Rata-Rata Capaian Kinerja Berdasarkan Kelompok Urusan dan Penunjangnya

Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, 2025

3.1.3 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja

3.1.3.1 Kinerja Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan Sosial mampu mencatat kinerja yang baik, dimana angka rata-rata capaian kinerja kelompok urusan wajib pelayanan dasar mencapai **110,02%** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**.



Gambar 3.21
Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, 2025

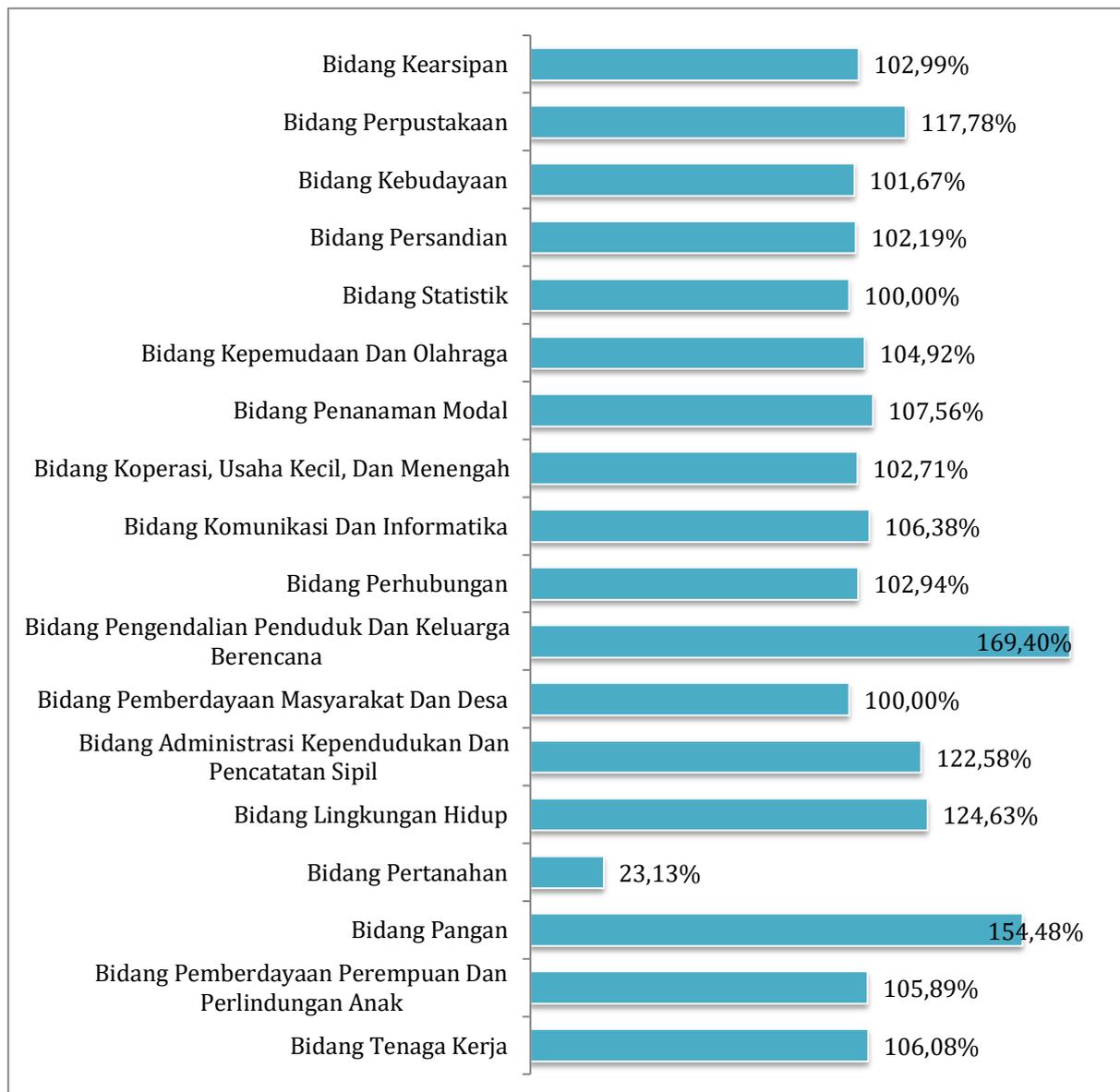
3.1.3.2 Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Secara umum, kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi: urusan Tenaga kerja, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan hidup, Administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan Keluarga berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Penanaman modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan serta Kearsipan mencatat hasil yang sangat baik, dengan angka rata-rata capaian kinerja kelompok urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar mencapai **107,71%** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**.

Namun demikian, urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan perlu memperoleh perhatian khusus dengan rata-rata capaian sebesar 23,13%. Belum optimalnya capaian urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan antara lain Adanya lokasi rencana yang masih dalam proses verifikasi dan validasi status tanah sehingga berpengaruh terhadap luasan yang dibebaskan serta penyesuaian program prioritas pembangunan di tingkat kota khususnya dalam pemulihan ekonomi dan penanganan genangan. Dalam hal mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya melakukan monitoring secara rutin dan melakukan koordinasi lebih intensif dengan Kantor Pertanahan Surabaya, Kantor



ATR/BPN Provinsi Jawa Timur untuk pendampingan dalam proses pengadaan tanah serta verifikasi status tanah yang direncanakan pengadaan.

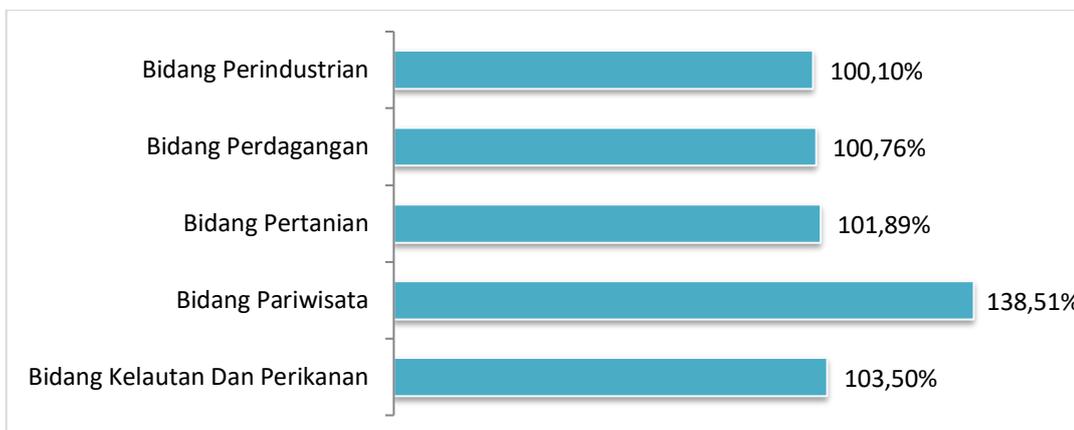


Gambar 3.22
Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, 2025

3.1.3.3 Kinerja Urusan Pemerintahan Pilihan

Secara umum, kinerja Urusan Pilihan yang meliputi: Urusan Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian menunjukkan kinerja yang sangat baik, dimana angka rata-rata capaian kinerja kelompok urusan pemerintahan pilihan mencapai 108,95% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori Sangat Tinggi.



Gambar 3.23
Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Urusan Pemerintahan Pilihan

Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, 2025

3.1.3.4 Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang meliputi urusan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD belum terlaksana dengan baik, dimana angka rata-rata capaian kinerjanya mencapai **102,87%** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**.

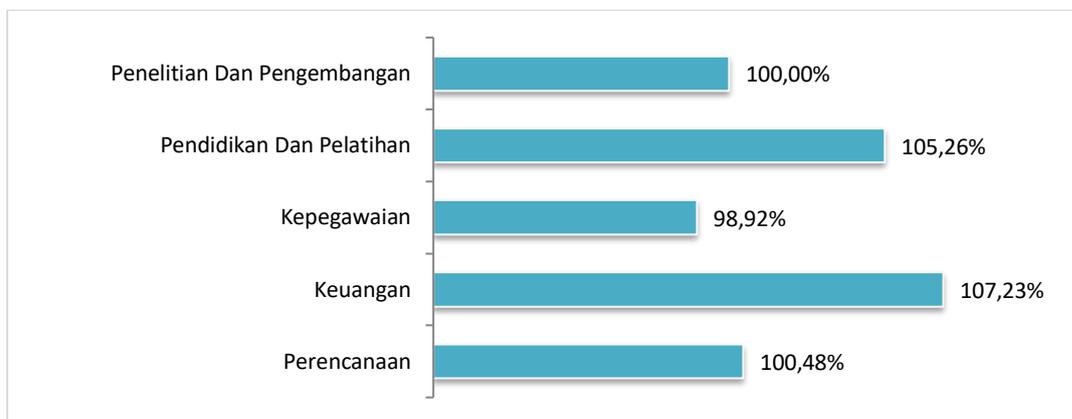


Gambar 3.24
Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, 2025

3.1.3.5 Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang meliputi fungsi: Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, dan secara umum menunjukkan kinerja yang baik, dimana angka rata-rata capaian kinerjanya mencapai **102,38%** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**.



Gambar 3.25

Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, 2025

3.1.3.6 Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Secara umum, kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan yang meliputi Urusan Inspektorat Daerah menunjukkan kinerja yang baik, di mana angka rata-rata capaian kinerja kelompok Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan mencapai **99,70%** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**.

3.1.3.7 Kinerja Unsur Kewilayahan

Kinerja Unsur Kewilayahan yang meliputi Urusan Kecamatan terlaksana dengan baik, dimana angka rata-rata capaian kinerjanya mencapai **107,34%** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**.

3.1.3.8 Kinerja Unsur Pemerintahan Umum

Kinerja Unsur Pemerintahan Umum yang meliputi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik telah terlaksana dengan baik, dimana angka rata-rata capaian kinerja kelompok Unsur Pemerintahan Umum mencapai **109,41%** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Kategori **Sangat Tinggi**.

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Kebijakan strategis adalah serangkaian rencana, kebijakan, dan keputusan yang dibuat untuk mencapai tujuan yang ditargetkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Guna memastikan bahwa kebijakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan serta mengatur pelaksanaan kebijakan agar tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku, maka disusun dan ditetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota. Sepanjang tahun 2024, telah ditetapkan Peraturan Daerah serta Peraturan Wali Kota, sebagai berikut:



Tabel 3.32 Kebijakan Strategis Tahun 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Pengelolaan Cagar Budaya	Peraturan Daerah Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	<ol style="list-style-type: none">Pelestarian warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;Peningkatan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;Perkuatan kepribadian bangsa;Peningkatan kesejahteraan rakyat; danPromosi warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional
2	Percepatan penanggulangan kemiskinan	Peraturan Daerah Kota Nomor 2 Tahun 2024 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	<ol style="list-style-type: none">Pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup keluarga miskin;Pengembangan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;Pemberian akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro;Maksimalisasi program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan keluarga miskin.
3	Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas	Peraturan Daerah Kota Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	Penjaminan keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman.



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
4	Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045	Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 - 2045	Sebagai arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah Kota Surabaya periode 2025-2045
6	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika	Peraturan Daerah Kota Nomor 8 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Perkuatan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
7	Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8	Pajak Bumi dan Bangunan	Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Surabaya.	Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Surabaya.



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
9	Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Peraturan Walikota Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Surabaya.	Penyesuaian pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Surabaya berdasarkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin
10	Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni	Peraturan Walikota Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya.	Optimalisasi penanganan rumah tidak layak huni milik penduduk Kota Surabaya
11	Perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas	Peraturan Walikota Nomor 09 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Bagi Disabilitas di Kota Surabaya.	Pedoman perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
12	Perpustakaan	Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.	Pelaksanaan Penyelenggaraan Perpustakaan, taman baca dan sudut baca sebagai perwujudan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perpustakaan
13	Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas	Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah.	Penyempurnaan ketentuan terkait kewajiban penyediaan pemakaman yang merupakan bagian dari penyerahan prasarana, sarana dan utilitas
14	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Retribusi Perizinan Tertentu.	Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Retribusi Perizinan Tertentu
15	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif	Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.	Optimalisasi pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kota Surabaya



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
16	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Masyarakat dalam Rangka Menyambut Hari Jadi Kota Surabaya ke 731.	Untuk memberikan keringanan beban masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
17	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan/atau Keterlambatan Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya ke 731.	Untuk memberikan keringanan beban masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah
18	Perdagangan dan Perindustrian di Bidang Pasar Rakyat.	Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian di Bidang Pasar Rakyat.	Optimalisasi fungsi pengawasan dalam pembangunan dan/atau revitalisasi pasar rakyat
19	Hibah Biaya Pendidikan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah.	Optimalisasi pemberian biaya pendidikan daerah untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Pendidikan Diniyah Formal (Setara SD/SMP) Swasta di Kota Surabaya



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
20	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Retribusi Pemakaian Tanah kepada Masyarakat Pemegang Izin Pemakaian Tanah dalam Rangka Memperingati Hari Kartini.	Untuk meringankan beban masyarakat di Daerah serta meningkatkan kesadaran dalam melakukan pembayaran retribusi pemakaian tanah.
21	Penerimaan Peserta Didik Baru	Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.	Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru yang sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan sekolah Menengah Kejuruan
22	Retribusi Daerah	Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Kebun Raya Mangrove, Adventure Land Romokalisari dan Hutan Kota pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Peninjauan tarif retribusi guna pengembangan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga pada Kebun Raya Mangrove, Adventure Land Romokalisari dan Hutan Kota
23	Perizinan dan Non Perizinan	Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.	Peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya perizinan dan non perizinan di Kota Surabaya
24	Pemanfaatan barang milik daerah	Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan.	Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
25	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Retribusi Jasa Umum.	Ketentuan pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Retribusi Jasa Umum
26	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 109 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah
27	Pelayanan Pemakaian Tanah	Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelayanan Pemakaian Tanah.	Pelaksanaan Pelayanan Pemakaian Tanah berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan Di Kota Surabaya
28	Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah	Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya.	Peningkatan komitmen RSUD BDH dalam mewujudkan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat
29	Pendirian Rumah Ibadat dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Rumah Ibadat	Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadat dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Rumah Ibadat.	Pedoman pelaksanaan tata cara pendirian rumah ibadat dan pemanfaatan bangunan gedung untuk rumah ibadat berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Nomor 200.6.5/e-227/Polpum perihal Penjelasan Terhadap Frasa “Masyarakat Setempat”
30	Perlindungan Anak	Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.	Penjaminan pemenuhan dan perlindungan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi khususnya upaya pencegahan perkawinan pada usia anak



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang D diselesaikan
31	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bidang Pajak Daerah.	Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bidang Pajak Daerah.
32	Retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penambahan Detail Rincian Objek Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Tempat Khusus Parkir pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.	Pengaturan mengenai tambahan layanan atas rincian objek pelayanan yang diberikan oleh BLUD setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
33	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.	Optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat Kota Surabaya
34	Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah	Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Sambikerep, Kecamatan Lakarsantri dan Kecamatan Pabean Cantian dalam Wilayah Kota Surabaya.	Untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggabungan Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur pada Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggabungan Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur pada Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
35	Hibah Biaya Pendidikan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah.	Optimalisasi pemberian biaya pendidikan daerah
36	Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini	Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini.	Peningkatan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini agar berdaya guna dan berhasil guna serta memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan
37	Retribusi pelayanan kesehatan	Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penambahan Detail Rincian Objek Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.	Penambahan Detail Rincian Objek Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
38	Bantuan Biaya Operasional untuk Mobil Ambulans yang Digunakan untuk Pelayanan Penanganan Sosial	Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Biaya Operasional untuk Mobil Ambulans yang Digunakan untuk Pelayanan Penanganan Sosial di Kota Surabaya.	Pemberian apresiasi bagi warga pelayan masyarakat di Kota Surabaya yang memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, berupa transportasi khusus menuju fasilitas kesehatan dan pengantaran ke rumah sehingga warga dengan segera mendapat penanganan lebih cepat dan efektif
39	Layanan Angkutan Perkotaan	Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2024 tentang Peningkatan Layanan Angkutan Perkotaan.	<ol style="list-style-type: none">meningkatkan minat penggunaan angkutan perkotaan melalui peningkatan standar pelayanan minimal dengan pembelian layanan;menjamin kemudahan mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan;mengurangi beban biaya transportasi yang ditanggung masyarakat;mengurangi dampak lalu lintas yang ditimbulkan akibat penggunaan kendaraan pribadi yang berlebih; dan



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			e. mengurangi tingkat kecelakaan yang ditimbulkan akibat penggunaan kendaraan pribadi yang berlebih.
40	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025	Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.	a. Dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan b. Sebagai pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
41	Tarif Pelayanan Non Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2024 tentang Tarif Pelayanan Non Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya dalam Melakukan Kerja Sama dengan Pihak Lain.	untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan non kesehatan pada Dinas Kesehatan
42	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Pendirian Bangunan di Kota Surabaya.	Penyempurnaan pelaksanaan pelayanan penerbitan Keterangan Rencana Kota agar dapat dilaksanakan secara lebih optimal, efektif dan efisien.
43	Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.	Penerapan Standar Pelayanan Minimal untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya kepada masyarakat yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah
44	Perubahan Rencana	Peraturan Walikota Nomor 59	Adanya perubahan prioritas



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.	Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.	pembangunan daerah serta kerangka ekonomi dan keuangan daerah Tahun 2024 dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024
45	Perizinan dan Non Perizinan	Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.	Peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya perizinan dan non perizinan di Kota Surabaya
46	Kota Layak Anak	Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2024 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Kota Layak Anak.	<ol style="list-style-type: none">meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak Anak;mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak;
47	Perlindungan Anak	Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2024 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Perlindungan Khusus kepada Anak.	<ol style="list-style-type: none">memberikan jaminan rasa aman bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;memberikan layanan yang dibutuhkan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; danmencegah terjadinya pelanggaran hak-hak anak.
48	Tarif Pelayanan Non Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya	Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2024 tentang Tarif Pelayanan Non Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya dalam Melakukan Kerja Sama dengan Pihak Lain.	untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan non kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya.



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
49	Penyelenggaraan reklame	Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame	<ol style="list-style-type: none">memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan reklame di Daerah;menata reklame di Daerah agar selaras dengan ketentuan tata ruang, mendukung estetika kota dan menyatu dengan kawasan dan lingkungan sekitar; danmenjamin terwujudnya penyelenggaraan reklame agar penempatan bangunan reklame dan materi reklame sesuai dengan batasan teknis yang ditetapkan, selaras dengan norma etika, estetika kota, tata ruang, sosial budaya, serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan.
50	Pemanfaatan Bangunan dan Persetujuan Bangunan Gedung	Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan	Penyempurnaan pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang bangunan terutama dalam tahap pemanfaatan bangunan agar dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Persetujuan Bangunan Gedung,
51	Persetujuan Hak Guna Bangunan	Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya.	Penetapan tata cara pemberian persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
52	Pelayanan Publik	Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan/Honorarium Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya.	Efektifitas pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat, khususnya terhadap kader surabaya hebat
53	Retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Tempat Khusus Parkir	Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penambahan Detail Rincian Objek Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Tempat Khusus Parkir pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.	Pengaturan mengenai penambahan Detail Rincian Objek Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Tempat Khusus Parkir
54	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Eropa Kota Lama Surabaya.	sebagai upaya mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Eropa Kota Lama Surabaya, dalam upaya menciptakan lingkungan yang berkarakter, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
55	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pecinan Kota Lama Surabaya.	sebagai upaya mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Pecinan Kota Lama Surabaya, dalam upaya menciptakan lingkungan yang berkarakter, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
56	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Ampel Kota Lama Surabaya.	sebagai upaya mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Ampel Kota Lama Surabaya, dalam upaya menciptakan lingkungan yang berkarakter, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
57	Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi risiko sosial ekonomi tenaga kerja di Surabaya.



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
58	Persetujuan Bangunan Gedung	Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung.	Penyempurnaan ketentuan dan penyesuaian nomenklatur mengenai penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung agar pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung dapat dilaksanakan secara lebih optimal, efektif dan efisien
59	Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Eka Candrarini Kota Surabaya	Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Eka Candrarini Kota Surabaya	Peningkatan komitmen RSUD Eka Candrarini dalam mewujudkan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat
60	Program Kampung Iklim	Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2024 tentang Program Kampung Iklim di Kota Surabaya.	a. mengendalikan dan mengurangi emisi GRK melalui ProKlim; dan b. meningkatkan pengetahuan, partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam upaya mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya untuk mendukung kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal/tapak.
61	Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada wilayah terdampak untuk mempercepat pemulihan kehidupan dan penghidupan masyarakat serta perbaikan prasarana dan sarana umum secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.
62	Air Minum	Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan SPAM; b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi; dan



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
63	Retribusi Daerah	Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2024 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda Dan Gelora Bung Tomo Pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Peninjauan tarif retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, pada Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda dan Gelora Bung Tomo berdasarkan perkembangan perekonomian di Kota Surabaya
64	Kepemudaan	Peraturan Walikota Nomor 104 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Kepemudaan	Pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa untuk membangun pemuda
65	Lembaga Kesejahteraan Sosial	Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial	Optimalisasi dan mewujudkan kemudahan pelayanan permohonan penerbitan tanda pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial
66	Penanggulangan Tuberkulosis	Peraturan Walikota Nomor 117 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Tuberkulosis Di Kota Surabaya	Penyelenggaraan penanggulangan Tuberkulosis berbasis kewilayahan di Kota Surabaya serta menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
67	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan Walikota Nomor 122 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Retribusi Jasa Usaha	Penyempurnaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Retribusi Jasa Usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan retribusi jasa usaha

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Sebagai bentuk *check and balance*, Pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya telah melakukan pembahasan atas Laporan Kinerja Wali Kota Akhir Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, berdasarkan pembahasan yang dilakukan, DPRD menyusun rekomendasi yang termuat dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya nomor 11 tahun 2024 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota



Surabaya Akhir Tahun Anggaran 2023, untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan anggaran tahun 2024. Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD atas LKPJ Walikota ATA 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.33 sebagai berikut.

Tabel 3.33 Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2023 dan Tindak Lanjut Tahun 2024

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
1	Mohon bagian litbang mengkaji orang terkait program padat karya, ingin sukses di dunia entrepreneur yang harus belajar atau didampingi oleh entrepreneur yang sukses bukan menugasi OPD sebagai pendamping. Pemkot perlu merubah padat karya dengan Kerjasama dengan pihak ke 3 yang bisa jadi "coach" pelaku padat karya dan bisa membuat mereka sukses dengan mindset entrepreneur. Kenyataan di lapangan, banyak program padat karya yang berguguran.	Monitoring dan evaluasi pengelolaan padat karya sedang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dan akan dilakukan perbaikan sehingga menjadi lebih efektif serta perlu dikaitkan dengan industri/ekonomi kreatif yang nantinya akan digerakkan di masing-masing kecamatan. Kajian Hub Produk Kreatif dan Tempat Kreatif pada masing-masing Kecamatan akan dilakukan pada tahun 2025.	Peningkatan daya saing usaha mikro padat karya
2	Perlu ada penanganan serius terkait asset Pemkot karena tidak sedikit lahan lahan Pemkot yang masih di kuasai pihak lain bahkan menjadi sumber penghasilan mereka.	<ol style="list-style-type: none">1. BPKAD berkoordinasi dengan lurah dan Camat serta PD terkait untuk melakukan pengawasan terhadap tanah aset Pemkot Surabaya yang dimanfaatkan pihak lain tanpa adanya hubungan hukum;2. Dalam hal terdapat klaim kepemilikan Warga, penanganan terhadap aset Pemerintah Kota Surabaya dilakukan dengan cara Upaya hukum Non-Litigasi atau Litigasi;3. Dalam rangka pengamanan aset, Pemerintah Kota Surabaya melakukan permohonan pendampingan kepada BPK, KPK, dan Kejaksaan;4. Pada Tahun 2024 telah dilakukan pengamanan aset sejumlah 4 lokasi	Optimalisasi pengamanan aset Pemerintah Kota Surabaya



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
3	Ada permula pemanfaat asset untuk dunia usaha yang bisa menjadi PAD tapi dengan skema yang lebih ringan dengan dunia usaha missal sewa lebih murah dan lain lain agar asset tidak mangkrak. Dalam hal sertifikasi lahan pemkot, selama ini sudah cukup baik. Ada peningkatan jumlah sertifikat.	Untuk memfasilitasi pemanfaatan/ penggunaan aset tanah dan atau bangunan berpedoman pada : 1. PP No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.; 2. Perwali No 1 tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perwali No 25 tahun 2024 tentang formula tarif sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan atau bangunan 3. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 tentang Program Padat Karya di Kota Surabaya.	1. Penyesuaian tarif sewa UMKM dan UKM untuk kegiatan non bisnis 2. Penyesuaian tarif pokok sewa untuk kegiatan non bisnis dengan bentuk kelembagaan kategori 2 (yayasan, koperasi lembaga pendidikan formal / non formal); 3. Peningkatan perekonomian warga masyarakat berpenghasilan rendah
4	Namun kenyataan di lapangan masih banyak tanah aset pemkot yang dikuasai pihak lain. Tapi sampai sekarang tetap dibiarkan. Sehingga ada kerugian pendapatan di retribusi pemkot.	Terhadap aset Pemerintah Kota Surabaya yang digunakan oleh Pihak Lain dilakukan dengan cara sosialisasi dan pemberian surat pemberitahuan kepada warga yang memanfaatkan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan hubungan hukum dengan Pemerintah Kota Surabaya	Optimalisasi pendapatan dari retribusi atau sewa lahan tanah aset Pemkot Surabaya oleh Pihak Ketiga
5	Belum maksimal memanfaatkan semua aset yang ada sehingga meski pendapatan naik dibandingkan tahun sebelumnya tapi tidak sebanding dengan keseluruhan nilai aset. Menurut data ada 8.542 aset teregister (5.319 di antaranya sudah bersertifikat), tapi pendapatan hanya 105,6 M. selain itu beberapa aset yang seharusnya mudah untuk mendatangkan revenue malah "menganggur" di antaranya bekas THR dan Surabaya Mall dan juga lapangan tembak internasional yang kini mangkrak.	Untuk optimalisasi pemanfaatan tanah dan/atau bangunan akan terus melakukan identifikasi tanah dan bangunan melalui : 1. menginformasikan kepada pengguna barang terhadap pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya oleh pihak lain tanpa ijin, agar diterbitkan hubungan hukum dan dilakukan pembayaran sewa/retribusinya; 2. memetakan aset yang masih idle untuk ditawarkan kepada masyarakat yang berminat memanfaatkannya 3. melakukan penawaran pada investor khususnya persil kawasan bekas THR dan Hi-Tech Mall	Optimalisasi pemanfaatan aset serta peningkatan PAD



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
6	Hasil appraisal jika di sewakan Surabaya Mall bisa mencapai 20 M / Tahun. Sudah 5 Tahun aset ini mangkrak, jadi pemkot kehilangan potensi pendapatan sebesar 20 M x 5 = 100 M. sementara lapangan tembak yang sudah di bangun dengan anggaran ratusan miliar rupiah tidak pernah di pakai sesuai peruntukannya, sempat di pakai sebagai rumah sakit lapangan saat covid setelah itu mangkrak lagi.	Dampak Pandemi terhadap kondisi perekonomian mengakibatkan menurunnya daya beli dan kemampuan bayar investor peminat pengelola Gedung Eks Hitech Mall. Saat ini Pemerintah Kota Surabaya tetap berusaha memberikan wadah sebagai bentuk pelayanan bagi pedagang / badan usaha yang masih berminat untuk berdagang dan berusaha di Gedung Eks Hitech Mall	1. Peningkatan PAD 2. Peningkatan perputaran roda perekonomian bagi warga Kota Surabaya
7	Perlu penguatan kapasitas tertentu seperti untuk ASN di pos pos layanan public agar betul betul sesuai standart tidak hanya service excellent tapi sudah di level care terhadap costumer.	Telah dilakukan pengembangan kompetensi untuk penguatan kompetensi teknis masing-masing pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya seperti diklat pelayanan prima, juru sita pajak, administrasi kepegawaian, diklat pemadam kebakaran level 1, dan lain-lain.	Penguatan kapasitas ASN Pemerintah Kota Surabaya
8	Perlunya antisipasi terhadap bencana alam yang berhubungan dengan iklim (hidrometeorologi) dengan membangun atau mempersiapkan posko tanggap bencana.	Bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan berbagai macam kegiatan sebagai antisipasi terhadap bencana alam hidrometeorologi yaitu berupa pelaksanaan kegiatan sosialisasi pelatihan mitigasi bencana yang diberikan kepada sekolah, rumah susun, dan warga masyarakat, sosialisasi melalui berbagai platform media sosial, serta mempersiapkan posko tanggap bencana yang tersebar di berbagai wilayah Kota Surabaya (7 Posko Terpadu dan 18 Pos Pantau) untuk mengantisipasi berbagai jenis kejadian kedaruratan bencana hidrometeorologi seperti angin puting beliung, pohon tumbang, banjir rob, genangan dan sebagainya.	Mempertahankan dan/atau meningkatkan waktu respon awal penanganan kejadian kedaruratan bencana, baik yang berkaitan dengan hidrometeorologi maupun kejadian kedaruratan lainnya
9	Sosialisasi kebencanaan terhadap Masyarakat perlu massif atau diperkuat agar Masyarakat bisa mampu	Pemerintah Kota Surabaya sudah melakukan sosialisasi mitigasi bencana dengan berbagai target sasaran yaitu sekolah, rumah susun,	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana yang ada di



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
	mengantisipasi secara mandiri dalam hal kebencanaan.	puskesmas, rumah sakit, dan warga masyarakat, serta telah mengedukasi masyarakat melalui berbagai platform media sosial untuk membangun kesadaran bencana masyarakat.	lingkungannya agar dapat melakukan identifikasi serta membuat rencana darurat bersama dengan elemen masyarakat yang ada di wilayah masing – masing
10	Perlu di masyarakatkan "content" dalam bentuk video terkait urgensi dan langkah langkah pencegahan bencana. Bisa melalui iklan Masyarakat.	Pemerintah Kota Surabaya melakukan kerjasama dengan unsur akademisi untuk pembuatan media edukasi kebencanaan kepada masyarakat melalui video dan penyebaran informasi melalui sosial media BPBD Kota Surabaya di Platform, Youtube, Instagram dan Tiktok. Konten edukasi dibuat menarik agar masyarakat lebih tertarik terhadap informasi kebencanaan yang sangat cepat sekali mengalami perubahan.	Memberikan edukasi kebencanaan kepada masyarakat melalui media sosial dan media video
11	Sistem zona Kecamatan harap dievaluasi apakah % (persentase) nya perlu diperbesar agar bisa mencover beberapa Kecamatan yang tidak memiliki SMPN atau jauh jaraknya	Pelaksanaan PPDB mengacu pada Permendikbudristek 1/2021. Pemerintah Kota Surabaya telah berinovasi dengan menciptakan zona 1 dan zona 2, sehingga semua kelurahan (153 kelurahan) memiliki kesempatan yang sama untuk diterima di SMP Negeri. Untuk jenjang SD tidak terjadi masalah zonasi.	Pemerataan aksesibilitas pendidikan (sekolah negeri)
12	Sudah saatnya ada pilot project terkait Smart School salah satunya penerapan system informasi manajemen sekolah (berbasis IT), maka bisa dimulai dari 10 sekolah dan berharap ke depan bisa diterapkan keseluruhan.	Terkait sekolah <i>pilot project</i> di wilayah Kota Surabaya, pada tahun 2024 telah dilaksanakan 41 sekolah, baik SD maupun SMP. Sedangkan saat ini di 2025 diperluas menjadi 93 sekolah dengan pemenuhan indikator utama Smart School, yakni: 1) elearning platform, 2) co-working space, 3) smart classroom (berbasis IoT), 4) edukasi BigData (ai dan coding), 5) literasi dan inklusi digital, 6) teknologi ramah anak berbasis komunitas, 7) pendidikan karakter, 8) pendidikan masyarakat, 9) infrastruktur digital. Sekolah tersebut secara bertahap dilengkapi sarana prasarana, media pembelajaran, serta peningkatan	Digitalisasi pendidikan



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
		kompetensi guru. Proses tersebut dilakukan tidak hanya terhadap lima sekolah yg menjadi pilot project, namun juga terhadap seluruh sekolah negeri yang ada di Kota Surabaya.	
13	Surabaya ada 153 kelurahan, tetapi SMP di Surabaya hanya 64 saja. Sehingga banyak kekurangan sekolah, akibatnya banyak anak sekolah yang tidak kebagian sekolah.	Surabaya dengan jumlah kecamatan sebanyak 31 Kecamatan dan 153 Kelurahan telah memiliki 63 SMP Negeri. Tahun 2025 akan ada penambahan 3 SMPN, penambahan SMPN baru akan dilakukan secara bertahap sesuai target pada RPJPD Kota Surabaya dengan memperhitungkan proyeksi jumlah lulusan SD dan daya tampung SMP Negeri dan Swasta di Kota Surabaya.	Pemerataan aksesibilitas pendidikan (sekolah negeri).
14	Dinas ini sangat penting. Namun fakta di lapangan banyak koperasi yang sudah tidak jalan dan organisasinya mati namun tetap dibiarkan saja.	<ul style="list-style-type: none">- Telah dilakukan identifikasi dan monitoring koperasi sesuai dengan alamat Badan Hukum/arsip di Dinas- Pembaruan data koperasi-koperasi yang sudah tidak aktif di Online Data System milik Kementerian Koperasi dan UKM	Untuk menertibkan data koperasi bagi koperasi yang tidak aktif/ tidak ditemukan keberadaannya (kekinian data)
15	Salah satu contoh Sentra Wisata Kuliner (SWK) yang diurus dinas ini banyak yang mangkrak. Dari 49 SWK se Surabaya tidak lebih dari separo saja yang jalan atau beroperasi. Itu pun hanya terkesan jalan di tempat.	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring secara berkala untuk mengoptimalkan okupansi SWK2. Sosialisasi kepada pemangku wilayah terkait ketersediaan stand di SWK di wilayah tersebut sehingga bisa diupayakan pemberdayaan masyarakat sekitar3. Telah mengadakan kegiatan rutin di beberapa SWK untuk menarik kunjungan masyarakat ke SWK tersebut sehingga meningkatkan omset pedagang SWK	Peningkatan okupansi sentra dan omset pedagang SWK
16	Dalam pembahasan banyak terungkap jika tim pendamping yang rutin datang ke SWK tidak menguasai masalah bisnis kuliner.	Telah dilaksanakan evaluasi rutin setiap bulan terhadap pendamping SWK yang memiliki latar belakang kompetensi yang beragam. Ke depannya akan lebih diintensifkan koordinasi dan sinergi pendampingan dengan instansi yang kompeten dalam bidang pengembangan bisnis kuliner.	Evaluasi dan peningkatan kualitas pendampingan.
17	Selain itu, masih banyak	Koordinasi dengan pemangku	Penertiban PKL liar di



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
	ditemukan sejumlah PKL yang berjualan tidak jauh dari lokasi SWK. Dan ironisnya kondisi seperti ini dibiarkan sampai sekarang padahal jeritan pedagang di SWK sudah sering dilontarkan lewat macam macam cara.	wilayah dan Satpol PP terkait penertiban PKL	sekitar SWK
18	Serapan anggaran seharusnya bisa dimaksimalkan mendekati 100%. Pada tahun 2023 serapannya 90,62%, mengingat masih banyaknya persoalan yang bisa dikerjakan oleh dinas ini. Diantaranya untuk memberdayakan UMKM yang butuh intervensi Pemkot.	Pertimbangan efisiensi anggaran, penyerapan pengadaan yang efisien, dan kerjasama dengan beberapa instansi dan akademisi sehingga kegiatan bisa terlaksana dengan lebih efisien.	Terlaksananya kegiatan dengan efisiensi terhadap anggaran.
19	Sinergitas UMKM dengan toko modern (minimarket) juga belum maksimal, padahal sudah ada payung hukum berupa perda dan perwali. Yaitu dalam bentuk ikut menjajakan produk UMKM di toko toko modern.	Telah dilakukan fasilitasi <i>business matching</i> yang mempertemukan toko modern dan UMKM yang produknya telah siap untuk dipasarkan di toko modern, bentuk kegiatan kurasi dan pemilihan produk-produk UKM untuk dipasarkan oleh toko modern pada tahun 2024.	Meningkatkan sinergitas UMKM dan toko modern
20	Banyak toko modern yang tidak mematuhi aturan jam buka dan tutup sesuai ketentuan perda. Sehingga makin menggerus pasar pasar rakyat (tradisional). Perlu ada tindakan tegas kepada toko toko modern yang terbukti melanggar perda termasuk jarak minimal dengan pasar modern.	<ol style="list-style-type: none">1. Dinkopumdag secara rutin telah melakukan pengawasan pada toko modern termasuk kaitanya dengan jam operasional dan melakukan pembinaan pada toko modern yang melanggar ketentuan dengan mengenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Perdagangan dan Perindustrian2. Sedangkan terkait ketentuan jarak toko modern dengan pasar tradisional, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko toko modern termasuk dalam kategori resiko rendah dimana perizinannya dapat terbit secara	Terkait banyak toko modern yang tidak mematuhi aturan jam buka dan tutup sesuai ketentuan perda dan toko modern yang terbukti melanggar perda termasuk jarak minimal dengan pasar modern.



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
		otomatis, adapun selain wajib memenuhi perizinan berusaha pelaku usaha juga wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha meliputi PBG dan KKPR yang mempertimbangkan jarak pasar rakyat dengan toko modern sesuai Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian	
21	Diupayakan Dinas Sosial saat ini melakukan update data terpadu kesejahteraan social (DTKS) agar distribusi bansos semakin membaik mengingat masih banyak warga yang berhak belum terdata.	<ol style="list-style-type: none">1. Telah dilakukan verifikasi dalam rangka pemutakhiran data keluarga miskin melalui musyawarah kelurahan atau muskel secara berkala setiap bulan oleh Dinas Sosial bersama dengan RT, RW, LPMK, Kelurahan dan Kecamatan2. Dinas Sosial telah melakukan sinkronisasi data keluarga miskin dengan DTKS setiap bulan dalam rangka pengusulan bantuan sosial untuk keluarga miskin	Data Keluarga Miskin yang mutakhir sebagai dasar pemberian intervensi
22	Mencermati penyaluran bansos mengenai ketepatan dan kecepataannya sampai pada sasaran agar terhindar dari penyimpangan dan tepat sasaran.	<ol style="list-style-type: none">1. Penyaluran bantuan sosial telah dilakukan berdasarkan data keluarga miskin yang telah dimutakhirkan melalui musyawarah kelurahan (Muskel) secara berkala setiap bulan oleh Dinas Sosial bersama dengan RT, RW, LPMK, Kelurahan dan Kecamatan, sehingga penerima bantuan sosial tepat sasaran.2. Terkait dengan kegiatan penyaluran bantuan sosial, Dinas Sosial telah berkoordinasi dengan pendamping PKH, Kecamatan dan Kelurahan sehingga penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan dengan tepat dan cepat	Penyaluran bantuan sosial yang tepat dan cepat sampai pada sasaran.
23	Penurunan angka orang miskin atau gamis, bukan karena warga miskin benar benar berkurang tetapi devinisi orang miskin yang diubah sehingga secara otomatis orang yang benar	Keluarga Miskin adalah keluarga yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan, dimana hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 117 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengumpulan,	Data Keluarga Miskin yang tervalidasi dan mutakhir



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
	benar miskin menjadi tidak memenuhi syarat miskin. Dengan demikian jumlah orang miskin disebut berkurang.	Pengolahan dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin. Terkait dengan data keluarga miskin Kota Surabaya, Dinas Sosial telah melakukan verifikasi bersama dengan RT, RW, Kelurahan, Kecamatan melalui musyawarah kelurahan yang dilaksanakan setiap bulan.	
24	Manajemen antrian dalam layanan perlu dikaji ulang apakah perlu perbaikan dan dikaitkan dengan penerapan system IT. Masih saja terlihat banyaknya antrian orang yang berobat di sana.	<ol style="list-style-type: none">1. Telah dilakukan perbaikan dalam penerapan sistem IT untuk antrian pendaftaran, baik secara online (e-health) maupun onsite (pendaftaran langsung di rumah sakit).2. RSUD dr. Mohamad Soewandhie telah melakukan penyesuaian jam operasional loket pendaftaran sehingga pasien tidak terlalu lama menunggu antrian sesuai sistem JKN dan e-health.3. RSUD dr. Mohamad Soewandhie memberikan informasi kepada pasien tentang estimasi waktu pelayanan sesuai dengan jam dan nomor yang tertera pada lembar nomor antrian pada saat pendaftaran online.4. Percepatan pelayanan dengan melengkapi semua loket pendaftaran rawat jalan dengan alat deteksi finger pasien termasuk kamera webcam untuk Face Recognition sebagai pemenuhan persyaratan pasien BPJS	Antrian kunjungan pasien rumah sakit.
25	Manajemen antrian dalam layanan perlu dikaji ulang apakah perlu perbaikan dan dikaitkan dengan penerapan system IT. Perluasan Gedung segera direalisasikan karena tuntutan Masyarakat terhadap pelayanan dan kenyamanan yang baik selalu meningkat.	<ol style="list-style-type: none">1. Optimalisasi digitalisasi pelayanan RS dengan aplikasi PETIS RUJAK (Pendaftaran Otomatis Rujukan Tanpa Berkas) di Instalasi Rawat Jalan2. Telah dilaksanakan digitalisasi permintaan layanan kesehatan diantaranya laboratorium/radiologi dan e-resep.3. Menambah titik pengambilan obat yang semula 2 UPF menjadi	Manajemen antrian dalam layanan dengan penerapan system IT dan rencana Perluasan Gedung yang akan segera direalisasikan



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
		<p>3 UPF untuk mengurai antrian pengambilan obat.</p> <p>4. Percepatan pelayanan dengan memperbanyak titik bantuan layanan meliputi titik layanan finger print pasien IRJ, pengambilan jadwal antrian e-health, dan lain-lain.</p> <p>5. RSUD Bhakti Dharma Husada telah berkoordinasi dengan pihak terkait tentang perluasan gedung dengan mempertimbangkan skala prioritas kota</p>	
26	<p>Segera dibuatkan payung hukum terkait sewa lahan antara Pemkot dengan RPH, agar tidak ada kendala atau masalah dikemudian hari. Perpindahan tempat pemotongan babi di Kawasan pegirian ke Kawasan Banjarsugihan sama saja dengan memindahkan masalah. Dimana warga di tempat baru tidak berkenan dengan pemotongan babi tersebut.</p>	<p>Sampai saat ini belum ada payung hukum terkait sewa lahan antara Pemkot Surabaya dengan RPH Kota Surabaya di 2 lokasi tersebut di Pegirian (Serambi Ampel) dan Aset Pemkot Surabaya (Banjarsugihan) dalam bentuk RPH Non Halal. Berkaitan dengan hubungan hukum antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PD RPH atas aset di Banjarsugihan berupa tanah, bangunan, dan peralatan potong babi akan menjadi penambahan penyertaan modal Daerah kepada PD RPH yang telah diakomodir dalam raperda PT RPH Perseroda</p>	<p>Segera dibuatkan payung hukum antara Pemkot dengan RPH untuk RPH Banjarsugihan dan memperkerjakan warga di daerah tersebut</p>
27	<p>Perlu pilot project jika memang investasi keseluruhan adalah berat dan mahal terkait pelayanan air yang bersih sesuai standart kesehatan agar masyarakat atau public secara bertahap juga mengetahui atau memahami jika ada langkah langkah perbaikan yang akan berdampak pada kenaikan iuran PDAM.</p>	<p>Pada tahun 2024 PDAM telah melakukan rehabilitasi pipa terutama pipa yang telah berusia tua sepanjang 52,8 kilometer.</p>	<p>Pelayanan air bersih sesuai standar kesehatan</p>
28	<p>Menajemen KBS agar selalu melakukan inovasi-inovasi agar menambah pengunjung dengan begitu akan meningkatkan pendapatan KBS. Selain itu kebersihan dan keindahan kandang hewan juga perlu</p>	<p>Inovasi dan pengembangan yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kunjungan KBS antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Optimalisasi wahan kidzoo untuk di tingkatkan di upgrade agar lebih menarik2. Proses pembahasan kerjasama	<p>Inovasi program pengembangan KBS untuk peningkatan kunjungan masyarakat dan peningkatan pendapatan KBS</p>



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
	diperhatikan. Melakukan Kerjasama dengan pihak ke 3 untuk mempercantik atau memperindah KBS.	<p>dengan pihak ketiga memanfaatkan lahan di KBS untuk Videotron sebagai sarana edukasi dan iklan</p> <ol style="list-style-type: none">3. Bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya untuk memfasilitasi pekerja seni kota surabaya untuk tampil di Kebun Binatang Surabaya4. Pembahasan kerjasama dengan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya untuk memasukkan KBS dalam rute Bus wisata Surabaya SSCT5. Melakukan pertukaran satwa untuk menambah jenis satwa maupun untuk untuk menjaga keragaman genetik6. Pengembangan Wahana dengan konsep visual dari video mapping satwa serta audio dan desain immersive, menghadirkan nuansa alam berupa hutan dan permainan Cahaya.7. Bekerjasama dengan travel agent untuk mobilisasi pengunjung.8. Melakukan kegiatan Goes to school untuk memperkenalkan program yang ada di KBS di sekolah-sekolah, agar dapat memobilisasi pengunjung dari segmen pelajar.9. Menambah tiket bundling tiket masuk dengan wahana-wahana. <p>Terkait peningkatan kebersihan dan keindahan kandang hewan serta peningkatan lingkungan KBS, telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penjadwalan pembersihan kandang secara rutin oleh keeper dengan baik dari sisi area lantai, dinding maupun sarana pendukung berupa tempat makan maupun kebersihan satwa sendiri2. Untuk menjamin keindahan	



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
		<p>maka dilakukan proses <i>enrichment</i> kandang berupa sarana dan prasarana bagi satwa yang ada, yang bertujuan untuk membuat lingkungan kandang semirip dengan lingkungan aslinya. Peningkatan kandang satwa antara lain penambahan pepohonan maupun tanaman hias agar pengunjung melihat tampak indah dan asri.</p> <p>3. Kerjasama dengan Rotary Club untuk penyediaan sarana wastafel di lingkungan KBS dan hibah bunga anggrek.</p>	
29	Dalam rangka mempersempit praktek rentenir yang terjadi ditengah Masyarakat, maka dengan kinerja SAU yang sudah baik agar dapatnya Pemkot memberikan tambahan penyertaan modal kepada BPR SAU agar dapat dijadikan alat penunjang pemberian kredit mikro kepada Masyarakat.	<ol style="list-style-type: none">1. Nilai modal disetor Pemerintah Kota Surabaya kepada PT BPR SAU Perseroda sampai dengan tahun 2024 menjadi Rp29,8 miliar2. Jumlah pemberian kredit BPR SAU tahun 2024 sebesar Rp.217.697.891.296 kepada 2.930 nasabah, meningkat 23,27 % dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp.176.606.322.235 atau sebanyak 2.664 nasabah3. PT. BPR SAU telah menyalurkan kredit mikro kepada masyarakat yang ber KTP Surabaya sampai dengan 31 Desember 2024 sebanyak 2.414 orang., pinjaman kepada UMKM Kota Surabaya melalui PUSPITA dan SIKUMIS sebanyak 250 orang dengan baki debit (sisa pinjaman) sebesar Rp. 376.751.438,-	Optimalisasi pemberian kredit mikro kepada masyarakat
30	Dalam pemenuhan SDM untuk auditor harap disesuaikan dengan analisis beban harap disesuaikan dengan analisis beban kerja agar pengawasan kerja di internal lebih maksimal dan memudahkan dalam menjalankan kinerja yang ada.	<ol style="list-style-type: none">1. Telah dilakukan penambahan APIP Inspektorat Kota Surabaya melalui penambahan PPUPD sebanyak 4 orang pada pengadaan CPNS Tahun 2024 dan penambahan auditor pada pembentukan jabatan fungsional auditor ahli pertama sebanyak 2 orang.2. Telah dilakukan upaya permohonan penambahan auditor dari lulusan STAN dalam	Pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM APIP Inspektorat Kota Surabaya



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
		pemenuhan kuantitas SDM auditor Inspektorat Kota Surabaya	
31	Menyediakan BLK untuk memenuhi kebutuhan anak-anak lulusan SMA/SMK serta di usia produktif yang ingin bekerja. Memastikan perusahaan di wilayah Kota Surabaya untuk merekrut tenaga kerja di wilayah sekitar.	<ol style="list-style-type: none">1. Pemerintah Kota Surabaya belum memiliki BLK maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melakukan kerja sama dalam kegiatan pelatihan dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Jawa Timur dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) di Surabaya. Selain itu, terkait kompetensi sertifikasi bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk menambah keahlian dan kompetensi dari pencaker lulusan SMA/SMK sesuai dengan pasar kerja.2. Pemerintah Kota Surabaya telah membuat Nota Kesepakatan dengan Hotel, dan pengelola pusat perbelanjaan (mall) di Surabaya diantaranya berkomitmen untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja penduduk Kota Surabaya dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di lingkungan perusahaan;3. Mengundang perusahaan di Kawasan SIER, Margomulyo dan sekitarnya, serta perusahaan alih daya untuk diberikan himbauan agar memprioritaskan penduduk Surabaya pada saat pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja;4. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyampaikan Surat Edaran kepada perusahaan-perusahaan yang berisi himbauan untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja penduduk Surabaya dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di lingkungan perusahaan.5. Pemerintah Kota Surabaya dalam	Kolaborasi stakeholder dalam melakukan pelatihan untuk anak-anak lulusan SMA/SMK sesuai minat dan keahliannya. Selain itu berkurangnya jumlah pengangguran terbuka di Kota Surabaya.



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
		<p>pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran pada tahun ini dengan melakukan pendataan perusahaan terkait kebutuhan tenaga kerja dan memberikan info lowongan kepada Kelurahan / Kecamatan di sekitar perusahaan.</p> <p>6. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja telah melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di wilayah Kota Surabaya dalam rangka fasilitasi kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan-perusahaan dan menginformasikan lowongan tersebut kepada pencari kerja warga Kota Surabaya dengan melakukan rekrutmen langsung dan proses seleksi di Kantor Dinas yang dilakukan secara rutin untuk menciptakan penempatan tenaga kerja guna mengurangi pengangguran.</p>	
32	<p>Melakukan kolaborasi dengan pihak terkait dalam pengawasan dan penanganan permasalahan kenakalan anak atau remaja.</p> <p>Monitoring pada pekerja anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi eksploitasi anak.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan kegiatan penyadaran oleh PUSPAGA SEMANGGI Kota Surabaya melalui sosialisasi/edukasi/parenting, bimbingan teknis fasilitator dan bimbingan masyarakat berupa pengembangan Puspaga RW, Webinar Kelas Parenting setiap Selasa Pukul 15.00 WIB, Talkshow, Intagram live, Puspaga Goes To School dan Puspaga Go To Community, serta Kelas Inspirasi.2. UPTD PPA berkolaborasi dengan Perangkat Daerah terkait, jajaran samping, LSM dan psikolog volunteer terkait penanganan kenakalan anak dan remaja serta dilakukan monitoring bagi pekerja / eksploitasi pada anak3. Melakukan sosialisasi dan edukasi melalui program Sosialisasi Dinamika Remaja di sekolah sekolah dasar dan tingkat menengah pertama	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan pemahaman kepada anak dan remaja serta kepada keluarga/orang tua anak dan remaja untuk menghindari perilaku negatif dan memahami konsekuensi negatif yang mungkin terjadi akibat terlibat dalam kenakalan 2. Memberikan perlindungan khusus pada anak yang mengalami eksploitasi dan kekerasan melalui pendampingan oleh UPTD PPA



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
		<p>(SD/SMP) dan sederajat serta pesantren tentang berbagai permasalahan yang terjadi pada usia anak hingga remaja dalam lingkup ranah pendidikan serta upaya-upaya perlindungan dari hal tersebut</p> <p>4. Peningkatan peran dan partisipasi anak melalui Forum Anak Surabaya (FAS) sebagai upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan pemenuhan hak anak kepada anak-anak melalui kegiatan sosialisasi oleh FAS untuk anak-anak di usia sekolah terkait bahaya bulliying dan permasalahan anak lainnya serta membantu program Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan Kota Layak Anak</p> <p>5. Melakukan konseling remaja melalui PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) dan kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) serta Kelas Remaja Surabaya Kreatif, Tangguh Mandiri</p> <p>6. Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) di tingkat RW sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pengawasan orang tua dalam memberikan pengasuhan yang tepat bagi anaknya</p>	
33	Mengoptimalkan produk urban farming supaya bisa menjangkau supermarket di Kota Surabaya.	Di tahun 2024 Bidang Pertanian telah melakukan intervensi berupa pelatihan teknis budidaya ke Kelompok Tani Urban Farming binaan DKPP yang meliputi : a. Pelatihan Budidaya Hidroponik Sayur b. Pelatihan Budidaya Hidroponik Buah c. Pelatihan Tanaman Sayuran dalam Pot dan pembinaan teknis pengembangan usaha dan mutu produk melalui pelatihan d. Pelatihan Teknik Pembuatan Video Profil Kampung Sayur e. Pelatihan untuk Membangun Pemasaran dan	Peningkatan kemampuan kelompok tani untuk budidaya, baik dari segi budidaya, pengemasan, dan pemasaran secara berkelanjutan



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
		Branding Kampung Sayur Sesuai Target Pasar f. Pelatihan Membangun Kampung Eduwisata Kasurboyo Melalui Penguatan Teknis Budidaya Sayur dan Buah. Pemasaran hasil budidaya saat ini telah dilakukan di Pasar Modern Citraland, terutama untuk produk sayuran hidroponik. Pengembangan usaha petani Urban Farming diarahkan tidak hanya budidaya tapi juga diversifikasi usaha non budidaya yaitu eduwisata dan olahan produk	
	Perlu adanya inovasi dan peningkatan kualitas dari budidaya maggot dan perikanan. Banyak program di dinas ini tapi tidak pernah merubah nasib petani perkotaan untuk hidup lebih baik. Sebab, program tersebut memang tidak bisa meningkatkan pendapatan para petani kota.	<ol style="list-style-type: none">1. Inovasi dan peningkatan kualitas dari budidaya maggot telah ditindaklanjuti dengan melakukan pendampingan yang menerapkan teknologi tepat guna ramah lingkungan melalui pemanfaatan limbah rumah tangga dan rumah makan untuk mengurangi biaya operasional dengan meminimalkan pakan komersial pada proses budidaya maggot, pendampingan melibatkan mahasiswa PKL serta magang MSIB di DKPP guna lebih meningkatkan minat serta keterlibatan generasi muda dalam usaha budidaya maggot2. Telah ditindaklanjuti dengan pemberian obat obatan ikan penunjang proses budidaya ikan yaitu Paket Antibiotik untuk Budidaya Ikan sebagai salah satu penunjang dari proses teknologi tepat guna dalam budidaya perikanan serta pemberian pakan ikan guna meminimalisir biaya pengeluaran para pembudidaya/petani perkotaan	<ol style="list-style-type: none">1. Berkurangnya biaya operasional budidaya maggot dan meningkatnya kemandirian serta pendapatan peternak maggot2. Menaikkan taraf ekonomi para pembudidaya dengan inovasi penunjang proses budidaya dan minimalisasi pengeluaran pembudidaya
34	Penyediaan lahan TPS di masing-masing kelurahan.	Penyediaan TPS sangat bergantung dengan ketersediaan Lahan Aset Pemerintah Kota Surabaya yang ada di Masing-masing Kelurahan. Termasuk Persetujuan dari Warga yang berdekatan dan akses jalan yang tersedia. Saat ini telah tersedia 191 Lokasi TPS yang telah	Penyediaan TPS di setiap Kelurahan



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
		terbangun dan beroperasi di Kota Surabaya. Bagi Kelurahan yang belum tersedia akan dilayani di TPS yang berada di Kelurahan terdekat.	
35	<p>Perlu adanya evaluasi terkait penataan SWK atau fasilitas umum lainnya yang lokasinya dekat dengan TPS. Khusus masalah Tempat pembuatan Akhir (TPA) Benowo), dalam pembahasan terungkap bahwa dalam perjanjian antara PT Sumber organik (SO) dengan pemerintah kota banyak kejanggalan. Dalam perjanjian itu Pemkot dalam posisi yang dirugikan. Dimana kalau sampai di Surabaya berkurang dari 1000 ton per hari, maka Pemkot tetap harus bayar 1000 ton. Sedangkan jika sampai di Surabaya lebih dari 1000 maka pemkot harus banyak sesuai kenyataan. Selain itu, hasil jual listrik tidak disepakati masuk kas pemkot. Sehingga penjualan listrik itu malah menguntungkan PT SO. Dan pembayaran Tipping Fee pertahun yang selalu meningkat juga di rasakan sangat merugikan APBD. Untuk tahun 2023 saja pemkot harus menguras 136 Milyar atau 220.000 per ton. Sehingga kami merekomendasikan agar ada evaluasi kerjasama ini yang berakhir pada 2032 ini.</p>	<p>Sampah yang dihasilkan dari Kegiatan SWK atau Fasilitas Umum Lainnya yang saat ini sudah terbangun dapat di tampung di TPS Terdekat. Adapun kewajiban Pemerintah Kota Surabaya untuk mengirimkan sampah 1000 ton/hari ke TPA Benowo, terkait dengan kapasitas dan spesifikasi Fasilitas pengolahan sampah di Gasifikasi Powerplant. Pemerintah Kota membayarkan Biaya Pengolahan Sampah kepada PT. Sumber Organik sesuai dengan Jumlah sampah yang masuk dan diolah di TPA Benowo. Sesuai dengan dengan Kontrak Perjanjian Kerjasama, PT Sumber Organik mempunyai Hak untuk memperoleh dan memanfaatkan hasil pengolahan sampah dalam bentuk apapun. Ini merupakan bagian dari Pengembalian Investasi yang telah dilakukan.</p>	<p>Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penyediaan Sarana dan Prasarana di TPA Benowo dengan PT. Sumber Organik telah sesuai dengan Kontrak.</p>
36	<p>Penyederhanaan administrasi birokrasi dalam pengurusan data kependudukan sehingga selesai di tingkat kelurahan. Validasi data kependudukan khususnya terkait dengan</p>	<ul style="list-style-type: none">- Pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kelurahan telah dilaksanakan, selain itu juga dilaksanakan pelayanan administrasi kependudukan di Balai RW pada jam kerja dan pelayanan malam	<ul style="list-style-type: none">- Optimalisasi Pelayanan prima, cepat, dan berintegritas selesai di tingkat kelurahan.- Pemutakhiran data kependudukan terkait



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
	profesi dan tingkat pendidikan.	di hari Selasa. Sebagai layanan tambahan, Disdukcapil juga memiliki inovasi RT Kalimasada dimana warga dapat mengajukan pelayanan administrasi kependudukan melalui Ketua RT yang telah bekerjasama. - Telah dilaksanakan upaya kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk update data pendidikan terakhir. Terdapat inovasi Kalimasada dimana Ketua RT dan Kader Surabaya Hebat mendorong warga untuk mengajukan update data kependudukan (profesi, tingkat pendidikan, dll). Dengan adanya kemudahan pelayanan adminduk mendorong peningkatan jumlah permohonan pelayanan adminduk yang signifikan.	profesi dan tingkat pendidikan untuk intervensi yang tepat sasaran
37	Pengawasan potensi pendapatan parkir agar tidak terjadi kebocoran. Pemanfaatan jalan harus sesuai dengan kelas jalan, antara pengguna jalan umum dengan truk, trailer dan kendaraan besar lainnya. Untuk meminimalisir kerusakan jalan. Banyak kebocoran untuk parkir tepi jalan, sehingga target yang ditetapkan tidak pernah tercapai. padahal target itu masih di bawah potensi.	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan upaya intensikasi dengan peningkatan pengawasan patroli rutin dan penanganan langsung segera di lapangan terkait kegiatan parkir insidentil;2. Meningkatkan volume kegiatan patroli gabungan bersama jajaran samping TNI/POLRI dan instansi terkait lainnya dalam hal penertiban parkir, penindakan pelanggaran parkir dan jukir liar;3. Menindaklanjuti upaya ekstensifikasi dari pelaku usaha terkait pemanfaatan lahan parkir tepi jalan umum untuk berkontrobusi langsung dalam PAD baik melalui pembayaran parkir insidentil, maupun melalui virtual account rekening BLUD UPT Parkir TJU,4. Melakukan upaya sosialisasi melalui sosial media terkait pemberlakuan pembayaran parkir non tunai baik QRIS maupun voucher parkir;5. Pemetaan titik parkir baru dan peningkatan jumlah potensi titik	<ol style="list-style-type: none">1. Diharapkan mampu menekan tingkat kebocoran Pendapatan Parkir;2. Meningkatkan potensi capaian realisasi PAD Parkir dan terciptanya budaya tertib parkir di Kota Surabaya;3. Mendorong penerapan pembayaran non tunai retribusi parkir.



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
		<p>parkir eksisting melalui survei & pendataan di lapangan;</p> <p>6. Telah dilakukan pembinaan koordinator jukir terkait peningkatan setoran di masing-masing wilayah yang menjadi tanggung jawabnya dan melakukan diskusi dengan pengurus / perwakilan Paguyuban Juru Parkir dalam upaya mendukung peneraparan pembayaran parkir non tunai;</p> <p>7. serta sedang merancang aplikasi sistim manajemen potensi parkir;</p> <p>8. Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Nomor : 188.45/40330/426.7.12/2023 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Nomor : 188.45/5491/436.7.14/2017 tentang Penetapan Kawasan Parkir Zona di Kota Surabaya menetapkan 105 ruas jalan menjadi kawasan parkir zona;</p> <p>9. Menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Nomor : 500.11/436.7.12/2024 Tentang Penetapan Lokasi Parkir Tepi Jalan Umum Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya menjadi 1438 titik parkir zona.</p>	
38	<p>Menambah kecepatan bandwidth pada lokasi pelayanan publik.</p> <p>Koordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait peningkatan fungsi CCTV.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Penambahan kecepatan bandwidth telah teranggarkan di tahun 2025, hal tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi di tahun 2024 dan hasil kajian bersama narasumber.- Terkait peningkatan fungsi CCTV, telah dilakukan pengkajian terkait pemanfaatan fungsi CCTV untuk pengawasan parkir tepi jalan dan lahan parkir objek pajak. Uji coba implementasi sistem tersebut telah dilaksanakan dengan hasil yang signifikan. Pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan dan kemudahan akses pelayanan publik bagi masyarakat.- Peningkatan pemantauan dan pengawasan keamanan Kota Surabaya.



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
		fungsi CCTV tersebut direncanakan untuk proses penganggaran di tahun 2025.	
39	Sistem pencatatan investasi di kota Surabaya harus di upgrade dan jelas datanya. Membuat aplikasi yang memetakan investasi baru di Kota Surabaya, agar potensi peluang kerja terpetakan.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya, untuk pencatatan nilai investasi berasal dari data tarikan aplikasi Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) yang bersifat nasional dan diperkuat dengan koordinasi dengan DPMPTSP Jawa Timur dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya, untuk mendorong investasi mempunyai aplikasi peta potensi investasi yang salah satunya memuat informasi perusahaan eksisting di masing-masing wilayah sebagai bentuk rekomendasi atau rujukan dalam melakukan investasi ditingkat Kecamatan di Kota Surabaya serta ditunjang dengan Klinik Investasi yang merupakan sarana pendampingan investor atau calon investor. Diharapkan dengan Upaya ini investasi akan tumbuh dan berdampak pada peningkatan lapangan kerja.	Pencatatan investasi yang up-to-date dan valid serta pemetaan investasi baru di Kota Surabaya guna meningkatkan investasi yang dapat berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja penduduk Kota Surabaya.
40	Optimalisasi pemanfaatan cagar budaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, agar sarana dan prasarana lebih dioptimalkan untuk kebutuhan atlet-atlet.	Optimalisasi pemanfaatan cagar budaya untuk meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif : 1. Telah dilakukan Penataan Kawasan Kota Lama meliputi Zona Eropa, Zona Pecinan, dan Zona Melayu sesuai dengan rencana penataan dalam dokumen RTBL (Perwali Nomor 83 Tahun 2024, Perwali Nomor 84 Tahun 2024, dan Perwali Nomor 85 Tahun 2024) 2. Telah dilakukan kolaborasi Pentahelix Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pemanfaatan dan pengembangan kawasan cagar budaya seperti penyelenggaraan event dan promosi (Surabaya Heritage Fest, Festival Rujak Uleg, Refleksi Perobekan Bendera di Hotel Majapahit, Parade Juang, Festival Cap Go Meh/Kya Kya	1. Optimalisasi pemanfaatan cagar budaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif 2. Mendorong seluruh sub sektor sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat daerah, dan perubahan lingkungan perekonomian global 3. Menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing global 4. Menyejahterakan rakyat daerah dan meningkatkan pendapatan daerah 5. Peningkatan sarana dan prasarana yang



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
		<p>Culture Show, Kya Kya Moon Cake Festival) Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, agar sarana dan prasarana lebih dioptimalkan untuk kebutuhan atlet-atlet :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Telah dilaksanakan kegiatan pemeliharaan lapangan olahraga di 405 lokasi termasuk lapangan olahraga yang berada di kawasan permukiman2. Telah dilaksanakan pembangunan dan peningkatan lapangan olahraga di 24 lokasi termasuk 3 lapangan olahraga baru yang dibangun di kawasan permukiman	memadai, agar sarana dan prasarana lebih dioptimalkan untuk kebutuhan atlet-atlet.
41	Melakukan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, terkait rumah jurnal untuk karya ilmiah. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan berkaitan dengan penguatan literasi di sekolah-sekolah.	Telah dibuatnya rumah jurnal karya tulis ilmiah para guru pada aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan (SIPUS), maka saat ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses jurnal online Dinas Pendidikan Kota Surabaya melalui link akses : https://sipus.surabaya.go.id sehingga diharapkan mampu menunjang penguatan literasi masyarakat pada umumnya serta memperkaya khasanah pendidikan di Kota Surabaya	Kemudahan akses masyarakat untuk mencari dan melihat jurnal karya tulis ilmiah para guru/tenaga pendidik, untuk mendukung penguatan literasi masyarakat.
42	Perlu adanya koordinasi dengan pihak kepolisian terkait pengawasan dan penertiban untuk daerah perkampungan dan jalan raya yang rawan. Serta perlu evaluasi barang hasil sitaan agar tidak disalahgunakan oleh oknum. Dan mengevaluasi penentuan target, pencapaian realisasi indeks ketentraman, ketertiban dan bencana dengan memperhatikan kondisi di lapangan / masyarakat.	<ol style="list-style-type: none">1. Telah dilaksanakan kegiatan rutin Patroli Asuhan Rembulan setiap malam bekerjasama dengan jajaran Polrestabes Surabaya, Polres Tanjung Perak dan Kogartap III Surabaya2. Telah dilaksanakan inventarisasi serta pengawasan terkait barang hasil dari penertiban dengan didukung adanya berita acara dan hasil bukti pembayaran denda sidang pelanggaran Tipiring3. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan atas realisasi indeks ketentraman dan ketertiban dengan memperhatikan kondisi di lapangan / masyarakat.	Menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kota Surabaya
43	Melakukan pemetaan	1. Bagian Pemerintahan dan	1. Tujuan dari website



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
	kondisi sarana dan prasarana di kelurahan dan kecamatan yang berkaitan dengan pemenuhan layanan pada masyarakat. Pada bagian ini, pemerintah kota juga menganggarkan untuk pembayaran sekolah bagi orang-orang yang tidak mampu. Namun, banyak warga yang masih tidak bisa mendapatkan bantuan, karena syaratnya rumit.	<p>Kesejahteraan Rakyat telah membuat website basis data kewilayahan yang didalamnya mencakup data-data yang ada di Kecamatan dan Kelurahan;</p> <p>2. Beasiswa Pemuda Tangguh telah difokuskan kepada warga miskin di Tahun 2024 sebanyak % untuk Warga miskin dan % untuk Pra Miskin jika dibanding 2023 yang kita akomodir semua warga ber-KTP Surabaya. dengan jumlah penerima Beasiswa sebanyak 21.000 orang</p>	<p>basis data kewilayahan adalah adanya peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan dan Kelurahan;</p> <p>2. Pengentasan Kemiskinan berupa intervensi biaya pendidikan untuk SMA sederajat.</p>
44	Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Surabaya agar melibatkan RT, RW dan LPMK	Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Surabaya, Bagian Hukum dan Kerjasama telah melibatkan RT, RW, dan LPMK dalam rangka memberikan pemahaman agar peraturan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan informasi yang disampaikan dapat tersebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di Kota Surabaya. Selain itu, dalam proses penyusunan Perda dan Perwali juga melibatkan masyarakat yang berpotensi terdampak peraturan yang dimaksud.	Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota
45	Perlu adanya perbaikan dan peningkatan kualitas yang harus di laukan terhadap BUMD. Banyak juga badan usaha milik daerah yang dibawah pengawasan Bagian perekonomian yang tidak bisa setor deviden.	<p>1. Seluruh BUMD yang beroperasi telah menyetorkan dividen di tahun 2024 ada 9 BUMD telah menyetorkan deviden, untuk tahun 2023 hanya 1 (PT Surya Karsa Utama) yang belum menyetorkan deviden karena sudah tidak beroperasi lagi;</p> <p>2. BUMD yang berkinerja sehat sebanyak 7 BUMD, meningkat apabila dibandingkan tahun 2023 sebanyak 6 BUMD</p>	Optimalisasi dan peningkatan kinerja BUMD
46	Menyusun regulasi berkaitan dengan tindak lanjut barang milik daerah ataupun barang sitaan yang dapat menghasilkan PAD atau perlu dimusnahkan.	Pengadaan barang milik daerah termasuk yang menghasilkan PAD dikoordinasikan antara BPKAD dengan BPBJAP, untuk kemudian pengelolaan BMD tersebut dilaksanakan oleh BPKAD. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menghasilkan PAD dilakukan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
		dilaksanakan oleh BPKAD sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Permendagri 19 Tahun 2016, Perda 1 Tahun 2020 dan Perwali 109 Tahun 2021.	
47	Bagian umum perlu mengembangkan aplikasi feedback ke warga berbasis IT dalam hal surat menyurat agar warga mengetahui status surat yang dikirimkan itu sampai proses Dimana.	Sehubungan dengan peningkatan fasilitas pelayanan surat di Bagian Umum Prokopim telah dilaksanakan pengembangan aplikasi SEMPOL (Surat Elektronik Masuk dan Pelacakan secara Online). Melalui aplikasi ini pelayanan surat menjadi lebih Efisien, transparan dan terbuka serta bersifat informatif karena masyarakat dapat melacak posisi surat dan tindak lanjutnya di OPD yang menerima surat.	<ul style="list-style-type: none">- Pengiriman Surat dapat dilakukan secara mandiri, lebih mudah dan efisien karena dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun- Dapat melakukan pelacakan surat untuk mengetahui posisi surat dan tindak lanjutnya di OPD terkait- Dokumen surat/arsip dapat dikelola dengan lebih baik
48	Perlu dirumuskan pula sinergi dengan dinas Pendidikan untuk mencari bibit yang bisa diberikan tugas dalam hal event yang terkait kegiatan pimpinan seperti bidang MC, content creator dan lain lain, bisa dimulai dengan membuat lomba untuk menemukan bibit terkait hal tersebut diatas.	Dalam hal regenerasi personil kegiatan kedinasan pimpinan, Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan akan mendukung secara penuh terhadap pelaksanaan kegiatan pembibitan personil kegiatan kedinasan pimpinan yang diadakan oleh Dinas-dinas teknis terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Agar terjadinya regenerasi personil kegiatan pimpinan sesuai dengan standar keprotokolanan / kedinasan
49	Perlu melakukan evaluasi terkait efektivitas dan efisiensi pada OPD yang beban kerjanya tidak berimbang.	Pembentukan perangkat daerah di lingkungan Kota Surabaya telah sesuai dengan PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terkait perumpunan urusan yang diampu. Terkait dengan evaluasi efektifitas dan efisiensi perangkat daerah, kami sepakat.	
50	Terkait layanan kesehatan agar dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan rutin untuk peningkatan kualitas pelayanan. Dan diharapkan layanan telemedicine dilakukan untuk penyakit umum dan dilaksanakan di semua	<ol style="list-style-type: none">1. Dinas Kesehatan Kota Surabaya telah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk peningkatan kualitas layanan baik di Puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik.2. Puskesmas Kota Surabaya telah melaksanakan layanan <i>telemedicine</i> berupa	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan;2. Kemudahan akses pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
	<p>puskesmas yang ada di Surabaya. Di bagian ini ada sorotan untuk pengelolaan Kader Surabaya Hebat yang setiap tahun nya menyedot anggaran dari uang rakyat sebesar Rp 200 milyar. Sementara di sektor lain sangat membutuhkan namun tidak mendapatkan alokasi anggaran, seperti pembangunan sekolahan SMP.</p>	<p>telekonsultasi antara pasien dengan tenaga medis, dan antara tenaga medis.</p> <p>3. Jumlah Kader Surabaya Hebat (KSH) per bulan Desember sebesar 27.669, efektifitas kinerja KSH telah diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam program-program Pemerintah Kota Surabaya antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Melakukan pendataan terhadap warga Surabaya melalui aplikasi “Sayang Warga”;b. Membantu pelaksanaan kegiatan di Pos Binaan Terpadu (Posbindu);c. Melaksanakan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia;d. Melaksanakan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita atau Pemantauan Balita pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (Pelita Baru);e. Melaksanakan kegiatan Kelurahan Siaga;f. Melakukan pemantauan di masyarakat, antara lain: pemantauan jentik, Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), tracing/ pemantauan kontak jika ada kasus penyakit;g. Membagikan vitamin A kepada Balita, multivitamin pada lansia serta Tablet Tambah Darah untuk remaja putri;h. Melakukan pendataan produk olahan, penyehat tradisional serta pemanfaatan TOGA;i. Melakukan pendampingan kontrol ke rumah sakit dan kunjungan Rumah bagi Pasien Paliatif serta Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Paliatif;j. Turut membantu dalam upaya	<p>3. Optimalisasi Kinerja KSH dalam membantu peningkatan program pembangunan kesehatan di Kota Surabaya</p>



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
		<p>pengecahaan serta penurunan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);</p> <p>k. Sosialisasi kepada Masyarakat terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).</p> <p>Telah diatur dalam Peraturan Walikota no 14 Tahun 2022)</p>	
51	<p>Mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk lebih inovatif menyiapkan strategi cadangan guna pencapaian target pendapatan. Penerapan ekonomi inklusif untuk dijadikan dasar arah pelaksanaan indikator program guna perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.</p>	<p>Telah dikembangkan sistem aplikasi berbasis online guna mencegah kebocoran pajak daerah, serta bekerja sama dengan lintas sektor dalam upaya menggali potensi Pajak Daerah dan mengelola PAD secara optimal antara lain sebagai berikut: - Melakukan sosialisasi terkait persiapan opsen PKB dan BBNKB bekerjasama dengan Bapenda Provinsi Jawa Timur; - Mengikuti program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) bekerjasama dengan universitas seperti Universitas Airlangga dan UPN Jatim, melibatkan mahasiswa dalam tugas lapangan seperti membantu penagihan dan pendataan objek pajak; - Mengadakan diklat pemeriksa pajak serta menambah personil pemeriksa pajak yang berasal dari OPD lain dalam upaya menggali potensi Pajak Daerah.</p>	<p>Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah</p>
52	<p>Menyiapkan alat dengan spesifikasi khusus agar dapat menjangkau pembersihan saluran-saluran di daerah pemukiman padat penduduk.</p>	<p>Pembersihan saluran pada permukiman padat penduduk dapat dilakukan dengan alat berat kecil sedangkan untuk bangunan-bangunan ataupun inritan warga yang menutup saluran, pembersihan dilakukan memakai tenaga manual (satgas)</p>	<p>Percepatan pembersihan saluran-saluran di daerah permukiman padat penduduk</p>
53	<p>Monitoring ketersediaan dan fungsi sanitasi umum untuk masyarakat luas.</p>	<p>1. Telah berkoordinasi secara intens dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup terkait monitoring ketersediaan dan fungsi sanitasi di Kota Surabaya.</p> <p>2. Telah dilakukan pemantauan</p>	<p>1. Terpenuhinya akses sanitasi layak Kota Surabaya (masyarakat Kota Surabaya terfasilitasi IPAL dan atau Tanki Septic individu maupun komunal)</p> <p>2. IPLT, IPAL dan atau</p>



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
		<p>terhadap fungsi sanitasi umum melalui kegiatan penyedotan dan pengolahan air limbah domestik di IPLT yang bisa dimonitoring pada aplikasi Senja dan Replica.</p> <p>2. Telah dilakukan monitoring dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Keputih Surabaya serta seluruh IPAL aset Pemerintah Kota Surabaya (SWK, Rusunawa, Puskesmas, Kantor, Sekolah, dll) yang bisa dimonitoring pada aplikasi SimIPAL.</p>	<p>Tanki Septic individu maupun komunal berfungsi dengan baik dan optimal sehingga mengurangi potensi pencemaran lingkungan</p>
54	<p>Perlunya pengawasan oleh Pemerintah Kota Surabaya terkait pemenuhan SLF termasuk bangunan apartemen.</p> <p>Melakukan evaluasi pengelolaan rumah susun terkait penghuni yang bermasalah.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Telah melaksanakan pengawasan terkait pemenuhan SLF terhadap bangunan dengan fungsi apartemen, hotel, dan lain-lain dan hasilnya telah memiliki SLF sebanyak 427 bangunan dari 896 bangunan yang wajib memiliki SLF.- Telah diterbitkan 2165 buah Surat Keputusan Penerapan Sanksi pada unit yang ditemukan melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Pemakaian Rumah Susun.	<ul style="list-style-type: none">- Pemenuhan SLF sebagai syarat teknis aspek keandalan bangunan untuk mendorong kepatuhan dan kesadaran pemilik bangunan- Penegakan ketertiban dan kepatuhan penghuni rumah susun sesuai peraturan yang berlaku
55	<p>Untuk ditingkatkan pelatihan tanggap darurat pada security atau bidang-bidang lainnya di gedung, hotel, perkantoran, plaza dan gedung Pemerintahan. Perlu adanya SOP untuk pemeliharaan APAR. Mohon dialokasikan anggaran untuk penyediaan APAR di tiap-tiap RW.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Jadwal kegiatan sosialisasi dan simulasi kebakaran untuk masyarakat tahun 2024 telah disusun2. Juknis pemeliharaan APAR sudah disampaikan dan diedukasikan ke masyarakat pada setiap kegiatan sosialisasi dan simulasi masyarakat3. Bahwa sesuai Peraturan Walikota Nomor 28 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan	<p>Peningkatan kompetensi dan sarana bagi warga dalam pencegahan dan penanganan di awal kebakaran</p>



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
		Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, Pasal 7 ayat (4) yang berbunyi "Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, berupa sarana penanggulangan kebakaran termasuk dengan pengisian ulang" menjadi kewenangan Kelurahan	
56	Sosialisasi terhadap para siswa di sekolah sekolah terkait bahaya kenakalan remaja perlu dimasikkan khususnya di wilayah atau daerah yang sering berpotensi terjadinya tawuran atau kenakalan remaja, mengingat tahun 2023 di Surabaya masih ada beberapa kejadian tersebut yang terjadi dan itu sangat meresahkan Masyarakat.	<ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk kegiatan outbound Sekolah Kebangsaan dengan peserta setingkat SMA/Mahasiswa yang berasal dari Penjangkauan Satpol PP dan binaan PD lain seperti Disbudporapar, DP3APPKB, Bapemkesra, dan Dinas Sosial. Berdasarkan kegiatan sosialisasi sepanjang tahun 2024, terdapat 85 peserta yang telah menjalani kegiatan outbound Sekolah Kebangsaan.2. Sosialisasi pencegahan Kenakalan Remaja juga dilaksanakan bersinergi dengan DP3APPKB, Satpol PP, dan Dinas Pendidikan.	Memberikan pemahaman terkait bahaya kenakalan remaja, serta membantu mengurangi potensi kejadian yang diakibatkan oleh kenakalan remaja.
57	Di mohon untuk diperhatikan terkait kelengkapan sarana dan prasarana serta perawatan gedung.	Kelengkapan sarana dan prasarana serta perawatan gedung sudah diperhatikan dan sepanjang tahun 2024 sampai saat ini sudah banyak perbaikan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD berkoordinasi dengan DPRKPP untuk mengakomodir kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD.	Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan pimpinan dan anggota DPRD.
58	Perlu ada revitalisasi dan pemenuhan sarana prasarana pasar tradisional. Selain itu perlu adanya pembenahan Manajemen PD Pasar Surya agar nilai hasil audit wajar tanpa pengecualian. Yang tidak kalah pentingnya kebersihan pasar sangat perlu diperhatikan untuk kenyamanan pengunjung.	<ol style="list-style-type: none">1. Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan perbaikan dan rehabilitasi pasar sebanyak 2 Pasar di tahun 2024. yaitu Pasar Kembang dan Pasar Dupak Rukun Pemerintah Kota Surabaya juga berkolaborasi dengan Bank Jatim untuk melakukan revitalisasi Pasar Kembang. Saat ini PD Pasar Surya sedang melakukan proses revitalisasi untuk 3 pasar, meliputi Pasar Kembang, Pasar	Revitalisasi dan pembenahan sarana prasarana pasar tradisional serta pembenahan manajemen PD Pasar Surya



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
		<p data-bbox="683 237 1086 338">Keputran Selatan, Pasar Dupak Rukun yang akan selesai di tahun 2025.</p> <p data-bbox="647 349 1114 891">2. Dalam rangka peingkatan kinerja, PD Pasar Surya melakukan pembenahan sistem keuangan melalui digitalisasi dan penyempurnaan Chart of Account, juga berkolaborasi dengan lembaga perbankan dalam digitalisasi pembayaran rekening.. Saat ini pasar yang sudah menerapkan proses digitalisasi sebanyak 6 pasar yaitu Pasar Pucang Anom, Pasar Dupak Rukun, Pasar Kapasan, Pasar Pabean, Pasar Tambahrejo, dan Pasar Rungkut.</p> <p data-bbox="647 902 1094 1149">3. PD Pasar Surya telah menggunakan Sistem Informasi Pasar Surya (SIPS) untuk mempermudah mekanisme kontrol terhadap pemberkasan perpasaran, penagihan, kontrol bahan pokok.</p>	

3.4 Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dilakukan melalui kerjasama baik kerjasama antar pemerintah daerah maupun kerjasama dengan pihak luar negeri. Kerjasama yang dilakukan merupakan upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah serta lembaga lain di dalam maupun luar negeri menjadi sesuatu kebutuhan, oleh karena itu diperlukan berbagai upaya agar kerjasama yang telah dilakukan dapat terus berkembang, baik jumlah mitra kerjasama maupun kualitas program dan kegiatan kerjasama dalam mendukung terwujudnya Kota Surabaya sebagai Kota Dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan kerjasama daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya baik dengan lembaga/instansi di dalam negeri maupun luar negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 3.34 Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024

No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
----	---------------	----------------



No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
1	Pemerintah Kabupaten Buru Selatan	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Peningkatan Perekonomian dan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil
2	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Tanjung Perak	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Tanjung Perak Dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Pada Puskesmas di Kota Surabaya
3	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Karimunjawa	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Karimunjawa Dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Pada Puskesmas di Kota Surabaya
4	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Juanda	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Juanda Dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Pada Puskesmas di Kota Surabaya
5	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Darmo	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Darmo Dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Peserta Bpjs Ketenagakerjaan Pada Puskesmas di Kota Surabaya
6	PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Utara	Perjanjian Kerja Sama Antara PT PLN (Persero) Dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik Pemerintah Kota Surabaya
7	PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Selatan	Perjanjian Kerja Sama Antara PT PLN (Persero) Dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik Pemerintah Kota Surabaya
8	PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Barat	Perjanjian Kerja Sama Antara PT PLN (Persero) Dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik Pemerintah Kota Surabaya



No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
9	Pemerintah Kabupaten Malang	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Malang Tentang Peningkatan Perekonomian
10	Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Petra	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Petra Tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Bagi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Petra
11	PT Bank Central Asia Tbk	Perjanjian Kerjasama Tentang Penyelenggaraan Program Promosi Bersama
12	Pemerintah Kabupaten Ngawi	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Ngawi Tentang Peningkatan Perekonomian dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil
13	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Perjanjian Kerahasiaan (Non Disclosure Agreement) Antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi
14	Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga (UNAIR)	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata Kota Surabaya
15	Henry Gunawan	Adendum Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Semolowaru Pengganti Nomor : 415.4/17093/436.7.10/2022 dan Nomor : 002/Viii/Spbu5460147/2022 Tanggal 26 Agustus 2022 Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Henry Gunawan
16	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo	Perjanjian Kerjasama Antara Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Bagi Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Pucang Sewu Surabaya
17	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo	Perjanjian Kerjasama Antara Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Bagi Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Mojo Surabaya



No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
18	Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Darma Cendika	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Darma Cendika Tentang Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Kecamatan Bubutan Kota Surabaya
19	Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Darma Cendika	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Darma Cendika Tentang Peningkatan Perekonomian Di Wilayah Kecamatan Simokerto Kota Surabaya
20	Pemerintah Kabupaten Blitar	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Blitar Tentang Peningkatan Perekonomian dan Pengembangan Usaha Mikro
21	PT Goto Gojek Tokopedia Tbk	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pt Goto Gojek Tokopedia Tbk Tentang Pengungkapan Data Sehubungan Dengan Potensi Kerja Sama Terkait Dengan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-Tk) Untuk Mitra Gojek di Kota Surabaya
22	Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Sekretariat Daerah Kota Surabaya Tentang Magang Bersertifikat Angkatan Vi
23	Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Surabaya	Adendum Perjanjian Kerjasama Nomor : 004/Un38.10/Ks/2023 dan Nomor: 100.3.7.1/13343/436.7.2/2023 Tanggal 26 Mei 2023 Antara Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Surabaya Dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Implementasi Wahana Pembelajaran dan Pembimbing Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Surabaya
24	Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur	Perjanjian Kerja Sama Antara Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Pendampingan dan Jejaring Rujukan Layanan Medis, Rehabilitasi Dan/Atau Reintegrasi Psikologi dan Kesehatan Jiwa Di Wilayah Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya



No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
25	Pemerintah Kabupaten Sumenep	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Sumenep dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Replikasi Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Publik
26	PT Grab Teknologi Indonesia	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Grab Teknologi Indonesia Tentang Pengungkapan Data Sehubungan Dengan Potensi Kerja Sama Terkait Dengan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-Tk) Untuk Mitra Pengemudi Transportasi Online di Kota Surabaya
27	Pemerintah Kabupaten Balangan	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Balangan dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Replikasi Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Publik
28	Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tentang Peningkatan Pelayanan Bidang Psikologi dan Kesehatan di Kota Surabaya
29	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya	Adendum Perjanjian Kerjasama Nomor: 100.3.7.1/12765/436.1.2/2023 dan Nomor: Hk.03.01/3/6044.1/2023 Tanggal 13 Juni 2023 Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya Tentang Penyelenggaraan Kelurahan/Wilayah Binaan Berkelanjutan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya
30	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Inovasi Daerah
31	Pemerintah Kabupaten Magetan	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Magetan dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Replikasi Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Publik
32	Pemerintah Kabupaten Magetan	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Magetan dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Replikasi dan Pemanfaatan Aplikasi E-Planning (SAKIP)
33	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Perjanjian Kerjasama Antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Dengan Pemerintah Kota Surabaya dan Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tentang Penerapan Tarif Layanan Transportasi Umum dan Layanan Parkir Elektronik Pada Hari Jadi Kota Surabaya Ke-731 DI Kota Surabaya



No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
34	Pemerintah Kabupaten Tana Tidung	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Replikasi Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Publik
35	Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tentang Seleksi Mandiri Kemitraan Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan
36	Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Surabaya	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Surabaya Tentang Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum di Balai Rukun Warga (RW)
37	Yayasan Wahana Visi Indonesia	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Yayasan Wahana Visi Indonesia Tentang Dukungan Pelestarian Mangrove di Kota Surabaya
38	Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Tentang Dukungan Pelestarian Lingkungan di Kota Surabaya
39	Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Fakultas Kewirausahaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan Fakultas Kewirausahaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Tentang Peningkatan Perekonomian Melalui Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro di Kota Surabaya
40	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tentang Replikasi dan Pengembangan Inovasi Daerah
41	Pemerintah Kabupaten Magetan	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Magetan dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Replikasi, Pemanfaatan, dan Pengembangan Inovasi Daerah
42	Pemerintah Kabupaten Lumajang	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Replikasi Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Publik
43	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur	Perjanjian Kerja Sama Antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Dengan Pemerintah Kota Surabaya dan Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tentang Penerapan Tarif Retribusi Layanan Transportasi Umum, Layanan Parkir Elektronik dan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga Pada Program Qris Experience Di Kota Surabaya



No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
44	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya	Adendum Kedua Perjanjian Kerja Sama Nomor : 100.3.7.1/12765/436.1.2/2023 dan Nomor : Hk.03.01/3/6044.1/2023 Tanggal 13 Juni 2023 Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya Tentang Penyelenggaraan Kelurahan/Wilayah Binaan Berkelanjutan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya
45	Pemerintah Kabupaten Malang	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Malang Tentang Replikasi dan Pengembangan Inovasi Daerah
46	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur	Perjanjian Kerja Sama Antara Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur Dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Bagi Masyarakat
47	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Program Merdeka Belajar Kampus Mengajar - Program Kompetisi Kampus Merdeka (MBKM-PKKM)
48	Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara
49	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Tentang Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka DI Kota Surabaya
50	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya Tentang Program Revitalisasi Pasar Kembang Surabaya Dengan Branding Bank Jatim
51	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya Tentang Layanan Jasa Keuangan Dalam Rangka Pembayaran Tarif Retribusi Rumah Tangga Dengan Fasilitas Virtual Account



No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
52	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Hang Tuah Surabaya	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Hang Tuah Surabaya Tentang Pendidikan dan Penerimaan Kerja Bagi Lulusan Penerima Beasiswa Pemerintah Kota Surabaya
53	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Pemerintah Kota Surabaya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Tentang Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka DI Kota Surabaya
54	Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Replikasi Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Publik
55	Pemerintah Kabupaten Lamandau	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Replikasi Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Publik
56	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie	Perjanjian Kerja Sama Antara Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Bagi Masyarakat
57	Pemerintah Kabupaten Ngawi	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Ngawi Tentang Replikasi dan Pengembangan Inovasi Daerah
58	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Penunjukan Layanan Rujukan Pemeriksaan Viral Load Hiv
59	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Pelaksanaan Proyek Indonesia Hiv Response : Eliminating The Aids Epidemic In Indonesia By 2030
60	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Replikasi Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Publik
61	CV Lentera Media	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Cv Lentera Media Tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik Berupa Taman/Jalur Hijau di Jalan Mayjend Yonosowoyo Surabaya



No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
62	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Utama Surabaya	Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Pelaksanaan Program Pesiar di Kota Surabaya
63	Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Airlangga Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Airlangga dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kota Surabaya
64	Pemerintah Kota Batu	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Batu dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Replikasi dan Pengembangan Inovasi Daerah
65	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Sinergi Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak
66	Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tentang Magang Bersertifikat Angkatan Vi
67	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Utama Surabaya	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Surabaya Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Peserta Pekerja Bujran Penerima Upah dan Bukan Pekerja Kota Surabaya Dalam Rangka Universal Health Coverage
68	Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Adendum Perjanjian Kerjasama Nomor : 415.42/16420/436.2.3/2021 Nomor : Pk.10/Moa/Fk/Uwks/Xm/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kota Surabaya Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya
69	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya Tentang Layanan Jasa Perbankan Dalam Pengelolaan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Kota Surabaya



No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
70	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	Perjanjian Kerja Sama Antara Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Dukungan Pelaksanaan Bintang Radio Tingkat Nasional Lpp Rri Tahun 2024 di Kota Surabaya
71	Pemerintah Kota Mojokerto	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Mojokerto dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Replikasi Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Publik
72	PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Utara	Kesepakatan Bersama Antara PT PLN (Persero) Dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
73	PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Selatan	Kesepakatan Bersama Antara PT PLN (Persero) Dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
74	PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Barat	Kesepakatan Bersama Antara PT PLN (Persero) Dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
75	Pemerintah Kota Metro	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Metro dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan
76	Pemerintah Kabupaten Ngawi	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Ngawi Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
77	Rumah Sakit Umum Bhakti Rahayu Surabaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Umum Bhakti Rahayu Surabaya Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
78	Universitas Katolik Darma Cendika	Addendum Kesepakatan Bersama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kota Surabaya Nomor : 415.42/16195/436.1.2/2022 dan Nomor: 741/Ukdc.0/D.01/Ix/2022 Tanggal 13 September 2022 Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Universitas Katolik Darma Cendika
79	Pemerintah Kabupaten Magetan	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Magetan dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah
80	Pemerintah Kabupaten Sumenep	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Sumenep dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah



No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
81	Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Surabaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Surabaya Tentang Sinergi Program Pembangunan DI Kota Surabaya
82	Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya	Addendum Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Nomor : 415.42/5635/436.2.3/2021 dan Nomor : 0879/K/Um/V/2021 Tanggal 31 Mei 2021 Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya
83	Rumah Sakit Wijaya Surabaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Wijaya Surabaya Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
84	Rumah Sakit Ibu dan Anak Graha Medika	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Graha Medika Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
85	CV Wahyu Golden Indonesia (Toko Mas Wahyu Redjo)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Cv Wahyu Golden Indonesia (Toko Mas Wahyu Redjo) Tentang Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
86	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya	Adendum Nota Kesepakatan Bersama Nomor : 415.42/10025/436.2.3/2021 dan Nomor : Hk.03.01/3/9612/2021 Tanggal 1 September 2021 Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia DI Kota Surabaya
87	Rumah Sakit Ibu dan Anak Pusura Tegalsari	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Pusura Tegalsari Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
88	Pemerintah Kabupaten Balangan	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Balangan dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah
89	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Kerja Sama Sinergi Pembangunan Antar Daerah dan Peningkatan Potensi Daerah



No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
90	Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya Tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kota Surabaya
91	PT Duta Selamat Indonesia	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pt. Duta Selamat Indonesia Tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Penanggulangan Kebencanaan di Kota Surabaya
92	Pemerintah Kabupaten Tana Tidung	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah
93	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Surabaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Pt Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Surabaya Tentang Sinergi Program Pembangunan DI Kota Surabaya
94	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tentang Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
95	Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya	Adendum Atas Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Nomor: 415.42/1299/436.1.2/2022 dan Nomor: 0254/Wm01/T/2022 Tanggal 24 Januari 2022 Tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya
96	Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah
97	Rumah Sakit Randegansari Husada	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Randegansari Husada Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
98	PT Airlangatama Nusantarasakti	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Pt Airlangatama Nusantarasakti Tentang Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (Jpo) DI Jalan Dupak Surabaya
99	Pemerintah Kabupaten Lumajang	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah



No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
100	Rumah Sakit Ibu dan Anak Ferina	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Ferina Tentang Pelayanan Rujukan dan Promosi Kesehatan Serta Program Pembangunan di Kota Surabaya
101	Universitas Wijaya Putra Surabaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Universitas Wijaya Putra Tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kota Surabaya
102	Rumah Sakit Islam Cahaya Giri Gresik	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Islam Cahaya Giri Gresik Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
103	PT Nusantara Global Inovasi	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Pt Nusantara Global Inovasi Tentang Uji Coba Konsep Sistem Pembayaran Nontunai Untuk Transportasi Umum di Kota Surabaya
104	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Hang Tuah Surabaya	Adendum Atas Kesepakatan Bersama Nomor: 415.42/14667/436.2.3/2021 dan Nomor: Nkb/1/Xii/2021/Sht Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Hang Tuah Surabaya Tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya
105	Akademi Farmasi Surabaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Akademi Farmasi Surabaya Tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya
106	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya Tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
107	Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah
108	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan William Booth	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan William Booth Surabaya Tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kota Surabaya
109	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (Pens) Tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kota Surabaya



No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
110	Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kota Surabaya
111	Universitas Kristen Petra	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Universitas Kristen Petra Tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya
112	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur Tentang Penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Lingkungan Kerja Pemerintah Kota Surabaya
113	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah
114	CV Lentera Media	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan CV Lentera Media Tentang Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
115	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Regional Jawa Timur	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Pt Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Tentang Sinergi Program Pembangunan DI Kota Surabaya
116	Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
117	Pemerintah Kota Batu	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Batu dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah
118	Rumah Sakit Mitra Keluarga Pondok Tjandra	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Pondok Tjandra Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
119	Akademi Kuliner dan Patiseri Ottimmo International	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Akademi Kuliner dan Patiseri Ottimmo International Tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kota Surabaya



No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
120	Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendangsari Merr	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendangsari Merr Tentang Pelayanan Rujukan dan Promosi Kesehatan Serta Program Pembangunan di Kota Surabaya
121	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	Kesepakatan Bersama Antara Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Dukungan Pelaksanaan Bintang Radio Tingkat Nasional Lpp Rri Tahun 2024 Di Kota Surabaya
122	Pemerintah Kota Mojokerto	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Mojokerto dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah
123	Badan Pusat Statistik Kota Surabaya (BPS)	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Badan Pusat Statistik Kota Surabaya Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Intervensi Pemerintah Kota Surabaya
124	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Nota Kesepakatan Antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi
125	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Nota Kesepakatan Antara Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Pertukaran Data dan Informasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kota Surabaya
126	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia	Nota Kesepakatan Antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Wilayah Kota Surabaya
127	Lembaga Administrasi Negara	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Lembaga Administrasi Negara Tentang Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Melalui Penyelenggaraan Kegiatan Analisis Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, Serta Pendidikan Tinggi Terapan
128	Direktorat Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan	Nota Kesepakatan Antara Direktorat Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Pelaksanaan Keberlanjutan Layanan Angkutan Perkotaan di Kota Surabaya



No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
129	Direktorat Jenderal Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Nota Kesepakatan Bersama Antara Direktorat Jenderal Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Dengan Pemerintah Kota Surabaya Pemanfaatan Peta Dasar Pertanahan Skala Besar Untuk Penyusunan Rencana Tata Ruang Serta Integrasi Data Pertanahan, Data Tata Ruang, dan Data Perpajakan Daerah Serta Informasi Tematik Lainnya di Kota Surabaya
130	Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nota Kesepakatan Antara Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (Spkua)
131	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Nota Kesepakatan Antara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah di Kota Surabaya
132	Ombudsman Republik Indonesia	Nota Kesepakatan Antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

Sumber: Bagian Hukum dan Kerjasama, Tahun 2025

3.5 Penghargaan Diraih Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024

Beberapa penghargaan yang berhasil diraih oleh Pemerintah Kota Surabaya sepanjang tahun 2024 menjadi bukti komitmen dan dedikasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang unggul serta pelayanan terbaik bagi masyarakat. Prestasi ini mencerminkan kerja keras, inovasi, dan kolaborasi berbagai pihak dalam membangun kota yang lebih maju dan berdaya saing. Berikut adalah penghargaan yang telah diraih di sepanjang tahun 2024.

Tabel 3.35 Penghargaan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024

No	Waktu	Judul Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	2024	Bronze Winner - Government Techno Marketing Awards 2024 Jawa Timur	MarkPlus Institute
2	2024	Juara 2 - Lomba Penataan Logistik	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
3	2024	Gold Winner - Government Techno	MarkPlus Institute



No	Waktu	Judul Penghargaan	Pemberi Penghargaan
		Marketing Awards 2024 Jawa Timur	
4	2024	Capaian Opini WTP ke 12 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 - Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan LHP	BPK JATIM
5	2024	Capaian Opini WTP ke 12 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 - Penyerahan Penghargaan	BPK JATIM
6	2024	Sangat Baik - Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara	Komisi Aparatur Sipil Negara
7	2024	Peran Serta Aktif - Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika P4Gn Di Provinsi Jawa Timur	BNN Provinsi Jawa Timur
8	2024	Partisipasi Aktif - Gerakan Nasional 10 Juta Bendera Merah Putih Tahun 2024 Dalam Rangka Menyemarakkan Hari Ulan Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri)
9	2024	Apresiasi - Daerah Yang Memberikan Dukungan Penyaluran Pembiayaan 100% (Seratus Persen) Yang Bersumber Dari APBD Untuk KPUD, Bawaslu, TNI dan Polri. Dalam Rangka Menyukseskan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
10	2024	Pemerintah Daerah Transformatif - Anugerah Merdeka Belajar Pemerintah Daerah kategori Pengelolaan Program Indonesia Pintar	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
11	2024	Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Konsisten Melakukan Validasi Data Satu Sehat SDMK	Kementerian Kesehatan
12	2024	Pemerintah Daerah dengan Kategori Utama - Universal Health Coverage Awards	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
13	2024	Juara 1 - Lomba Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman tingkat SD	Badan Pengawas Obat dan Makanan
14	2024	Government Techno Marketing Awards 2024 Jawa Timur	MarkPlus Institute
15	2024	Insentif Stunting - Percepatan Penurunan Stunting	Wakil Presiden RI
16	2024	Partisipasi pada diskusi anak dan remaja - Perwakilan Anak dengan Disabilitas Dinas Sosial	Perwakilan UNICEF Indonesia untuk Wilayah Jawa dan ITS



No	Waktu	Judul Penghargaan	Pemberi Penghargaan
17	2024	Terbaik I - Penghargaan K3 Nasional	Gubernur Jawa Timur
18	2024	Terbaik I - Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
19	2024	Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi Perkotaan - Wahana Tata Nugraha	Kementerian Perhubungan
20	2024	Darmabakti dalam memajukan perkoperasian dan usaha kecil dan menengah - Penerima Tanda Penghargaan atau Tanda Jasa Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia
21	2024	Juara 2 - Penghargaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Regional Barat	Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) RI
22	2024	Juara 1 - Penghargaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tingkat Provinsi Jawa Timur	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM)
23	2024	Register Nasional Memori Kolektif Bangsa berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 202 - Arsip Pembangunan Tugu Pahlawan (1951-1997)	Arsip Nasional Republik Indonesia
24	2024	Apresiasi dan Penghargaan - Karya Bhakti Satuan Polisi Pamong Praja	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
25	2024	Peringkat 1 - Pemerintah Kabupaten/Kota dengan transaksi terbanyak dengan Pemanfaatan Pengadaan Barang/Jasa Melalui e-Katalog	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
26	2024	Program Literasi Keuangan Terbaik Pemerintah Kota - Financial Literacy Awards	Otoritas Jasa Keuangan
27	2024	Best Social & Community Infrastructure	CNN
28	2024	Best Educational Development	CNN
29	2024	Penghargaan Keberhasilan Menekan Stunting	Kompas
30	20 September 2024	Penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka (NJDP) Gemilang Perpustakaan Tahun 2024	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
31	30 September 2024	Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Anugerah Layanan Investasi	Kementerian Investasi/BKPM
32	2024	Adiwiyata Mandiri	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)



No	Waktu	Judul Penghargaan	Pemberi Penghargaan
33	2024	Adiwiyata Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
34	2024	Puspaga kota surabaya meraih peringkat paripurna sebagai puspaga ramah anak nasional tahun 2024 dengan nilai tertinggi 333	Kementerian PPPA
35	2024	Penghargaan Hasil Evaluasi SAKIP dengan predikat AA	KemenpanRB
36	2024	Terbaik 1 Kategori Pemerintah Kota dalam SDGs Action Award untuk kategori kota pada SDGs Annual Conference (SAC) 2024	Bappenas RI
37	2024	CI-EL Medal of Distinction 2024 kepada Walikota Surabaya	Mark Plus Institute
38	2024	Pemkot Surabaya mendapat penghargaan penyelenggara inovasi pelayanan publik terbaik kelompok kota	KemenpanRB
39	2 September 2024	Penghargaan Kategori Dukungan Pemerintah Daerah dalam Konversi Sepeda Motor Listrik Operasional	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
40	11 Oktober 2024	Penghargaan Gajah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Terbaik di Jawa Timur	Kampus UGM
41	10 Oktober 2024	Anugerah Media Humas (AMH) 2024 Terbaik ke-3 Kategori Siaran Pers (Media Online) di Indonesia	Kemenkominfo
42	12 Oktober 2024	Juara Umum Syariah Award 2024	Provinsi Jawa Timur
43	2024	Percepatan Penurunan Stunting	Wakil Presiden RI
44	2024	Terbaik III Kategori Siaran Pers (Media Online) Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota - Anugerah Media Humas 2024	Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat
45	22 Agustus 2024	Bronze Winner - Government Techno Marketing Awards 2024 Jawa Timur	Indonesia Marketing Festival 2024
46	23 Oktober 2024	Terbaik I Kategori Media Sosial - Jatim Public Relation Awards 2024	Kominfo Jatim



No	Waktu	Judul Penghargaan	Pemberi Penghargaan
47	23 Oktober 2024	Terbaik I Kategori Rilis Pers - Jatim Public Relation Awards 2024	Kominfo Jatim
48	23 Oktober 2024	Terbaik I Kategori Video Kreatif - Jatim Public Relation Awards 2024	Kominfo Jatim
49	23 Oktober 2024	Terbaik I Kategori Website - Jatim Public Relation Awards 2024	Kominfo Jatim
50	11 Oktober 2024	Seminar Nasional dan Perilisan - Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI)	UGM
51	12 Desember 2024	Pelayanan Publik terbaik - Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
52	11 Desember 2024	Terbaik Regional 1 - Kepala Desa/Lurah Cinta Bina Keluarga Balita (BKB)	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2025



BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugaspembantuankan

4.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Atasnya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Tugas Pembantuan Pusat adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan Tugas Pembantuan Provinsi adalah penugasan dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/ kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan setelah adanya penugasan pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) atas beban APBN. Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2024 tidak mendapatkan anggaran Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi.

4.1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan di Bawahnya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, bahwa wilayah Kota Surabaya terbagi menjadi 31 Kecamatan dan 153 Kelurahan dan tidak memiliki Desa, sehingga Pemerintah Kota Surabaya tidak melaksanakan tugas pembantuan kepada tingkat Pemerintahan di bawahnya.

4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2024 tidak mendapatkan anggaran Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi serta tidak melaksanakan tugas pembantuan kepada tingkat Pemerintahan di bawahnya.



BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya Tahun 2024 merupakan laporan tentang hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Surabaya selama satu tahun anggaran. LKPJ Wali Kota Surabaya Tahun 2024 memuat informasi rangkaian pelaksanaan pembangunan, baik berupa capaian makro maupun mikro yang diukur berdasarkan capaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Surabaya serta rencana program dan kegiatan dengan mengacu pada Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. LKPJ Wali Kota Surabaya Tahun 2024 ini disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tahun 2024 merupakan periode tahun ke-3 pelaksanaan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Sekitar 3,5 tahun kita telah bekerja bersama membangun Surabaya. Di tengah terpaan badai pandemi Covid-19 selama dua tahun, Surabaya terus berupaya bangkit. Sepanjang Tahun Anggaran 2024 perencanaan pembangunan Kota Surabaya dapat dilaksanakan optimal sehingga mampu meningkatkan kualitas pembangunan kota. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan capaian nilai Indikator Kinerja Utama antara lain Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,76%; Indeks Gini sebesar 0,381; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,91% di mana merupakan yang terendah dalam periode 2001–2024; Persentase Penduduk Miskin sebesar 3,96%; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,69 dengan kategori “**sangat tinggi**”; Indeks Harmoni Sosial sebesar 99,83; Indeks Infrastruktur sebesar 0,810; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS) sebesar 69,53; Indeks Reformasi Birokrasi terus membaik, dengan capaian SAKIP sebagai Kota pertama dengan predikat AA dan Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota sebesar 0,94. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan ini dapat diraih tidak terlepas dari daya upaya dan kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya, DPRD, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan berlandaskan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing.



Pencapaian pembangunan tersebut, menunjukkan ketekunan upaya dan kolaborasi antar pihak membawa pada keberhasilan meningkatkan keberhasilan dan kesejahteraan penduduk Kota Surabaya. Namun demikian, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kota Surabaya agar pembangunan dapat berkelanjutan, adil, dan inklusif. Tantangan di masa depan, menuntut adanya pemerintahan yang diselenggarakan secara adaptif, kolaboratif dan inovatif. Guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang, maka catatan-catatan strategis, saran dan masukan dari DPRD Kota Surabaya merupakan rekomendasi penting bagi penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Surabaya di masa mendatang. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Surabaya pada masa yang akan datang dan membawa Kota Surabaya sebagai Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan.

Semoga niat dan langkah baik kita selalu mendapat ridho dari Allah SWT.

Surabaya,

Wali Kota Surabaya

Dr. Eri Cahyadi, S.T., M.T.

